

MUSEUM PERJUANGAN

Wahana Pengenalan Sejarah Bagi Generasi Muda



Direktorat
Pencapaian

**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA
MUSEUM BENTENG VREDEBERG YOGYAKARTA
Jl. Kolonel Sugiono 24 Yogyakarta**

069.2

SUH
m



**MUSEUM PERJUANGAN
(MUSEUM BENTENG VREDEBURG UNIT II)**

069

Sub

m



**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA
Jl. Kolonel Soegiyono No. 24 Yogyakarta 55143
☎(0274) 387576**

TIM PENYUSUN NASKAH

Penanggungjawab
Drs. SUHARJA

Redaktur
Dra. SRI SUNARNI

Redaktur Pelaksana
NASIB DWI RIYANTA, S.Pd
Dra. SOELISTYOWATI

Penyunting
V. AGUS S ULISTYA, S.Pd

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa kami panjatkan, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku Museum Perjuangan berhasil disusun dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Museum Perjuangan adalah museum khusus sejarah perjuangan yang mengemban misi pelestarian nilai-nilai luhur kejuangan. Melalui tata pameran yang ada, Museum Perjuangan berusaha mengajak pengunjung untuk berkomunikasi dengan masa lampau melalui koleksi yang dipamerkan. Interaksi yang terjadi diharapkan dapat memberikan kesan sehingga masa lampau itu mempunyai arti.

Pada tanggal 27 Mei 2006, Museum Perjuangan rusak akibat gempa bumi dan terpaksa ditutup untuk umum selama kurang lebih satu setengah tahun. Setelah diadakan perbaikan, museum dibuka kembali dengan materi yang telah mengalami perubahan.

Maksud penyusunan Buku Museum Perjuangan : Wahana Pengenalan Sejarah Bagi Generasi Muda ini adalah untuk membantu pengunjung museum dalam memahami sajian koleksi Museum Perjuangan. In formasi yang disajikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda sehingga mereka dapat memanfaatkan museum secara proporsional sebagai sumber informasi. Tersusunnya buku ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang berperan dalam pengumpulan informasi seputar materi pameran. Oleh karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih.

Meskipun telah optimal berusaha dalam memberikan informasi mengenai materi pameran, kami yakin bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami mohon maaf, dan besar harapan kami adanya masukan dalam bentuk apapun demi kesempurnaan buku ini.

Meski demikian, kami tetap berharap semoga buku Museum Perjuangan ini mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya pelajar dalam pengembangan pengetahuan sejarah. Terima kasih.

Yogyakarta, Juli 2008
Tim Penyusun

**SAMBUTAN
KEPALA MUSEUM BENTENG VREDEBURG
YOGYAKARTA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobil'amin. Kami menyambut baik terbitnya buku Museum Perjuangan ini. Museum Perjuangan adalah sebuah museum khusus sejarah perjuangan yang bertugas mengumpulkan, merawat, menyimpan, meneliti dan menyajikan benda-benda bukti material peristiwa sejarah. Dari tugas tersebut, museum eksis sebagai lembaga ilmiah dengan fungsinya sebagai sumber informasi, rekreasi, edukasi dan inspirasi.

Dalam melayani masyarakat, khususnya pelajar, Museum Perjuangan selalu berusaha menempatkan fungsinya sebagai sumber informasi. Terbitnya buku Museum Perjuangan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi museum sebagai sumber informasi dan bagi masyarakat dalam menambah pengetahuan dibidang sejarah.

Banyaknya manfaat dari program penerbitan buku seperti ini, mengharuskan kami selalu berharap agar program ini dapat berkesinambungan sehingga pelestarian nilai-nilai luhur kejuangan dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dari sini pulalah kiranya penanaman rasa cinta sejarah dapat dipupuk sejak dini.

Terbitnya buku ini bukan berarti memindahkan pameran Museum Perjuangan kedalam catatan, namun lebih tepat buku ini sebagai "penunjuk jalan" pengunjung museum dalam menikmati pameran. Pengunjung yang ingin mengetahui lebih jauh tentang koleksi-koleksi yang disajikan, dapat ditempuh dengan membaca referensi yang terkait. Meski demikian, kami tetap berharap bahwa buku ini dapat memberikan nilai tambah dalam pengembangan ilmu pengetahuan sejarah. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Yogyakarta, Juli 2008

Kepala

Sri Ediningsih
Dra. Sri Ediningsih, M.Hum

NIP. 130937922

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN KEPALA MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SEJARAH MUSEUM PERJUANGAN	3
BAB III TATA PAMERAN MUSEUM PERJUANGAN ...	15
A. Tata Pameran Di Luar Ruang	15
B. Tata Pameran Di Dalam Ruang	91
BAB IV PENUTUP	155
DAFTAR PUSTAKA	157
LAMPIRAN	161

BAB I

PENDAHULUAN

Museum Perjuangan merupakan unit II dari Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Hal itu terjadi sejak tanggal 5 September 1997 ketika diadakan serah terima pengelolaan Museum Perjuangan dari Museum Negeri Propinsi Sonobudoyo kepada Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta.

Museum Perjuangan terletak di Jalan Kolonel Soegiyono Nomor 24 Yogyakarta. Tepatnya di RT 14 RW 6 Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta. Secara astronomis Museum Perjuangan terletak pada 7,45 Lintang Selatan dan 110,15 Bujur Timur.

Berdirinya Museum Perjuangan tidak dapat dilepaskan dengan peringatan setengah abad kebangkitan nasional. Gagasan pembangunan Museum Perjuangan muncul dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang menginginkan adanya sebuah tinggalan bagi generasi mendatang terkait dengan peringatan setengah abad kebangkitan nasional.

Lahirnya jiwa nasionalisme Indonesia yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta, merupakan tonggak sejarah bangkitnya Nasionalisme Indonesia. Organisasi Budi Utomo merupakan pelopor berdirinya organisasi modern yang pertama, dalam arti mempunyai pimpinan, anggota, dan ideologi yang jelas.

Berdirinya Budi Utomo diikuti oleh berdirinya organisasi-organisasi lain. Organisasi yang semula bergerak dalam bidang sosial, budaya, bahkan keagamaan, lama kelamaan mengalami perubahan dengan berorientasi pada bidang politik. Nilai-nilai nasionalisme yang lahir dengan berdirinya Budi Utomo, semakin berkembang secara simultan, bukan saja menjangkau partai-partai politik tetapi juga organisasi-organisasi pemuda.

Para pemuda dan pelajar dari berbagai organisasi mulai bergabung dalam satu wadah yang sama yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang didirikan pada tahun 1926. Mereka kemudian menyelenggarakan Kongres Pemuda Pertama pada bulan Mei 1926. Mereka ingin mengesampingkan perbedaan-perbedaan berdasarkan daerah dan ingin menciptakan kesatuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya manifestasi persatuan tersebut diwujudkan dalam Kongres Pemuda II yang berlangsung pada

tanggal 27-28 Oktober 1928. Dalam kongres itulah lahir "Sumpah Pemuda", yang berbunyi :

- 1 Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.
- 2 Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
- 3 Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Sumpah pemuda merupakan hasil pemikiran kaum terpelajar. Merekalah pencipta identitas nasional yang berhasil membangkitkan ekspresi kolektif untuk merealisasikan solidaritas nasional. Tri Tunggal Sumpah Pemuda merupakan tali pengikat nasionalisme Indonesia yang mencakup pengertian wilayah, bangsa dan bahasa. Rumusan Sumpah Pemuda adalah bentuk identitas nasional yang menjadi simbol persatuan dalam menggalang kekuatan untuk menghadapi kekuatan kolonial.

Sejarah membuktikan bahwa perasaan nasionalisme menjadi modal dasar dalam perjuangan sehingga tercapailah Proklamasi Kemerdekaan. Semangat tersebut semakin mengakar dan mendarahdaging, sehingga ketika ada kekuatan asing yang akan merongrong kemerdekaan, rakyat Indonesia digerakkan oleh kekuatan besar yang tak terbendung oleh kekuatan lawan, yang tidak lain adalah "Nasionalisme" itu sendiri.

Nasionalisme menjadi dasar perjuangan dalam merintis, mencapai, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu bukan hal yang berlebihan jika berdirinya Budi Utomo sebagai tonggak sejarah lahirnya nasionalisme Indonesia ditandai dengan berdirinya sebuah monumen, yang sekarang kita kenal dengan nama Museum Perjuangan.

BAB II SEJARAH MUSEUM PERJUANGAN

Dalam rangka peringatan setengah abad kebangkitan nasional, di Yogyakarta dibentuk panitia yang diberi nama "Panitia Setengah Abad Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta". Panitia tersebut diketuai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan beranggotakan kepala-kepala djawatan, wakil-wakil kalangan militer dan polisi, pemimpin-pemimpin partai dan organisasi dari segala aliran dan keyakinan yang tergabung dalam Panitia Persatuan Nasional (PPN), serta kaum cerdik cendekiawan dan karya.

Pada tanggal 20 Mei 1958, diadakan upacara setengah abad kebangkitan nasional di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Selain itu dilakukan juga kerja bakti, gerakan menambah hasil bumi, mengumpulkan bingkisan untuk kesatuan-kesatuan yang sedang menumpas pemberontakan, serta mengadakan ziarah ke makam para pahlawan nasional. Meski demikian, panitia merasa ada sesuatu yang kurang. Oleh karena itu muncul gagasan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku ketua Panitia Setengah Abad Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan suatu tinggalkan bagi generasi mendatang.

Seusai upacara tanggal 20 Mei 1958, diadakan rapat panitia dan berhasil membentuk Panitia Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional yang anggotanya terdiri dari anggota Dewan Pimpinan Panitia Peringatan Setengah Abad Kebangkitan Nasional Yogyakarta. Adapun susunan dari panitia tersebut, sebagai berikut :

Ketua	: Sri Sultan Hamengku Buwono IX
Wakil Ketua I	: Sri Paku Alam VIII
Wakil Ketua II	: Moh. Djamhari (anggota DPD DIY)
Wakil Ketua III	: Letkol Joesmin (Kepala Staf Res. Inf. 13)
Wakil Ketua IV	: Mayor R.M. Hardjokusumo (Kom. KMK Jogjakarta)
Wakil Ketua V	: Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo (Kepala Daerah Kota Praja Jogjakarta)
Sekretaris	: R. Soetardjo (Kepala Djapendi Jogjakarta)
Anggota	: Kom. Bes. R. Soemarsono (Kepala Polisi DIY) KRT Kertoprodjo (Kepala Djawatan Keuangan DIJ) R. Rio Darmoprodjo (Kepala Djawatan Sosial DIJ)

R. Mangunwasito (Kepala Djawatan PP dan K. DIJ)
 Prodjosudono (Kepala Djawatan Penerangan Kota Praja Jogjakarta)
 Soejoedi (Ketua BKSPM DIJ)
 Susilo Prawirosoesanto (Anggota PPN dari PNI)
 Bismo Wignyoamidjojo (Anggota PPN dari PKI)
 Sunarjo Mangunpuspito (Anggota PPN dari Masjumi)
 RW Probosuprojo (Anggota PPN dari PRN)
 Winoto (Anggota PPN dari PRI)
 Ds SP Poerbowijogo (Anggota PPN dari Parkindo)
 Ibnu Mukmin (Anggota PPN dari PSII)
 Daljoeni (Anggota PPN dari Parindra)
 Prodjokaskojo (Anggota PPN dari PIR)
 Nj. Sahir Nitihardjo (Ketua POWJ)
 KRT Labaningrat (Sekretaris I Pem DIJ)
 Prof. Ir. Soewandi (Ahli Bangunan dari UGM)
 RM. Srihandojokusumo (Ahli Kebudayaan)
 Sudharso Pringgobroto (Ahli Kesenian dari Djawatan PPK DIJ)
 Kepala Perwakilan Djawatan Kebudayaan PP dan K

Selanjutnya untuk membahas apa dan bagaimana monumen itu kelak, panitia monumen setengah abad kebangkitan nasional membentuk panitia khusus (panitia sembilan). Adapun susunan panitia tersebut adalah sebagai berikut :

Ketua : Sunarjo Mangunpuspito
 Sekretaris : Soetardjo
 Anggota : Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo, Soenito Djojosoegito, Nj. Sahir Nitihardjo, Bismo Wignyoamidjojo, Daljoeni, Fadlan AGN, RW. Probosoeprodjo, Mangunwarsito

Pada tanggal 22 Mei 1958 panitia khusus mengadakan rapat di gedung Djapendi. Rapat membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepanitiaan, arti penting monumen, letak monumen, bentuk monumen, sumber dana, dan rencana kerja.

Pada tanggal 7 Juli 1958, dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX panitia monumen setengah abad kebangkitan nasional menyetujui apa yang telah direncanakan dan dikerjakan oleh panitia khusus. Untuk merealisasikannya, maka dalam rapat tersebut dibentuk dua panitia kecil. Adapun susunan kepanitiaan tersebut sebagai berikut :

1. Panitia Teknis, yang terdiri dari :
Ketua : Prof. Ir. Soewandi
Sekretaris : diambilkan personel dari Djapendi, dan juga berkantor di sana
Anggota : Sdr. Bismo Wignyoamidjojo, Sdr. Winoto
2. Panitia Keuangan, yang terdiri dari :
Ketua : Sunarjo Mangunpuspito
Anggota : diambilkan personel dari Resimen Infantri, Ds. S.P. Purbowijogo

Rapat juga menunjuk Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo untuk menghubungi pengurus / panitia yang dulu pernah dibentuk untuk mengambil alih pekerjaan mereka dan diminta supaya menunjuk seorang wakilnya untuk duduk dalam Panitia Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional.

Perlu disampaikan bahwa di Yogyakarta pada tanggal 2 Desember 1952 telah dibentuk Panitia Sementara yang bermaksud merencanakan berdirinya sebuah museum perjuangan untuk menyimpan dan memelihara benda-benda yang dipergunakan oleh rakyat Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan. Adapun susunan kepanitiaan pada waktu itu adalah :

- Ketua : Sri Paku Alam VIII
Wakil Ketua : Prof. Mr. A. G. Pringgodigdo
Sekretaris : I. Hutauruk
Bendahara : RM. Dryono
Anggota : Kol. Bachrun, Overste Sarbini, Pemb. Komisaris Besar Polisi Sudjono Hadi pranoto, R. Patah dan Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo.

Selanjutnya Panitia Sementara Museum Perjuangan menyerahkan barang-barang yang berhasil dikumpulkannya, antara lain berupa :

1. Barang-barang berupa pakaian dan lain-lain yang dipakai oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman ketika bergerilya.
2. Tas yang dulu dipergunakan oleh Drs. Mohamad Hatta ketika menghadiri perundingan KMB di Den Haag Belanda.

3. Barang-barang berupa senapan, juga pedang dari Aceh.
4. Uang dengan jumlah beberapa ratus rupiah.
5. Uang yang dijanjikan oleh Presiden Soekarno sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan catatan supaya panitia Monumen berhubungan langsung dengan beliau.

Sejak saat itu kata "Museum Perjuangan" mulai digunakan lagi, dan menggeser kepopuleran kata "Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional". Berita-berita yang muncul di koran-koran juga mendorong perubahan penyebutan dari Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional menjadi Museum Perjuangan.

Karena itulah, pada tanggal 14 Mei 1959 Museum Pusat TNI AD menghubungi Panitia Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional di Yogyakarta dengan mengutus Kapten Kamari Sampurno untuk mengadakan pembicaraan dengan Saudara Soetardjo selaku Sekretaris Panitia Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional di Yogyakarta.

Dalam rapat pleno keempat tanggal 19 Juni 1959, ketua panitia teknik Prof. Ir. Soewandi memberikan penjelasan tentang rencana dan bentuk bangunan. Ide bentuk bangunan muncul dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Museum Perjuangan akan berbentuk bulat, sedang ornamen-ornamennya akan diambilkan dari bermacam-macam candi.

Terkait dengan masalah permohonan dana kepada pemerintah pusat, telah ditunjuk Sdr. Soetardjo (Kepala Djapendi Yogyakarta) selaku Sekretaris Panitia Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional. Hasilnya bahwa pemerintah RI sanggup memberikan dana sebesar Rp 8.000.000, serta menyanggupkan diri hadir dalam peringatan 10 tahun peringatan "Yogya Kembali" (berakhirnya penarikan mundur Tentara Belanda dari Kota Yogyakarta).

Pada tanggal 29 Juni 1959 di Gedung Negara Yogyakarta (Gedung Agung) diadakan peringatan 10 tahun "Yogya Kembali" yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting pada masa clash II (agresi militer Belanda Kedua). Sebagai wakil pemerintah pusat hadir Wakil Perdana Menteri I Mr. Hardi yang mewakili Perdana Menteri (waktu itu Ir. Djuanda) sedang berada di luar negeri. Berkenan memberikan sambutan dalam acara tersebut antara lain : Kepala Daerah dan Ketua DPRD Siswosoemarto dan Wakil Perdana Menteri I Mr. Hardi. Dalam sambutannya, Wakil Perdana Menteri I Mr. Hardi, mewakili pemerintah menyatakan persetujuannya terhadap pendirian Museum Perjuangan di Yogyakarta.

Pada tanggal 1 Juli 1959 bertempat di Gedung Wilis Kepatihan Yogyakarta diadakan rapat pleno yang kelima. Rapat dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam rapat tersebut berhasil dibentuk seksi-seksi beserta anggotanya. Adapun seksi-seksi tersebut antara lain :

- 1 Seksi I (Pembangunan Gedung Museum)
Ketua : Prof. Ir. Soewandi
Anggota : Sdr. Soedarman
Sdr. KRT. Mertosono
Sdr. KRT. Mertopuro
Sdr. Dr. Sahir Nitihardjo
Sdr. Winoto
- 2 Seksi II (Pengumpulan Barang-barang dari pihak sipil)
Ketua : Sdr. Darmosugito
Anggota : Sdr. I. Hutauruk
Wakil dari Sonobudoyo
Sdr. Soetardjo
Sdr. Soesilo Prawirosusanto
Sdr. Soenito Djojosoegito
- 3 Seksi III (Pengumpulan Barang-barang dari pihak militer)
Ketua : Kapten Kamari Sampurno
Anggota : Dari Resimen Infantri 13
Dari KMK Jogjakarta
- 4 Seksi IV (Usaha sesudah Museum Jadi dan dibuka)
Ketua : Sdr. AZ. Djoj oaminoto
Anggota : Sdr. Sunarjo Mangunpuspito
Sdr. KRT. Kertoprodj o
Sdr. Soekono
- 5 Seksi V (Relief)
Ketua : Nj. Sahir Nitihardjo
Anggota : Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo
Sdr. R.W. Pr obosoeprodjo
Sdr. Soemardjo, L.E
Sdr. Joemadi
- 6 Seksi VI (Administrasi Keuangan)
Ketua : Sdr. Sunarjo Mangunpuspito
Anggota : Sdr. AZ. Djoj oaminoto
Sdr. KRT. Kertoprodj o
- 7 Seksi VII (Penerangan dan Propaganda)
Ketua : Sdr. Soetardjo

Anggota : Sdr. Prodjosudono
Sdr. Toekidjo Handoyo
Sdr. Soedomo Bandjaransari

Laporan pelaksanaan tugas seksi-seksi tersebut disampaikan dalam rapat pleno tanggal 26 Juli 1959. Dengan mempertimbangkan masukan dan laporan dari tiap seksi maka ditetapkan bahwa pemasangan patok pertama kali akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1959. Upacara tersebut berlangsung di halaman ndalem Brontokusuman Yogyakarta tepat jam 12.00 WIB usai upacara resmi di Gedung Negara Yogyakarta (Gedung Agung). Hadir dalam acara tersebut antara lain para pembesar sipil maupun militer beserta tamu undangan. Karena Sri Sultan Hamengku Buwono IX berhalangan hadir maka pemasangan patok dilaksanakan oleh Sri Paku Alam VIII. Dengan demikian tanda dimana gedung Museum Perjuangan nantinya akan dibangun sudah ada.

Pada tanggal 21 Agustus 1959 di Gedung Wilis Kepatihan Yogyakarta diadakan rapat pleno yang ke tujuh. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Panitia Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam rapat tersebut Sri Sultan Hamengku Buwono IX melaporkan hasil kunjungannya ke Jakarta, antara lain keberhasilannya menemui Perdana Menteri Ir. Djuanda dan Menteri Keamanan Nasional Letnan Jenderal Abdul Haris Nasution.

Mengenai uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari pemerintah pusat, akan diatur dalam 3 termin, yaitu :

- Termin pertama : tahun 1959 sebesar 3 ½ juta.
- Termin kedua : tahun 1960 sebesar 2 ½ juta.
- Termin ketiga : tahun 1961 sebesar 2 juta.

Pada tanggal 1 September 1959 diadakan pertemuan antara Seksi I (Pembangunan Gedung Museum) dengan para pemborong dari berbagai kota besar di Jawa seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Sala, Surabaya, Malang dan Yogyakarta. Pertemuan diadakan di ruang Perpustakaan Djapendi (Djawatan Penerangan Daerah Istimewa) Yogyakarta. Penjelasan gambar proyek gedung museum dan cara penawaran diberikan oleh Sdr Soedarman. Selanjutnya pada tanggal 28 September 1959 bertempat di Djapendi, diadakan pertemuan pelelangan gedung Museum Perjuangan yang dihadiri oleh para pemborong yang telah memasukkan penawaran.

Setelah surat-surat penawaran dibuka, penawar yang paling rendah adalah I.E.C. (Indonesian Engineering Corporation) sebesar Rp 3.545.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menurut taksiran direksi, pembangunan gedung tersebut akan menghabiskan biaya Rp 4.070.000,- (empat juta tujuh puluh ribu rupiah).

Pemborong lain yang mengajukan penawaran antara lain AIA sebesar Rp 5.380.000, Santoso sebesar Rp 5.784.000, Sindutomo sebesar Rp 5.364.000, dan lainnya mengajukan penawaran yang lebih tinggi. Tertinggi hingga mendekati Rp 7.000.000. Dengan demikian I.E.C. merupakan pemenang lelang pembangunan Gedung Museum Perjuangan. Surat pemberian pekerjaan dan kontrak telah diselesaikan oleh ketua direksi yaitu Sdr. Soedarman (Kepala Djawatan Gedung-gedung Negeri di Yogyakarta).

Sebagai awal pembangunan gedung Museum Perjuangan, pada tanggal 5 Oktober 1959, bertepatan dengan Hari Angkatan Perang, dilakukan pencangkulan pertama. Kegiatan itu dilaksanakan setelah usai upacara peringatan hari Angkatan Perang di Makam Pahlawan Kusuma Negara Semaki Yogyakarta. Upacara pencangkulan pertama berlangsung di ndalem Brontokusuman, dengan didahului kata pembukaan oleh Sekretaris Panitia Sdr. Soetardjo, disusul dari Direksi yang melaporkan jalannya pelelangan. Yang ketiga adalah dari pamborong yang disampaikan oleh Sdr. Poegoeh dari I.E.C.. Selanjutnya dibacakan doa oleh Kyai Hadji Badawi. Akhirnya Sri Paku Alam VIII selaku Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan memberikan amanatnya. Kemudian para hadirin dipersilahkan menuju ke halaman muka dengan mengelilingi patok yang telah dipancangkan pada tanggal 17 Agustus 1959. Ayunan cangkul pertama dilakukan oleh Sri Paku Alam VIII selaku Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama para pembesar sipil, militer, polisi dan lain-lain. Dengan selesainya upacara pencangkulan pertama ini, pembangunan bangunan gedung museum dimulai.

Sesuai dengan laporan sekretariat dan seksi V (Relief) pada sidang pleno ke sembilan tanggal 7 April 1960, Panitia Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional di Yogyakarta telah membuat dua macam sayembara yaitu :

1. Hiasan Puncak gedung Museum
2. Kesatuan Patung Gerilya di muka Gedung Museum

Karena banyak naskah yang tidak sampai kepada panitia, maka penutupan sayembara yang semula akan dilakukan pada tanggal 30 Juni 1960 diundur menjadi tanggal 31 Juli 1960.

Hasil pemeriksaan yuri pada permulaan bulan Agustus 1960, menyatakan bahwa dari sejumlah karya yang masuk hanya 44 gambar yang memenuhi syarat. Meski demikian tidak satupun gambar tersebut memenuhi keinginan panitia, sehingga sayembara tersebut tidak ada juara pertamanya. Gambar hiasan puncak yang mendekati keinginan panitia hanya satu yaitu yang berjudul "Purna Swaraj" karya FA. Sutjipto yang oleh panitia diberi penghargaan nomor 2 dan berhak atas hadiah uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Sedangkan gambar kesatuan patung gerilya hadiah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diberikan kepada gambar yang berjudul "Mara Hanung". Selanjutnya kepada Sdr. F.A. Sutjipto diminta menyempurnakan hasil kerjanya dengan petunjuk panitia ahli, yang pelaksanaannya didampingi oleh Sdr. Katamsi sebagai panasehat. Selanjutnya hiasan puncak ini dikerjakan di Muja-muju di sebelah timur Kota Yogyakarta.

Sedangkan Relief dikerjakan oleh Edhi Soenarso di rumahnya di Kampung Karangwuni sebelah utara kota Yogyakarta. Untuk mengejar panjangnya dinding bangunan museum (55 ½ m), dari 33 thema dikembangkan menjadi 40 thema dengan ukuran 2 x 0,75 m. Untuk patung kepala pahlawan nasional, semula direncanakan ada 11 buah. Namun karena sampai menjelang pembukaan museum master patung Si Singamangaraja tidak dapat ditemukan, maka patung kepala yang terwujud hanya 10 buah.

Pembuatan relief dan patung dipimpin oleh Sdr. Edhi Soenarso dibantu oleh Guru-guru ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia) dan pemahat / pematung yang tergabung dalam PIM (Pelukis Indonesia Muda), SIM (Seniman Indonesia Muda), dan Pelukis Rakyat, antara lain : Sdr. Soedarso, Abdul Salam, Hendrodjasmoro, Saptoto, Soetopo dan Boediani. Disamping itu masih terdapat pelaksana yang terdiri dari 20 orang pokok dan 20 orang pembantu. Adapun yang membuat rencana sket selain anggota-anggota staf sendiri, juga mendapat sumbangan pikiran dari seniman-seniman lain seperti Surono (SIM), Handrijo (PIM), Abdul Sidik (bekas siswa ASRI), Abdul Kadir, Murthiadi dan Sindusawarno (Tamansiswa). Pembuatan relief mulai dikerjakan bulan Oktober 1960 dan pada pertengahan bulan April 1961 sudah dapat dipasang di dinding gedung Museum.

Hiasan puncak merupakan proyek besar ukuran dasar 3 meter dan tinggi 7 meter, maka pengerjaannya terpaksa dibagi menjadi 3 bagian. Untuk membuat dasarnya dibutuhkan tanah liat seberat 11

ton dan gibs untuk cetakannya sebanyak 6 ton. Jika gibs cetakan telah selesai baru dibawa ke Brontokusuman untuk diatur di atas atap gedung museum.

Menurut keterangan pimpinan pembangunan gedung museum Sdr. Soerodjo dari NV I.E.C. yang dibantu oleh Sdr. Djoko Soenarso Cs dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dianggap sukar adalah pengecoran *koepeldak* dan hiasan puncak. Potongan-potongan cetakan dari gibs mulai dinaikkan ke atas atap gedung museum. Setelah diatur sedemikian rupa baru masuk tahap pengecoran dengan beton yang dilakukan oleh I.E.C.. Menurut perhitungan bahwa jika seluruh hiasan puncak selesai dicor dengan beton maka beratnya mencapai kurang lebih 15 ton. Hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena kekuatan atap dirancang hingga mencapai 45 ton.

Pembuatan proyek hiasan puncak ini diselenggarakan oleh murid-murid SGA III Prabangkara dibawah pimpinan Prawito, Saptoto, dan Hendrodjasmoro. Selain hiasan puncak oleh Prabangkara juga dibuat relief, makara dan candra sengkala. Relief dalam hal ini merupakan ornamen perhiasan tiang-tiang dan mengelilingi dinding museum dengan mengambil motif api. Jumlah Makara yang dibuat ada dua buah dan ditempatkan di kanan dan kiri trap pintu masuk.

Candra Sengkala di atas pintu masuk dengan bertulisan "Anggatra Piriantining Kusuma Nagara" yang memberi catatan 1959. Pencipta dari Candra Sengkala ini adalah R.M. Kawindra Susanto. Pengecoran proyek-proyek ini juga dilaksanakan kerjasama dengan I.E.C..

Setelah pembangunan Museum Perjuangan mencapai tahap akhir, maka diadakanlah upacara pemasangan batu terakhir yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Ketua Panitia Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional pada tanggal 29 Juni 1961 jam 19.00 Wib.

Setelah upacara pemasangan batu terakhir selesai, dilanjutkan upacara penyerahan gedung oleh Wakil I.E.C. yaitu Sdr. Poegoeh kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Ketua Panitia Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional.

Setelah upacara pemasangan batu terakhir selesai dilaksanakan, maka para anggota panitia mengadakan rapat pleno yang ke sepuluh bertempat di ruang belakang ndalem Brontokusuman. Dalam rapat tersebut selain diperdengarkan laporan dari seksi-seksi, juga dibicarakan hal-hal yang belum selesai terkait

dengan persiapan pembukaan museum untuk umum. Setelah rapat selesai, ketua panitia menyimpulkan bahwa pembukaan Museum Perjuangan yang semula direncanakan tanggal 6 Juli 1961 diundur menjadi tanggal 5 Oktober 1961 dan bertepatan dengan peringatan Hari Angkatan Perang. Hal itu dengan pertimbangan, antara lain :

- 1 Persiapan interior museum belum selesai.
- 2 Diselenggarakannya Pekan Raya Dwi Windu Kemerdekaan RI dari tanggal 6 Juli - 24 Agustus 1961.
- 3 Adanya pertunjukan Ballet Ramayana di Pram banan, hingga suasana tidak menguntungkan guna membuka museum untuk umum.

Meski demikian, rencana tersebut juga tidak dapat terlaksana karena suatu hal. Akhirnya museum berhasil dibuka untuk umum pada tanggal 17 November 1961 oleh Sri Paku Alam VIII melalui sebuah upacara pembukaan.

Dari uraian di atas, secara ringkas proses pembangunan Museum Perjuangan dapat disebutkan sebagai berikut :

- 1 Pemasangan patok pertama tanggal 17 Agustus 1959 oleh Sri Paku Alam VIII, sebagai tanda tempat akan dibangunnya Museum Perjuangan.
- 2 Pencangkulan pertama tanggal 5 Oktober 1959 oleh Sri Paku Alam VIII, sebagai tanda dimulainya pembangunan Museum Perjuangan.
- 3 Pemasangan batu terakhir tanggal 29 Juni 1961 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, sebagai tanda berakhirnya pembangunan Museum Perjuangan.
- 4 Upacara Pembukaan Museum tanggal 17 November 1961 oleh Sri Paku Alam VII, sebagai tanda dibukanya Museum Perjuangan untuk umum.

Setelah dibuka untuk umum, selanjutnya museum dikelola langsung oleh Panitia Setengah Abad Kebangkitan Nasional di Yogyakarta. Meski demikian secara operasional pengelolaan Museum Perjuangan ditangani oleh Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Djapendi).

Oleh karena pengelolaan museum ditangani oleh sebuah panitia dan bukan sebuah yayasan yang dibentuk untuk menanganinya, maka kegiatan Museum Perjuangan mengalami pasang surut. Bahkan sempat tutup beberapa waktu lamanya. Secara garis besar perkembangan Museum Perjuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1 Tahun 1961 – 1963, Museum Perjuangan dikelola oleh Panitia Setengah Abad Kebangkitan Nasional di Yogyakarta. Pada saat ini museum dibuka untuk umum dan terbuka bagi kunjungan masyarakat.
- 2 Tahun 1963 – 1969, museum ditutup untuk umum. Urusan perawatan gedung dan koleksi museum diserahkan kepada Museum Angkatan Darat yang waktu itu berkedudukan di Ndalem Brontokusuman tepat di belakang Museum Perjuangan.
- 3 Tahun 1970 – 1974, museum masih tertutup untuk umum. Pada masa ini Museum Perjuangan dalam pengawasan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Inspeksi Kebudayaan Dinas P dan K Propinsi DIY.
- 4 Tahun 1974 – 1980, museum tertutup untuk umum. Pada tahun 1974 Museum Perjuangan oleh Pemda DIY diserahkan kepada Museum Sonobudoyo untuk dikelola sebagai bagian dari Museum Sonobudoyo. Pada masa ini pengelolaannya berada dibawah Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan (PSK) Kanwil Depdikbud Propinsi DIY. Selanjutnya oleh PSK dilakukan pemugaran.
- 5 Tahun 1980 – 1997, museum berada dibawah pengelolaan Museum Sonobudoyo. Tanggal 30 Juni 1980 museum mulai dibuka untuk umum dibawah pengelolaan Museum Sonobudoyo/ Direktorat Permuseuman Dirjen Kebudayaan Departemen P dan K, dan dipimpin oleh seorang koordinator.
- 6 Tahun 1997 – 2008 (sekarang), museum berada di bawah pengelolaan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Tanggal 5 September 1997, Museum Sonobudoyo menyerahkan pengelolaan Museum Perjuangan kepada Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Tanggal 27 Mei 2006, Museum Perjuangan rusak akibat gempa dan ditutup untuk umum. Tahun 2007 Museum Perjuangan diadakan pemugaran dan dibuka untuk umum sejak bulan Juli 2008.

BAB III TATA PAMERAN MUSEUM PERJUANGAN

"A Museum is a non profit making, permanent institution in the service of society and of its development, and open to the public, which acquires, conserves, communicate, and exhibits, for purpose of study, education an enjoyment, material evidence of people and their environment."

Uraian ini merupakan definisi museum menurut ICOM (*Internationale Council of Museums*) dalam kongresnya pada tanggal 14 Juni 1974. Definisi tersebut kurang lebih berarti : Museum adalah lembaga yang tidak mencari keuntungan, bersifat tetap, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang mengumpulkan, merawat, mengkomunikasikan dan memamerkan, untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan hiburan, benda-benda bukti material manusia dan lingkungannya.

Dari definisi tersebut, terdapat satu kata yaitu "*communicates*" atau mengkomunikasikan. Kata ini memegang peranan paling pokok dalam kalimat tersebut. Hal itu jika dikaitkan dengan kata yang ada di atasnya bahwa museum adalah terbuka untuk umum, kata mengkomunikasikan ini menjadi ujung tombak dari sebuah museum. Dalam mengkomunikasikan koleksi museum, cara yang paling efektif adalah melalui pameran.

Koleksi museum meski bagus apapun tidak akan mempunyai arti apa-apa jika tidak dikomunikasikan kepada masyarakat umum. Oleh karena itu sungguh bukan tidak beralasan jika *Frans Schouten* dan *M. Hammond Guthrie* mengatakan bahwa : "dalam sebuah museum media yang paling penting dalam penyampaian informasi adalah pameran".

Tata pameran Museum Perjuangan dibagi menjadi dua yaitu tata pameran di luar ruang (*outdoor exhibition*) dan tata pameran di dalam ruang (*indoor exhibition*).

A. Tata Pameran Di Luar Ruang (*Outdoor Exhibition*)

Yang dimaksud dengan tata pameran di luar gedung adalah segala macam penyajian informasi melalui bahasa benda yang ditata di luar ruang/gedung. Untuk Museum Perjuangan tata pameran di luar ruang meliputi antara lain : gedung museum itu sendiri termasuk simbol-simbol yang ada di dalamnya, relief patung kepala pahlawan nasional, dan relief peristiwa sejarah.

a. Gedung Museum

Bangunan Museum Perjuangan secara keseluruhan memiliki arti dan makna sesuai dengan tujuan pendirian bangunan. Gedung Museum Perjuangan berbentuk bulat silinder dengan garis tengah 30 meter dan tingginya 17 meter.

Bentuk bangunan merupakan perpaduan bangunan model barat dan timur. Model barat terlihat dengan bentuk bangunan yang mirip dengan bangunan di Roma jaman kekaisaran Romawi yang tampak pada bagian atas bangunan. Sedangkan model timur terlihat pada bagian bawah bangunan yang mengambil model candi-candi di Indonesia.

Bangunan Museum Perjuangan berbentuk bulat silinder dan dikenal dengan istilah "Ronde Tempel". Pada sebelah kanan dan kiri pintu masuk terdapat makara berbentuk binatang laut. Bagian atas bangunan museum berbentuk topi baja model Amerika dengan hiasan puncak berupa : lima buah bambu runcing yang berdiri tegak di atas bulatan bola dunia. Sedangkan bulatan bola dunia itu terletak diatas lima buah trap.

Di bagian atas pintu masuk museum terdapat hiasan berbentuk bintang bersudut delapan dengan peta kepulauan Indonesia di tengah-tengahnya. Dibawahnya terdapat candrasengkala yang berbunyi : "Anggatra Pirantining Kusuma Nagara" ciptaan RM. Kawindro Susanto.

Pada pintu masuk museum terdapat trap-trapan yang jika dihitng jumlahnya 17 buah. Sedangkan daun pintu masuk museum berjumlah 8 buah. Kemudian jendela yang terdapat pada dinding bangunan museum berjumlah 45 buah. Jendela-jendela tersebut dihubungkan oleh pilar-pilar yang berhiasan lung-lungan yang menyerupai perwujudan api yang tak kunjung padam.

Secara keseluruhan, bentuk bangunan Museum Perjuangan mengandung arti bahwa Kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan hadiah dari bangsa lain. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Candrasengkala yang berbunyi "Anggatra Pirantining Kusuma Nagara" memiliki arti sama dengan tahun 1959, yaitu tahun dimulainya pembangunan Museum Perjuangan yaitu sejak dipancangkannya patok pertama kali tanggal 17 Agustus 1959.

Jumlah trap pada pintu masuk yang berjumlah 17 buah merupakan tanggal ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, yaitu tanggal 17. Sedangkan daun pintu yang berjumlah 8 pada pintu masuk, merupakan angka yang menunjukkan bulan saat dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yaitu 8 yang berarti bulan Agustus. Jendela yang terpasang mengelilingi tembok bangunan Museum Perjuangan berjumlah 45 buah, merupakan jumlah yang sama dengan tahun ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan di Jakarta pada tahun 1945.

Lung-lungan yang berada diantara jendela yang menyerupai perwujudan api yang tak kunjung padam, mengandung arti semangat bangsa Indonesia yang tak kunjung berhenti dalam perjuangan merintis, mencapai, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

b. Relief Patung Kepala Pahlawan Nasional

Relief patung kepala yang dipasang pada dinding Museum Perjuangan, adalah patung-patung pahlawan nasional yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. Patung-patung tersebut berjumlah 10 buah. Adapun kesepuluh patung kepala pahlawan nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sultan Hasanudin (1631 – 12 Juni 1670)

Sultan Hasanudin adalah putra kedua dari Sultan Malikussaid, Raja Gowa ke 15 yang lahir pada tahun 1631. Beliau adalah Raja Makasar yang memerintah tahun 1654-1669. Beliau gigih melawan VOC yang ingin memonopoli hasil rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Akibat keberaniannya, maka perang antara VOC dan rakyat Goa tak terelakkan. Belanda dipimpin oleh Cornelis Speelman untuk melawan Goa tahun 1666. Lamanya perang memaksa Hasanudin menerima ajakan damai, sehingga 18 Nopember 1667 diadakan perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Goa. Hasanudin kembali melakukan perlawanan. Tanggal 12 Juni 1669 Pasukan Belanda dapat menaklukkan benteng Somba Opu. Peperangan terhenti, dan Hasanudin mengundurkan diri dari tahta sampai akhirnya mangkat pada tanggal 12 Juni 1670.

2. Kapten Pattimura (1783 – 16 Desember 1817)

Thomas Matulesy yang kemudian dikenal dengan Kapitan Patimura dilahirkan di Ambon tahun 1783. Beliau pernah masuk dinas militer Inggris dengan pangkat sersan. Tahun 1816 ketika Belanda berkuasa, daerah Maluku mengalami penindasan. Maka Patimura segera menyusun strategi perang dengan Benteng Duurstede di Saparua sebagai sasaran, dan pada tanggal 16 Mei 1817 benteng berhasil dikuasai. Dalam peristiwa tersebut Residen Van den Berg terbunuh. Mulai saat itulah Patimura dan anak buahnya menjadi pasukan yang disegani oleh Belanda. Hingga akhirnya Patimura tertangkap di Siri Sori. Atas putusan pengadilan Belanda, Patimura dihukum gantung dan gugur pada tanggal 16 Desember 1817.

- 3. Pangeran Diponegoro (11 Nopember 1785 – 8 Januari 1855)**
Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 Nopember 1785, dengan nama Pangeran Ontowiryo. Beliau adalah putra dari Sultan Hamengku Buwono III dari istrinya (bukan permaisuri) yang bernama R.A. Mangkorowati. Semasa kecil beliau tinggal bersama nenek buyutnya Ratu Ageng (janda dari HB I) di Tegal Rejo. Oleh karena sikap Belanda yang sangat menyengsarakan rakyat dengan menetapkan pajak tinggi (pajak pacumpleng), dan perbuatan Belanda yang ingin membangun jalan yang melewati tanah leluhur Pangeran Diponegoro maka terjadilah perlawanan yang kemudian terkenal dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa (20 Juli 1825 s.d 28 Maret 1830). Perlawanan Beliau didukung oleh bangsawan, ulama, maupun rakyat biasa. Antara lain Kyai Mojo, Sentot Alibasah Prawirodirjo, Pangeran Mangkubumi dll. Atas siasat licik Belanda, maka pada tanggal 28 Maret 1830 Diponegoro ditangkap dalam sebuah jebakan perundingan di Karesidenan Kedu, Magelang. Kemudian Beliau diasingkan ke Manado. Tahun 1834 dipindahkan ke Ujung Pandang sampai wafat tanggal 8 Januari 1855.
- 4. Tuanku Imam Bonjol (1772 – 6 November 1864)**
Tuanku Imam Bonjol lahir pada tahun 1772 di Kampung Tanjung Bungi, Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, semula bernama Peto Syarif. Karena beliau berhasil mendirikan negeri Bonjol maka lebih dikenal sebagai Imam Bonjol. Pertikaian antara kaum Paderi (kaum agama) dengan kaum adat telah melibatkan Imam Bonjol dan Belanda. Melihat kekuatan kaum Paderi dibawah Imam Bonjol maka Belanda khawatir dan membuat perjanjian tahun 1824 (Perjanjian Masang) yang akhirnya dilanggar oleh Belanda dengan mengadakan serangan ke daerah Negeri Pandai Sikat. Peperangan berkobar lagi. Ajakan damai dengan maklumat “Palakat Panjang” Belanda tiada digubrisnya. Setelah tiga kali Belanda mengganti panglima perangnya barulah Negeri Bonjol dapat direbut pada tanggal 16 Agustus 1837. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol dapat ditangkap dalam sebuah pengkhianatan perundingan Belanda. Kemudian diasingkan ke Cianjur, dipindahkan ke Ambon dan kemudian ke Manado sampai wafat tanggal 6 Nopember 1864 dalam usia 92 tahun sebagai pahlawan perjuangan Perang Padri di Sumatra Barat.
- 5. Teuku Umar (1854 – 10 Februari 1899)**
Teuku Umar lahir pada tahun 1854 di Meulaboh. Pada saat usia 19 tahun (1873) Teuku Umar telah melibatkan diri dalam

Perang di Aceh. Tahun 1878, markas pasukannya di Kampung Darat diduduki Belanda. Dengan siasatnya menyerah pada Belanda, Teuku Umar dipercaya membawahi 32 orang tentara untuk menumpas pasukan Raja Teunom dan yang kedua membawahi 250 pasukan untuk menumpas pejuang Aceh. Pada tanggal 29 Maret 1896, Teuku Umar melarikan 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, uang 18.000 dolar, sehingga menyebabkan Belanda marah dan memerintahkan Panglima Tentara Hindia Belanda (Jenderal Van Heuts) untuk menangkapnya. Pada suatu pertempuran (10 Pebruari 1899, malam) Teuku Umar tertembak sehingga gugur sebagai kusuma bangsa. Dalam perangnya ia selalu didampingi oleh istrinya Cut Nya' Dien. Perang Aceh mampu bertahan lama karena: kepemimpinan para Ulama, daerah yang berbukit-bukit, serta semangat perang jihad. Perang Aceh berlangsung pada tahun 1873-1904 suatu peperangan yang berlarut-larut.

6. R.A. Kartini (21 April 1879 – 17 September 1904)

Raden Ajeng Kartini seorang putri Bupati Jepara yang juga pelopor emansipasi wanita Indonesia lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Karena kegemarannya suka membaca buku dan majalah pikirannya menjadi terbuka lebar. Meski pendidikannya hanya tamat setingkat SD, dalam masa pingitan (tradisi adat, sebelum menikah) pikirannya tetap jauh ke depan untuk memajukan wanita Indonesia melalui pendidikan. Oleh karenanya Kartini mendirikan sekolah bagi gadis-gadis di lingkungan Kabupaten Jepara. Muridnya pun hanya berjumlah 9 orang yang terdiri dari kerabatnya sendiri. Disamping itu Kartini giat menulis surat kepada sahabatnya orang Belanda (Tuan dan Nyonya Abendanon), hingga saatnya Kartini menikah dengan Raden Adipati Joyodiningrat, Bupati Rembang. Sejak itu pula Kartini pindah ke Rembang. Karena tahu akan cita-cita Kartini maka suaminya (Raden Adipati Joyodiningrat) mendirikan sekolah perempuan di rumahnya sendiri. Kemudian bermunculan pula sekolah-sekolah serupa dengan nama Sekolah Kartini di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon dll. Kartini wafat pada usia 25 tahun (17 September 1904), setelah melahirkan putra pertamanya. Surat-surat Kartini terkumpul dalam sebuah buku yang berjudul “Door Duisternis tot Licht” (Habis Gelap Terbitlah Terang).

7. Dr. Wahidin Soediro Hoesodo (7 Januari 1857 – 26 Mei 1917)

Wahidin Soediro Hoesodo adalah seorang tokoh pencetus ide lahirnya Boedi Oetomo 1908. Beliau lahir pada tanggal 7

Januari 1852 di Mlati, Sleman, Yogyakarta dan wafat pada tanggal 26 Mei 1917 dan dimakamkan di Mlati, Sleman, Yogyakarta. Semasa hidupnya, tahun 1895 bersama rekan-rekannya mendirikan Surat Kabar dua bahasa (Jawa dan Melayu) Retno Dumilah di Yogyakarta. Pada tahun 1906 s.d. 1907 giat melaksanakan perjalanan mengumpulkan Studiefonds (Dana Pendidikan) bagai penduduk pribumi. Setelah bertemu dengan Sutomo seorang pelajar STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), berpadulah gagasan mereka yang teraktualisasi dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Wahidin Soediro Hoesodo beristri seorang wanita Betawi yang bernama Anna. Dari perkawinannya lahirlah dua orang anak. Salah satunya bernama Abdullah Subroto yang kemudian menurunkan Sujono Abdullah dan Basuki Abdullah (keduanya pelukis).

8. Ki Hajar Dewantara (2 Mei 1889 – 26 April 1959)

Ki Hadjar Dewantara lahir tanggal 2 Mei 1889 dengan nama kecil Suwardi Suryaningrat. Ayahnya adalah bangsawan Kadipaten Pakualaman yang bernama Pangeran Suryaningrat. Pada tanggal 6 September 1913 sampai dengan 5 September 1919 pernah dibuang ke negeri Belanda karena tindakannya yang menentang pemerintahan Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922 mendirikan Perguruan Taman Siswa. Tanggal 23 Nopember 1928 secara resmi, disamping namanya yang lama, memakai nama baru yaitu Ki Hadjar Dewantara. Pada tanggal 1 Oktober 1932 bersama dengan segenap lapisan masyarakat dan partai politik serta organisasi rakyat mengadakan perlawanan menentang "Ordonansi Sekolah Liar" atau *Wilde Schoolen Ordonantie*. Pada tanggal 8 Maret 1955 ditetapkan oleh pemerintah sebagai Perintis Kemerdekaan Nasional. Tanggal 19 Desember 1956 mendapat gelar kehormatan dalam ilmu Kebudayaan dari Universitas Gadjah Mada. Pada waktu wafat tanggal 26 April 1959 diangkat sebagai perwira tinggi dengan upacara negara secara kemiliteran. Tanggal 28 Nopember 1959 oleh Presiden diangkat sebagai Pahlawan Nasional. Tanggal 6 Desember 1959, hari lahir Ki Hadjar Dewantara (2 Mei) ditetapkan sebagai hari pendidikan nasional.

9. MH. Thamrin (16 Pebruari 1894-11 Januari 1941)

Mohammad Husni Thamrin dilahirkan pada tanggal 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Pinggiran kota Batavia. Ayahnya, Thamrin Mohamad Thabrie, pernah menjadi Wedana Batavia tahun 1908. Kakek biologis Thamrin adalah

seorang pengusaha berdarah Inggris yang memiliki sebuah hotel dikawasan Petojo. Sepak terjang kegiatan Thamrin dalam pergerakan dimulai sejak menjadi anggota Dewan Kota hingga perjuangannya menghadapi krisis politik dan ekonomi akibat kegagalan langkah yang diambil pemerintah kolonial. Keberhasilan upaya Thamrin kemudian menempatkan dirinya sebagai salah satu tokoh dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1916, MH Thamrin bersama ayahnya ikut bergabung dengan perkumpulan pemilih melayu (Kiesvereening Melajoe) yang didirikan oleh Hinloopen Labberton. Pada masa ini pula organisasi Kaoem Betawi yang didirikan oleh Thamrin dan Masserie untuk menghimpun pribumi Betawi elite mulai aktif. Setelah diangkat sebagai anggota Dewan Kota Batavia pada tahun 1919, Thamrin mulai aktif menyampaikan pembelaan dan empatinya terhadap wong cilik, terutama masalah perbaikan kondisi sosial dan sanitasi. MH. Thamrin merupakan pejuang dari Betawi yang banyak memberikan andil perjuangan. Di antaranya memperjuangkan kepada pemerintah Belanda untuk dibentuk Dewan Volksraad, kemudian memprakarsai berdirinya Fraksi Nasional, serta turut membentuk PPKI menjelang kemerdekaan Indonesia. M. H. Thamrin yang diangkat menjadi anggota volksraad oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1919 dengan maksud mengimbangi kaum pejuang nasionalis yang beraliran keras yang dipelopori Ir. Soekarno dan kawan-kawan. Tetapi maksud pemerintah Hindia Belanda tersebut gagal total karena selama ia menjadi anggota volksraad bukannya bersifat lunak yang diperlihatkan, tetapi justru sifat yang keras menentang penjajahan yang diperlihatkan, bahkan ia selalu mengadakan pertemuan-pertemuan (rahasia) dengan Ir. Soekarno. M.H. Thamrin pada waktu itu betul – betul melaksanakan fungsinya sebagai anggota parlemen. Ia bersama dengan Mr. Kusumo Utojo melakukan peninjauan di Sumatera guna mengecek bagaimana asisten-asisten perkebunan milik pemerintah kolonial Hindia Belanda memperlakukan buruh pribumi (yang terkenal dengan istilah kuli-kuli) secara biadab. Hasil peninjauan (penyelidikannya) itu dengan tanpa ditutup-tutupi dibebaskan secara gamblang oleh M.H. Thamrin dalam sidang Volksraad pada tanggal 27 Januari 1930. M.H. Thamrin wafat pada tanggal 11 Januari 1941.

10. Jendral Soedirman (24 Januari 1916-29 Januari 1950)

Pangsar Soedirman adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Bodas

Karangjati, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Setelah tamat HIS di Purwokerjo, melanjutkan pendidikan ke Taman Dewasa Tamansiswa dan kemudian memasuki Sekolah Guru Muhammadiyah tetapi tidak tamat. Pada masa pendudukan Jepang mengikuti pendidikan ketentaraan dalam Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor dan setelah selesai diangkat menjadi komandan batalyon di Kroya. Setelah TKR terbentuk ia diangkat sebagai Panglima Divisi V Banyumas dengan pangkat kolonel. Anggota TKR di bawah pimpinannya ikut terlibat dalam perang melawan pasukan Inggris di Ambarawa. Dalam konperensi TKR bulan November 1945 di Yogyakarta terpilih sebagai panglima besar TKR dan dilantik dengan pangkat Jenderal. Pada masa agresi militer Belanda II 19 Desember 1948 bersama pasukannya keluar kota Yogyakarta dan melakukan perjuangan secara bergerilya sampai akhirnya pada tanggal 10 Juli 1949 masuk kota Yogyakarta kembali. Karena sakitnya yang tidak mendapatkan perawatan secara intensif selama perjuangan maka pada tanggal 29 Januari 1950 wafat di Magelang. Kemudian dimakamkan di TMP Semaki Yogyakarta.

c. Relief Peristiwa Sejarah

Koleksi relief secara kronologis menceritakan peristiwa sejarah sejak dari masa lahirnya Boedi Oetomo sampai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Adapun koleksi-koleksi yang divisualisasikan dalam relief ini adalah sebagai berikut :

1. Lahirnya Boedi Oetomo (20 Mei 1908)

Boedi Oetomo merupakan organisasi pergerakan nasional Indonesia modern yang pertama kali berdiri. Organisasi tersebut lahir pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta, tepatnya di ruang anatomi STOVIA (School Toot Opleiding van Inlansche Artsen) yaitu tempat pendidikan bagi para calon dokter rakyat bumi putera. Berdirinya organisasi Boedi Oetomo ini bermula dari adanya usaha dari Dr. Wahidin Soediro Hoesodo untuk membantu kaum bumi putera yang kurang mampu untuk dapat menyalurkan pendidikan di perguruan tinggi dengan menyelenggarakan "Studiefonds" (dana pendidikan). Pada akhir tahun 1907 di gedung STOVIA terjadi pertemuan antara Dr. Wahidin dan Sutomo didampingi pelajar Soeradji yang waktu itu sedang disibukkan oleh usahanya untuk memajukan pengajaran di kalangan pelajar bumi putra. Dari situlah akhirnya gagasan pendirian Boedi Oetomo muncul.

Langkah pertama yang kemudian dilakukan oleh Sutomo dan beberapa orang temannya, ialah segera mengirimkan surat untuk mencari hubungan dengan murid-murid di kota lain di luar Jakarta, seperti Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Magelang. Ternyata persetujuan dan dorongan datang dari berbagai pihak sehingga lebih memantapkan usaha Sutomo dan kawan-kawan.

Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1908, kurang lebih pukul 09.00 WIB, Soetomo dan kawan-kawannya pelajar STOVIA antara lain M. Soeradji, M. Muhammad Saleh, M. Soewarno, M. Goenawan, Soewarno, R.M. Goembrek, R. Angka dan M. Soelaiman berkumpul di ruang anatomi Gedung STOVIA, mereka mendirikan sebuah organisasi yang kemudian diberi nama Boedi Oetomo yang berarti suatu usaha yang mulia (dalam bahasa Jawa = budi kang utami).

Boedi Oetomo adalah sebuah nama yang diusulkan oleh M. Soeradji. Adapun susunan pengurus yang berhasil mereka bentuk setelah diikrarkan berdirinya Boedi Oetomo adalah sebagai berikut :

Ketua	: R. Soetomo
Wakil Ketua	: M. Soelaiman
Sekretaris I	: Soewarno
Sekretaris II	: M. Goenawan
Bendahara	: R. Angka
Komisaris	: M. Soewarno, M. Muhammad Saleh, M. Soeradji, M. Goembrek.

2. Lahirnya Serikat Islam 10 September 1912

Serikat Islam (SI) merupakan kelanjutan dan perkembangan nama dari Serikat Dagang Islam (SDI), suatu organisasi Islam yang bergerak dalam bidang perdagangan (ekonomi) yang mula-mula didirikan di Jakarta oleh RM. Tirtoadisoerjo. Pada awal kegiatannya RM. Tirtoadisoerjo berkeliling seluruh Jawa, tetapi hanya kota-kota besar saja yang dikunjungi. Masing-masing dianjurkan untuk mendirikan SDI dengan tujuan kebebasan ekonomi, Islam sebagai jiwanya, guna kekuatan dan persatuan.

Pada tahun 1911 setiba di kota Solo, RM. Tirtoadisoerjo berhasil mendirikan SDI yang diketuai oleh Haji Samanhoedi, seorang saudagar batik di Lawean, Solo. Ketika itu di Solo terjadi kompetisi yang tajam dalam perdagangan batik terutama dengan golongan Cina. Kebanyakan mereka (golongan Cina) merupakan leveransir bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat batik, misalnya : mori, soja, lilin.

Permainan pedagang Cina tersebut sangat merugikan pedagang-pedagang Indonesia. Sehingga SDI cabang Solo kerap kali melakukan boikot terhadap pedagang Cina. Akibatnya kegiatan SDI baik yang ada di Solo maupun daerah-daerah lain terus diawasi oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pada saat RM. Tirtoadisoerjo sedang giat mempropagandakan program SDI di Solo oleh pemerintah Hindia Belanda ditangkap dan kemudian diasingkan. Sejak RM. Tirtoadisoerjo dalam pengasingan, maka kegiatan SDI diteruskan oleh H. Samanhoedi. Setahun kemudian dalam penyusunan Anggaran Dasar, H. Samanhoedi meminta bantuan Umar Said Tjokroaminoto (pegawai perusahaan dagang di Surabaya). Dia berpendapat bahwa kata dagang hanya mempersempit ruang gerak organisasi, disarankan agar gerakan SDI tidak saja pada golongan pedagang, akan tetapi lebih diperluas lagi meliputi seluruh golongan dalam masyarakat dan seluruh kegiatan dalam masyarakat. Selanjutnya Serikat Dagang Islam dirubah menjadi Serikat Islam dengan akta notaris tanggal 10 September 1912. Selanjutnya perserikatan ini terus berkembang dengan pasang surut dinamikanya mewarnai perjalanan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan di Indonesia.

3. Lahirnya Indische Partij di Bandung 25 Desember 1912

Indische Partij didirikan oleh EFE. Douwes Dekker (DD) alias Styabudi di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Untuk hal ini Drs. G. Moedjanto, MA dalam bukunya menyampaikan tanggal 6 September 1912. Organisasi ini merupakan organisasi campuran orang Indo dan Bumiputera. Indische Partij menjadi organisasi politik yang kuat setelah bekerjasama dengan dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara). Untuk selanjutnya mereka dikenal dengan "Tiga Serangkai". Pergerakan Indische Partij berdasarkan nasionalisme (kebangsaan) India (Nama Indonesia belum dipakai). Yang dimaksud bangsa India ialah setiap orang yang dilahirkan, dibesarkan di India dan mengakui India sebagai tanah airnya.

Adapun tujuan dari Indische Partij : 1) Jangka pendek : mempersatukan seluruh bangsa India (termasuk Indo Eropa yang mau mengakui dasar pergerakan tadi), 2) Jangka Panjang : mencapai India Merdeka.

Sikap pergerakan ini terhadap pemerintah Belanda tegas antipati dan non kooperasi yang diilhami oleh perasaan tidak puas : 1) golongan Indonesia karena kehilangan peranan

yang berarti dalam politik dan sosial ekonomi, 2) golongan Indo Eropa karena merasa dianaktirikan oleh masyarakat dan pemerintah Belanda dan merasa terjepit dalam pergaulan sosial, kehidupan politik dan ekonomi (merasa diperlakukan lebih rendah dari pada orang Belanda totok). Dengan bekerja sama dengan bangsa Indonesia, ada kemungkinan bagi mereka untuk memegang peranan yang berarti.

Reaksi pemerintah Belanda terhadap organisasi Indische Partij, adalah pemerintah Belanda menganggap Indische Partij merupakan partai yang berbahaya karena tuntutan dan sikapnya. Lagi pula peraturan yang ada tidak memperkenankan adanya perkumpulan politik. Karena itu permohonan Indische Partij untuk diakui menjadi badan hukum ditolak pemerintah. Karena ijin berdiri tidak diberikan maka Indische Partij bubar pada tanggal 11 Maret 1913.

Namun para pemimpin Indische Partij adalah orang-orang yang agresif dan berani dalam menentang pemerintah Belanda. Ketika pemerintah Belanda mempersiapkan peringatan 100 tahun Nederland bebas dari penjajahan Perancis (Napoleon I). Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat membentuk suatu organisasi dengan nama ironis : Komite Perayaan Seratus Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda, dikenal juga sebagai Komite Bumi Putera.

Menanggapi rencana pemerintah untuk menyelenggarakan perayaan tersebut pada bulan Nopember 1913, para pemimpin Indische Partij menulis karangan (artikel) di harian De Expres (Asuhan EFE. Douwes Dekker. Yang pertama adalah tulisan Suwardi yang berjudul "Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan mengadakan pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaan". Suwardi Suryaningrat selanjutnya menulis : Sejajar dengan jalan pikiran ini, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander (pribumi) memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk mengadakan perayaan itu saja sudah menghina mereka dan sekarang kita garuk pula kantongnya. Ayo teruskanlah penghinaan lahir dan batin ini.

Karena tulisan tersebut maka kejaksaan Belanda mengadakan pembeslahan dokumen-dokumen Sekretariat Komite (Suwardi adalah sekretaris Komite, Cipto menjadi Ketua). Karena tindakan kejaksaan tersebut maka kini ganti Cipto menulis karangannya yang dimuat di harian De Expres juga, berjudul "Kekuatan atau ketakutan". Dikecamnya

tindakan sewenang-wenang yang tidak demokratis yang dilakkan pemerintah. Ditulisnya antara lain "Adakah itu suatu pernyataan kekuatan yang dipertontonkan pembeslahan itu? Ah... kasihan, orang toh tak akan mengira kita akan kehilangan jiwa karena berhadapan dengan kekuasaan yang jauh lebih besar dari kami sendiri? Justru di situ terdapat suatu yang menusuk-nusuk untuk menyerang kekuasaan itu, memaksakan dia menggunakan seluruh tenaganya untuk mengalahkan kita. Makin keras tindakannya makin hebat tumbuhnya tenaga kita.

Mengetahui beberapa teman-temannya aktif menulis dalam berbagai surat kabar yang berisi kecaman pedas terhadap tindakan pemerintah Belanda, maka Douwes Dekker tidak mau ketinggalan. Ia pun menulis karangan yang berjudul : "Pahlawan Kita Dr. Cipto Mangunkusumo dan RM. Suwardi Suryaningrat" yang isinya memuji keberanian mereka berdua dalam kiprahnya untuk memperjuangkan nasib bangsa. Karena keberanian mereka mengecam pemerintah dan sikap mereka yang tegas, Gubernur Jenderal dengan menggunakan hak luar biasa (*exorbitante rechten*) sebagai dasarnya, maka ketiga pemuka IP tersebut dikenai hukuman. Cipto dibuang ke Banda, Suwardi ke Bangka, sedang Douwes Dekker dikenakan tahanan (*internering*). Namun atas permintaan sendiri, pemerintah Belanda memperkenankan mereka meninggalkan Indonesia dan tempat pembuangan yang dipilihnya adalah Negeri Belanda. Di Negeri Belanda mereka itu kemudian menjadi anggota Perhimpunan India (*Indische Vereniging*), yaitu perkumpulan sosial yang diorganisir oleh pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di sana. Segera setelah mereka menjadi anggota, maka perkumpulan sosial tadi kemudian berubah menjadi suatu perkumpulan politik, suatu perkumpulan yang memperjuangkan perubahan kenegaraan bagi Indonesia.

4. Lahirnya Muhammadiyah di Yogyakarta 18 November 1912

Kehidupan beragama umat Islam di Indonesia sampai akhir abad XIX dipandang sangat memprihatinkan. Amalan Islam banyak menyimpang dari tuntunan pokoknya, yaitu Al Quran dan As-Sunnah. Praktek-praktek khurofat (takhayul), Bid'ah (menambah ibadah) dan syirik (menyekutukan Tuhan), banyak dicampur aduk dalam pengamalan Islam. Di samping itu kehidupan pendidikan dan sosial dalam masyarakat Islam belum baik, akibat diskriminasi yang dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Keadaan itu mendorong Kyai Haji Ahmad Dahlan untuk mengadakan Tajdid (reformasi), yaitu

pembaharuan pengamalan kehidupan Islam di Indonesia, yang dikembalikan kepada kemurnian sumber aslinya (Al Quran dan As-Sunnah). Upaya untuk mengadakan gerakan tajdid itu diwujudkan dengan membentuk organisasi yang diberi nama Muhammadiyah, artinya pengikut Nabi Muhammad SAW. Gerakan Muhammadiyah ini secara resmi berdiri pada tanggal 18 November 1912 atau bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1330 H di Kauman Yogyakarta. Pada awal berdirinya Muhammadiyah didukung oleh para ulama antara lain KH. Abdullah Siraj, KH. Ahmad, KH. Abdurrahman, KH. R. Syarkowi, KH. Muhammad, KH. R. Jaelani, KH. Anies dan KH. R. Fekih. Sebagai ketua adalah KH. Ahmad Dahlan dan sekretarisnya KH. Abdullah Siraj.

Sebenarnya cita-cita untuk mengadakan pembaharuan Islam telah dimulai sejak tahun 1316 H atau 1896 M yaitu mengenai pembetulan arah Qiblat dari langgar-langgar dan mesjid-mesjid di Yogyakarta yang dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan. Kemudian pada tanggal 20 Desember 1912 KH. Ahmad Dahlan mengajukan surat permintaan "*rectperson*" bagi Muhammadiyah kepada Gubernur Jenderal Belanda di Jakarta. Permintaan ini dikabulkan dengan surat ketetapan Gouvernement Besluit No. 81 tanggal 22 Agustus 1914. Pengakuan Muhammadiyah sebagai badan hukum mula-mula berlaku hanya di Yogyakarta tetapi kemudian berkembang juga di daerah lain.

Pada masa awal gerakannya Muhammadiyah tidak hanya memusatkan kegiatan dibidang dakwah melainkan juga memberikan kursus-kursus dan pelajaran-pelajaran agama Islam, mendirikan sekolah-sekolah umum disamping mendirikan madrasah-madrasah. Dengan perkataan lain, cita-cita dan perjuangan Muhammadiyah membentuk manusia muslim yang berpendidikan intelek, atau mendidik manusia intelek yang berjiwa muslim.

Dalam bidang kemasyarakatan lainnya, Muhammadiyah mendirikan poliklinik-poliklinik, rumah sakit, memelihara anak-anak yatim piatu, menerbitkan buku-buku agama dan buku bacaan lainnya, menerbitkan surat kabar, majalah dan sebagainya. Dengan demikian ditinjau dari segi idiologis, perjuangan Muhammadiyah untuk memodernisasikan cara menyiarkan dan mengembangkan agama Islam dapat dikatakan berhasil.

Ketika Muhammadiyah belum diperkenankan membuka cabang dan rantingnya di luar Yogyakarta,

masyarakat yang ingin mendirikan Muhammadiyah di daerah lain dianjurkan menggunakan nama lain, sehingga sesuai dengan anjuran itu maka di Pekalongan berdiri Nurul Islam, di Makasar berdiri Almunir, di Garut berdiri Alhidayah. Sedangkan di Sala berdiri perkumpulan Sidik Amanat Tabligh Fathonah (SATF). Perkumpulan ini merupakan cabang Muhammadiyah di Sala waktu itu. Juga di dalam kota Yogyakarta sendiri KH. Ahmad Dahlan menganjurkan adanya jamaah dan perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam menurut kemampuannya, dengan nama masing-masing yang mendapat bimbingan dari Muhammadiyah, seperti Ikhwanul-Muslimin, Taqwimuddin, Cahaya Muda, Hambudi Suci, Khayatul-Qulub, Priya-Utama, Dewan Islam, Thaharatul-Qulub, Thaharatul-Aba, Ta'awana alal birri Ta'rifu bima kana, Wal-Fajri, Wal-Asri, Jamiyatul Ummahat, Jamiatul Muslimin, Syarihatal Mabtabi dan lain-lain. Oleh karena banyaknya cabang Muhammadiyah yang berdiri di luar kota Yogyakarta ini, maka KH. Ahmad Dahlan mengajukan permohonan ijin untuk pendirian cabang Muhammadiyah di Yogyakarta yang kemudian dikabulkan dengan Besluit dari Pemerintah Belanda No. 40 tanggal 16 Agustus 1920.

Kemudian pada tanggal 7 Mei 1921 KH. Ahmad Dahlan mengusulkan permohonan izin untuk kesempurnaan maksud dan tujuan persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia (dulu Nederland Indie). Usul ini disetujui oleh Gubernemen dengan Besluit No. 3 tanggal 2 September 1921.

Seiring dengan timbulnya kependuan di Yogyakarta, maka pada permulaan tahun 1922 dalam organisasi Muhammadiyah juga dibentuk organisasi kependuan dengan nama Hizbul Wathan dibawah pimpinan Yumaeni.

Dengan lahirnya Muhammadiyah tercatatlah dalam sejarah bahwa gerakan ini adalah merupakan pelopor kebangunan Islam Indonesia. Sedangkan jika ditinjau dari segi nasional, maka Muhammadiyah pun terhitung pelopor kebangunan nasional.

5. Lahirnya Tamansiswa 3 Juli 1922

Kedaaan yang dirasakan pada masa kolonial Belanda, bahwa sistem pendidikan yang berlaku lebih banyak berorientasi pada kepentingan bangsa Belanda dari pada rakyat bumi putra. Kepincangan ini menjadi tantangan bagi kaum pergerakan untuk menciptakan iklim baru dalam dunia pendidikan yang berdasarkan kebudayaan dan kepentingan rakyat Indonesia.

Keadaan tersebut berhasil menggugah para pemikir sehingga dari mereka lahir ide untuk mengentaskan bangsa Indonesia dari kesengsaraan tersebut. Mereka kemudian membentuk sebuah forum untuk membicarakan masalah nasib bangsa Indonesia yang kemudian dikenal dengan “Perkumpulan Selasa Kliwon” di Yogyakarta. Forum ini beranggotakan antara lain RM. Soetatmo Soerjokoesoemo, RM. Soerjopoetro, BRM. Soebono, Ki Pronowidigdo, RM. Soewardi Soerjoningrat (Ki Hadjar Dewantara), Ki Ageng Soerjo Mataram, Ki Soetopo Wonoboyo dan RM. Gondo Atmodjo.

Dari beberapa perkumpulan, mereka berhasil membangun niat untuk membangun jiwa merdeka Bangsa Indonesia. Oleh karenanya dilanjutkan dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. RM. Soewardi Soerjoningrat (Ki Hadjar Dewantara) bertugas dalam masalah pendidikan anak.
- b. Ki Ageng Soerjo Mataram bertugas menggarap jiwa merdeka bagi orang dewasa. Media ajarannya terkenal dengan “Kawruh Begja”.
- c. RM. Soerjopranata (kakak Ki Hadjar Dewantara) seorang tokoh SI dan pemimpin Adidharma bertugas mematangkan pikiran kaum buruh, yang karena keberaniannya mendapat julukan de staking koning (raja pemogokan)

Ketika kebutuhan akan pengajaran rakyat bumi putra sedang bergolak, RM. Soewardi Soerjoningrat seorang tokoh Perkumpulan Selasa Kliwon, pada tanggal 3 Juli 1922 mendirikan *National Onderwijs Instituut Tamansiswa* di Tanjung Weg 32 (sekarang Jl. Gajah Mada 32 Yogyakarta). Sistem pendidikan di dalamnya terkenal dengan Sistem Among yang mendasarkan pada dua landasan pokok yaitu : Pertama, Kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir-batin, sehingga dapat hidup berdiri sendiri. Dan kedua, Kodrat Alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya.

Pada tanggal 6 Januari 1923 di dalam National Instituut Tamansiswa dibentuk sebuah majelis yang disebut “*Instituutraad*” yang bertugas memperlancar jalannya pendidikan. Dalam konferensi yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 20–22 Oktober 1923, perguruan ini memperluas Instituut menjadi Hoofdraat (majelis luhur), dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	: RM. Soetatmo Soeryokoesoemo
Ketua II	: RM. H. Soerjopoetro
Panitera Umum	: Ki Hadjar Dewantara
Anggota	: Ki Pronowidigdo M.Ng. Wiyodihardjo R. Roedjito Mr. Soeyoedi RM. Soeryodipoero
Penasehat	: Ki Prawirowiworo

Baru pada tahun 1930 nama National Onderwijs Instituut Tamansiswa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Perguruan Nasional Tamansiswa.

6. **Perlawanan Rakyat terhadap Penjajahan Belanda**

Menggeloranya pergerakan nasional sejak 1908, makin lama makin keras menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah kolonial Belanda. Hal ini menggelisahkan pemerintah waktu itu. Kritik-kritik mulai bermunculan sehingga Belanda memandang perlu memberikan "Volksraad" sebuah dewan perwakilan rakyat di daerah jajahan yang dibuka tanggal 18 Mei 1918 oleh Gubernur Jenderal Mr. Graaf Van Limburg Stirum. Akibat adanya gejolak baik di daerah jajahan dan di negeri Belanda tentang tuntutan perluasan hak negeri jajahan, maka pada tanggal 18 November 1918 Volksraad mengadakan sidang istimewa. Dalam sidang itu Gubernur Jenderal De Graaf Van Limburg Stirum menyampaikan janjinya bahwa akan diselenggarakan pemerintahan yang demokratis di daerah jajahan. Janji yang kemudian dikenal dengan "November Belofte" atau Janji November itu tidak pernah terwujud. Karena itulah Haji Agus Salim keluar dari Volksraad.

Kondisi politik di daerah jajahan semakin panas oleh tindakan radikal organisasi-organisasi kiri. Semula arah kiri ini dipengaruhi oleh "Indische Sociaal Democratische Vereeniging" (ISDV), yang berdiri pada bulan Mei 1914 di Semarang oleh seorang Belanda yang bernama H.F.J.M. Sneelviet. Waktu itu belum ada aturan untuk tidak bergabung dalam dua organisasi atau lebih, sehingga seorang anggota SI (Sarekat Islam) boleh juga menjadi anggota organisasi lain. Oleh karena itulah maka dalam SI terdapat dua golongan yaitu golongan Islam murni antara lain H.O.S. Cokroaminoto, Abdul Muis, H.A. Salim, dll. Sedangkan yang beraliran sosialis – marxis antara lain Semaun, Darsono, Tan Malaka, dll. Oleh karena itu maka pada tahun 1921, dalam kongresnya di Surabaya pecah menjadi dua yaitu SI putih yang tetap

konsisten dengan aturan SI, dan SI Merah yang menentang dan kemudian menjadi Serikat Rakyat yaitu susunan bawah dari PKI (*Partai Komunis Indonesia*).

Sementara itu ISDP mengalami perpecahan. Sayap kanan dibawah pimpinan P.F. Dahler (namanya berganti Amir Dahlan) yang kemudian mendirikan Indische Sociaal Democratische Party (ISDP). Sedangkan sayap kiri makin lama makin bercorak komunis. Apalagi setelah berdirinya Komintern pada tanggal 5 Maret 1919. Sifat komunis partai itu semakin lama semakin mantap dan pada tanggal 23 Mei 1920 namanya diganti menjadi Partai Komunis Indonesia dibawah pimpinan Semaun. Partai ini semakin lama semakin besar sehingga sangat besar pengaruhnya dalam jalannya politik daerah kolonial Belanda.

Sejak berdirinya, PKI telah yakin bahwa pemerintah Belanda melakukan berbagai macam kebohongan. Oleh karena itulah maka pada setiap kesempatan digunakan oleh PKI untuk menciptakan kekacauan (anarkhi). Karena PKI memiliki kekuatan yaitu kaum buruh, maka kekuatan inilah yang diandalkan dalam berbagai aksi itu. Tahun 1922 Tan Malaka menggerakkan pemogokan buruh pegadaian. Karena tindakannya ia akan dibuang ke Timor, tetapi atas permintaannya dia meninggalkan Indonesia dan berkelana ke Eropa dan Asia. Tindakan itu ternyata tidak menyurutkan aksi mogok. Semaun pada tahun 1923 menggerakkan aksi mogok buruh Trem dan kereta api. Akibatnya ia harus mengikuti jejak Tan Malaka. Pimpinan selanjutnya dipegang oleh Darsono. Pada tahun 1924 Darsono juga harus mengikuti apa yang dialami oleh Tan Malaka, karena berbagai kegiatan-kegiatannya yang terkait dengan pemogokan.

Melihat apa yang dilakukan oleh Belanda terhadap para pemimpin mereka, para tokoh PKI yang masih bebas merasa khawatir. Mereka kemudian mulai memikirkan diadakannya revolusi. Oleh karenanya untuk menghitung kekuatan PKI mengadakan kongres di Kotagede Yogyakarta pada bulan Desember 1924. Karena masih tergolong sedikit maka perlu digalang kekuatan kembali. Caranya adalah dengan merangkul golongan non komunis. Dalam hal ini PKI mendapat dukungan dari K.H. Misbach. Ia adalah tokoh muslim yang tertarik dengan propaganda PKI tentang sosialisme. Bahkan dia juga yang mencetuskan slogan "sama rasa, sama rata". Bahkan saking semangatnya dia berani berkata bahwa yang tidak ikut berevolusi bukan Muslim.

Untuk menentukan kapan revolusi dimulai maka diadakan kongres di Surakarta pada awal Desember 1925. Namun oleh residen Surakarta waktu itu dilarang. Oleh karena itu para pemimpin PKI seperti Alimin, Muso, Aliarkham, Sarjono, Sutan Said Ali (mewakili Sumatra), dll segera mengadakan rapat. Hasil rapat terkenal dengan nama "Dokumen Prambanan" (tanggal 12 Desember 1925). Dalam dokumen tersebut termuat pedoman-pedoman praktis dan ketentuan-ketentuan saat revolusi dilancarkan yaitu bulan Juni 1926 ada juga sumber lain yang menyebutkan revolusi ditetapkan bulan Juli 1926. Kebutuhan Senjata diperoleh dari penyelundupan dari Singapura, yang dilakukan oleh para penyelundup yang menyamar sebagai nelayan. Mendengar rencana tersebut, Tan Malaka tidak setuju, karena dia melihat kekuatan PKI waktu itu belum siap. Dia memperingatkan para pemimpin PKI yang masih bebas dengan pamfletnya yang berjudul *Menuju ke Republik Indonesia*. Dalam pamflet tersebut Tan Malaka mengemukakan bahwa PKI masih perlu tambahan anggota, persiapan PKI belum matang, dan perlunya strategi yang tepat. Juga dalam pamflet tersebut disampaikan bahwa kekuatan Belanda berpusat di Jawa, antara lain pusat politik di Jakarta, militer di Bandung, dan ekonomi di lembah Bengawan Solo. Untuk di luar Jawa terdapat di daerah-daerah perkebunan dan pertambangan. Meskipun pamflet ini mendapat perhatian dari PKI, namun gagal menghentikan maksudnya untuk mengadakan revolusi. Akhirnya revolusi meletus meski dengan kekuatan yang belum memadai. Pemberontakan meletus antara lain di daerah Banten dan Minangkabau. Perlawanan Rakyat Banten (12 Nopember 1926) dapat dipadamkan. Perlawanan rakyat Minangkabau yang dipimpin oleh Sutan Said Ali dan Sadrudin mengakibatkan pertumpahan darah. Perlawanan ini dapat dipatahkan (Januari – Februari 1927). Mereka melakukan perlawanan bukan karena propaganda komunis akan tetapi lebih mengarah pada kecintaan mereka kepada kebebasan.

Waktu itu pemerintah jajahan menghentikannya dengan aksi kejam yang dikenal dengan "Pendigulan". Dari sinilah dimulainya sejarah Pembuangan Digul. Tindakan pembuangan ini berpedoman pada hak-hak luar biasa dari Gubernur Jenderal (Exorbitante Rechten), hingga orang yang disangka berbahaya dapat dibuang ke Digul tanpa ada putusan hakim. Ribuan rakyat Indonesia menjadi korban dari hak kolonial Gubernur Jenderal ini. Menurut catatan resmi para

pemberontak yang berhasil dibuang ke Digul mencapai ratusan orang. Termasuk diantaranya Aliarkham dan Sarjono. Waktu itu Muso dan Alimin berhasil melarikan diri ke luar negeri. Karena peristiwa itulah maka organisasi PKI dilarang dan dibubarkan dan muncul kembali setelah Indonesia Merdeka.

7. Lahirnya PNI 4 Juli 1927

Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Tokoh-tokoh PNI yang berperan dalam pendirian partai ini antara lain : Sukarno, Iskak Cokroadisuryo, Cipto Mangunkusuma, Samsi, Sartono, Budiarto, Sunario, dan Anwari. PNI bermula dari Algemene Studie Club, Bandung. Beberapa hal yang mendorong berdirinya organisasi ini antara lain :

- a. Pergerakan yang ada mulai melemah sehingga kurang berpotensi menggerakkan massa.
- b. PKI sebagai partai massa waktu itu telah dilarang.
- c. PNI bersifat radikal revolusioner, meskipun para pemimpinnya berasal dari kalangan intelektual.
- d. Propagandanya menarik dan memiliki propagandis ulung seperti Bung Karno yang merupakan pemimpin kharismatik.

Dasar PNI waktu itu adalah : Marhaenisme (sosiomasionalisme dan sosio-demokrasi). Menurut Sukarno, Marhaenisme adalah ideologi kerakyatan yang mencita-citakan terbentuknya masyarakat yang sejahtera dan merata. Sedangkan cita-cita PNI adalah jelas yaitu "Mencapai Indonesia Merdeka". Rapat-rapat penting yang pernah digelar oleh PNI antara lain :

- a. Tanggal 14 Agustus 1927 di Bandung, Rapat protes terhadap penangkapan pelajar-pelajar Indonesia di Negeri Belanda.
- b. Tanggal 25 Agustus 1927 di Bandung
- c. Tanggal 9 Oktober 1927 di Yogyakarta
- d. Tanggal 4 Desember 1927 di Jakarta
- e. Tanggal 27–20 Mei 1928 mengadakan Kongres Pertama di Surabaya
- f. Tanggal 30 Agustus 1928 di Gresik
- g. Tanggal 14 Oktober 1928 di Semarang
- h. Tanggal 24 Maret 1929 di Bandung
- i. Tanggal 18–20 Mei 1929 mengadakan Kongres Kedua di Jakarta
- j. Tanggal 27 Juli 1929 di Surabaya (dengan mengadakan rapat Studie Club)

- k. Tanggal 25 Agustus 1929 di Jakarta
- l. Tanggal 15 September 1929 di Bandung
- m. Bulan Oktober 1929 di Bandung dan Jakarta.

Dalam kongres pertamanya yang dilaksanakan di Surabaya (27–20 Mei 1928) PNI yang semula Perserikatan Nasional Indonesia diganti menjadi Partai Nasional Indonesia dengan singkatan masih tetap yaitu PNI. Perubahan ini lebih mempertegas sifat pergerakan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan kemajuan taraf hidup rakyat Indonesia pada umumnya. Sesuai dengan watak PNI maka PNI menetapkan Merah Putih dan kepala banteng sebagai lambangnya. Kesemuanya melambangkan berani, suci dan percaya kepada diri sendiri.

Melihat perkembangan PNI maka Pemerintah Hindia Belanda mengawasi dengan ketat perkembangan PNI, meskipun pada waktu itu gerakannya, masih ada dalam taraf kewajaran. Meski demikian akibat propaganda Sukarno yang begitu menarik PNI berkembang dengan pesat, sehingga Gubernur Jenderal dalam pembukaan sidang Dewan Rakyat pada tanggal 15 Mei 1928 perlu memberikan peringatan kepada pemimpin PNI supaya menahan diri. Namun himbuan itu tidak dihiraukan oleh para pemimpin PNI. Peringatan kedua kembali disampaikan oleh pemerintah Belanda pada bulan Juli 1929.

Pada akhir tahun 1929 tersiar kabar provokasi bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan di awal tahun 1930. Oleh karena itu pemerintah Belanda mengadakan pengeledahan dan penangkapan terhadap para pemimpin PNI yaitu Ir. Soekarno, Maskun, Gatot Mangkuproja, dan Supriadinata pada tanggal 29 Desember 1929. Ir. Sukarno ditangkap sepulang dari Surakarta menghadiri kongres PPPKI yang waktu itu Sukarno masih berada di Yogyakarta. Tokoh PNI pada tanggal 18 Agustus 1930 dihadapkan ke meja pengadilan Landraad Bandung. Pidato pembelaan Sukarno kemudian dikenal dengan judul "Indonesia Menggugat". Dalam pembelaannya itu Sukarno berhasil menguraikan dengan gamblang sisi negatif praktek kapitalisme dan kolonialisme Belanda. Akibatnya pada tanggal 22 Desember 1930 hakim menjatuhkan keputusan antara lain : Sukarno dihukum 4 tahun penjara, Gatot Mangkuprojo 2 tahun, Maskun 1 tahun 8 bulan, dan Supriadinata 1 tahun 3 bulan. Tiga orang pembela yang memperjuangkan nasib para pemimpin PNI waktu itu adalah Mr. Sartono, Ir. Suyudi, dan Mr. Sastro

Mulyono. Keputusan hukuman bagi para pemimpin PNI di ditetapkan oleh Raad van Justitie pada tanggal 17 April 1931.

Para pimpinan PNI dituduh melakukan perbuatan mengganggu umum atau menentang kekuasaan pemerintah yang pada dasarnya dikategorikan melakukan kejahatan. Oleh karena itu para pengikut PNI dinyatakan dalam keadaan bahaya. Dengan pertimbangan itulah maka PNI dibubarkan pada tahun 1931. Sebagai gantinya para pemuka PNI mendirikan parti baru yaitu Partindo (Partai Indonesia) yang dipimpin oleh Sartono. Hal ini dengan maksud agar perjuangan tetap dapat dilaksanakan. Tetapi bagi mereka yang tidak menyetujui pembubaran PNI mereka mendirikan PNI Baru (Pendidikan Nasional Indonesia) yang dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir.

8. Berdirinya Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia 17 Desember 1927

PPPKI (*Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia*) merupakan sebuah federasi politik yang didirikan oleh wakil dari PSI (Partai Serikat Islam), BU (Boedi Oetomo), PNI (Perserikatan Nasional Indonesia), Pasundan, Sumatranenbond, Kaum Betawi, dan Kelompok Studi Indonesia dalam sebuah pertemuan di Bandung yang berlangsung pada tanggal 17–18 Desember 1927. Pendirian PPPKI ini dipelopori oleh Ir. Soekarno sebagai sosok yang sangat mendambakan persatuan. Adapun tujuan dari dibentuknya PPPKI ini antara lain :

- a. Mencegah perselisihan antar partai.
- b. Menyatukan organisasi, arah serta cara beraksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
- c. Mengembangkan kebangsaan Indonesia dengan berbagai lambangnya yang kemudian diterima oleh berbagai anggotanya : Sang Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan.

Hasil utama dari dibentuknya PPPKI ini adalah makin meluasnya rasa persatuan kebangsaan Indonesia. Semua partai atau pergerakan tujuannya sama dan tegas : Indonesia Merdeka.

Kongres Pertama PPPKI diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 2 September 1928. Wakil-wakil dari partai politik berharap agar pembentukan federasi ini menjadi era baru gerakan kebangsaan. Permasalahan yang dibahas antara lain : masalah pendidikan nasional, bank nasional, dan cara

memperkuat kerjasama. Komisi-komisi dalam rapat tersebut antara lain : Cokroaminoto (PSI), Sukarno (PNI), Otto Subrata (Pasundan) dan Thamrin (Kaum Betawi). Mereka bekerja gigih menyiapkan program jangka pendek. Sementara itu kongres berhasil membentuk badan pengurus yang bernama Majelis Pertimbangan yang diketuai oleh Dr. Sutomo (BU) dan Anwari (PNI).

9. **Kongres Pemuda II di Jakarta 28 Oktober 1928**

Berdirinya organisasi Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908, ternyata memberikan inspirasi bagi golongan kaum muda. Mereka tidak ketinggalan segera mendirikan organisasi-organisasi pemuda kedaerahan. Yang pertama adalah Jong Jawa. Semula bernama Tri Koro Dharmo yang didirikan pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta. Anggotanya kebanyakan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena sifat Jawa terlalu menonjol maka dalam kongresnya tahun 1918 namanya diganti menjadi Jong Java. Dengan demikian pemuda dari Jawa Barat dapat turut serta.

Berdirinya Jong Java kemudian diikuti oleh organisasi-organisasi pemuda dari daerah lain. Seperti Jong Sumatranen Bond yang berdiri tanggal 9 Desember 1917. Jong Minahasa berdiri tahun 1918, Jong Ambon dan Jong Celebes (Sulawesi), Jong Borneo (Kalimantan). Perkumpulan-perkumpulan tersebut bergerak maju menuju persatuan Indonesia. Sejak tahun 1920 Jong Java tumbuh menjadi perkumpulan yang semi politik, yang tidak saja bertujuan membangun Jawa Raya tetapi lebih jauh ke depan menuju Indonesia Merdeka (1926).

Langkah pertama yang diambil oleh perkumpulan pemuda untuk meninggalkan batas-batas kesukuan menuju kesatu-Indonesia-an adalah diselenggarakannya Kongres Pemuda Pertama tanggal 20 April s.d. 2 Mei 1926 di Jakarta yang dipimpin oleh Mohammad Tabrani. Adapun tema kongres tersebut adalah Indonesia Bersatu. Persiapan kongres tersebut telah dimulai sejak November 1925 dengan adanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Sekar Rukun dan lain-lain. Dalam kongres itu muncul usul untuk menyatukan fusi dari semua organisasi pemuda yang ada di Indonesia.

Setelah kongres itu, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Sekar Rukun, Vereeniging voor Ambonsche Studenenden, dan Jong Batak, berkumpul lagi dengan komite Kongres dan melahirkan suatu gagasan untuk mendirikan organisasi baru yang bernama Jong Indonesia

dengan tujuan menanamkan nasionalisme untuk mewujudkan Indonesia Raya. Nama ini kemudian diambil alih oleh Algemeene Studie Club Bandung yang kemudian diterjemahkan menjadi Pemuda Indonesia.

Kongres Pemuda Pertama di Jakarta tahun 1926 mendorong lahirnya organisasi Pemuda Pelajar pertama yang diberi nama PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia). PPPI inilah yang akhirnya memberanikan diri memprakarsai diselenggarakannya Kongres Pemuda II tahun 1928 di Jakarta. Pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 diadakanlah Kongres Pemuda Indonesia Kedua. Kongres dilaksanakan di gedung Indonesische Club Gebauw yang terletak di Jalan Keramat Raya 106 Jakarta (sekarang Museum Sumpah Pemuda). Hadir dalam kongres tersebut antara lain : Sugondo Joyopuspito (ketua), Muh. Yamin (sekretaris yang merumuskan ikrar pemuda), Abu Hanifah, WR. Supratman, Sukarjo Wiryopranoto, Kuncoro Purbopranoto, dan Mohammad Hoesmi Thamrin. Sebagai realisasi dari keputusan kongres maka pada tahun 1930 diadakanlah fusi berbagai organisasi pemuda lokal menjadi satu wadah, yaitu Indonesia Muda.

Para peserta kongres yang hadir waktu itu mempertegas perasaan persatuan mereka dengan mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda. Adapun isi dari ikrar itu ialah :

- Pertama : Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.
- Kedua : Kami putra dan putri Indonesia menjunjung Bahasa Persatuan, bahasa Indonesia
- Ketiga : Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.

Karena pertimbangan politik waktu itu, maka rumusan tersebut mengalami perubahan yang intinya satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, jadi bunyinya tetap sama. Disamping kesepakatan tersebut, peserta kongres juga menerima lagu Indonesia Raya ciptaan WR Supratman sebagai lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Pada acara penutupan dinyanyikan lagu Indonesia Raya dengan instrumentalia. Keputusan Kongres tersebut dimuat dalam Surat Kabar Persatuan Indonesia tanggal 15 November 1928.

10. Kongres Wanita Indonesia 1928 Di Yogyakarta

Timbulnya kesadaran nasional juga dialami oleh kaum wanita. Hal ini ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi pergerakan wanita modern. Organisasi mengalami

perkembangan dari lingkup lokal ke nasional sejalan dengan pertumbuhan kesadaran nasional bangsa Indonesia. Sejalan dengan cita-cita RA. Kartini (1879-1904), pada masa awal pergerakan nasional muncul organisasi-organisasi wanita antara lain Putri Mardika di Jakarta tahun 1912, Kautaman Istri di Tasikmalaya tahun 1913, di Sumedang dan Cianjur tahun 1916, di Ciamis tahun 1917, di Cicurug tahun 1918, Pawiyatan Wanito di Magelang tahun 1915, Wanito Susilo di Pematang tahun 1918, Wanito Hadi di Jepara tahun 1915.

Setelah tahun 1920 organisasi wanita makin luas orientasinya terutama dalam menjangkau masyarakat bawah dan tujuan politik dilakukan bersama-sama organisasi sosial dan politik pada umumnya. Setiap organisasi politik mempunyai bagian wanita seperti Wanodya Utomo dari SI, kemudian menjadi Sarekat Perempuan Islam Indonesia (SPII). Bagian wanita Muhammadiyah adalah Aisyiah tidak mencampuri politik. Bagian wanita Sarekat Ambon adalah Ina Tunj. Di Yogyakarta, tempat wanita-wanita terpelajar terdapat beberapa perkumpulan wanita yang tidak hanya belajar kepandaian khas wanita tetapi mempunyai tujuan tertentu. Mereka itu diantaranya adalah Wanita Utomo, Wanita Mulyo, Wanita Katholik yang berdiri sekitar tahun 1920, dan Putri Budi Sejati di Surabaya. Adapun organisasi pergerakan wanita yang merupakan organisasi pemuda terpelajar antara lain Putri Indonesia, Jong Islamieten Bond Dames Afdeling (JIBDA disamping JIB), Jong Java bagian gadis-gadis (Meisjeskring), organisasi Wanita Taman Siswa dan lain-lain.

Sejalan dengan perjalanan waktu dimana faham kebangsaan semakin tumbuh berkembang, maka pada tanggal 22-25 Desember 1928 diadakanlah Kongres Perempuan Indonesia Pertama bertempat di Dalem Joyodipuran Jl. Kintelan 139 (sekarang Jl. Brigjen Katamso 23 Yogyakarta). Kongres dihadiri oleh kurang lebih 1.000 orang wakil-wakil dari 30 organisasi wanita. Diantaranya Wanita Utomo, Aisyiah, Wanita Tamansiswa, Poetri Indonesia, Jong Islamieten Bond Dames Afdeling, Meisjeskring, dan Wanita Katholik. Organisasi pergerakan yang lain yang juga hadir antara lain Boedi Oetomo, PNI, Partai Syarikat Islam dan Muhammadiyah.

Kongres Perempuan Indonesia Pertama ini diprakarsai oleh Ny. Sukonto (dari Wanita Utomo), Nyi Hadjar Dewantara (dari Wanita Tamansiswa) dan Nn. Sujatin (dari Putri Indonesia) dan didukung oleh tujuh organisasi wanita antara

lain Wanita Utomo, Wanita Tamansiswa, Putri Indonesia, Wanita Katholik, Jong Java bagian gadis-gadis (Meisjeskring), Aisyiah dan JIBDA (Jong Islamietend Bond Dames Afdeling). Pelaksanaan kongres dimulai pada hari Sabtu malam tanggal 22 Desember 1928 dan dipimpin oleh sebuah panitia kongres.

Adapun susunan panitia tersebut adalah ssebagai berikut :

- | | |
|---------------|---|
| Ketua | : Ny. R. A. Sukonto (Wanita Utomo) |
| Wakil Ketua | : Nn. Siti Munjiah (Aisyiah) |
| Sekretaris I | : Nn. Siti Sukaptinah (JIBDA) |
| Sekretaris II | : Nn. Siti Sunaryati (Putri Indonesia) |
| Bendahara I | : Ny. R.A. Harjodiningrat (Wanita Katholik) |
| Bendahara II | : Ny. R.A. Sujatin (Putri Indonesia) |
| Anggota | : Nyi Hadjar Dewantara (Wanita Tamansiswa),
Nyi. Driyowongso (Wanita PSII),
Nyi. Muridan Noto (Wanita PSII),
Nyi. Umi Salamah (Wanita PSII),
Ny. Johanah (Aisyiah),
Nn. Diah Muryati (JIBDA) |

Adapun maksud dari dilaksanakannya kongres Perempuan Indonesia Pertama ini antara lain :

1. Supaya menjadi pertalian antara perkumpulan-perkumpulan Indonesia.
2. Supaya dapat bersama-sama membicarakan soal-soal kewajiban, kebutuhan dan kemajuan wanita Indonesia.

Setelah menjalani perbincangan selama 4 hari (22 s.d. 25 Desember 1928), kongres berhasil memutuskan antara lain :

1. Mendirikan badan federasi bersama "Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia" (PPPI). Adapun susunan keanggotaannya sebagai berikut :

- | | |
|---------------|---|
| Ketua | : Ny. RA. Sukonto |
| Wakil Ketua | : Ny. RA. Sujatin |
| Sekretaris I | : Ny. Siti Soekaptinah |
| Sekretaris II | : Ny. Moego Roemah |
| Bendahara | : Ny. R.A. Hardjodiningrat |
| Komisaris | : Nyi. Hadjar Dewantara, Siti Moenjiah |
| Anggota | : Nyi Hadjar Dewantara, Ny. Hajinah, Ny. Ali Sastroamidjoyo, Ismudijarti, Rosida. |

2. Menerbitkan surat kabar, yang redaksinya dipercayakan kepada pengurus PPPI. Adapun anggota redaksi terdiri

dari Nyi. Hadjar Dewantara, Nn. Hajinah, Ny. Ali Sastroamijoyo, Nn. Ismudijarati, Nn. Budiah dan Nn. Sunaryati.

3. Mendirikan Studie Fonds yang akan menolong gadis-gadis yang tidak mampu.
4. Memperkuat pendidikan kepanduan putri.
5. Mencegah perkawinan anak-anak.
6. Mengirimkan mosi kepada pemerintah (Hindia Belanda), agar :
 - a. Secepatnya diadakan fonds bagi janda dan anak-anak.
 - b. Tunjangan bersifat pensiun jangan dicabut.
 - c. Sekolah-sekolah putri diperbanyak.
7. Mengirimkan mosi kepada Raad Agama agar tiap talak dikuatkan secara tertulis sesuai dengan peraturan agama.

11. Lahirnya Gabungan Politik Indonesia 21 Mei 1939

PPPKI mengalami kemunduran setelah para pemimpin PNI ditangkap dan partai tersebut dibubarkan. Sebab lain yang juga menyebabkan mundurnya PPPKI adalah adanya pertentangan partai-partai yang berasas kooperasi dan non-kooperasi, antara yang berdasarkan agama dan kenasionalan belaka. Juga keluarnya PSII (SI dulu) tahun 1930 dari PPPKI karena iri akan kebesaran PNI. Oleh karena itulah maka Bung Hatta memberikan komentar tentang PPPKI yang akan memperjuangkan persatuan justru malah mendapat "persatean".

Tahun 1935 kondisi ekonomi mulai pulih setelah diterjang krisis ekonomi tahun 1930. Dengan kondisi seperti itu kaum pergerakan berharap agar hak-hak politik berdasarkan paham demokrasi dipulihkan juga. Harapan tersebut membaik setelah ada pergantian Gubernur Jenderal de Jong oleh Tjarda van Starckenborg Stachouwer. Gubernur yang baru itu dianggap lebih luwes dan menaruh perhatian terhadap kaum pergerakan. Harapan kaum pergerakan menjadi lebih mantap, selain hal-hal tersebut di atas juga adanya kegentingan dunia akibat aksi Hitler dan ekspansi Jepang. Kondisi tersebut mendorong kaum pergerakan untuk mendesak pemerintah Belanda untuk mengadakan pembaharuan yang demokratis. Tuntutan penting untuk mengadakan pembaharuan itu terkenal dengan Petisi Sutarjo dan Mosi Wiwoho yang keduanya diajukan melalui Volksraad.

Tanggal 15 Juli 1936 Sutarjo Kartohadikusumo, ketua PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputera) bersama 5 anggota Volksraad lainnya yaitu Kasimo (Katolik Indonesia),

Ratulangie (Sarekat Minahasa), Datuk Tumenggung (Sarekat Minangkabau), Alatas (Masyarakat Arab) dan Ko Kwat Tiong (Partai Tionghoa Indonesia) mengajukan petisi supaya diadakan suatu sidang permusyawaratan dari wakil-wakil Nederland dan India-Nederland atas dasar kesamaan kedudukan untuk menyusun rencana pemberian hak berdiri sendiri (otonomi) dalam batas pasal 1 Konstitusi kepada India-Nederland dalam waktu 10 tahun, atau di dalam waktu yang dianggap sesuai oleh sidang. Namun petisi tersebut ditolak. Ini menjadi bukti bahwa perjuangan kaum pergerakan yang dilakukan melalui Volksraad tidak membawa hasil. Oleh karena itu jalur yang ditempuh dengan membentuk GAPI.

Hasrat untuk menuju persatuan, tidak mundur. Setelah kemunduruan PPPKI maka pada tahun 1939 berdirilah GAPI (Gabungan Politik Indonesia). Anggota GAPI terdiri dari Parindra (sebagai peopornya), Gerindo, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, PII (pecahan PSII), Perhimpunan Politik Katolik Indonesia. Untuk mengurus pekerjaan sehari-hari dibentuk sekretarian bersama yang diketuai oleh Abikusno (PSII) dan dibantu oleh Mohammad Hoesni Thamrin (Parindra) dan Amir Syarifudin (Gerindo).

GAPI memiliki tujuan antara lain :

1. Pelaksanaan *The Right of Self-determination*.
2. Persatuan kebangsaan atas dasar demokrasi politik, demokrasi sosial dan ekonomi.
3. Pembentukan parlemen yang dipilih secara bebas dan umum, dan yang mewakili dan bertanggung jawab kepada rakyat, parlemen terdiri dari atas dua kamar : Dewan Rakyat diubah menjadi Senat, dan Kamar Rakyat (*Volkskamer*) sebagai house of representatives harus dibentuk.
4. Membentuk solidaritas Indonesia Belanda untuk menghadapi kekuatan Fascis.
5. Pengangkatan lebih banyak orang Indonesia dalam berbagai jabatan negara, termasuk Wakil gubernur Jenderal, wakil-wakil direktur pada departemen-departemen, anggota Dewan India.

Karena itu (tuntutan 3 tersebut) GAPI berslogan "Indonesia Berparlemen", sedangkan GAPI dikenal juga sebagai menuntut "Indonesianisasi" jabatan-jabatan (karena tuntutan 5 tersebut di atas). Tuntutan tersebut belum pernah berhasil hingga Jepang masuk menduduki Indonesia tahun 1942.

12. Perang Dunia II (1939-1945)

Pada tanggal 1 September 1939, Perang Dunia II meletus ditandai dengan adanya penyerangan Jerman terhadap Polandia yang kedaulatannya dijamin oleh Inggris dan Perancis. Waktu itu negara-negara Eropa Barat terancam, begitu pula Belanda yang berada di Indonesia. Sementara itu situasi dunia menjadi bertambah genting. Gerakan tentara Jerman begitu cepat dan dahsyat, sehingga pada bulan Mei 1940, negara Belanda, Belgia, dan Perancis telah diduduki tentara Jerman.

Kebutuhan akan bahan bakar minyak untuk persiapan Perang Pasifik, menyebabkan Jepang tertarik untuk menguasai Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang mulai membuka Perang Pasifik dengan mengadakan penyerangan terhadap Pearl Harbour yaitu pangkalan armada Amerika di Pasifik. Pada hal waktu itu sedang berlangsung perundingan Cordell Hull – Nomura (yang dibantu oleh Korusu) di Washington. Penyerbuan ini, bagi Jepang dimaksudkan untuk melumpuhkan kekuatan Amerika di Pasifik, sehingga penyerbuan Jepang ke negara-negara Asia Tenggara, wilayah yang dijajah Inggris, Belanda, Perancis dan Amerika Serikat sendiri (Philipina) terus ke Australia bisa berlangsung dengan cepat. Sehari kemudian yaitu tanggal 9 Desember 1941 Gubernur Jenderal Tjarda memaklumkan bahwa India – Belanda dalam keadaan perang melawan Jepang.

Penyerbuan daerah-daerah selatan dilakukan oleh baik angkatan darat (Rikugun) maupun angkatan laut (Kaigun) Jepang. Angkatan darat yang sudah menduduki Indo-Cina bertugas merebut Malaya, Sumatra, Luzon dan Burma. Angkatan laut merebut Pearl Harbour, Mindanau, Kalimantan, Sulawesi, Irian, dan pulau-pulau pasifik. Sesuai dengan tujuan penyerbuan, yaitu mencari dan menguasai sumber alam terutama minyak tanah, maka penyerbuan ke Indonesia dilakukan dengan menduduki daerah-daerah minyak di Kalimantan dan Sumatra terlebih dahulu.

Dari arah barat, kearah Kalimantan Barat, Jepang langsung mengirimkan tentara dari Indo-Cina yang berhasil menduduki tambang minyak Miri di Brunai tanggal 16 Desember 1941. Kearah Malaya dan Sumatra dapat dilakukan dengan baik, karena Inggris mengira kedatangan Jepang dari arah selatan (laut) namun ternyata Jepang datang dari utara sehingga pasukan Inggris dapat dibuat tak berdaya. Sebelum ke Singapura, pasukan Jepang dibagi menjadi dua yaitu

sebagian langsung ke Palembang (Januari 1942) untuk menyelamatkan sumber minyak tanah yang menurut rencana akan dibumihanguskan, sedang yang lainnya terus ke Singapura dan berhasil merebut daerah tersebut tanggal 15 Februari 1942.

Kemudian dari arah timur, setelah Pearl Harbour jatuh, Jepang mendirikan pangkalan operasi di Kepulauan Pulau, yang terletak di sebelah timur Mindanau. Selain dilancarkan serangan ke Philipina, dari Pulau dilancarkan serangan untuk menduduki Tarakan dan Balikpapan (Januari 1942). Setelah Philipina jatuh, Jepang melancarkan serangan ke Selatan dan menduduki Menado (Januari 1942), Ambon (akhir Januari 1942), Ujung Pandang (Makasar, Pebruari 1942), Kepulauan Nusa Tenggara (Pebruari 1942), juga Irian.

Melihat hal tersebut, Jawa berada dalam kepingan daerah yang telah diduduki Jepang. Jepang melancarkan serangan serentak dengan mengerahkan ketiga angkatan. Dalam sebuah pertempuran di laut Jawa pada bulan Pebruari 1942, Jepang berhasil menenggelamkan kapal Karel Dorman milik angkatan laut Belanda. Setelah itu dengan mudah tentara Jepang mendaratkan pasukannya di tiga tempat yaitu Banten, Indramayu dan Bojonegoro.

Pendaratan pasukan Jepang ke tempat-tempat tersebut tidak diduga sebelumnya, oleh karena itu Belanda tidak dapat mengadakan perlawanan. Seminggu kemudian, yaitu tanggal 9 Maret 1942 Jenderal Ter Poorten, Panglima Tentara Belanda di Indonesia menandatangani penyerahan tidak bersyarat (kapitulasi) di Kalijati (Subang) Jawa Barat kepada Imamura. Penandatanganan dilakukan oleh Ter Poorten dan bukan Tjarda (gubernur jenderal) karena Belanda mempunyai tujuan jika perang telah usai akan mempermudah pemulihan kembali kekuasaannya. Hal ini karena yang menyerah adalah bala tentara Belanda dan bukan pemerintah Belanda.

Memang ketika itu gubernur Tjarda di tawan Jepang, namun Belanda membentuk pemerintahan dalam pelarian (*exile government*) di Australia di bawah H.J. Van Mook. Jadi meskipun tentara Belanda menyerah, namun pemerintahan Belanda tetap berjalan dalam bentuk *exile government* dalam bentuk NICA (*netherlands Indies Cibil Administration*). Karena Indonesia diduduki Jepang maka terpaksa berkedudukan di Brisbane, Australia.

13. Penindasan Jepang 1942-1945

Masalah yang dihadapi Jepang sehingga menjadi negara

Imperialis, salah satunya adalah masalah kepadatan penduduk, disamping adanya pembatasan imigrasi ke Australia dan Amerika. Sesudah Perang Dunia Pertama usai, minat Jepang terhadap Indonesia mulai bangkit. Hal itu dilatarbelakangi oleh berbagai pemahaman, antara lain : adanya ajaran Shinto tentang Hakko-Ichiu (ajaran kesatuan keluarga manusia). Jepang sebagai bangsa yang maju berkewajiban menyatukan bangsa-bangsa di dunia dan memajukannya. Khusus untuk Indonesia, pemahaman Jepang diperkuat oleh pendapat antropolog tahun 1930 bahwa antara orang Jepang dan Indonesia adalah serumpun, oleh karena itu masuk akal jika Jepang mengaku sebagai saudara tua. Alasan lain yang lebih riil yaitu masalah ekonomis. Jepang membutuhkan sumber alam yang dimiliki oleh Indonesia yaitu minyak tanah, timah, karet, tungsten (pelapis baja), dan kina.

Jauh sebelum Jepang masuk ke Indonesia telah menyusun strategi untuk menarik perhatian dunia, khususnya rakyat Indonesia. Pada tahun 1938 PM Jepang, Pangeran Konoye, memaklumkan berdirinya Dewan Asia Raya yang akan menjalankan Orde Baru dengan doktrinnya : Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya (ATR). Ajaran baru ini dipropagandakan secara giat. Pers pribumi, bahkan pers Belanda, yang mau mempropagandakannya diberi subsidi. Jadi dalam propaganda itu diterangkan bahwa negara-negara yang dimasukkan dalam lingkungan ATR adalah negara-negara yang terbelakang yang akan mendapat bantuan dari Jepang. Cara lain juga dilakukan oleh Jepang yaitu melalui jalur pendidikan. Pelajar Indonesia diundang untuk belajar ke Jepang dengan mendapat beasiswa. Untuk itu mereka harus diuji kesetiiaannya kepada rencana ATR. Jepang juga berusaha menarik simpati umat Islam Indonesia. Orang Islam Jepang dikirim ke Mekkah menunaikan tugas haji. Di Tokyo didirikan mesjid. Kemudian sautu konferensi agama Islam diselenggarakan di Tokyo.

Politik itu ternyata membawa hasil. Ketika Jepang tiba di Indonesia rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan. Sehingga dengan mudah Jepang menundukkan Belanda dan terjadilah Kapitulasi Kalijati tanggal 9 Maret 1942. Sejak itulah Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang.

Dibawah pendudukan Jepang, Indonesia dibagi menjadi 3 koloni, berdasarkan pertimbangan strategi militer dan politis. Strategi militer berarti disesuaikan dengan organisasi pertahanan Jepang, politis berarti disesuaikan

dengan penilaian Jepang terhadap perkembangan sosial politik di Indonesia. Bagi Jepang, Jawa dinilai lebih maju dibanding dengan daerah lain, tetapi hanya kaya akan tenaga. Sementara daerah lain kaya sumber alam dan jarang penduduknya. Karena itulah wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga koloni terpisah :

- e. Jawa-Madura dengan pusatnya di Jakarta dibawah tentara XVI.
- f. Sumatra dengan pusatnya di Bukittinggi dibawah tentara XXV.
- g. Pulau-pulau lain dengan pusat di Ujung Pandang (Makasar), dibawah angkatan laut, yang mempunyai penghubung di Jakarta, yaitu Laksamana Maeda.

Untuk memerintah Indonesia Jepang mengalami kesukaran, antara lain : 1) Indonesia terdiri dari wilayah yang luas berbentuk pulau-pulau yang banyak jumlahnya, masyarakatnya serbaneka dan majemuk dengan berbagai macam suku bangsa dan adat-istiadat, 2) Jepang kurang paham tentang sifat-sifat dan karakteristik bangsa Indonesia yang berbeda-beda tersebut. 3) Jepang kekurangan tenaga untuk mengisi jabatan-jabatan yang telah ditinggalkan oleh Belanda. Oleh karena itulah maka Jepang membiarkan dan mempertahankan organisasi pemerintah sebagaimana adanya tetapi pimpinannya harus orang Jepang. Jenderal Imamura yang mengepalai Tentara XVI dan menjadi penguasa tertinggi (Gunsireikan, kemudian Seiko sikikan) dalam pemerintahan Bala Tentara Jepang di Jawa menjalankan politik lunak. Namun ketika berkaitan dengan masalah politik Imamura mulai bertindak keras seperti ia mengeluarkan maklumat tanggal 20 Maret 1942 yang melarang segala macam pembicaraan, pergerakan dan anjuran atau propaganda tantang peraturan dan susunan negara dan melarang pengibaran Sang Merah Putih dan penyanyian lagu Indonesia Raya.

Jauh sebelum kedatangan Jepang ke Indonesia, Radio Tokyo telah menerangkan maksud kedatangan tentara Jepang. Mereka datang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa barat. Untuk itu mereka mengharapkan adanya bantuan dari rakyat. Mereka diharuskan memberikan bantuan berupa hasil-hasil alam maupun tenaga. Setelah Jepang berhasil mengusir bangsa Barat (Belanda), mereka akan mengusahakan kemajuan Bangsa Indonesia (Asia). Tetapi kenyataannya apa yang dijanjikan oleh Jepang hanya kebohongan. Harapan yang dijanjikan oleh bala tentara Jepang sirna sudah. Dari

semula sudah terlihat bahwa Jepang tidak akan memenuhi janjinya. Usaha-usaha untuk memenuhi janji itu mulai muncul setelah Jepang mulai terjepit oleh kekuatan Sekutu. Bahkan kebijakan Jepang merendahkan martabat bangsa Indonesia. Karena sulitnya penghidupan, rakyat terpaksa makan ubi-ubian yang gizinya sangat kurang, bekicot yang dulunya dianggap jijik terpaksa dimakan untuk bertahan hidup, goni terpaksa dipakai sebagai bahan pakaian. Kesengsaraan rakyat masih ditambah dengan merajalelanya penyakit yang muncul seperti beri-beri, penyakit kulit, wabah pes, kutu kepala dan kepinding.

Perampasan kekayaan dalam berbagai bentuk rajabrana dan raja kaya, rakyat dikenakan tanam paksa untuk kebutuhan perang : kapas, randu, rami, jarak dan sebagainya. Mereka juga dikenakan kerja paksa (romusha atau narakarya) untuk membangun bangunan-bangunan militer.

Waktu itu Jepang merasa terlalu optimis sehingga tidak memandang perlu mengikutsertakan bangsa Indonesia, buktinya Jepang hanya mendirikan Gerakan Tiga A (Nipon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1942 dibawah pimpinan Mr. Syamsuddin. Untuk menggerakkan pemuda dibentuk Gerakan Pemuda ATR (Asia Timur Raya) yang kemudian berubah menjadi Seinendan dibawah pimpinan Sukarjo Wiryopranoto.

Usaha membentuk kerjasama dengan rakyat Indonesia semakin tampak ketika Jepang terpukul dalam pertempuran di Laut Karang pada tanggal 7 Mei 1942. Berbagai gerakan massa yang dibentuk oleh Jepang antara lain : *Seinendan* (barisan pemuda), *Seinentai* (barisan murid-murid sekolah dasar), *Gakukotai* (barisan murid-murid sekolah lanjutan), *Fujin-Seinentai* (barisan gadis-gadis), *Fujinkai* (barisan wanita), *Keibodan* (barisan cadangan polisi), *Heiho* (barisan cadangan prajurit/militer), *Romusha* (barisan pekerja paksa).

Karena dipandang tidak berguna maka Gerakan Tiga A dibubarkan. Sebagai gantinya maka dibentuk PUTERA yang didirikan pada bulan Maret 1943. Putera dipimpin oleh empat serangkai yaitu Sukarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan K.H. Manshur. Putera dalam menjalankan tugasnya selalu berhubungan dengan massa rakyat melalui pidato-pidatonya. Dalam berbagai kesempatan, hal ini digunakan oleh para pemimpin Putera untuk menanamkan nasionalisme. Sebagai sasarannya adalah PETA (Pembela Tanah Air / Boo-ei-

Giyugun) sebuah organisasi militer bersenjata yang dibentuk pada bulan Oktober 1943. Organisasi ini diusulkan pendiriannya oleh Gatot Mangkuprojo. Karena kedudukan Jepang yang makin terdesak dengan jatuhnya Guadalcanal pada bulan Agustus 1943, maka Jepang menyetujui pembentukan PETA. Peta berada dibawah pengaruh Putera.

Keberadaan Putera justru lebih menguntungkan pihak Indonesia maka, Putera dibubarkan pada bulan Maret 1944. Sebagai gantinya didirikanlah Gerakan Kebaktian Jawa (Jawa Hokokai) yang langsung dibawah pengawasan Jepang, meskipun para pemimpinnya tetap sama.

14. Jepang menyerah kepada Sekutu

Sewaktu Jepang melibatkan diri dalam perang dunia kedua, Jepang salah mengira tentang Amerika Serikat. Diluar perhitungan Jepang, setelah dihancurkannya Pearl Harbour tanggal 8 Desember 1941, Amerika bangkit kembali dengan begitu cepat. Dalam pertempuran untuk menguasai Australia, Jepang terpukul di Pulau Karang pada tanggal 7 Mei 1942. Peristiwa itu ternyata menjadi "turning point" laju ekspansi tentara Jepang. Jenderal Mac Arthur yang semula terpukul di Philipina kembali melancarkan serangan balasan. Satu persatu pulau-pulau antara Australia dan Jepang direbut kembali. Bulan April 1944 Sekutu telah mendarat di Irian Barat. Saat itulah kedudukan Jepang di Indonesia mulai terancam. Keadaan semakin genting ketika Pulau Saipan gugusan kepulauan Mariana jatuh ke tangan Sekutu pada bulan Juli 1944. Keberadaan pulau tersebut sangat penting karena dari Saipan ke Tokyo dapat ditempuh dengan pesawat B 29 USA. Ini berarti ancaman untuk Tokyo dari udara. Karena itulah kabinet Tojo jatuh dan digantikan oleh Kabinet Koiso. Untuk memikat hati bangsa Indonesia Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 mengucapkan pidato di muka parlemen Jepang yang antara lain menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari yang terkenal dengan "Koiso Declaration".

Sepak terjang bala tentara Jepang benar-benar berhenti setelah Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki tiga hari kemudian. Akibat dari pengeboman itu sungguh dahsyat. Korban jatuh ribuan jumlahnya. Melihat hal itu maka kedudukan Jepang sudah diujung tanduk. Ditambah lagi bahwa pada tanggal 9 Agustus 1945, Rusia menyatakan perang melawan Jepang. Melihat keadaan tersebut maka pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang

menyatakan menyerah kepada Sekutu. Induk akte penyerahan ditandatangani di atas kapal penempur Amerika Missouri, diikuti dengan penyerahan ditempat lainnya.

15. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Dengan adanya “Koiso Declaration” yang menyatakan akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia di kelak kemudian hari, maka pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan rencana pembentukan BPUPKI (*Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai* / Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pada tanggal 29 April 1945 susunan BPUPKI diumumkan. Anggotanya terdiri orang Indonesia dan orang Jepang, sedangkan ketuanya adalah Dr. Rajiman Wedyodiningrat. BPUPKI mengadakan sidang hanya dua kali. Sidang pertama yaitu tanggal 29 Mei s.d. 1 Juni 1945. Sidang tersebut membahas persoalan dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang itulah Ir. Soekarno menyampaikan gagasannya tentang Pancasila. Kemudian sidang yang kedua tanggal 10-17 Juli 1945 untuk membicarakan batang tubuh UUD 1945 yang menyangkut berbagai hal antara lain wilayah negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, bendera nasional dan bahasa nasional. Berdasarkan sidang BPUPKI wilayah Indonesia kelak adalah Nederlandsch Indie ditambah jajahan Inggris yaitu Malaka dan Kalimantan Utara serta Timor Portugis. Bentuk negara disetujui kesatuan (Unitaris). Bentuk pemerintahan Republik, bendera nasional adalah Merah Putih dan bahasa nasional bahasa Indonesia.

Sementara itu kedudukan Jepang semakin terjepit. Komando Tentara Jepang di Wilayah Selatan mengadakan rapat pada akhir bulan Juli 1945 di Singapura. Dalam rapat disetujui bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 7 September 1945.

Perubahan begitu cepat terjadi. Tanggal 7 Agustus 1945 Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan PPKI (*Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ Dokuritzu Zyunbi Iinkai*) yang bertugas melanjutkan tugas BPUPKI. PPKI beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Anggota PPKI secara simbolis dilantik oleh Jenderal Terauchi dengan mendatangkan Sukarno-Hatta ke Saigon pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada tanggal 11 Agustus 1945, Terauchi telah menentukan tanggal 24 Agustus 1945 sebagai hari pemberian kemerdekaan. Setelah dilantik, maka Ir. Soekarno-Drs. Mohammad Hatta pulang ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945.

Setibanya di Jakarta, Sutan Syahrir yang telah mengikuti perkembangan politik melalui radio gelapnya menyatakan bahwa Jepang telah meminta damai dengan Sekutu. Syahrir mendesak agar pernyataan kemerdekaan disampaikan keesokan harinya yaitu tanggal 15 Agustus 1945. Namun Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta yang dituduh sebagai seorang kolaborasi Jepang oleh golongan Syahrir dan Golongan Pemuda, tidak mau ambil resiko. Hal itu karena waktu itu Jepang masih berkekuatan penuh. Sementara itu tanggal 15 Agustus 1945, Syahrir telah mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kembali ia mendesak Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, kembali pula Ir. Soekarno menolak, karena kabar itu hanya dari radio gelap bukan kabar resmi dari pemerintah Jepang.

Sementara itu pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945 terjadi dua hal penting, yaitu persiapan rapat PPKI dan rapat Gerakan Pemuda. Setelah diterima kabar Jepang menyerah, maka PPKI akan mengadakan rapat tanggal 16 Agustus 1945 pagi. Rapat akan diadakan di Hotel Des Indes. Bersamaan dengan itu, Gerakan Pemuda mengadakan rapat dibawah pimpinan Sukarni dan Chaerul Saleh. Rapat memutuskan untuk mengamankan Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta dari Jakarta ke Rengasdengklok. Alasan pemuda mengamankan Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta dengan pertimbangan keamanan karena pemuda akan melakukan perebutan kekuasaan. Namun bagi Hatta, ia berpendapat bahwa para pemuda khawatir jika Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta diperalat oleh Jepang sehingga cita-cita mereka kandas.

Mengenai pemilihan tempat pengamanan Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta di Rengasdengklok, bukan di tempat lain, karena di sana terdapat kesatuan PETA bersenjata yang cukup besar serta masyarakat di situ didominasi orang yang anti Jepang dan pro perebutan kekuasaan. Hingga sore hari perebutan kekuasaan yang dicetuskan oleh para pemuda tidak terjadi. Sementara itu Laksamana Maeda kebingungan mencari Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta untuk menyampaikan resmi penyerahan Jepang.

Dengan bantuan Wikana, Laksamana Maeda mengetahui kalau Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta berada di Rengasdengklok. Lalu Maeda mengutus Soebarjo untuk menyampaikan berita resmi tersebut dan mengambil Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta kembali ke Jakarta.

Soebarjo tiba di Rengasdengklok petang hari. Kabar resmi berhasil diterima, kemudian mereka berangkat ke Jakarta dan tiba pukul 11.00 malam. Kemudian mereka segera menggelar rapat dengan mengundang para anggota PPKI. Rapat akan diadakan di Hotel Des Indes. Tetapi karena ada larangan mengadakan rapat setelah jam 10 malam, maka Maeda menawarkan agar rapat diadakan dirumahnya di Miyokodori (Nassau-Boulevard), kini Jl. Imam Bonjol No 1 (sekarang Museum Perumusan Naskah Proklamasi).

Rapat yang semula hanya merupakan rapat PPKI kini diikuti pula oleh anggota Cou Sangi In dan pemimpin-pemimpin pemuda. Rapat berlangsung hingga pukul 6 pagi tanggal 17 Agustus 1945. Hasilnya adalah rumusan teks proklamasi yang diumumkan pada hari itu juga jam 10 pagi.

16. Gema Proklamasi dalam Peristiwa IKADA

Walaupun Republik Indonesia telah terbentuk, hingga pertengahan September 1945 belum ada tanda-tanda Kabinet bekerja dan berusaha menyingkirkan halangan-halangan dari Tentara Jepang. Melihat keadaan yang tidak menentu dan melihat para pemimpin dari angkatan "tua" selalu ragu-ragu menghadapi Jepang, para pemuda lalu hilang kesabarannya. Maka direncanakanlah mengadakan Rapat Raksasa di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) di Medan Merdeka sekarang. Seluruh rakyat Indonesia di ibukota dan sekitarnya dianjurkan hadir.

Jepang yang mengetahuai adanya rencana itu mencoba mencegah terlaksananya rapat tersebut. Jepang rupanya tak ingin menanggung resiko disalahkan Sekutu yang tak lama lagi akan tiba di Jakarta. Jepang kemudian mengambil tindakan. Kepada masyarakat Jakarta diserukan untuk tidak menghadiri rapat raksasa di lapangan Ikada. Kabinet ditekan dan diancam, bahwa mereka akan ditawan, kalau sampai terjadi rapat di Ikada.

Meski demikian, pada tanggal 19 September 1945 rakyat tetap berbondong-bondong menuju lapangan Ikada. Ternyata bukan dari Jakarta saja mereka datang. Juga dari Bogor, Tangerang, Bekasi dan tempat-tempat lain. Lebih dari setengah juta manusia memadati lapangan IKADA saat itu. Mereka berjejal-jejal menunggu pemimpin mereka yaitu Ir. Soekarno.

Ternyata kabinet tak mau ditekan oleh Jepang. Bung Karno dan menteri-menteri lainnya datang ke lapangan Ikada. Rakyat Indonesia tidak lagi mempedulikan ancaman tentara

Jepang. Meski senjata berat Jepang mengepung lapangan, namun rapat di Ikada tetap berjalan terus. Hanya 5 menit Presiden Soekarno berpidato, dan menganjurkan agar rakyat tenang, siap sedia menerima perintah mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan. Sesudah itu rapat dibubarkan dan bentrokan dengan tentara Jepang dapat dihindarkan.

17. Konsolidasi Kekuasaan

Proklamasi Kemerdekaan yang telah dikumandangkan disambut dengan gerakan pengambilalihan kekuasaan dan senjata Tentara Jepang oleh rakyat Indonesia yang dipelopori pemuda. Hal ini dilakukan dengan cara damai maupun secara kekerasan.

Menghadapi situasi pada waktu itu, yaitu berhubungan dengan konsolidasi RI, masalah pelucutan tentara Jepang serta rencana kedatangan Sekutu, maka Komite Aksi menyusun manifesto yang berisi :

- a. Negara RI sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, karenanya rakyat sekarang sudah merdeka, bebas dari pemerintah asing;
- b. Seluruh kekuasaan harus ditempatkan dalam tangan pemerintah/negara rakyat Indonesia sendiri;
- c. Jepang telah dikalahkan, dan karena itu tidak berhak lagi menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia;
- d. Rakyat Indonesia harus merebut senjata dari tangan Jepang;
- e. Semua perusahaan (kantor-kantor, pabrik-pabrik, pertambangan dan perkebunan) harus diambil alih dari Jepang oleh rakyat Indonesia.

Dalam bulan September 1945 Komite Aksi telah melakukan pengambilalihan berbagai perusahaan kereta api dan trem. Ini diikuti oleh pengambilalihan perusahaan lain. Semua berjalan secara tertib tanpa melibatkan pimpinan tertinggi pemerintah Jepang. Sementara itu di Surabaya pada tanggal 11 September 1945 terjadi demonstrasi mendukung proklamasi kemerdekaan RI.

Sejalan dengan makin menggelornya api kemerdekaan pada sebagian besar pemuda Indonesia, pada tanggal 20 September 1945 di Jakarta dilangsungkan konferensi antara pemuda-pemuda, pegawai, polisi, BKR dan Barisan Pelopor dari seluruh Jawa. Konferensi tersebut antara lain menegaskan bahwa pemasangan bendera merah putih makin diperhebat. Di Yogyakarta para pemuda pelajar tidak mau tinggal diam.

Hebatnya gelora api revolusi yang mengalir dalam diri pemuda waktu itu sulit dibendung. Sangkur dan mitrliyur Jepang tidak mampu meredam bara api kemerdekaan pada diri pemuda Indonesia yang telah berkobar-kobar. Gedung-gedung baik pemerintah maupun swasta, kendaraan bermotor, pabrik-pabrik, toko-toko serta bangunan lain menjadi sasaran gerakan pengibaran bendera ini.

Berkaitan dengan gerakan tersebut di Yogyakarta terjadi peristiwa heroik yang luar biasa. Di mana massa rakyat yang didukung oleh ribuan pemuda membanjiri gedung Cokan Kantai (Gedung Agung) untuk mengibarkan bendera Merah Putih walaupun harus menghadapi sangkur dan mitraliur Jepang. Tetapi akhirnya insiden ini berjalan tanpa pertumpahan darah dan Merah Putih berhasil berkibar di atas gedung tersebut menggantikan bendera Hinomaru Jepang. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 21 September 1945.

18. Insiden Bendera Tunjungan

Hari-hari setelah penyerahan, Tentara Jepang dalam keadaan lesu. Penjagaan interniran kurang diperhatikan, sehingga tanpa menanti pelepasan mereka oleh Sekutu, banyak interniran yang telah berhasil kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka menemukan rumahnya masih utuh, tetapi harta bendanya telah habis, mungkin dirampok Jepang, dibeli orang Cina atau diambil oleh orang-orang Indonesia sendiri. Meski demikian tidak pernah terjadi perkosaan atas diri orang-orang bekas interniran, bahkan kerap kali orang-orang Indonesia menolong mereka. Tetapi perkembangan selanjutnya diikuti oleh ketegangan, karena orang-orang bekas interniran itu menuntut kembali barang-barang mereka. Sebaliknya kedatangan Sekutu menimbulkan rasa takut di kalangan rakyat Indonesia. Mereka memandang orang Belanda tidak lagi sebagai bekas interniran, melainkan sebagai alat untuk menegakkan kembali penjajahan Belanda. Tetapi permusuhan dimulai tidak karena soal kekayaan, melainkan oleh persoalan simbol-simbol kekuasaan, terutama soal pengibaran bendera.

Permusuhan terbuka meledak pertama kali di Surabaya pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato (Hotel Oranye dulu, atau Simpang sekarang) di Tunjungan. Sejumlah bekas interniran mengibarkan Triwarna di muka hotel tersebut. Pemuda-pemuda tidak dapat mentolerir pengibaran bendera itu. Tanpa memperdulikan penjagaan Kempetai, seorang pemuda dengan tangkas memanjat tiang bendera, menyobek bagian bendera itu yang berwarna biru, sehingga tinggalah

bendera itu berwarna merah putih. Kemudian peristiwa ini diikuti oleh perkelahian massal antara orang-orang (pemuda) Belanda dan Indo melawan pemuda-pemuda Indonesia yang menjadi biang keladi perkelahian itu, Kapten Poegman, tewas. Pada tanggal 20 September 1945, sesudah rapat umum di Tambaksari, para pemuda bersama rakyat mengadakan pawai kemerdekaan berkeliling. Tanpa memperdulikan larangan Jepang pemuda-pemuda itu membawa bambu runcing. Mulai saat itu bambu runcing dibawa oleh setiap laki-laki yang masih kuat.

19. Pembentukan TKR

Pertama dibentuk, suatu badan yang bertugas menjaga keamanan negara adalah BKR (Badan Keamanan Rakyat) dibawah pimpinan Kasman Singadimeja, pada tanggal 22 Agustus 1945. BKR tersebut bukanlah tentara. Hal itu untuk memberi kesan bahwa bangsa Indonesia tidak meninggikan permusuhan dengan bangsa lain yang waktu itu masih berada di Indonesia (pendudukan Jepang). BKR beranggotakan personil-personil bekas PETA dan HEIHO. Senjata yang disandang anggota BKR hanya sedikit, sebagian besar bersenjata tajam. Persenjataan menjadi bertambah banyak jumlahnya karena terjadinya aksi pelucutan senjata Jepang.

Dengan datangnya tentara Sekutu pada bulan September 1945, eksistensi BKR sulit dipertahankan. Karena kedudukannya yang otonom di bawah KNI (Komite Nasional Indonesia) maka pemerintah sulit mengontrol kekuatannya. Disamping itu ketika terjadi pelucutan senjata Jepang banyak senjata yang jatuh ke tangan pemuda yang bukan BKR, sehingga sangat menyulitkan pengawasan pemerintah. Oleh karena itu maka pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan Maklumat yang berbunyi, "Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakanlah satu Tentara Keamanan Rakyat". Maklumat tersebut ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Sekarang jelas bahwa lembaga ini menjadi tentara yang dibawahkan oleh pemerintah pusat. BKR yang didalamnya terdapat BKR Darat, BKR Laut, BKR Udara kemudian terintegrasi menjadi TKR Darat, TKR Laut dan TKR Udara.

Dalam sidangnya tanggal 15 Oktober 1945 di Jakarta kabinet memutuskan bahwa markas besar umum (MBU) TKR berkedudukan di Yogyakarta. Dan sekaligus menunjuk bekas Mayor KNIL Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum Angkatan Perang yang bertugas menyusun TKR dan

perkembangannya. Semula MBU TKR bertempat di Grand Hotel (sekarang Hotel Garuda), kemudian dipindahkan ke gedung yang terletak di Jl. Jenderal Soedirman Yogyakarta (sekarang Museum Pusat TNIAD Dharma Wiratama).

Sedang Menteri Keamanan Rakyat waktu itu ditunjuk Moh. Sulyoadikusumo. Dan pemimpin tertinggi TKR ditentukan tanggal 20 Oktober 1945 yaitu Soepriyadi seorang tokoh pemberontakan PETA di Blitar Januari 1945. Karena sejak tanggal tersebut sampai sekarang Soepriyadi belum diketahui jejaknya, MBU TKR berada di tangan Letjen Oerip Soemoharjo.

Pada tanggal 30 Oktober 1945 MBU TKR Yogyakarta juga mengeluarkan pengumuman tentang pengangkatan Anggota Agung Markas Tertinggi bagian MBU TKR yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sri Susuhunan Paku Buwono XII, Sri Mangkunegara dan Sri Paku Alam VIII. Selain itu diangkat pula sebagai opsir penghubung yaitu Gusti Pangeran Haryo (GPH) Sulyohamijoyo untuk divisi istimewa Surakarta dan Bendera Pangeran Haryo (BPH) Bintoro untuk divisi istimewa Yogyakarta.

Tanggal 12 November 1945 diadakan konferensi TKR yang dihadiri oleh para panglima dan komandan divisi se Jawa dan Sumatra di MBU TKR. Hasil konferensi antara lain memutuskan mengangkat Pangsar Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar.

Untuk selanjutnya TKR dirubah menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) pada tanggal 25 Januari 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 4/SD. Dan kemudian pada tanggal 3 Juni 1947 berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 24 tahun 1947 berubah menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia). Segenap anggota angkatan perang yang ada dan segenap anggota laskar yang bersenjata dimasukkan secara serentak ke dalam TNI.

20. Kongres Pemuda Indonesia 1945 Di Yogyakarta

Dalam rangka berpartisipasi dalam pembelaan negara banyak diantara para pemuda menggabungkan diri dalam BKR. Banyak juga dengan maksud yang sama masuk dalam badan-badan kelaskaran. Pada tanggal 25 Oktober 1945 di Yogyakarta diadakan rapat yang dihadiri oleh para pemuda. Rapat tersebut berhasil membentuk suatu badan yang bernama Gerakan Pemuda Republik Indonesia (GERPRI). Untuk selanjutnya GERPRI yang telah terbentuk tersebut mengadakan rapat yang bertempat di Balai Mataram

Yogyakarta (sekarang Senisono) untuk membahas pelaksanaan Kongres Pemuda Seluruh Indonesia. Dalam rapat tersebut berhasil dibentuk panitia kehormatan yang terdiri dari Sri Sultan HB IX, Sri Paku Alam VII dan Mohammad Saleh. Sebagai ketua Bendoro Raden Mas (BRM) Hertog dan wakilnya S. Hudoro.

Pada tanggal 31 Oktober 1945 diadakanlah kongres yang dihadiri oleh para utusan dari Markas Besar Barisan Pelopor Jakarta, API (Angkatan Pemuda Indonesia) Jakarta, PRI (Pemuda Republik Indonesia) Bandung dan Surabaya, IPI (Ikatan Pelajar Indonesia) Jakarta, GERPRI Yogyakarta dan Staf Wartawan Kementerian Penerangan. Kongres ini dimaksudkan untuk memantapkan kongres yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1945.

Pada tanggal 10-11 Nopember 1945, badan-badan perjuangan yang dibentuk di luar BKR mengadakan Kongres Pemuda Indonesia di Balai Mataram Yogyakarta. Pembukaan kongres dilakukan di Alun-alun Utara Yogyakarta pada tanggal 10 Nopember 1945. Kongres dipimpin oleh Chaerul Saleh dan dihadiri oleh 332 orang utusan dari 30 organisasi pemuda di Indonesia. Dalam kongres tersebut berkenan memberikan amanat antara lain Presiden Soekarno, Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII. Hadir dalam kongres Drs. Mohammad Hatta, menteri negara dan wartawan asing. Ketika kongres berlangsung peserta dari Surabaya meninggalkan kongres karena bertepatan dengan Pertempuran Surabaya melawan Sekutu. Hasil dari kongres tersebut adalah diadakan penggabungan semua gerakan pemuda dalam satu badan yang dinamakan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI), yang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Republik Indonesia dibantu Dewan Pekerja Perjuangan dan Dewan Pekerja Pembangunan.

Semula kongres tersebut bertujuan untuk mempersatukan lebih dari 20 perkumpulan pemuda dalam satu wadah yang bercorak nasional, namun tidak berhasil. Peleburan ke dalam satu perkumpulan tersebut hanya disetujui oleh 7 organisasi yang membentuk Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) pada kongres tersebut.

Sebagai realisasi dari hasil kongres tersebut maka pada tanggal 24-25 November 1945 di Yogyakarta dibentuk Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Indonesia Yogyakarta yang diketuai BRM. Hertog dan wakilnya Darwis Tamim.

21. Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan perlu dibentuk lembaga pemerintahan yang layak. Untuk itu perlu dibentuk UUD sebagai pedoman dasar melaksanakan penyelenggaraan negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, UUD yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan disertai penjelasan telah terbentuk. Hari itu juga dipilih presiden dan wakil presiden. Atas usul Otto Iskandar Dinata secara aklamasi PPKI menyetujui pengangkatan Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang lagi. Kali ini memutuskan pembagian wilayah RI menjadi propinsi di seluruh bekas koloni India-Belanda. Jadi tidak termasuk Malaka, Kalimantan Utara, Timor Portugis (seperti yang diputuskan BPUPKI). Ini dengan latar belakang kemudahan dalam memperoleh dukungan internasional dan supaya tidak dicap sebagai penjajah.

Mengenai masalah susunan kementerian diserahkan kepada sebuah panitia kecil yang terdiri dari Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo dan Kasman Singodimejo. Jumlah kementerian yang berhasil dibentuk berjumlah 12 kementerian. Karena ada larangan Jepang untuk mengadakan perubahan status, maka kementerian itu baru dilantik tanggal 31 Agustus 1945.

Selanjutnya tanggal 22 Agustus 1945 dipersiapkan pembentukan KNI (Komite Nasional Indonesia). Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta kemudian merekrut 135 orang untuk duduk dalam KNI. Anggota KNI ini kemudian dilantik tanggal 29 Agustus 1945. Sebagai ketua KNIP adalah Mr. Kasman Singodimejo.

Anggota KNI setelah dilantik, pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1945 mengadakan sidang pleno yang pertama. Sidang tersebut bertempat di Balai Muslimin Jakarta. Dalam sidang itulah kemudian muncul Maklumat Negara Republik Indonesia No. X berisi antara lain : bahwa sebelum MPR dan DPR terbentuk maka KNI disertai tugas kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Serta pekerjaan KNIP sehari-hari berhubungan dengan pentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada KNP.

Berdasarkan maklumat tersebut maka sejak tanggal 16 Oktober 1945 KNIP merupakan sebuah parlemen sementara.

Namun karena keadaan genting maka menyerahkan pekerjaannya kepada sebuah Dewan Pekerja yang diketuai oleh Sutan Sjahrir.

22. Perpindahan Ibukota RI ke Yogyakarta

Tanggal 29 September 1945 pasukan Sekutu yang tergabung dalam AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies) dipimpin Letjen Phillip Christison mendarat di Jakarta. Mereka bertugas melucuti dan mengembalikan tentara Jepang ke daerah asalnya, mengevakuasi APWI (*Allied Prisoner War and Interneer*) yaitu tawanan Jepang dan Belanda, mengambil alih daerah pendudukan Jepang, dan menjaga keamanan dan ketertiban sehingga pemerintahan sipil berfungsi kembali. Sebelumnya, tanggal 20 Oktober 1945 juga didaratkan tentara Sekutu di Semarang dibawah pimpinan Jenderal Bethel yang kemudian menuju Ambarawa dan tanggal 26 Oktober 1945 sampai di Semarang. Semula sambutan rakyat sungguh baik karena pasukan ini disangka hanya akan mengurus tawanan perang dan Jepang.

Namun kemudian konflik terjadi karena tentara Sekutu yang didalamnya terdapat NICA (Netherlands Indie Civil Administration) Belanda melepaskan secara sepihak tawanan Belanda. Ditambah dengan adanya provokasi yang dilakukan Tentara NICA Belanda semakin merajalela. Penculikan, pembunuhan dan penangkapan para pemuda pejuang makin sering terjadi di kota-kota besar. Sementara itu keadaan kota Jakarta makin tidak aman. Pembunuhan dan penculikan oleh tentara NICA sering terjadi tiap hari. Adanya usaha pembunuhan terhadap Perdana Menteri Sutan Sjahrir tanggal 26 Desember 1945, juga terhadap Amir Sjarifudin tanggal 28 Desember 1945 dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa keadaan di Jakarta kurang menjamin keselamatan para pemimpin negara. Ditambah lagi dengan adanya pendaratan pasukan marinir Belanda yang mendarat di Tanjung Priuk tanggal 30 Desember 1945. Oleh karena itu dalam sidangnya tanggal 3 Januari 1946, kabinet memutuskan memindahkan untuk sementara ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta. Pemilihan Yogyakarta sebagai ibukota RI didasari dengan berbagai pertimbangan antara lain :

- a. Sikap tegas Sri Sultan HB IX sebagai orang nomor satu di Yogyakarta dalam mendukung berdirinya negara Republik Indonesia.
- b. Ketika itu, di Yogyakarta Jiwa kemerdekaan rakyat sedang mencapai titik puncak.

Pada tanggal 4 Januari 1946, Presiden Soekarno, Drs. Muhammad Hatta dan para pemimpin negara lainnya hijrah ke Yogyakarta dengan menggunakan Kereta Api. Kemudian diikuti oleh pindahnya instansi-instansi dan jawatan pemerintah yang lain. Ketika itu Sutan Sjahrir masih tetap di Jakarta. Hal itu untuk mempermudah jika sewaktu-waktu terjadi perundingan dengan Belanda.

Pada tanggal 4 Januari 1946, di Stasiun Tugu Yogyakarta banyak orang menyambut kedatangan Presiden dan Wakil Presiden beserta para ibu. Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII segera masuk gerbong dan menyambut kedua pemimpin negara tersebut. Selanjutnya para pemimpin negara diantar dengan mobil. Presiden Soekarno satu mobil dengan Sri Sultan HB IX. Wakil Presiden Mohammad Hatta satu mobil dengan Sri Paku Alam VIII. Sedangkan Ibu Fatmawati Soekarno dan Ibu Rahmi Mohammad Hatta satu mobil. Rombongan segera menuju ke Gedung Negara.

Sejak saat itu (4 Januari 1946) Yogyakarta menjadi ibukota RI. Sebagai rumah dinas, Presiden Soekarno menempati Gedung Agung. Sedang Wakil Presiden Mohammad Hatta menempati Gedung di Jl. Reksobayan 4 Yogyakarta (sekarang Makorem 072 Pamungkas Yogyakarta).

23. Perang Puputan di Bali 20 November 1946

Sejak pendaratan NICA di Bali, pulau yang dijuluki sebagai pulau dewata tersebut selalu menjadi arena pertempuran. Sama seperti di daerah lain, pasukan RI di Bali juga menjalankan perang gerilya. Markas Besar Operasi (MBO) sebagai induk pasukan selalu berpindah-pindah. Untuk memperkuat pertahanan di Bali, didatangkan bantuan ALRI dari Jawa yang kemudian menggabungkan diri ke dalam pasukan yang ada di Bali. Karena seringnya terjadi pertempuran, pihak Belanda pernah mengirim surat kepada I Gusti Ngurah Rai untuk mengadakan perundingan. Akan tetapi, pejuang Bali itu tidak bersedia, bahkan terus memperkuat pertahanan dengan mengikutsertakan seluruh rakyat.

Sesuai dengan hasil pertemuan para pucuk pimpinan perjuangan di Bali yang diadakan di desa Bongkasa, Badung, maka diutuslah I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Putu Wisnu, Cokorda Ngurah, dan I Wayan Ledang ke Jawa untuk melaporkan situasi di Bali dan meminta bantuan senjata serta tambahan pasukan untuk memperkuat pertahanan perjuangan di Bali. Bapak Wijekesuma, Ida Bagus Tantra, Bapak Debes ditugaskan mengadakan konsolidasi perjuangan di Bali sambil

menunggu kedatangan rombongan I Gusti Ngurah Rai dari Jawa.

Pada permulaan bulan Maret 1946, bantuan dari Jawa mulai berdatangan dan disiapkan di Banyuwangi, dibawah pimpinan Kapten Markadi. Pasukan yang diberangkatkan ke Bali adalah pasukan Waroka, pasukan I Gusti Ngurah Rai dan pasukan Markadi. Pasukan Waroka mendarat di pantai Celukan Bawang, pasukan I Gusti Ngurah Rai mendarat di Yeh Kuning dan Pulukan.

I Gusti Ngurah Rai bersama rombongan berangkat dengan membawa pasukan sebanyak 45 orang. Mereka berangkat dari Muncar, sebuah desa nelayan terkenal di daerah Banyuwangi. Dengan menggunakan beberapa perahu nelayan, rombongan berangkat pada waktu malam hari pada tanggal 4 April 1946. Pelayaran dilakukan dengan menyusur pantai Banyuwangi ke arah utara, kemudian memotong Selat Bali pada daerah yang paling sempit, yaitu di derah Ketapang. Pada waktu lewat tengah malam, sekitar jam 02.00 malam, rombongan mendapat serangan dari patroli Belanda yang menggunakan motor boat. Terjadilah pertempuran laut yang seru. Dalam pertempuran laut ini Cokorda Darmaputera dan agen Polisi II Cokorda Ngurah Gambir gugur. Dari anggota ALRI gugur pula Sumeh Darsono. Sedangkan Cokorda Oka, tertawan. Dalam peristiwa ini sebuah boat Belanda berhasil ditenggelamkan.

Rombongan Ngurah Rai terpecah menjadi dua bagian. Sebagian rombongan pada malam itu juga berhasil mendarat di pantai Yeh Kuning, daerah Pulukan, dipimpin oleh Bonjoran Bayupathi ke Muncar. Penyeberangan diulangi kembali pada malam itu juga. Rombongan Ngurah Rai dengan selamat sampai di pantai Yeh Kuning pada waktu pagi hari tanggal 5 April 1946 dan terus melanjutkan perjalanan menuju ke desa Pulukan untuk menantikan hari malam. Seluruh rombongan Ngurah Rai bergabung di Pulukan dan pada malam harinya mereka berangkat menuju ke Munduk Malang, sebuah daerah di Tabanan bagian Barat Laut.

Untuk memudahkan kontak dengan Jawa, I Gusti Ngurah Rai menjalankan strategi pengalihan perhatian Belanda dari barat ke bagian timur Bali. Mengikuti strateginya ini pada 28 Mei 1946 I Gusti Ngurah Rai mengerahkan pasukannya menuju ke timur yaitu dari Munduk Malang ke daerah Karangasem yang terkenal dengan "Perjalanan Juni-Juli" atau Long March. Selama Long March pasukan I Gusti

Ngurah Rai sering dihadap oleh tentara Belanda.

Pada tanggal 5 Juli 1946 pasukan I Gusti Ngurah Rai tiba di Tanah Aron. Dipilihnya Tanah Aron sebagai markas, karena dusun tersebut terletak di lereng Gunung Agung yang merupakan tanah perbukitan yang kering dan tandus, ditumbuhi beberapa macam pepohonan seperti “belu” dan jambu klutuk. Di sebelah Timur dikelilingi jurang, di sebelah selatan merupakan daerah yang lebih rendah, terletak bukit Pawon. Setelah dua hari, ada laporan bahwa Belanda mulai menempatkan pasukannya di Desa Ababi, Pipid, Abang, dan Culik. Oleh karena itu, I Gusti Ngurah Rai dengan beberapa stafnya mengadakan perundingan tentang pengaturan posisi pertahanan. Pada tanggal 7 Juli 1946 kurang lebih pukul 07.00 I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk mengatur posisi yang telah ditentukan. Setengah jam kemudian dari arah Barat datanglah iring-iringan pasukan Belanda dengan kekuatan 200 orang.

Pada pukul 09.00 pagi terdengar tembakan dari arah bukit Pawon, dimana pada posisi tersebut berkedudukan pasukan yang dipimpin oleh Kapten Markadi. Tak lama berselang dari arah utara (atas) terdengar tembakan dari pasukan Tabanan yang dipimpin Kapten Wijana. Pasukan Belanda bergerak mundur dan turun pada posisi yang menguntungkan pasukan Republik. Dengan dibatasi sebuah jurang dan jarak sekitar 250 meter, pasukan induk dengan jelas dapat melihat pasukan Belanda. Sebaliknya Belanda tidak menduga dihadapannya telah siap pasukan I Gusti Ngurah Rai. Letnan Dhiasa memerintahkan penembakan dengan senjata kaliber 12,7 mm. Terjadilah kontak senjata hingga pukul 15.00. Dalam pertempuran itu 82 orang serdadu NICA berhasil dibinasakan, sedangkan di pihak I Gusti Ngurah Rai semuanya selamat. Setelah pertempuran itu pasukan I Gusti Ngurah Rai kembali menuju arah barat yang kemudian sampai di Desa Marga (Tabanan).

Pada waktu staf MBO (Markas Besar Operasi) berada di Marga, I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk merebut senjata polisi NICA yang ada di kota Tabanan. Perintah itu dilaksanakan pada tanggal 18 November 1946 (malam hari) dan berhasil baik. Beberapa pucuk senjata beserta pelurunya dapat direbut dan seorang komandan polisi NICA ikut menggabungkan diri kepada pasukan Ngurah Rai. Setelah itu pasukan segera kembali ke Desa Marga.

Keesokan harinya, tanggal 19 Nopember 1946 pasukan

beristirahat di desa Ole dekat Marga kurang lebih 10 km di sebelah utara kota Tabanan. Dalam keadaan beristirahat itu Letkol I Gusti Ngurah Rai, Kapten I Gusti Wayan Debes, Mayor I Gusti Putu Wisnu dan Kapten Sugianyar serta Wagimin mengadakan musyawarah untuk mengatur taktik perlawanan dalam menghadapi NICA/Belanda. Pasukan Ciung Wanara sebagai induk pasukan di bawah pimpinan Letkol I Gusti Ngurah Rai, yang telah mendapatkan tambahan personel dan persenjataan, menyiapkan pertahanan di sela-sela tanaman jagung di persawahan Uma Kaang.

Pada tanggal 20 Nopember 1946, pagi-pagi benar sekitar pukul 06.00 pasukan menerima laporan dari penghubung laskar rakyat bahwa di sebelah utara dan selatan desa Marga telah terlihat pasukan Belanda dengan persenjataan lengkap. Kemudian I Gusti Ngurah Rai memerintahkan untuk mengadakan penyelidikan. Desa Marga ternyata telah terkepung rapat-rapat. Seluruh penduduk desa Marga baik tua-muda, laki-laki dan perempuan digiring ke pasar Marga yang kemudian disiksa dengan kejam tanpa mengenal peri kemanusiaan. Sekitar pukul 09.00 terdengar letusan pistol Letkol I Gusti Ngurah Rai sebagai tanda dimulainya penyerangan terhadap serdadu Belanda yang telah masuk pada sasaran tembak. Terjadilah baku tembak yang sangat seru. Banyak serdadu Belanda menjadi korban sehingga membangkitkan kegembiraan pasukan Republik dan keluar dari posisi pertahanannya untuk mengejar musuh.

Dalam keadaan gawat I Gusti Ngurah Rai memerintahkan agar pasukan Ciung Wanara tetap tabah dan gigih melawan kavaleri Belanda yang didukung dengan serangan udara. Kapten Sugianyar selaku pimpinan pasukan Markas Besar Daerah Badung gugur terkena peluru Belanda. Mengetahui hal tersebut Letkol I Gusti Ngurah Rai merasa sangat sedih dan dengan kebulatan tekad untuk keteguhan hati pantang menyerah sampai titik darah penghabisan, akhirnya memberikan perintah "Puputan" kepada seluruh pasukannya. Di sinilah pasukan Ngurah Rai mengadakan "Puputan" sehingga pasukan yang berjumlah 96 orang itu semuanya gugur, termasuk I Gusti Ngurah Rai sendiri sebagai kusuma bangsa. Sebaliknya, di pihak Belanda ada lebih kurang 400 orang yang tewas. Untuk mengenang peristiwa tersebut kini pada bekas arena pertempuran itu didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa.

24. Berdirinya Universitas Gajah Mada 19 Desember 1949

Sebagai upaya untuk mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia, maka di Yogyakarta, Solo dan Klaten banyak didirikan lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah. Lembaga pendidikan itu adalah Sekolah Tinggi Teknik yang didirikan pada tanggal 17 Februari 1946 di Yogyakarta. "Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Klinis pada tanggal 4 Maret 1946 di Solo. Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Praktis di Klaten pada tanggal 5 Maret 1946. Fakultas Farmasi dan Fakultas Pertanian pada tanggal 27 September 1946 di Klaten. Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Kedokteran Hewan pada awal tahun 1948 di Klaten. Akademi Ilmu Politik pada awal tahun 1948 di Yogyakarta. Balai Pendidikan Ahli Hukum pada tanggal 1 November 1948 di Solo. Sebelumnya, yaitu pada tanggal 24 Januari 1946, Mr. Budiarto, Ir. Warsito, Mr. Soenarjo dan Dr. Prijono bertemu untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi swasta. Rencana mereka mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kemudian pada tanggal 3 Maret 1946 diresmikanlah Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada di Yogyakarta yang hanya mempunyai Bagian Hukum dan Bagian Sastra. Sri Sultan Hamengku Buwono IX diangkat sebagai Ketua Dewan Kurator dan Ki Hadjar Dewantara sebagai wakil.

Pada tanggal 20 Mei 1946 dibentuklah sebuah komite antar kementerian yang akan membahas masalah pendidikan tinggi di Indonesia. Komite itu memutuskan untuk menggabungkan semua lembaga pendidikan yang ada di Yogyakarta, Solo dan Klaten. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tanggal 16 Desember 1949 tentang Peraturan Sementara Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universitas maka perguruan tinggi yang ada di tiga kota tersebut digabungkan menjadi Universitas Negeri Gajah Mada yang berkedudukan di Yogyakarta. Universitas tersebut terdiri dari :

- a. Fakultas Hukum
- b. Fakultas Sosial dan Politik
- c. Fakultas Teknik
- d. Fakultas Kedokteran
- e. Fakultas Kedokteran Gigi dan Farmasi
- f. Fakultas Sastra dan Filsafat
- g. Fakultas Pertanian
- h. Fakultas lain menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan memperhatikan

pertimbangan Senat "Universiteit Negeri Gadjah Mada.

Pada tanggal 19 Desember 1949, di Sitihiinggil Kraton Yogyakarta diresmikan Universiteit Negeri Gadjah Mada. Prof. Dr. A. Sardjito ditetapkan sebagai Presiden Universiteit yang pertama. Pada hari itu juga ditetapkan senat Universiteit Negeri Gadjah Mada sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Sardjito
Sekretaris : Prof. Mr. Drs. Notonagoro
Anggota : Prof. Ir. Wreksodiningrat
Prof. Mr. Djokosoetono
Prof. Dr. Prijono
Prof. Mr. Soenarjo Kolopaking
Prof. Ir. H. Johannes
Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo
Prof. Dr. Soetopo
Prof. Mr. Wirjono Prodjodikoro
Prof. Dr. Aboetari
Prof. Drs. Soeparwi

Sedangkan universitas yang baru ini, susunan dewan kurator adalah sebagai berikut :

Ketua Kehormatan : Sri Sultan HB IX
Ketua : Sri Paku Alam VIII
Wakil : Soetardjohadikoesoemo
Anggota : Dr. Kodijat
Ki Hadjar Dewantara
Prof. Ir. Wreksodiningrat
Mr. Hadi
Ir. Goeneng Iskandar
Mr. S. Poerwokoesoemo
Samadikoen
Moestadjab

Berdasarkan PP No 37 tanggal 14 Agustus 1950 universitas ini mempunyai Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Farmasi, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan. Fakultas Sastra, Fakultas Paedagogik, Fakultas Filsafat dimulai tahun 1951. Pada tahun 1954 nama Universiteit Negeri Gadjah Mada diganti menjadi Universitas Gadjah Mada. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang memutuskan untuk menggunakan istilah universitas dan fakultas untuk seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

25. Peristiwa Bandung Lautan Api Oktober 1945

Pada waktu tentara Sekutu memasuki kota Bandung pada

bulan Oktober 1945, para pemuda dan pejuang sedang dalam pergulatan untuk melaksanakan pemindahan kekuasaan dan merebut senjata serta peralatan dari tangan tentara Jepang. Tentara Sekutu menuntut supaya senjata-senjata yang diperoleh dari pelucutan tentara Jepang dan berada di tangan para pemuda diserahkan kepada Sekutu. Pada tanggal 21 November 1945, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara paling lambat tanggal 29 November 1945 dikosongkan oleh pihak Indonesia dengan alasan untuk menjaga keamanan. Ultimatum itu tidak dihiraukan oleh para pejuang, sehingga sejak saat itu sering terjadi insiden dengan pasukan Sekutu. Batas kota bagian utara dan bagian selatan adalah rel kereta api yang melintasi kota Bandung.

Untuk kedua kalinya tanggal 23 Maret 1946 tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum, kali ini supaya TRI mengosongkan seluruh kota Bandung. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan agar TRI mengosongkan kota Bandung, tetapi sementara itu dari markas TRI di Yogyakarta datang instruksi lain, yaitu supaya kota Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya TRI di Bandung mematuhi perintah dari Jakarta walaupun dengan berat hati. Sebelum meninggalkan Kota Bandung, pejuang RI melancarkan serangan umum ke arah kedudukan-kedudukan Sekutu dan membombardir kota Bandung Selatan. Kota Bandung sebelah selatan pada tanggal 23 Maret 1946 dibakar dan menjadi lautan api, sebelum TRI meninggalkannya.

Selain di Kota Bandung, di Jawa Barat pertempuran-pertempuran dengan Sekutu dan NICA meletus dimana-mana. Di Sukabumi terjadi serangkaian pertempuran yang dimulai pada bulan Desember 1945 dan berjalan sampai bulan Maret 1946 yang dikenal sebagai "Peristiwa Bojongsokosan". Pertempuran lain terjadi di Gunung Masigit (Pertempuran Cimareme), Balaindah, Dayeuhkolot, Cijoho, Gekbrong, Cileungsir, dan sebagainya.

26. Politik Diplomasi 1948

Dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua macam cara yaitu dengan perjuangan bersenjata dan perjuangan dimeja perundingan (diplomasi). Perjuangan dengan menggunakan senjata dilakukan oleh para pejuang dimedan pertempuran dengan cara melakukan perlawanan secara bergerilya. Sedangkan perjuangan dengan cara diplomasi dilakukan oleh para pejuang diplomat di meja

perundingan. Dengan perjuangan diplomasi ini keberadaan Indonesia telah diakui oleh dunia internasional. Sedangkan perjuangan bersenjata biasanya terjadi setelah perjuangan diplomasi mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut biasanya disebabkan oleh Belanda yang selalu menafsirkan secara sepihak hasil perundingan. Beberapa perundingan yang telah ditempuh oleh RI dan Belanda untuk menyelesaikan permasalahannya antara lain : Perundingan pertama antara RI dan Belanda dengan penengah dari Inggris mula-mula Sir Archibald Clark Kerr kemudian diganti Lord Killearn. Perundingan dimulai tanggal 10 Februari 1946. Setelah diadakan penjajagan maka segera digelar perundingan secara resmi yang bertempat di Hooge Veluwe yang berlangsung tanggal 14-25 April 1946.

Perundingan gencatan senjata RI, Sekutu dan Belanda akhirnya diselenggarakan di Jakarta tanggal 20 September 1946. Indonesia diwakili oleh Jendral Mayor Soedibjo, Komodor Udara Suryadi Suryadarma (utusan Pulau Jawa, Kolonel Simbolon, dan Letkol Abdullah Kartawirana (utusan Sumatra). Dari pihak Sekutu hadir Mayor Jenderal JFR. Forman dan Brigadir Jenderal IDA. Lauder. Belanda diwakili oleh Mayor Jenderal DH Buurman van Vreeden. Perundingan gencatan senjata tersebut berlangsung hingga tanggal 30 September 1946, meski tidak menghasilkan apa-apa.

Selanjutnya Lord Killearn berhasil membawa wakil-wakil RI dan Belanda ke meja perundingan yang berlangsung di kediaman konsul jenderal Inggris di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1946. Delegasi RI diketuai oleh PM Sutan Sjahrir, sementara Belanda diwakili oleh suatu komisi yang dikirim oleh Belanda yang diketuai Prof. Schermerhorn. Untuk selanjutnya sebagai kelanjutan dari perundingan-perundingan selanjutnya sejak tanggal 10 November 1946 di Linggajati, dekat Cirebon, dilangsungkan perundingan antara RI dengan komisi umum Belanda. Perundingan itu dipimpin oleh Lord Killearn. Tanggal 15 November 1946 hasil persetujuan diparaf oleh kedua belah pihak, dan kemudian baru tanggal 25 Maret 1947 naskah tersebut ditandatangani.

Namun semua hasil perundingan tersebut dilanggar oleh Belanda yang dengan sepihak menafsirkan hasil-hasil perundingan menurut versinya, sehingga meletuslah Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947. Agresi ini menimbulkan protes keras sehingga atas inisiatif India dan Australia, permasalahan RI dan Belanda berhasil dibahas di PBB. Hasil

dari pembicaraan PBB maka perlu dibentuk komisi jasa baik untuk mengawasi gencatan senjata RI-Belanda. Komisi itu kemudian terkenal dengan "Komisi Tiga Negara"/KTN. Dalam sidang kabinet RI tanggal 6 September 1947 RI meminta Australia menjadi anggota KTN, sementara Belanda memilih Belgia. Sedangkan Australia dan Belgia memilih Amerika Serikat. Tiga negara tersebut masing-masing diwakili oleh Paul van Zeeland (Belgia), Richard Kirby (Australia), dan Dr. Frank Graham (Amerika Serikat). Mereka tanggal 27 Oktober 1947 tiba di Jakarta.

Dalam pertemuannya di Sidney, pada tanggal 20 Oktober 1947 KTN memutuskan bahwa tugas mereka di Indonesia adalah untuk membantu menyelesaikan sengketa antara RI dan Belanda secara damai. Atas usul KTN perundingan dilakukan di atas sebuah kapal pengangkut pasukan AL Amerika Serikat "USS Renville". Perundingan dimulai tanggal 8 Desember 1947 di atas Kapal Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi RI dipimpin Mr. Amir Syarifudin, dan Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjoatmodjo. Selama perundingan berlangsung untuk membicarakan masalah daerah kekuasaan RI, pada tanggal 13 Januari 1948 di Kaliurang diadakan perundingan antara KTN dengan RI.

Meskipun sudah tercapai persetujuan di atas Kapal Renville, tembak menembak belum juga berhenti. Tanggal 9 Januari 1948 Belanda mengajukan ultimatum kepada RI untuk mengosongkan sejumlah daerah yang luas dan menarik TNI dari daerah-daerah gerilya di Yogyakarta. Dalam suasana seperti itu akhirnya perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, disusul dengan instruksi penghentian tembak menembak pada tanggal 19 Januari 1948. Persetujuan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemerintah RI sehingga mengakibatkan Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh.

Ketika perundingan sedang berlangsung Belanda menyiapkan pasukannya, kemudian berusaha menafsirkan hasil perundingan secara sepihak. Kerena itulah maka kembali Belanda melanggar perjanjian Renville dengan mengadakan Agresi Militer Belanda Kedua. Akibatnya kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda dan para pemimpin RI ditawan. Namun demikian pemerintahan tetap berjalan melalui *exilegouvernement* di Sumatra yaitu PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dibawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawira Negara. Dengan begitu Belanda menyiarkan kabar

bohong bahwa RI sudah hancur bersama TNI. Keadaan ini diketahui oleh Sri Sultan HB IX. Atas idenya maka dilaksanakanlah Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Serangan tersebut berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam. Berkat siaran radio PC 2 informasi tentang keberhasilan Serangan Umum ini sampai ke meja DK PBB di New York. Ini menunjukkan bahwa berita yang disampaikan Belanda adalah bohong, dan Belanda menjadi terpojok dalam percaturan internasional dan bersedia mengadakan perundingan dengan RI yang sempat macet beberapa waktu. Maka dibukalah perundingan Roem Royen dengan hasil terpenting yaitu pemerintah RI dikembalikan di Yogyakarta, pemimpin RI yang ditawan oleh Belanda sejak 19 Desember 1948 dikembalikan, dan RI siap menghadapi KMB.

Setelah semuanya siap maka KMB dilaksanakan di Den Haag sejak 23 Agustus-2 November 1949. Hasil KMB Belanda mengakui kedaulatan RIS pada tanggal 27 Desember 1949

27. Pengangkutan APWI 28 April 1946

Pada tanggal 29 September 1945 mulai didaratkan AFNEI (*Allied Forces for Netherlands East Indies*) dipimpin Letjen Phillip Christison mendarat di Jakarta. Bertugas untuk melucuti dan mengembalikan tentara Jepang ke daerah asalnya, mengevakuasi APWI (*Allied Prisoner War and Internee*) yaitu tawanan Jepang dan Belanda, mengambil alih daerah pendudukan Jepang, dan menjaga keamanan dan ketertiban sehingga pemerintahan sipil berfungsi kembali. Ketika itu tentara Sekutu hanya mengakui kedaulatan Belanda di Indonesia. Sehingga aksi-aksi militer di daerah RI dengan dalih membebaskan APWI sering terjadi seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Magelang, Surabaya dan Malang. Aksi tersebut mendapat perlawanan keras dari para pejuang RI sehingga jatuh korban besar.

Setelah pertempuran antara RI dan Sekutu berakhir maka pada tanggal 1 dan 2 April 1946 diadakan perundingan tentang pemulangan tawanan perang Jepang selama Perang Dunia Kedua yang akhirnya menghasilkan persetujuan yang dikenal dengan "The Yogya Agreement". Isi dari persetujuan tersebut bahwa pengangkutan dan pelucutan tentara Jepang yang ada di daerah pendudukan RI akan dilakukan oleh TRI. Sedangkan yang berada di daerah pendudukan Sekutu akan dilakukan oleh Sekutu. RI akan membantu segala akomodasi yang diperlukan. Pada tanggal 24 April 1946 mulai dilakukan pengangkutan bekas tawanan perang dan interneeran Sekutu

(Allied Prisoner of War and Interneeer) APWI yang pertama kali yang ditawan Jepang selama Perang Dunia Kedua dari daerah RI ke Jakarta. Dalam melaksanakan tugas APWI ini dibentuk suatu panitia yaitu "Panitia Oentoeik Pengembalian bangsa Djepang dan Asing" yang selanjutnya dikenal dengan POPDA di bawah pimpinan Jenderal Mayor Sudibyo dan Jenderal Mayor Adul Kadir. Untuk pelaksanaannya di setiap daerah dibentuk pos-pos penampungan sementara yang tugas dan pengawasannya dibebankan kepada komandan resimen setempat dibantu dari badan-badan perjuangan yang lain.

Memenuhi apa yang pernah dikemukakan oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang disampaikan kepada Sekutu, maka pada tanggal 28 April 1946 dari Yogyakarta diberangkatkan kurang lebih 550 orang tawanan Belanda dan Jepang dengan menggunakan kereta api istimewa menuju Stasiun Manggarai Jakarta. Berangkat dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Tugas pengawalan ini dilaksanakan oleh Kompi Widodo.

Ini merupakan pengangkutan yang pertama dari Yogyakarta dan sekaligus menunjukkan itikad baik TRI dalam melakukan tugas internasional bahwa pengawalannya sampai ke Jakarta berjalan baik tanpa insiden apapun. Khusus pengangkutan dengan menggunakan pesawat terbang dilaksanakan di Lapangan Panasan Solo dengan pesawat Dakota milik Sekutu.

28. Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947

Setelah melalui perdebatan sengit di dalam masyarakat dan dalam lingkungan KNIP akhirnya pada tanggal 25 Maret 1945 persetujuan Linggajati ditandatangani di Istana Rijswijk, Istana Merdeka Jakarta. Ketua dan anggota Delegasi Indonesia terdiri dari Sutan Sjahrir, Mr. Mohammad Roem, Mr. Soesanto Tirtoprodjo, dan dr. A.K. Gani membubuhkan tanda tangan mereka dalam persetujuan tersebut. Sedangkan di pihak Belanda, turut menandatangani Prof. Schermerhorn, Dr. Van Mook dan Van Poll.

Namun pada perkembangan selanjutnya, hasil perundingan tersebut diadakan penafsiran secara sepihak sehingga menimbulkan perselisihan diantara RI dan Belanda. Penafsiran Belanda tentang Persetujuan Linggajati tetap berpedoman pada pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942 yang menyatakan bahwa Indonesia akan dijadikan anggota *Commonwealth* dan akan berbentuk federal, sedangkan hubungan luar negerinya akan diatur oleh Belanda. Belanda juga menuntut untuk segera diadakan *gendarmerie*

bersama. Dengan ditambah oleh kesulitan ekonomi negaranya, maka Belanda ingin segera menyelesaikan masalah Indonesia ini dengan cepat.

Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan nota yang berisi ultimatum yang harus dijawab oleh pemerintah RI dalam waktu 14 hari. Adapun nota tersebut berisi :

- a. Membentuk pemerintahan *ad interim* bersama
- b. Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama
- c. RI harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki Belanda
- d. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah RI yang memerlukan bantuan Belanda (*gendarmerie* bersama)
- e. Menyelenggarakan pemilikan bersama atas impor dan ekspor.

Perdana Menteri Sutan Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak *gendarmerie* bersama. Jawaban itu mendatangkan reaksi keras dari kalangan partai politik dan berakibat jatuhnya kabinet Sjahrir. Kabinet penggantinya yaitu kabinet Amir Syarifudin memberikan jawaban yang pada hakekatnya sama.

Dalam notanya tertanggal 15 Juli 1947, Belanda tetap menuntut adanya *gendarmerie* bersama dan minta agar RI menghentikan permusuhan terhadap Belanda. Nota tersebut kemudian disusul lagi dengan sebuah ultimatum bahwa dalam waktu 32 jam RI harus memberi jawaban terhadap tuntutan Belanda. Jawaban RI yang disampaikan oleh Amir Sjarifuddin tanggal 17 Juli 1947 lewat RRI Yogyakarta ditolak oleh Belanda. Kemudian tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan serentak terhadap daerah-daerah RI. Serangan militer ini dikenal sebagai Agresi Militer Belanda Pertama. Jawa digempur dengan pasukan bersenjata lengkap dan modern yang terdiri dari tiga divisi, sementara di Sumatra Belanda mengerahkan tiga brigade. Untuk menguasai Jawa Barat Belanda mengerahkan dua divisi, satu divisi diantaranya melanjutkan serangan ke Jawa Tengah, sedangkan di Jawa Timur didaratkan satu divisi.

Pasukan TNI yang terpecah pada pukulan pertama serangan Belanda itu berusaha mengkonsolidasikan diri dan membangun daerah pertahanan baru. Sistem Wehrkreise diterapkan untuk menggantikan sistem pertahanan linear, yang

ternyata tidak dapat menahan gempuran Belanda yang memiliki persenjataan dan alat perang yang lebih kuat. Akhirnya, kekuasaan dan gerakan Belanda berhasil dibatasi hanya di kota-kota besar dan jalan-jalan raya, sedangkan di luar itu kekuasaan berada di tangan TNI. Di luar negeri, agresi Belanda ini mendatangkan reaksi keras. Wakil-wakil India dan Australia di PBB mengajukan usul agar soal Indonesia dibahas dalam DK PBB. Akhirnya pada tanggal 1 Agustus 1947 PBB memerintahkan RI dan Belanda untuk mengadakan gencatan senjata. Dalam sidang tersebut RI mengutus Sutan Sjahrir dan Haji Agus Salim. Tanggal 4 Agustus 1947 RI dan Belanda mengumumkan penghentian tembak menembak. Dengan adanya pengumuman tersebut maka agresi militer Belanda Pertama resmi berakhir.

29. Kongres Kebudayaan di Magelang, Agustus 1948

Kehidupan kebudayaan di daerah RI mendapatkan perhatian khusus. Meski dalam suasana revolusi perhatian dalam masalah kebudayaan tetap tidak terabaikan. Berbagai perhimpunan seniman, lahir karena adanya revolusi. Bahkan karya-karya terbaik mereka dilahirkan karena inspirasi dari jalannya revolusi. Untuk mencatat dan menghimpun fikiran-fikiran dan aliran-aliran baru di lapangan kebudayaan, maka pada bulan Agustus 1948 dilangsungkan "Kongres Kebudayaan" yang pertama. Kongres dibuka pada tanggal 20 Agustus 1948 dan sebagai ketua kongres adalah Mr. Wongsonegoro. Dalam kongres tersebut berhasil diputuskan antara lain : lembaga kebudayaan Indonesia akan didirikan, guna memajukan Kebudayaan seluruh Indonesia.

30. Pekan Olah Raga Nasional Indonesia I di Solo, September 1948

Pada bulan September 1948, ketika Pemerintah RI masih diguncang oleh berbagai tekanan baik dari dalam berupa Pemberontakan PKI Madiun, maupun dari luar terutama dari Belanda yang berusaha untuk menjajah lagi Indonesia, tetapi penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional tetap mendapatkan prioritas. PON Pertama ini berlangsung pada tanggal 9 s.d 12 September 1948 di Solo (Stadion Sriwedari). Tetapi upacara pembukaan PON Pertama diadakan di Yogyakarta. Upacara dimulai dengan penyerahan bendera PON di Yogyakarta. Hadir dalam acara tersebut Presiden Soekarno, Ibu Fatmawati Soekarno, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sri Paku Alam VIII, dan para pejabat setempat. Disamping itu hadir juga wakil-wakil KTN. Setelah acara

pembukaan yang diselenggarakan di halaman istana negara Yogyakarta (Gedung Agung) selesai, pada tanggal 8 September 1948 dilanjutkan dengan gerak jalan masal dengan membawa bendera PON dari Yogyakarta menuju Solo melalui Jl. Tugu Kulon (sekarang Jl. Pangeran Mangkubumi). Sebagai ketua penyelenggara dalam pelaksanaan PON tersebut adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sedangkan ketua pelaksana di Solo diserahkan kepada P. Soerjohamidjojo. Sesampainya di Solo kemudian bendera PON di kibarkan di Stadion Sriwedari Solo. Acara tersebut dimeriahkan dengan senam masal yang dilakukan oleh ribuan siswa-siswa sekolah menengah di Solo. Cabang olah raga yang ditampilkan dan PON tersebut meliputi sepak bola, bola keranjang, bola basket, bulu tangkis, atletik, renang, tenis, panahan, pencak silat, dll.

PON Pertama ditutup pada tanggal 12 September 1948. Upacara penutupan dilaksanakan di Stadion Sriwedari Solo. Hadir dalam upacara penutupan tersebut Panglima Besar Jenderal Soedirman.

31. Agresi Militer Belanda II

Kekacauan-kekacauan yang terjadi di Indonesia yang diwarnai dengan pertentangan politik yang semakin tajam antara yang pro dan kontra terhadap persetujuan Renville, Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang, Pembentukan Negara Indonesia Serikat, ditambah dengan terjadinya pemberontakan PKI Madiun dimanfaatkan oleh Belanda untuk menyusun kekuatan dalam usahanya ingin menjajah lagi Indonesia. Perundingan-perundingan antara RI dan Belanda yang dilakukan dibawah pengawasan KTN (Komisi Tiga Negara) selalu mengalami jalan buntu. Hal ini terjadi karena Belanda selalu mengajukan usul yang jelas tidak mungkin dapat diterima RI.

Pada tanggal 11 Desember 1948 delegasi Belanda yang dipimpin oleh Abdul Kadir Wdjooadmojo, menyatakan tidak dapat melanjutkan perundingan lagi, itu berarti bahwa persetujuan Renville yang telah ditandatangani tanggal 17 dan 19 Januari 1948 mengalami kegagalan.

Pada tanggal 17 Desember 1948 Belanda menyampaikan ultimatum melalui KTN yang meminta RI harus mengakui sepenuhnya kedaulatan Belanda, dan ikut serta dalam pemerintah yang dirancang oleh Belanda. Jawaban RI harus sudah diterima paling lambat pada tanggal 18 Desember 1948 jam 10.00 WIB. Tetapi jawaban pemerintah pusat RI di Yogyakarta tidak dapat segera dirumuskan dan

disampaikan. Hal itu mengingat batas waktu yang terlalu singkat, sehingga tidak sempat merundingkan dulu dengan BPKNIP dan partai-partai. Lagi pula waktu itu hubungan komunikasi Yogyakarta-Jakarta terputus.

Pada tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30 Dr. Beel secara resmi melalui KTN menyampaikan pernyataan bahwa terhitung sejak tanggal 19 Desember 1948 mulai pukul 00.00 WIB Belanda tidak mengakui lagi de facto RI dan tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville. Pada pukul 06.00 WIB Belanda telah mulai dengan serangannya terhadap kota Yogyakarta dan sekitarnya. Belanda menyerang lapangan terbang Maguwo dengan 5 buah pesawat pemburu dan disusul dengan 6 buah pesawat lainnya. Pasukan Belanda terus menduduki pos-pos penting di atas dan sekitar lapangan. Para anggota yang bertugas jaga lapangan terbang Maguwo (sekarang Adisucipto) pimpinan Perwira Kadet Udara Kasmiran mencoba melakukan perlawanan. Perlawanan yang dipimpin oleh Kadet Udara Kasmiran berkekuatan lebih kurang 40 orang, berlangsung kurang lebih hampir satu jam (pukul 06.00-07.00 WIB). Perwira Udara Kasmiran, Sersan Mayor Tanumiharjo, Kopral Tohir bersama anak buahnya gugur dalam mempertahankan lapangan terbang Maguwo. Pukul 08.00 WIB Maguwo jatuh ke tangan Belanda disusul mendaratnya Dakota pertama Belanda. Selang beberapa menit kemudian sudah mendarat 5 pesawat mendarat dengan mengangkut rombongan Resimen Speciale Troepen yang kemudian memelopori serangan atas kota Yogyakarta.

Setelah tentara Belanda berhasil menduduki lapangan terbang Maguwo, pasukan Belanda Brigade T di bawah pimpinan Kapten Van Langen bergerak menuju pusat kota Yogyakarta sambil menghambur-hamburkan peluru menembak apa saja yang ditemui. Sementara pasukan Belanda bergerak menuju kota Yogyakarta, dalam keadaan darurat tersebut Presiden Soekarno mengadakan sidang darurat. Dalam sidang tersebut diputuskan bahwa Presiden, Wakil Presiden dan beberapa menteri tetap tinggal di kota dengan kemungkinan ditawan, namun tetap dekat dengan KTN. Selanjutnya juga diputuskan bahwa Mr. Syafrudin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Sumatra) dengan perantaraan radio diberi kuasa untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Mandat semacam itu juga diberikan kepada Dr. Sudarsono dan Mr. A.A. Maramis yang berada di New Delhi. Dengan maksud

apabila Mr. Syafrudin Prawiranegara gagal membentuk pemerintahan darurat di Sumatra, keduanya dapat membentuk Excile Gouvernement (Pemerintahan Pelarian).

Kurang lebih pukul 16.00 WIB tentara Belanda berhasil menguasai seluruh kota Yogyakarta. Tempat-tempat penting seperti Istana Presiden (Gedung Agung), Benteng Vredenburg (Sekarang Museum Benteng Yogyakarta), Markas MBKD, serta tempat penting lainnya sudah jatuh ke tangan Belanda. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, H. Agus Salim, KSAU Suryadi Suryadarma ditawan Belanda dan selanjutnya diasingkan ke Bangka dan baru kembali ke Yogyakarta setelah dicapai persetujuan Roem Royen pada tanggal 7 Mei 1949.

32. Serangan Umum I Maret 1949 di Yogyakarta

Jatuhnya ibukota RI Yogyakarta akibat Agresi Militer Kedua, dijadikan indikasi oleh Belanda untuk mengkultuskan tentang hancurnya RI bersama TNI. Berita tersebut oleh Belanda disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Belanda menganggap aksi-aksi yang dilakukan para pejuang tidak lebih hanya sebagai aksi para perampok dan teroris belaka.

Setelah berhasil menguasai kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, maka berturut-turut pula dikuasai daerah-daerah lain. Seperti Sleman pada tanggal 20 Desember 1948, Bantul tanggal 19 Januari 1949, dan Gunung Kidul tanggal 10 Maret 1949. Di setiap tempat yang telah dikuasai selalu didirikan pos-pos penjagaan. Dari pos inilah Belanda mengadakan patroli pada siang hari yang rata-rata jauhnya 3 Km dari pos. Sementara itu pasukan TNI yang berhasil menyingkir ke luar kota memerlukan waktu yang relatif lama untuk mengadakan konsolidasi antar pucuk pimpinan TNI. Ketika terjadi agresi militer Belanda II, 19 Desember 1948 Letkol Soeharto melalui Kapten Widodo telah memerintahkan Mayor Sardjono untuk menyusun kekuatan di Yogyakarta selatan.

Tanggal 20 Desember 1948, Letkol Soeharto Komandan Brigade X mengadakan perjalanan untuk menghimpun kekuatan militer di daerah Wehkreise III. Perjalanan konsolidasi tersebut dilaksanakan selama kurang lebih 5 hari. Berangkat dari Desa Ngotho menuju ke arah barat, Kalibayem, Godean, Cebongan, Cangkirang, Manisrenggo, Prambanan, Piyungan dan kembali ke Ngotho. Dari hasil konsolidasi yang dilakukan oleh Komandan Wehkreise III,

Letkol Soeharto tersebut dapat dirinci kekuatan pasukan bersenjata di Kota Yogyakarta antara lain :

- a. Pasukan Polisi Istimewa dengan kekuatan 2 kompi dibawah pimpinan Mayor Sakri di wilayah Imogiri;
- b. Pasukan Taruna Militer Akademi dengan kekuatan 2 kompi dibawah pimpinan Kolonel GPH. Djati Koesoemo di wilayah Cangkringan;
- c. Batalyon I dibawah pimpinan Sudjono di Bantul;
- d. Pasukan dibawah komandan Sub Teritorium Militer Yogyakarta Mayor Selo Ali (kemudian diganti Letnan Suhud) di Gamping;
- e. Batalyon Hadidjoyo di Bantul;
- f. Batlayon Basuni di Sleman;
- g. Batalyon 151 Haryadi (gugur diganti adiknya Haryo Sudirjo) di Sleman Tengah;
- h. Brigade 17/TP dengan kekuatan 1 Kompi dibawah pimpinan Letnan Kolonel Sudarto di Kulon Progo;
- i. Detasemen 3 Brigade XVII dibawah pimpinan kapten Martono berada di Sleman Tengah;
- j. Brigade XVI (Laskar Seberang) dengan kepala staf Letnan Kolonel Kahar Muzakar, Yon Andi Matalata, Yon Palar, Yon Peloepessy di Godean.

Dengan melihat cukup besarnya kekuatan pasukan bersenjata yang ada serta simpati rakyat yang begitu besar terhadap perjuangan maka segera direncanakan serangan balasan terhadap Belanda di kota maupun pos-posnya yang berada di luar kota. Pada tanggal 26 Desember 1948 dari markas sementara Ngotho, Komandan Brigade X yang sekaligus komandan WK III Letkol Soeharto memberikan briefing kepada para perwira antara lain Mayor Rekso Siswo, Letnan Sudibyso dan Letnan Sugiyono. Hasil dari briefing tersebut diputuskan bahwa akan segera diadakan serangan balasan terhadap Belanda. Sore harinya markas dipindahkan dari Ngotho ke sebelah timur yaitu di desa Segoroyoso, Plered, Bantul di rumah Bapak Gardo Utomo.

Untuk lebih mengoptimalkan hasil yang dicapai maka organisasi pertahanan Wehrkreise III dibagi menjadi 6 Sub Wehkreise (SWK), antara lain :

- a. SWK 101 daerah Bantul Timur dengan komandan Mayor Sakri
- b. SWK 102 daerah Bantul Barat dengan komandan Mayor Sardjono
- c. SWK 103 daerah Godean Selatan dengan komandan

Mayor Ventje Sumual

- d. SWK 104 daerah Sleman dengan komandan Mayor Sukasno
- e. SWK 105 daerah Yogyakarta Timur dan Gunung Kidul dengan komandan Mayor Sudjono
- f. SWK 106 daerah Kulon Progo dengan komandan Letnan Kolonel Sudarto

Pembagian tersebut berjalan beberapa saat, tetapi kemudian dirasa adanya kekurangseimbangan pada masing-masing kekutan. Sehingga pada tanggal 16 Januari 1949, Komandan WK III segera mengadakan perubahan. Semula 6 SWK dirubah menjadi 7 SWK, sebagai berikut :

- a. SWK 101 daerah kota Yogyakarta dengan komandan Letnan Marsudi
- b. SWK 102 daerah Bantul dengan komandan Mayor Sardjono
- c. SWK 103 daerah Gamping dengan komandan Letnan Kolonel Suhud
- d. SWK 103 A daerah Godean dengan komandan Ventje Sumual
- e. SWK 104 daerah Sleman dengan komandan Mayor Sukasno
- f. SWK 105 daerah Yogyakarta Timur termasuk Gunung Kidul dengan komandan Mayor Sudjono
- g. SWK 106 daerah Kulon Progo dengan komandan Letnan Kolonel Soedarto

Kota Yogyakarta yang termasuk dalam SWK 101 berada dibawah komandan Letnan Marsudi dibagi menjadi 6 sektor yaitu :

- a. Sektor I/SWK 101 meliputi daerah Kraton sebelah barat hingga Jalan Ngabean dibawah komandan Letnan Wuston
- b. Sektor II/SWK 101 meliputi daerah sebelah timur hingga Jalan Secodiningratan (sekarang Jl. Panembahan Senopati) dibawah komandan Sudomo
- c. Sektor III/SWK 101 meliputi Jl. Ngabean ke utara, Jl. Malioboro ke barat, rel kereta api ke selatan, dibawah komandan Moctar
- d. Sektor IV/SWK 101 meliputi Jl. Secodiningratan, Pakualaman ke utara, Jl. Malioboro ke timur, rel kereta api ke selatan dibawah komandan Rakido
- e. Sektor V/SWK 101 meliputi rel kereta api ke utara, Jl. Tugu ke timur dibawah komandan Supriyo
- f. Sektor VI/SWK 101 meliputi rel kereta api ke utara, Jl.

Tugu ke barat di bawah komandan Sudarno.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengamanan kota Yogyakarta, SWK 101 dibawah pimpinan Letnan Marsudi ini, banyak mendapat bantuan yang sangat berarti dari Sri Sultan Hamengku Buwomo IX. Serangan balasan pertama kali yang dilakukan oleh gerilyawan TNI setelah agresi Belanda II yang telah direncanakan sejak tanggal 26 Desember 1948, dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1948. Serangan tersebut dipimpin oleh Letkol Soeharto. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok yaitu besar dan kecil. Kelompok kecil mengadakan serangan pancingan ke luar kota. Sedangkan kelompok besar berusaha masuk dan menghancurkan pos-pos penjagaan Belanda di dalam kota seperti di sekitar Kantor Pos, Secodiningratan, Ngabean, Patuk, Pakuningratan, Sentul, Pengok dan Gondomanan. Serangan seperti itu diulangi beberapa kali yaitu pada tanggal 9 Januari, 4 Februari, dan 16 Februari tahun 1949.

Keempat serangan balas terhadap kedudukan Belanda di Yogyakarta yang dilakukan pada malam hari, belum melibatkan kekuatan maksimal dan belum mempunyai dampak yang luas. Keempat serangan balas tersebut baru merupakan visualisasi dari sistem pertahanan Wehrkreise III dengan titik berat operasi gerilya.

Akibat dari serangan gerilyawan TNI tersebut maka Belanda mengadakan gerakan pembersihan. Tempat-tempat penting seperti kantor-kantor, sekolah-sekolah dan bahkan sampai barang-barang kecilpun termasuk radio disita oleh Belanda. Hanya radio di Kraton saja yang waktu itu bebas dari sitaan Belanda. Oleh karenanya perkembangan yang terjadi diluar dapat diketahui oleh Sri Sultan HB IX melalui siaran radio. Terutama siaran radio yang dipancarkan ke seluruh dunia yang menyatakan bahwa Belanda telah menduduki Yogyakarta dan RI bersama TNI telah hancur. Jelas berita tersebut telah didramaliris Belanda. Mengetahui hal ini maka Sri Sultan Hamengku Buwono IX berpikir harus segera diambil tindakan yang menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI masih tetap eksis. Kemudian melalui kurirnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX segera memanggil Letkol Soeharto untuk melaksanakan aksi untuk menunjukkan bahwa siaran radio yang disebarluaskan oleh Belanda bahwa RI dan TNI telah hancur adalah berita bohong. Oleh karenanya perlu diadakan suatu serangan besar-besaran. Berbeda dengan serangan serentak yang dilakukan sebelumnya, maka TNI

harus mengadakan serangan yang mempunyai dampak internasional secara luas. Serangan dilaksanakan pada siang hari sehingga punya nilai politis yang mampu mempengaruhi jalannya sidang di DK PBB.

Untuk mematangkan gagasan yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX tersebut maka pada tanggal 21 Februari 1949 diadakan rapat rahasia bertempat di Sekretariat Dewan Pertahanan Daerah di Kepatihan Yogyakarta (Gedung Wilis). Rapat dihadiri oleh seluruh komandan Sektor SWK 101, komandan SWK 101, wakil pemerintahan kotapraja, dan wakil gabungan rukun kampung. Rapat selanjutnya diadakan di rumah Bapak Atmonadi di Jl. Kadipaten Lor pada tanggal 26 Februari 1949. Hasil rapat diputuskan untuk mengadakan serangan umum dan untuk mohon restu serta petunjuk dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Setelah mendapat restu dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Panglima Besar Jenderal Soedirman (dari markas gerilyanya) maka Serangan Umum ditentukan pelaksanaannya yaitu pada tanggal 1 Maret 1949. Secara teknis pelaksanaannya diserahkan kepada Letkol Soeharto.

Serangan Umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949, pada siang hari tersebut mempunyai tujuan. Antara lain sebagai berikut :

a. Tujuan Politik

Untuk mendukung perjuangan perwakilan RI di Dewan Keamanan PBB yang dipimpin oleh Lambertus Nico Palar, melawan kampanye Belanda yang menyatakan bahwa “Aksi Polisionilnya” di Indonesia telah berhasil, karena TNI sudah dihancurkan dan Yogyakarta sudah kembali normal.

b. Tujuan Psikologis

Untuk mengobarkan semangat juang rakyat dan TNI. Serangan ini dimaksudkan untuk memulihkan, memupuk, dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap TNI. Karena TNI masih tetap setia pada tugasnya dan dengan gigih terus berjuang menghalau musuh. Serangan umum diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pejuang di seluruh tanah air untuk meningkatkan perlawanan.

c. Tujuan Militer

Untuk membuktikan pada dunia internasional bahwa TNI masih tetap utuh, masih merupakan satuan yang tertib, teratur dan disiplin, serta mampu mengadakan perlawanan secara terkoordinasi dan terkonsentrasi. Disamping itu

untuk membuktikan pula bahwa keberadaan Belanda di Yogyakarta adalah tidak sah, dan berpengaruh terhadap tekad kesetiaan TNI.

Untuk lebih mempermudah hubungan dengan sektor barat, maka pada tanggal 28 Februari 1949 markas Komando WK III dipindahkan dari Segoroyoso, Plered, Bantul ke Bibis, Bangunjiwo, Bantul. Tanggal 1 Maret 1949 pukul 06.00 WIB bertepatan dengan bunyi sirine berakhirnya jam malam dimulailah Serangan Umum. Komandan WK III, Letnan Kolonel Soeharto menempatkan komandonya di sektor barat. Pos komando taktis WK III bergerak meninggalkan Patuk memasuki Jl. Malioboro. Dari sinilah Letnan Kolonel Soeharto mengendalikan pasukan WK III yang mengenakan tanda pengenal "Janur Kuning" yang menyerang dari 4 jurusan.

Sektor selatan, SWK 102 pimpinan Mayor Sardjono menempatkan pos komandonya di Pagelaran, dengan sasaran Kantor Pos, Gedung Negara, Benteng Vredeburg, Pabrik Anim Wirobrajan, Pabrik Watson, Kotabaru, Stasiun Lempuyangan dan pabrik paku Lempuyangan. Pasukan ini terdiri dari Kompi Sumarmo, Kompi Ali Affandi, Kompi Widodo, dan Kompi Sudarmo. Selain itu juga diperkuat oleh satu kompi Sudarsono Bismo dari batalyon Suhardoyo yang berkedudukan di Purworejo dan satu kompi Polisi pimpinan Djohan Suparno.

Kompi Sudarmo berhasil menetralsir kekuatan musuh di barongan, Gesikan dan Bantul serta satu peleton untuk masuk kota dan berhasil menguasai pabrik Anim Wirobrajan. Kompi Ali Affandi, seksi Letda Wasil dengan sasaran Kotagede. Kompi Sumarmo dengan sasaran kantor Pos dan Benteng Vredeburg. Kompi Widodo yang diperkuat dengan satu kompi polisi (Mobil Brigade) MB Musiman, satu seksi polisi MB Kohari, dan dua peleton (Tentara Pelajar) TP Tomas Rahardjo menyerang Pabrik Watson. Dari Sini berhasil mendapatkan amunisi seberat 5 ton, selanjutnya menyerang Kotabaru dan mendapatkan perlawanan yang berat dari Belanda. Kompi Sudarsono Bismo dengan kekuatan 3 peleton tempur dan 1 peleton bantuan menyerang kota Yogyakarta dari arah tenggara dengan sasaran Alun-alun Utara dan Wirogunan. Kompi Polisi pimpinan Djohan Suparno menyerang kedudukan Belanda di Pojok Beteng Timur. Lewat pukul 11.00 Komandan SWK 102 memerintahkan pasukannya meninggalkan kota Yogyakarta dengan lebih dulu mengibarkan bendera Merah Putih di ringin kurung.

Sektor Barat, SWK 103 A pimpinan Ventje Sumual yang terdiri dari batalyon (minus) P.C. Haryo Sudirdjo, dua kompi dari Batalyon Palupessey. Komandan SWK 103 A memindahkan pos komandonya dari Godean ke Dagen. Sasaran pasukan SWK 103A ialah sepanjang Jl. Malioboro, Hotel Tugu, Hotel Merdeka dan Benteng Vredenburg. Kompi Polisi (Mobil Brigade) MB M. Ayatiman tetap mempertahankan Lempuyangan sampai Jl. Maliboro bagian barat. Dalam pertempuran ini gugur seorang anggota polisi. Polisi (Mobil Brigade) MB Subroto dengan kekuatan dua peleton masing-masing dipimpin oleh Sugiyo dan Jilan bergerak menyerang Patuk. Perlawanan yang cukup berat dari sektor barat ini adalah kedudukan Belanda yang berada di Hotel Tugu.

Sektor Utara, SWK 104 pimpinan Mayor Sukasno yang menempatkan pos komandonya di Mrican. Pasukan SWK 104 terdiri dari Pasukan A, Pasukan B, dan Pasukan C. Pasukan A terdiri dari Peleton Vandrigt Kadet Sudjamadi yang mendapat tugas mengikat kedudukan Belanda di Maguwo dari arah utara bekerjasama dengan pasukan dari SWK 105. Peleton Nawawi menyerang kedudukan Belanda di MBT (Markas Besar Tentara) dan Pasukan A lainnya menyerang MBT dan kedudukan Belanda di Gondokusuman dan mendapat perlawanan sengit dari Belanda. Pasukan A selanjutnya bergerak ke Klitren terus ke Sapen dan bersama-sama dengan Pasukan Wiyogo Atmo Darminto (Mantan Gubernur DKI) pada jam 11.00 mundur ke Pejambon.

Pasukan B pimpinan Mayor Sakri dengan kekuatan dua peleton menyerang Hotel Tugu dan Hotel Merdeka. Pada jam 06.00 WIB mereka membuka serangan fajar di Jembatan Kewek dan menewaskan beberapa tentara Belanda, oleh karena disini mendapat perlawanan yang sengit akhirnya mereka mundur ke arah Lempuyangan.

Pasukan C disamping 3 peleton organik yaitu Peleton SS KODM pimpinan Letnan Satu Zidni Nuri, Seksi Polisi Negara pimpinan Inspektur Suragil Sukidi dan Peleton KODM pimpinan Letnan Dua Sudjiman bersama Peleton II Pasukan C dengan sasaran pos kedudukan Belanda di Pingit, Jetis, dan Gondolayu. Jetis dapat segera dikuasai dan Gondolayu dapat segera ditahan. Peleton III Kompi TP Martono pimpinan Letda Aliadi mengikat pos kedudukan Belanda di Medari dan Tempel. Sedangkan Peleton I pimpinan Letnan Satu Sudarsono mengikat pos Belanda di Beran. Seksi (Mobil Brigade)MB

Sumarjan, Seksi Polisi Abdul Rahman dan Peleton II TP Martono mempertahankan Bangirejo untuk menutup jalan ke Yogyakarta dari arah utara.

Sektor Timur, SWK 105 pimpinan mayor Sudjono menempatkan pos komandonya di Sri Martani. Sasaran SWK 105 ialah kedudukan Belanda di Maguwo, Tanjung Tirta, Kalasan dan Prambanan dengan tujuan mengisolir tentara Belanda di timur kota dari induk pasukannya. Pasukan SWK 105 berhasil membumihangus bangunan yang dipergunakan Belanda hingga Belanda mundur ke Wonocatur. Ki Mardjuki dan Peleton Zahid Husein diminta komandan WK III untuk memperkuat serangan umum di dalam Kota Yogyakarta. Peleton Pratelo dan Peleton Abdul Kayat serta Peleton Abdul Rahman menjelang Serang Umum 1 Maret 1949 telah aktif mengadakan serangan pendahuluan untuk mengacaukan pertahanan Belanda di Sentul, Kantor Pos, dan Benteng Vredeburg.

Sedangkan SWK 106, yang tidak terlibat langsung dalam serangan umum di Kota Yogyakarta membuka serangan operasi di wilayahnya yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soedarto. Tujuan dari serangan ini untuk mengikat kedudukan Belanda di Pos Jembatan Bantar, dengan mengerahkan Seksi Staf Pengawal untuk menyerang dari arah barat dan Seksi Nur Munir menyerang dari arah timur. SWK 106 ini merupakan lingkaran pengamanan dalam untuk menghambat bantuan pasukan Belanda dari arah barat. Sedangkan sebagai lingkaran pengamanan luar ditugaskan pada Batalyon Suhardoyo dan Batalyon Sudarmo di Kebumen. Batalyon Daryatmo merupakan lingkaran pengamanan luar di Salam dan Magelang untuk mencegah bantuan Belanda dari arah utara.

Bantuan musuh pada jam 11.00 dari Magelang tiba di Yogyakarta dengan kekuatan 1 Batalyon Infantri Brigade V yang terdiri dari pasukan lapis baja, pasukan Anjing NICA dan Pasukan Gajah Merah pimpinan Kolonel Van Zanten yang terkenal keganasannya waktu bertugas di Kerawang. Berdasarkan pertimbangan taktis dan kekuatan senjata yang tidak seimbang, serta pertimbangan keselamatan rakyat, maka pada jam 12.00 pasukan dan gerilyawan mengundurkan diri ke basis masing-masing. Dengan demikian TNI dan gerilyawan berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam (jam 06.00 s.d. 12.00). Dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, pihak RI timbul korban lebih kurang 353 gugur, sedangkan pihak Belanda menurut beritanya tidak kurang dari

213 tentaranya tewas.

Berita tentang keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Komandan WK III Letnan Kolonel Soeharto yang terkenal dengan 6 Jam di Yogya, berhasil disebarluaskan melalui jaringan radio AURI dengan sandi PC-2 di Playen, Wonosari, Gunung Kidul secara beranting menyusuri jaringan radio AURI di Sumatra. Selanjutnya dipancarluaskan ke luar negeri melalui Birma dan diterima pemancar All India Radio, akhirnya sampai kepada perwakilan RI di PBB, New York USA. Di sisi lain, peristiwa itupun diseberluaskan melalui jaringan radio pemerintahan RI melalui Wonosari dan Balong sampai ke stasiun radio PDRI Sumatra.

33. Penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta, 29 Juni 1949

Serangan Umum yang dilancarkan pada tanggal 1 Maret 1949 berhasil membuka mata dunia bahwa apa yang selama ini diberitakan oleh Belanda tentang hancurnya RI dan TNI hanyalah omong kosong belaka. Oleh karena itu atas inisiatif komisi PBB untuk Indonesia (UNCI : United Nations Commission for Indonesia) pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan antara RI dan Belanda yang diadakan di Hotel Des Indes Jakarta. Perundingan dipimpin oleh Merle Cochran (wakil dari PBB). Pihak RI dipimpin oleh Mr. Roem sebagai ketua, dan Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai wakil ketua. Sedangkan anggotanya terdiri atas Dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Dr. Supomo, Mr. Latuharhary yang disertai dengan 5 orang penasehat. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. Van Royen. Anggotanya antara lain Mr. N.S. Blom, Mr. A.S. Jacob, Dr. J.J. Van der Velde dan 4 orang penasehat. Setelah berjalan sangat alot, maka berkat usaha keras Merle Cochran akhirnya dicapai kesepakatan yang berhasil ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Persetujuan tersebut kemudian dikenal dengan Persetujuan Roem Royen, diambil dari dua nama ketua delegasi, RI dan Belanda.

Adapun prinsip-prinsip dari persetujuan Roem Royen tersebut bahwa RI bersedia untuk :

- a. Sesuai dengan resolusi DK PBB, Indonesia sanggup menghentikan perang gerilya
- b. Bekerjasama mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan dan ketertiban
- c. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan dengan tidak bersyarat.

Selanjutnya Ketua Delegasi Belanda Dr. Van Royen membacakan pernyataannya yang antara lain berisi :

- a. Delegasi Belanda menyetujui pembentukan satu panita bersama di bawah pengawasan komisi PBB
- b. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatannya sepatutnya dalam satu daerah, meliputi daerah Yogyakarta
- c. Menyetujui adanya RI sebagai satu negara
- d. Membebaskan dengan tidak bersyarat pemimpin-pemimpin RI dan tahanan politik yang ditangkap sejak tanggal 19 Desember 1948
- e. Konferensi Meja Bundar akan segera diadakan setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.

Dengan adanya kesepakatan dari persetujuan Roem-Royen tersebut maka Presiden Soekarno yang berada di Sumatra segera memerintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku menteri negara koordinator keamanan untuk menyiapkan segala sesuatunya menjelang pengembalian Yogyakarta dari tangan Belanda, termasuk penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta. Pada tanggal 10 Mei 1949 Komandan Brigade T Kolonel Van Langen, memerintahkan kepada pasukannya yang berada di Karesidenan Yogyakarta untuk menghindari pertempuran-pertempuran dengan pasukan RI. Selanjutnya Menteri Negara Koordinator Keamanan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX memerintahkan kepada komandan TNI di Yogyakarta untuk menghindari pertempuran dengan Belanda.

Pada tanggal 23 Juni 1949 baru ada berita dari Pihak Belanda yang memberitahukan kepada pihak RI di Yogyakarta, bahwa tentara Kerajaan Belanda akan ditarik dari Karesidenan Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 1949 dari Pos Wonosari. Penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta akan dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 1949 yang diatur dalam empat tahap mulai dari selatan ke utara dan keluar kota ke jurusan Magelang.

Pada tanggal 24 Juni 1949 rombongan yang terdiri dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sri Paku Alam VIII, Honggowongso (dari pamong praja), Sumardjan (dari pamong praja) dan Taya (dari kepolisian negara), serta dari Milobs yang ditempatkan di pihak Indonesia adalah Letnan Jenderal Alexander dan Kapten Marshal dan dari Milobs yang ditempatkan di pihak Belanda adalah Mayor Goedfroy dan Mayor Laksos. Mereka berangkat dari Lapangan Terbang

Maguwo menuju Gading Wonosari. Kemudian mereka disambut oleh Kolonel D.B.A. Van Langen. Dengan demikian dimulailah penarikan tentara Belanda yang pertama kali dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk menjaga dan menjamin keamanan kedua belah pihak, maka selama pasukan Belanda ditarik dari posnya, penduduk di sekitar pos itu disepanjang jalan yang akan dilalui pasukan Belanda, dilarang keluar rumah. Seruan ini dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku menteri negara koordinator keamanan dua hari sebelum penarikan mundur tentara Belanda dari kota Yogyakarta dilaksanakan (27 Juni 1949). Satu hari kemudian yaitu tanggal 28 Juni 1949 telah dilaksanakan penyerahan semua lembaga-lembaga dan kantor-kantor serta perusahaan-perusahaan sipil dari pihak Belanda yang dipimpin oleh Leyklama kepada pihak RI yang dipimpin oleh Ir. Suryomihardjo.

Tanggal 29 Juni 1949 dibawah pengawasan UNCI (United Nations Commission for Indonesia) penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta dimulai. Pengawasan dari udara dilakukan dengan menggunakan dua buah pesawat Mo-Hawk dan sebuah pesawat capung Belanda.

Sesuai dengan rencana yang diusulkan Belanda, penarikan tentara Belanda diatur dalam empat tahap sebagai berikut :

- a. Tahap I : Tentara Kerajaan Belanda mulai pukul 07.00 ditarik dari Kota Yogyakarta bagian selatan (Jl. Sentul, Secodining-ratan, Ngabean, Wirobrajan). Selanjut-nya TNI masuk bagian kota tersebut sampai kurang lebih 500 meter dari garis jalan tersebut.
- b. Tahap II : Tentara Kerajaan Belanda mulai pukul 09.30 ditarik dari bagian kota antara jalan-jalan disebut pada tahap I dan jalan kereta api. Selanjutnya TNI masuk ke bagian kota tersebut sampai garis kurang lebih 500 meter di sebelah selatan jalan kereta api.
- c. Tahap III : Tentara Kerajaan Belanda mulai pukul 11.30 ditarik dari bagian kota di sebelah utara jalan kereta api dan sebelah barat Sungai Code. Selanjutnya TNI menduduki bagian kota tersebut.
- d. Tahap IV : Tentara Kerajaan Belanda mulai pukul 14.30 ditarik dari Kota Yogyakarta menuju

Magelang. Selanjutnya TNI menduduki seluruh Kota Yogyakarta. Sore itu tanggal 29 Juni 1949 seluruh Kota Yogyakarta berhasil kembali ke tangan RI. Sehingga tanggal 29 Juni selalu diperingati sebagai hari “Yogya Kembali”.

Pasukan MA yang dipimpin oleh Letnan Wiyogo Atmodarminto masuk kota pada tahap III. Sebelumnya mereka menyiapkan diri di Gejayan. Kemudian di Gejayan dijemput oleh Sri Paku Alam VIII didampingi oleh 2 orang dari Milobs. Pukul 12.00 pasukan mulai masuk kota didampingi Sri Paku Alam VIII dengan rute Pelemkecut-Demangan-Pengok dan kemudian menempat-kan pos komandonya untuk sementara di Rumah Sakit Pusat (Bethesda sekarang) dan dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih di halaman rumah sakit tersebut.

34. Para Pemimpin Negara kembali ke Yogyakarta 6 Juli 1949

Dengan adanya kesepakatan dari persetujuan Roem-Royen yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 maka Presiden Soekarno yang berada di Sumatra segera memerintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku menteri negara koordinator keamanan untuk menyiapkan segala sesuatunya menjelang pengembalian Yogyakarta dari tangan Belanda, termasuk penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta. Dalam persetujuan tersebut juga memuat prinsip bahwa Belanda akan membebaskan para tahanan politik yang ditawan oleh Belanda sejak tanggal 19 Desember 1949 dengan tidak bersyarat. Ini berarti bahwa Presiden Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan para pemimpin lainnya yang ditangkap sewaktu Belanda menjalankan aksi militernya yang ke dua akan segera dikembalikan.

Setelah tentara Belanda meninggalkan Kota Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949, tugas pengamanan Daerah Istimewa Yogyakarta sepenuhnya menjadi tanggungjawab komadan WK III Letkol Soeharto. Sesuai dengan situasi dan kondisi yang baru ini, Komandan WK III tidak hanya bertanggungjawab kepada Gubernur Militer III/Divisi III (Kolonel Gatot Subroto), tetapi juga bertanggungjawab kepada Menteri Negara Koordinator Kemanan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Berkat perhatian Sri Sultan Hamengku Buwono IX terhadap kehidupan rakyat di pedesaan sekaligus memberikan motivasi dan semangat baru bagi rakyat, serta dengan adanya disiplin yang tinggi pasukan

TNI dan pasukan pejuang bersenjata lainnya yang berada di bawah WK III, dan seringnya beliau meninjau daerah-daerah bekas basis-basis gerilya maka keamanan kota Yogyakarta dan sekitarnya cepat pulih dengan penuh kewaspadaan.

Dengan keamanan yang makin mantap ini, maka persiapan untuk menerima kedatangan para pemimpin RI makin sempurna. Pada hari Rabu Kliwon, tanggal 6 Juli 1949, jam 12.25 rombongan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta, Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, menteri Pendidikan Ali Sastoadidjojo, Ketua delegasi Muhammad Roem, Kepala Staf Angkatan Perang Suryadi Suryadarma, beserta para pemimpin lainnya tiba di Lapangan Terbang Maguwo (Adisucipto sekarang) dengan pesawat milik UNCI (United Nations Commission for Indonesia). Di lapangan terbang Maguwo rombongan dari Bangka ini disambut oleh Menteri Negara koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, menteri-menteri yang ada di Yogyakarta dan panitia penyambutan pemerintah RI beserta pembesar-pembesar lainnya dengan upacara resmi. Presiden segera mengadakan pemeriksaan barisan kehormatan. Setelah itu barulah menuju gedung negara Yogyakarta (Gedung Agung). Disepanjang jalan disambut oleh rakyat dengan pekik "Merdeka".

Sesampai di Istana disambut pula dengan upacara penyambutan yang amat sederhana. Hanya upacara singkat dengan pidato sambutan wakil ketua panitia penyambutan yang diwakili oleh Wakil Ketua BPKNIP dan pidato terima kasih dari Presiden Soekarno yang menegaskan bahwa :

".....kembalinya Pemerintah ke Yogyakarta adalah nyata bahwa perjuangan kemerdekaan harus dilanjutkan. Dua faktor utama yang memungkinkan kembalinya pemerintah itu, ialah kekuatan dan keuletan rakyat dan bantuan dunia internasional. Dengan berdoa bersyukur kepada Tuhan atas berkah dan ridho-Nya lebih dari yang sudah-sudah, kita harus insyaf hendaknya, bahwa hanya dengan persatuan yang menjadi sendi perjuangan kita, akan tercapailah cita-cita kita."

35. Konferensi Meja Bundar (KMB), Agustus-Nopember 1949

Setelah permasalahan intern dapat dipecahkan melalui Konferensi Inter Indonesia tahap pertama di Yogyakarta (19-22 Juli 1949) dan tahap kedua di Jakarta (31 Juli- 3 Agustus 1949), maka bangsa Indonesia secara keseluruhan telah siap menghadapi KMB. Tanggal 4 Agustus 1949 telah ditetapkan delegasi RI untuk KMB antara lain Drs. Mohammad Hatta, Mr.

Mohammad Roem, Prof. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastro Amidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Soekiman, Mr. Soejono Hadinoto, Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, dan Mr. Soemadi. Sedangkan perwira-perwira TNI yang duduk dalam delegasi tersebut antara lain Kolonel TB. Simatupang, Komodor Suryadi Suryadarma, Kolonel Soebijakto, Letkol Daan Jahja, dan Mayor Haryono. Untuk Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.

Tanggal 23 Agustus 1949 bertempat di Riderzaal, Den Haag dibuka sidang KMB. Dalam sidang tersebut delegasi RI diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta, delegasi Belanda diketuai oleh Mr. Van Maarseveen sedangkan UNCI (United Nations Commission for Indonesia) diketuai oleh Chritchley.

Setelah sidang berjalan dengan alot, pada tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan penandatanganan Piagam Persetujuan tentang konstitusi RI di kota Scheveningen, Nederland. Pada tanggal 2 Nopember 1949 berlangsung upacara penutupan KMB di Riderzaal, Den Haag dengan hasil ketentuan bahwa Kedaulatan Belanda di Indonesia akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Mengenai masalah Irian Barat akan ditunda satu tahun kemudian, meski dalam kenyataannya berlarut-larut dan resmi menjadi bagian RI sejak 1 Mei 1963 serta dikuatkan melalui Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 yang berisi bahwa rakyat Irian ingin tetap menjadi bagian dari NKRI.

36. Pengakuan Kedaulatan RIS oleh Belanda 27 Desember 1949

Setelah permasalahan intern dapat dipecahkan melalui Konferensi Inter Indonesia tahap pertama di Yogyakarta (19-22 Juli 1949) dan tahap kedua di Jakarta (31 Juli- 3 Agustus 1949), maka bangsa Indonesia secara keseluruhan telah siap menghadapi KMB. Tanggal 4 Agustus 1949 telah ditetapkan delegasi RI untuk KMB antara lain Drs. M. Hatta, Mr. Mohammad Roem, Prof. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastro Amidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Soekiman, Mr. Soejono Hadinoto, Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, dan Mr. Soemadi. Sedangkan perwira-perwira TNI yang duduk dalam delegasi tersebut antara lain Kolonel TB. Simatupang, Komodor Suryadi Suryadarma, Kolonel Soebijakto, Letkol Daan Jahja, dan Mayor Haryono. Untuk Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Tanggal 23 Agustus 1949 bertempat di Riderzaal, Den Haag dibuka sidang KMB. Dalam sidang tersebut delegasi RI

diketahui oleh Drs. Mohammad Hatta, delegasi Belanda diketahui oleh Mr. Van Maarseveen sedangkan UNCI (United Nations Commission for Indonesia) diketahui oleh Chritchley. KMB (Konferensi Meja Bundar) berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 di Riderzaal, Den Haag, Belanda. Setelah sidang berjalan dengan alot selama kurang lebih 3 bulan, pada tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan penandatanganan Piagam Persetujuan tentang konstitusi RI di kota Scheveningen, Nederland. Hasil terpenting dari diadakannya konferensi tersebut adalah bahwa kedaulatan Belanda di Indonesia akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.

Pada tanggal 14 Desember 1949, berkumpul di Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta wakil-wakil pemerintah RI dan pemerintah negara daerah (negara bagian) yang akan menjadi bagian dari RIS serta Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari masing-masing negara bagian tersebut. Mereka bermaksud mengadakan musyawarah federal. Dari hasil pembicaraan dalam musyawarah tersebut berhasil disetujui naskah Undang-Undang Dasar Sementara yang sebelumnya telah disetujui oleh Delegasi RI dan wakil-wakil BFO di Scheveningen 29 Oktober 1949. Undang-undang tersebut disepakati sebagai Konstitusi RIS.

Pada tanggal 15 dan 16 Desember 1949, sesudah hasil KMB diterima oleh Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia segera diadakan sidang pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno oleh suatu Dewan Pemilihan Presiden RIS di Kapatihan Yogyakarta. Ketua Panitia Pemilihan Nasional (PPN) adalah Mr. Mohammad Roem. Panitia tersebut beranggotakan wakil-wakil RI dan wakil negara bagian. Sore harinya hasil sidang Dewan Pemilihan Nasional disampaikan kepada Presiden Soekarno oleh Ketua Panitia Pemilihan Nasional, Mr. Mohammad Roem. Pada tanggal 17 Desember 1949, bertempat di Bangsal Manguntur Tangkil, Sitihiinggal, Kraton Yogyakarta, Ir. Soekarno dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusumah Atmadja sebagai Presiden RIS pada pukul 08.00 dengan disaksikan para undangan yang hadir antara lain : Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Roem, Anak Agung Gde Agung, Mr. Sugiyo Pranoto, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Sri Paku Alam VIII. Hadir pula wakil-wakil dari negara bagian termasuk RI Yogyakarta, pejabat Belanda dan wakil

dari UNCI (United Nations Commission for Indonesia).

Setelah selesai acara pelantikan, dilanjutkan dengan penghormatan terhadap presiden RIS dengan defile militer di Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta yang dipimpin oleh Kolonel Soeharto. Sementara itu Drs. M. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Kabinet dan perdana menteri dilantik pada tanggal 20 Desember 1949 di Istana Kepresidenan Yogyakarta oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden RIS. Adapun sususunan kabinet RIS yang pertama, yang diumumkan oleh Panitia Persiapan Nasional adalah sebagai berikut :

Perdana Menteri	: Drs. M. Hatta
merangkap Menteri Dalam Negeri	: Sri Sultan HB IX
Menteri Pertahanan	
Menteri Dalam Negeri	: Anak Agung Gde Agung
Menteri Keuangan	: Mr. Syafrudin Prawiranegara
Menteri Perekonomian	: Ir. Juanda
Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum	: Ir. Laoh
Menteri Kehakiman	: Prof. Mr. Soepomo
Menteri Pendidikan, pengajaran dan Kebudayaan merangkap	: Dr. Leimena
Menteri Kesehatan	
Menteri Perburuhan	: Mr. Wilopo
Menteri Sosial	: Mr. Kosasih
Menteri Agama	: Wahid Hasyim
Menteri Penerangan	: Arnold Mononutu
Menteri Negara	: Sultan Hamid II
Menteri Negara	: Mohammad Roem
Menteri Negara	: Dr. Soeparno

Guna manandatangani piagam pengakuan kedaulatan RIS yang telah disetujui dalam KMB tersebut, maka pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi RIS yang dipimpin oleh Perdana Menteri Drs. Mohammad Hatta segera berangkat ke negeri Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan RIS. Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan RIS tersebut dilangsungkan di dua tempat yaitu di Belanda dan Jakarta. Di Belanda, tepatnya di ruang tahta istanan Kerajan Belanda, Ratu Juliana, Perdana Menteri Mr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. AMJA. Sassen dan Ketua

delegasi RIS Drs. Mohammad Hatta bersama-sama membubuhkan tanda tangan dalam naskah pengakuan kedaulatan RIS.

Sedangkan di Jakarta penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan RIS dilakukan di Istana Gambir (Istana Merdeka sekarang). RIS diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Belanda diwakili oleh Wakil Tinggi Mahkota AHJ. Lovink.

Pada tanggal yang sama, 27 Desember 1949 di Yogyakarta terjadi peristiwa penting. Di istana kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung) diselenggarakan upacara penyerahan jabatan Presiden Republik Indonesia dari Ir. Soekarno kepada Mr. Asaat (ketua KNIP waktu itu). Ir. Soekarno akan menjabat tugas yang baru yaitu Presiden Republik Indonesia Serikat. Sedangkan tugas Mr. Assaat sebagai ketua KNIP kemudian digantikan oleh Prawoto Mangkusasmito.

37. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Agustus 1950

Terbentuknya RIS (Republik Indonesia Serikat) bertentangan dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Hasrat untuk kembali ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin berkobar-kobar. Cukup parah tindakan Belanda yang telah memecah belah negara Indonesia menjadi negara-negara kecil yang puluhan jumlahnya. Hal ini dilakukan tidak lain hanya untuk melemahkan Republik belaka. Rakyat segera sadar akan apa arti pentingnya persatuan yang telah menjadi amanat proklamasi.

Pada tanggal 16 Januari 1950 wali negara Jawa Timur menyerahkan mandatnya dan melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain seperti Madura, Jawa Tengah, Daerah Padang Sabang, Negara Indonesia Timur, Kota-kota Sulawesi dan juga negara Sumatra Timur, Sumatra Selatan, Bangka dan Pontianak. Pemuda sebagai pelopor gerakan persatuan bangsa berperan aktif dalam aksi demonstrasi pembubaran negara boneka dan jerih payah mereka tidak sia-sia.

Sementara itu pada tanggal 21 Januari 1950, pemerintah RI di Yogyakarta berhasil membentuk kabinetnya yang ke XII. RI sebagai bagian dari RIS tetap memperjuangkan terwujudnya NKRI. Hal ini terlihat dari program kabinetnya yang mencantumkan tujuan utamanya untuk mewujudkan terbentuknya NKRI.

Usaha-usaha untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi di berbagai daerah. Gerakan rakyat menuntut dibubarkannya negara atau daerah bagian dan menggabungkannya dengan Republik Indonesia di Yogyakarta. Penggabungan daerah yang satu dengan yang lain atau negara bagian yang satu dengan negara bagian yang lain secara konstitusional dimungkinkan oleh pasal 43 dan 44 Konstitusi RIS dengan ketentuan penggabungan tersebut dikehendaki oleh rakyatnya dan diatur dengan UU Federal.

Pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RIS dengan persetujuan Parlemen (DPR) dan Senat RIS mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Dengan dasar tersebut berturut-turut negara-negara bagian menggabungkan diri dengan RI Yogyakarta. Sehingga pada tanggal 5 April 1950 hanya tinggal terdiri dari tiga negara bagian yaitu RI, Negara Sumatra Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT). Melihat hasrat rakyat yang begitu besar untuk kembali ke bentuk negara kesatuan maka pemerintah RI menganjurkan kepada pemerintah RIS agar mengadakan perundingan dengan NST dan NIT. Perundingan RIS, NST dan NIT berlangsung tanggal 13 Mei 1950. Setelah RIS mendapat kuasa penuh dari NST dan NIT untuk berunding dengan Pemerintah RI, maka pada bulan Mei 1950 diselenggarakanlah perundingan antara RI dan RIS.

Pada tanggal 19 Mei 1950, kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam "Piagam Persetujuan". Pada pokoknya kedua belah pihak sepakat untuk membentuk sebuah negara kesatuan sebagai penjelmaan RI berdasarkan UUD yang diperoleh dengan mengubah Konstitusi RIS sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip pokok UUD 1945 dan konstitusi RIS dapat masuk di dalamnya. Selanjutnya oleh pemerintah RI dan RIS dibentuk sebuah panitia bersama yang diberi tugas untuk melaksanakan piagam persetujuan 19 Mei 1950 tersebut, khususnya untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan.

Pada tanggal 14 Agustus 1950, parlemen dan senat RIS mengesahkan UUDS Negara Kesatuan Republik Indonesia hasil panita bersama. BPKNIP di Yogyakarta sebelumnya telah menyetujui RUUDS tersebut pada tanggal 12 Agustus 1950.

Akhirnya dalam rapat gabungan parlemen dan senat RIS tanggal 15 Agustus 1950, Presiden RIS Ir. Soekarno

membacakan piagam terbentuknya NKRI. Pada hari itu juga Presiden Soekarno terbang ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden RI dari Mr. Asaat. Demikian tamatlah riwayat RIS. Sebaliknya NKRI seperti yang dicitakan oleh bangsa Indonesia dan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah terwujud kembali.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 bertepatan dengan HUT RI ke 5 dirayakan besar-besaran. Dan hari itu pulalah bendera pusaka Sang Merah Putih berkibar untuk pertama kali di halaman Istana Merdeka Jakarta. Di daerah-daerah perayaan HUT RI ke 5 tersebut dirayakan dengan meriah dan penuh suka cita.

B. Tata Pameran Di Dalam Ruang (*Indoor Exhibition*)

Tata pameran di dalam ruang adalah tata pameran yang digelar di dalam ruang pameran, dalam hal ini adalah ruang pameran Museum Perjuangan. Tata pameran di dalam ruang ini menyajikan koleksi-koleksi Museum Perjuangan yang terkait dengan peristiwa sejarah sejak kedatangan bangsa barat ke Nusantara sampai dengan kembalinya bentuk negara dari RIS (Republik Indonesia Serikat) menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Adapun koleksi-koleksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Replika Meriam

Koleksi ini merupakan replika dari meriam yang terdapat di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Meriam ini merupakan bukti sejarah tentang keberadaan Belanda yang berada di dalam Benteng Vredeburg Yogyakarta. Menurut hasil penelitian bahwa Benteng Vredeburg Yogyakarta (semula bernama Rustenburg) merupakan benteng Belanda di Yogyakarta yang dimanfaatkan secara sempurna oleh VOC sebagai benteng pertahanan mulai tahun 1788. Meriam model seperti itu biasa di pasang di depan pintu gerbang atau di sudut-sudut benteng. Dilihat dari bentuknya, meriam tersebut dulunya terdapat roda yang memungkinkan memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Meriam ini juga merupakan simbol kekuasaan bangsa Belanda yang telah menjajah dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia selama kurang lebih 350 tahun.

2. Miniatur Kapal Armada Laut Belanda

Koleksi ini merupakan miniatur dari kapal armada laut Belanda yang berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di Eropa. Berawal dari diketemukannya kompas, kapal, dan teori-teori (teori Copernicus), maka dimulailah penjelajahan dunia, yang kemudian

mengakibatkan munculnya penjajahan oleh bangsa-bangsa barat atas bangsa-bangsa Asia dan Afrika sejak abad XVI. Dengan modal itulah maka Portugis dan Spanyol mulai melakukan penjelajahan dunia. Mereka bersembayan Gold, Gospel dan Glory yang berarti emas (kekayaan), agama, dan kejayaan (keharuman nama). Dari situlah maka dua negara besar tersebut berkembang menjadi negara imperialis kuno.

Penjelajahan dunia diawali dengan diadakannya Perjanjian Tordesilas di Pulau Verdi yang diadakan pada tahun 1494. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan bahwa dunia telah dibagi menjadi dua bagian. Pulau Verdi ke arah barat adalah milik Spanyol, dan Pulau Verdi ke arah timur adalah milik Portugis. Waktu itu armada Portugis dipimpin oleh Alfonso D'allbuquerque. Pada tahun 1509 armada ini tiba di Malaka. Mereka baru dapat menguasai Malaka pada tahun 1511 karena adanya perlawanan. Pada tahun 1512, armada Portugis melanjutkan perjalanan ke Maluku untuk mencari rempah-rempah. Di Maluku juga tidak bertahan lama karena mendapat perlawanan dari Sultan Baabulah Raja Ternate. Selanjutnya Portugis pindah ke Ambon tahun 1605, dan pindah lagi ke Timor sampai tahun 1976.

Bangsa barat yang datang ke Indonesia kemudian adalah Bangsa Belanda. Motivasi utama dari Bangsa Belanda untuk datang ke Indonesia adalah adanya larangan membeli rempah-rempah di Lisabon pada tahun 1585. Hal itu terjadi menyusul adanya Perang 80 Tahun, dimana Belanda terlibat permusuhan dengan Spanyol. Peperangan terjadi karena tindakan Spanyol yang beragama Katolik dibawah Philip II terhadap Nederland yang mulai pindah ke agama Kristen Protestan (Calvinis), dianggap sangat sewenang-wenang. Tahun 1850, ketika Philip II juga menjadi raja Portugis, para pedagang Belanda mulai dilarang melakukan transaksi yang biasa di Lisabon dan Pelabuhan Portugis yang lain. Pelayaran yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman ke Nusantara pada tahun 1895 merupakan salah satu percobaan Belanda menerobos ketidakpastian akibat politik Philip II itu. Meskipun Belanda merupakan armada yang kuat tetapi mereka lebih mengutamakan perdagangan dari pada kekuatan.

Armada Belanda pertama di Banten pada tanggal 22 Juni 1596. Armada ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman seorang pedagang dari Belanda. Dia berangkat dari Tessel tanggal 21 Maret 1595 dan merupakan sebuah Liga atau Gabungan. Sebagai liga atau serikat, para pedagang Belanda itu mewakili organisasi mereka "Sang Kumpeni dari Jauh" (*de Copagnie van Verre*). Mereka datang dengan empat kapal milik Perhimpunan Pedagang

Amsterdam.

Dalam lima tahun setelah Cornelis de Houtman ke Nederland, tahun 1597 dikirim ke Nusantara tak kurang dari 65 kapal (hanya 54 kapal yang kembali). Sementara itu kota-kota di Nederland yang terlibat dalam pengiriman misi dagang tersebut terlibat persaingan sengit. Seperti wilayah Friesland, Holland Utara, Holland Selatan, memberangkatkan kapal tersendiri. Keadaan tersebut menambah semakin runyamnya keadaan Nederland. Untuk itu, guna mencegah terjadinya perkelahian antar kelompok dan kerugian dagang, maka dibentuklah organisasi perdagangan yang tetap untuk Nusantara yaitu VOC (*Verenigde Oost Indie Compagnie*). Organisasi itu didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Atas nama Parlemen Nedherlan, VOC diberi kekuasaan mengikat hubungan dan memelihara angkatan bersenjata, dan melaksanakan pemerintahan.

3. Mata uang VOC

Mata uang VOC ini merupakan bukti material telah berlangsungnya sistem perdagangan yang memasukkan VOC dalam posisi penting di Nusantara.

Banyaknya pedagang Belanda yang berdagang dengan penduduk pribumi, menimbulkan persaingan antar pedagang Belanda sendiri. Dalam rangka mencegah persaingan antar pedagang, enam kamar dagang dari propinsi dan kota negeri Belanda yaitu Amsterdam, Delf, Middleburg, Rotterdam, Hoorn, dan Enkhuizen mendirikan perusahaan dagang dengan nama Verenigde Oost Indie Compagnie (VOC) pada tahun 1602. Pemerintah Belanda kemudian mendukung usaha VOC tersebut dan menunjuk seorang komisaris berpangkat Gubernur Jenderal yang berkedudukan di Batavia. Untuk pertama kalinya Gubernur Jenderal dijabat oleh Pieter Both (1610 – 1614). Untuk mempermudah lalu-lintas perdagangan dan gaji pegawai, kepada VOC diberikan ijin untuk membawa mata uang yang berlaku di negeri Belanda sebagai alat pembayaran. Karena banyak uang pecahan kecil (uang receh) yang diperlukan, maka VOC juga diijinkan mencetak mata uang di Indonesia.

4. Replika senjata Serdadu VOC

Merupakan replika dari senjata serdadu VOC (laras pendek) yang merupakan atribut VOC dalam rangka menegakkan monopoli dagangnya di Nusantara sebagai wujud eksploitasi terhadap rakyat bumiputera.

Keberhasilan para pedagang Belanda dalam mengambil rempah-rempah di bumi Nusantara mendorong bertambahnya kapal-kapal Belanda yang lain untuk datang ke Nusantara. Dengan

banyaknya para pengusaha dan pedagang Belanda di Nusantara rentan akan adanya persaingan dan perselisihan diantara mereka. Oleh karena itu perlu dibentuk adanya persatuan dagang. Karena itulah maka berdiri VOC (*Verenigde Oost Indie Compagnie*). Organisasi itu didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Atas nama Parlemen Nederlan, VOC diberi kekuasaan mengikat hubungan dan memelihara angkatan bersenjata, dan melaksanakan pemerintahan.

Niat semula hanya ingin berdagang, namun terdorong oleh keuntungan yang luar biasa maka niat tersebut berubah menjadi nafsu yang tak terkendalikan. Oleh karena itulah maka terjadilah praktek monopoli dan akhirnya eksploitasi. Dari sinilah maka kewenangan yang telah diberikan oleh Parlemen Nederland untuk memelihara angkatan bersenjata dan melaksanakan pemerintahan mulai dijalankan. Dengan kekerasan senjata mereka berusaha memaksakan kehendaknya terhadap rakyat.

5. **Buku Kedokteran dari STOVIA**

Buku ini adalah buku yang dipakai oleh para pelajar di STOVIA, yang dulunya bermula dari Sekolah Dokter Jawa di Jakarta.

Pada tahun 1847, Dr. W. Bosch seorang pejabat Kepala Dinas Kesehatan mendapatkan laporan bahwa di wilayah Karesidenan Banyumas berjangkit berbagai macam penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu muncul gagasan agar setiap Kepala Desa (Lurah) diberi sebuah buku tuntunan kesehatan yang berbahasa Jawa atau Melayu. Tujuannya agar dengan buku tersebut masyarakat dapat menjaga kesehatannya. Akan tetapi gagasan tersebut tidak tepat pada sasaran. Gagasan baru muncul dengan dibentuknya Korps Kesehatan atau Juru Kesehatan/Juru Suntik dari kalangan penduduk. Dari gagasan tersebut, maka pemerintah dalam sidangnya pada tanggal 9 Nopember 1847 memutuskan untuk mengambil beberapa orang pemuda yang sehat dan cakap dari seluruh penjuru pulau Jawa yang pandai menulis dan membaca huruf Jawa dan Melayu serta berbakat, untuk dididik menjadi Juru Kesehatan praktis. Mereka akan dididik di Rumah Sakit Militer Weltevreden. Yang dipilih sekurang-kurangnya telah berumur 16 tahun.

Setelah persiapan-persiapan dilalui secara matang, maka bulan Januari 1851 pendidikan tersebut dibuka secara resmi. Sebagai pimpinan kursus ditunjuk Dr. P. Bleeker, Opsir Kesehatan Klas Satu Rumah Sakit Militer Weltevreden, yang memimpin kursus dari tahun 1851-1860. Dalam kursus tersebut diajarkan 15 mata pelajaran yaitu : Dasar-dasar Bahasa Belanda, Berhitung, Ilmu Ukur, Ilmu Bumi (Eropa dan Indonesia), Ilmu Kimia

Anorganik, Ilmu Falak, Ilmu Alam, Ilmu Pesawat (Peralatan Kesehatan), Ilmu Tanah, Ilmu Tumbuh-Tumbuhan, Ilmu Hewan, Ilmu Anatomi Tubuh, Azaz-azaz Patologi, Ilmu Kebidanan, dan Ilmu Bedah.

Berdasarkan Keputusan Pemerintah tanggal 5 Juni 1853 No. 10 sejak tahun 1856 pendidikan ditingkatkan menjadi 3 tahun, dan untuk pertama kalinya diterima murid-murid dari luar Jawa sebanyak enam orang. Masing-masing dua orang dari Sumtra Barat, dua orang dari Minahasa dan dua lainnya dipilih dari pulau-pulau yang lain.

Dengan dimulainya sistem pendidikan 3 tahun, maka menurut Keputusan Pemerintah tanggal 11 Mei 1856 No. 3 kepada para lulusan sekolah tersebut diberikan gelar Dokter Jawa, dan dengan demikian kursus juru kesehatan itupun berubah menjadi Sekolah Dokter Jawa. Setelah mereka lulus dan mulai menjalankan tugas para Dokter Jawa itu berada di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Sipil.

Pada tahun 1867 muncul sebuah brosur yang ditulis oleh Dr. Fles, yang kemudian disusul dengan pernyataan J.J.W.E. van Riemsdijk pada tahun 1868 yang secara tegas menjelaskan bahwa pendidikan 3 tahun untuk mencetak Dokter-dokter Jawa sama sekali tidak atau belum mencukupi persyaratan. Oleh karena itu masa belajar harus lebih ditingkatkan lagi. Menanggapi hal tersebut maka Dr. C. Eijkman, direktur Sekolah Dokter Jawa 1888-1896 mengemukakan usul sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pendidikan yang mengambil dasar lulusan Sekolah Dasar harus ditingkatkan menjadi lima tahun.
- b. Harus disusun buku-buku pegangan mengajar yang memenuhi syarat-syarat untuk mencapai peningkatan pelajaran.
- c. Pelajaran praktek kedokteran harus lebih diintensifkan.

Usul yang disampaikan oleh Dr. Eijkman tahun 1889 tersebut disambut dengan saran lain supaya siswa-siswa yang dapat diterima menjadi pelajar Sekolah Dokter Jawa hendaknya adalah murid-murid lulusan ELS (Europeesche Lagere School). Dan jika masih terpaksa menerima lulusan sekolah dasar sebaiknya pendidikan diselenggarakan selama 6-8 tahun.

Saran-saran dan usul-usul yang disampaikan demi perbaikan mutu Sekolah Dokter Jawa mencapai klimak pada tahun 1898. Saran tersebut diajukan oleh Dr. H.F. Roll, seorang direktur Sekolah Dokter Jawa yang memegang jabatannya tahun 1901-1908. Dr. H.F. Roll dengan tegas menyatakan bahwa Sekolah Dokter Jawa harus ditingkatkan menjadi School toot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA). Oleh karena itulah maka Dr. H.F.

Roll disebut sebagai Bapak STOVIA.

Beberapa usulan yang diajukan oleh Dr. H.F. Roll, setelah melalui proses yang memerlukan perjuangan hebat, akhirnya pada tahun 1900 menjadi kenyataan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang cukup untuk mewujudkan berdirinya STOVIA. Selanjutnya sisa-sisa para siswa Sekolah Dokter Jawa (Dokter Jawa School) yang masih ada pada tahun itu, tidak dicetak lagi menjadi Dokter Jawa, melainkan meneruskan pelajarannya di STOVIA. Oleh karena itu pada tahun 1903-1904 STOVIA yang baru diresmikan selama 4 tahun tersebut, telah berhasil mencetak 11 orang *Inlandsch Artsen*.

6. **Barang-barang milik RM. Soerjopranoto**

Barang-barang bersejarah berupa udheng (penutup kepala), mesin ketik, dan peralatan makan (piring dan *enthong*) adalah milik seorang tokoh pejuang pahlawan kemerdekaan yang bernama RM. Soerjopranoto.

RM. Soerjopranoto adalah seorang bangsawan Istana Pura Pakualaman yaitu putra pertama dari KPH. Suryaningrat (putra Paku Alam III) yang lahir pada tanggal 11 Agustus 1875 dengan nama kecil RM. Iskandar. Disamping sebagai seorang pendiri PFB (*Personeel Fabrieks Bond*), dia juga seorang Ketua SI (*Sarekat Islam*) Yogyakarta dan sekaligus tokoh dari sekolah *Adi Dharma*.

Pada awal abad XX kehidupan buruh di pabrik-pabrik gula sekitar Yogyakarta mengalami nasib yang memprihatinkan. Upah pekerja atau buruh sangat rendah sehingga tidak mencukupi untuk hidup yang layak bagi keluarganya. Hal ini disebabkan oleh adanya inflasi yang timbul akibat terjadinya Perang Dunia Pertama. Oleh karena itulah pemerintah Hindia Belanda berusaha mencari pemasukan sebanyak-banyaknya bagi kas negaranya.

Situasi dan kondisi yang menimpa kaum buruh itu membangkitkan kesadaran para pemimpin buruh, diantaranya RM. Soerjopranoto (kakak Ki Hadjar Dewantara). Demi membela nasib kaum buruh, Beliau memelopori berdirinya organisasi serikat buruh yang diberi nama *Personeel Fabrieks Bond* (PFB) pada bulan November 1918 (Sumber lain mengatakan FPB dirikan tahun 1917).

Hampir bersamaan dengan berdirinya PFB, waktu itu muncul pula organisasi-organisasi buruh yang lain. Seperti di lingkungan karyawan bumiputera pada departemen pekerjaan umum muncul *VIP-BOW* (*Vereeniging Inlandsch Personeel Burgerlijke Opendbare Warken*), untuk buruh pelabuhan terbentuk *HAB* (*Havens Arbeiders Bond*), untuk buruh percetakan timbul *Perserikatan Boerroeh Tjitak*, untuk buruh tambang muncul *SPPH*

(Sarekat Pegawai Pelikan Hindia) dan untuk pegawai kehutanan muncul PPDH (Perserikatan Pegawai Dinas Hutan).

PFB segera tumbuh menjadi organisasi yang kuat dan berada dibawah kendali SI (Sarekat Islam) cabang Yogyakarta pimpinan RM. Soerjopranoto yang kebetulan sekaligus menjabat sebagai komisaris CSI (Central Sarekat Islam) dan ketua SI Yogyakarta. Ia juga pemimpin Adhi Dharma, yaitu sebuah paguyuban para pangeran Kasultanan Yogyakarta.

Berdirinya PFB ini mendapat sambutan baik di kalangan kaum buruh di Yogyakarta, sehingga anggotanya mencapai 30.000 orang. Adapun tujuan PFB itu ialah untuk memberikan pertolongan kepada keluarga buruh pabrik di sekitar Yogyakarta.

RM. Soerjopranoto sebagai ketua PFB selain mendapat dukungan dari kaum buruh, ia juga mendapat dukungan dari Sarekat Islam, sebab RM. Soerjopranoto juga anggota pengurus Central Sarekat Islam. Oleh karena itu keberaniannya menuntut perbaikan nasib kaum buruh dan perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang majikan orang Belanda mendapat dukungan yang kuat pula. Oleh karenanya mendapat julukan komandan tentara buruh (Arveidsleger).

Pada bulan Februari 1919 pengurus PFB terbentuk yang kemudian disebut Komite Sentral (Central Komite). Pengurus pusat ini terdiri dari RM. Soerjopranoto sebagai ketua, Soemodihardjo sebagai sekretaris dan Soemoharjono bendahara. Sebulan kemudian dengan anggota-anggota yang telah dapat digalangnya PFB ini telah mampu mempengaruhi gerakan buruh pabrik di seluruh Jawa pada musim tebang dan giling tebu pada bulan April-Agustus. Pada akhir tahun 1919, PFB telah menjadi organisasi buruh terbesar di Hindia Belanda dengan kurang lebih 90 cabang, 10.000 anggota di seluruh Jawa, dan berhasil menerbitkan sebuah surat kabar dengan nama "Surat Kabar Boeroeh Bergerak".

Pada waktu penguasa kebun tebu bertindak sewenang-wenang dalam hal sewa tanah wajib pada Belanda, dengan ganti rugi yang sangat rendah, dan pemberian upah gaji sangat rendah, hal itu dianggap telah merendahkan martabat bangsa. Oleh karena itu RM. Soerjopranoto melalui PFB mengajukan tuntutan untuk menaikkan upah buruh dan sewa tanah yang layak bagi bangsa pribumi. Namun pihak Belanda yang waktu itu sebagai penguasa tebu tidak menuruti tuntutan itu. Penolakan itu mengakibatkan bangkitnya semangat kaum buruh untuk menentang penguasa kebun tebu dan pabrik gula.

Meskipun pemerintah Belanda mengadakan larangan untuk

mengadakan pemogokan, namun seluruh buruh pabrik gula di Yogyakarta dengan dipimpin oleh RM. Soerjopranoto tetap mengadakan aksi pemogokan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1920.

Berkat kegigihan perjuangan kaum buruh tersebut, akhirnya pihak penguasa pabrik terpaksa menuruti tuntutananya dengan menaikkan upah buruh, yang semula £10,- dinaikkan menjadi £15,- yang berarti naik sebesar 50% dari upah semula.

Sebagai akibat dari adanya pemogokan kaum buruh di pabrik gula tersebut kemudian memberi inspirasi bagi buruh-buruh lain seperti di buruh perkembunan, pegadaian maupun di perusahaan kereta api milik pemerintah Belanda. Oleh karena keberaniannya melakukan pemogokan, kemudian RM. Soerjopranoto mendapat sebutan "de staking koning" yang berarti raja pemogokan.

Mengingat benda tersebut memiliki nilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 2 Oktober 2002 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 591/SB/UPT/BD/02.X/2002, Mesin Ketik, udheng, piring dan sendok tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

7. Miniatur Kepanduan

a. Miniatur Pandu HW (Hizbul Wathan)

Sejalan dengan perkembangan sejarah yang terjadi, organisasi kepanduan tumbuh bersama dengan organisasi pergerakan. Setiap organisasi pergerakan baik itu yang berasaskan kebangsaan ataupun agama akan membentuk organisasi kepanduan yang bernaung dibawahnya. Pada tahun 1918 atas prakarsa KHA. Dahlan, Muhammadiyah mendirikan organisasi kepanduan yang bernaung dibawahnya dengan nama "*Padvinders Muhammadiyah*" di Yogyakarta. Organisasi ini dipimpin oleh Siraj Dahlan dan Sarbini. Setelah berkembang selama dua tahun, kemudian tahun 1920 R.H. Hajid mengusulkan agar nama Padvinders Muhammadiyah diganti. Adapun nama yang diajukan adalah "*Hizbul Wathan*" yang kemudian disingkat dengan HW.

Pandu HW berseragam warna hijau muda kecoklatan dengan celana pendek sampai di bawah lutut terlipat keluar warna biru tua, memakai topi dari bambu warna coklat kehitaman, berkalung dook warna hijau bergambar lambang Muhammadiyah, memakai kaos kaki panjang dan bersepatu.

b. Miniatur KBI

KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia) merupakan sebuah organisasi kepanduan yang terbentuk pada tanggal 13 September 1930 dan merupakan bentuk baru hasil fusi dari Pandu Kebangsaan, Pandu Pemuda Sumatra (PPS) dan Indonesische Nationale Organisatie (INPO). Adapun para perintis berdirinya KBI adalah : dari PK terdiri dari Dr. Muwardi, Suratno, dan Sugandi. Dari INPO terdiri dari Suwarjo Tirtosupeno, Dr. Supardan, dan Pentor. Dari PPS terdiri dari Prof. Dr. Bhaider Johan, Dr. Nazir, dan Dr. Syagaf. Pandu KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia) berseragam baju warna hijau kecoklatan, dengan celana pendek warna sama dengan bajunya, memakai kaos kaki panjang, bersepatu, memakai topi terbuat dari bambu warna coklat tua, berkalung dook warna merah putih.

c. Miniatur Pandu Rakyat

Dalam rangka mewujudkan cita-cita persatuan, maka atas prakarsa KBI, pada akhir bulan April 1938 di Solo diadakan pertemuan dengan mengundang beberapa pimpinan kwartir besar kepanduan lainnya. Dalam pertemuan tersebut dapat disetujui untuk mendirikan suatu badan untuk mengurus penyelenggaraannya, yang kemudian dikenal dengan Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) yang berkedudukan di Solo.

Ketika bangsa Indonesia mengalami masa pendudukan Jepang, maka seluruh organisasi pergerakan, termasuk gerakan kepanduan dilarang mengadakan kegiatan. Kegiatan mereka lebih diarahkan pada kegiatan disiplin militerisme demi keuntungan Jepang. Sebagai gantinya akan muncul PETA, Heiho, Seinendan, maupun Keibodan. Api semangat kepanduan kembali muncul setelah Indonesia memasuki jaman kemerdekaan setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pada akhir bulan September 1945 di Gedung Balai Mataram Yogyakarta berkumpul beberapa pemimpin pandu dari KBI, HW, SIAP, NATIPIJ, Tri Dharma, Kepanduan Azaz Katolik Indonesia, dan Pandu Kasultanan. Dari perkumpulan itu berhasil memutuskan untuk : a).Membentuk Panitia kesatuan Kepanduan Indonesia. b).Menganjurkan pembentukan satu organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia, c).Membentuk satu Panitia Kerja untuk melaksanakan anjuran itu. d).Mengadakan secepat mungkin Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia.

Selanjutnya Kongres Kepanduan Indonesia berhasil

diselenggarakan di Surakarta tanggal 27-29 Desember 1945. Kongres dihadiri para mantan pemimpin kepanduan antara lain KBI, HW, SIAP, NATIPIJ, JPO, Kepanduan Azaz Katolik Indonesia, Teruna Kembang, Tri Dharma, Al Wathoni, Hizbul Islam, Sinar Pandu Kita, Kepanduan Rakyat Indonesia, Pandu Kasultanan, Pandu Indonesia dan Pandu Pasundan. Semuanya berjumlah kurang lebih 300 orang. Pada tanggal 28 Desember 1945, kongres memutuskan untuk membentuk organisasi kesatuan kepanduan dengan nama Pandu Rakyat Indonesia. Kongres juga memutuskan bahwa para mantan pimpinan KBI ditunjuk sebagai pengurus besar yang pertama. Merka adalah dr. Muwardi sebagai ketua, Hertog sebagai Komisaris Besar umum bagian putra, dan Ny. Suhariah Sutarman sebagai komisaris umum bagian putri.

Pada upacara pelantikan yang dipimpin Dr. Muwardi para pemimpin pandu menyatakan ikrar bersama yang dinamakan "Panji Ikatan Sakti", yang bunyinya :

1. Melebur segenap perkumpulan kepanduan Indonesia dan dijadikan satu organisasi kepanduan Pandu Rakyat Indonesia.
2. Tidak akan menghidupkan lagi kepanduan yang lama
3. Tanggal 28 Desember diakui sebagai "Hari Pandu" bagi seluruh Indonesia.
4. Mengganti setangan leher yang beraneka warna dengan warna hitam.

Pandu Rakyat Indonesia yang didukung oleh segenap pemimpin pandu dan diikat kuat dengan "Janji Ikatan Sakti" diakui oleh pemerintah RI sebagai satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia. Pengakuan ini berdasarkan Keputusan Menteri PP dan K Nomor 93/Bag. A tertanggal 1 Februari 1947.

Pandu Rakyat berseragam baju warna hijau kecoklatan, dengan celana pendek warna sama dengan bajunya, memakai kaos kaki panjang, bersepatu, memakai topi dari bambu warna coklat tua, berkalung dook warna hitam berplisir ganda warna merah.

d. Miniatur Pramuka

Sementara itu terjadi pengakuan kedaulatan RIS tanggal 27 Desember 1949, kemudian bentuk negara menjadi NKRI tanggal 17 Agustus 1950. Pada masa itu demokrasi parlementer menjadi sistem demokrasi yang dipilih pemerintah. Partai-partai berlomba mendapatkan kedudukan, perkecokan dan pertikaian muncul sebagai kembang-

kembang sejarah. Hal ini ternyata memberikan dampak pula dalam perkembangan kependuan di Indonesia. Organisasi kependuan yang dulu dilebur dalam satu organisasi yaitu Pandu Rakyat Indonesia, satu persatu mulai memisahkan diri.

Tanggal 8 Januari 1952 bekas pandu KBI putra dan putri Mataram berkumpul di Dalem Tegalorejo Yogyakarta untuk menyatakan berdirinya kembali KBI. Peristiwa ini kemudian diikuti oleh bekas pandu KBI di kota-kota lain, dan banyak diantara mereka yang menggabungkan diri dengan KBI cabang Yogyakarta (Mataram). Pada bulan Maret 1952 di Yogyakarta diselenggarakan kongres kilat KBI yang dihadiri para pimpinan KBI daerah. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk Pengurus Besar Sementara dan menyusun pedoman kerja sampai pada kongres yang akan datang. Sebagai Ketua pengurus Besar dan Komisaris Besar Sementara dipilih Dr. Sahir Nitiharjo dan Hertog. Sejak itu tugas-tugas di cabang-cabang dipergiat termasuk Cabang KBI Mataram.

Pada pertengahan bulan September 1953 KBI berhasil mengadakan kongresnya yang pertama. Dalam kongres itu diputuskan mengesahkan Dr. Sahir Nitiharjo dan Hertog masing-masing sebagai Ketua Pengurus Besar dan Komisaris Besar KBI. Sewaktu KBI mengadakan ulang tahun ke XXV, berhasil mendirikan pusat tempat latihan bagi calon pemimpin pandu. Pusat tempat latihan ini didirikan Di Babarsari Yogyakarta dan diresmikan tanggal 17 September 1955.

Pada tanggal 9 Maret 1961 pukul 20.00 WIB para tokoh dan pimpinan pandu yang mewakili organisasi-organisasi kependuan yang ada di Indonesia berkumpul di Istana Merdeka untuk mendengarkan amanat Presiden Soekarno. Dalam amanat tersebut Presiden Soekarno memutuskan untuk mengambil tindakan tegas dengan membubarkan semua organisasi kependuan yang ada di Indonesia, untuk dilebur dalam satu wadah organisasi baru yang bernama "Gerakan Pramuka". Gerakan Pramuka ini sebagai satu-satunya organisasi yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kependuan di Indonesia.

Kemudian pada tanggal 30 Juli 1961 para wakil organisasi kependuan termasuk KBI berkumpul di Istana Olah Raga Senayan Jakarta. Mereka bersama-sama dengan sukarela membuat pernyataan untuk meleburkan diri ke dalam satu organisasi kependuan yang bernama Gerakan Praja Muda Karana atau Pramuka. Tanggal 30 Juli 1961 kemudian disebut

sebagai hari Ikrar Gerakan Pramuka. Selanjutnya baru pada tanggal 14 Agustus 1961 organisasi Gerakan Pramuka dengan resmi diumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 14 Agustus ini kemudian disebut sebagai hari Pramuka.

Pramuka berseragam baju warna kuning kecoklatan, lengan baju bagian atas bertanda huruf Yogyakarta warna merah di atas dasar putih, dalam susunan melengkung, pada saku bajunya bertanda lambang Pramuka, memakai kaos kaki, memakai celana pendek warna coklat tua, memakai lambang Pramuka, berkalung dook warna merah putih berbentuk segitiga dalam lipatan.

8. Tugu KBI

Tugu KBI merupakan tanda atau peringatan peristiwa meleburnya organisasi kepanduan di Indonesia ke dalam satu wadah yaitu Kepanduan Bangsa Indonesia, pada tanggal 13 September 1930 di Jakarta.

Dasar ide pendirian kepanduan diletakkan oleh Lord Robert Baden Powell of Gilwell, seorang bekas Jenderal Kolonial Inggris yang lama mengabdikan diri sebagai tentara kolonial Inggris. Menurutnya kepanduan adalah organisasi sport yang bersifat kemiliteran, organisasi pendidikan sosial dengan dasar humanisme yang bercita-cita persudaraan dan perdamaian.

Berbeda dengan kepanduan yang ada di Indonesia pada awal-awal berdirinya. Kepanduan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pergerakan nasional pada umumnya dan pergerakan pemuda pada khususnya. Organisasi kepanduan waktu itu lebih cenderung menjadi objek pendidikan bagi organisasi perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia.

Munculnya organisasi kepanduan di Indonesia ditandai dengan adanya sebuah organisasi kepanduan yang ditujukan untuk para pemuda dan remaja Belanda di Indonesia. Organisasi tersebut adalah cabang dari *Nederlands Padvinderij Organisation* (NPO) yang didirikan pada tahun 1912 oleh P.J. Smits dan Mayor De Yager. Akibat meletusnya Perang Dunia Pertama, hubungan Indonesia Belanda menjadi terputus, sehingga cabang NPO di Indonesia pada tanggal 4 September 1914 diberi wewenang untuk berdiri sendiri, sehingga berdirilah *Nederlandsche Indische Padvinderij Vereeniging* (NIPV).

Berdirinya NIPV memberikan inspirasi kaum bumi putera untuk membentuk organisasi kepanduan. Oleh karena itulah maka pada tahun 1916 atas prakarsa KGPAA Mangkunegoro VII di Surakarta didirikan organisasi kepanduan nasional yang pertama dengan nama "*Javaansche Padvinderij Organisatie*" atau JPO,

yang kemudian segera disusul dengan berdirinya organisasi "Teruna Kembang" di daerah kasunanan dibawah pimpinan Pangeran Suryobroto.

Dengan banyaknya berdiri organisasi kepanduan Belanda, maka organisasi kepanduan kolonial Belanda memandang perlu dibentuk sebuah organisasi kepanduan yang mampu menghimpun kepanduan anak Belanda. Organisasi itu diberinama "*de Nederlands Indische padvinders Organisatie*" atau NIPO. Organisasi ini merupakan bagian dari organisasi kepanduan di negeri Belanda, yaitu "*Nederlandsche-Padvindery*" atau NP. Akan tetapi keberadaan organisasi itu tidak menjadi penghalang berdirinya organisasi kepanduan Indonesia. Bahkan setiap organisasi pemuda maupun organisasi pergerakan nasional dalam perkembangannya mempunyai organisasi kepanduan. Dengan demikian menjamurlah organisasi-organisasi kepanduan yang tumbuh bersama organisasi pemuda dan pergerakan nasional sebagai naungannya antara lain : Kepanduan Jong Java yang kemudian diberinama "*Jong Java Padvindery*" atau JJP yang pada tahun 1928 menjadi "Pandu Kebangsaan". Pada tahun 1918 atas inisiatif KHA. Dahlan organisasi Muhamaddiyah mendirikan organisasi kepanduan dengan nama "*Padvinders Muhamaddiyah*" yang kemudian tahun 1920 diganti menjadi "*Hizbul Wathan*". Dari SI muncul "*Sarekat Islam Afdeeling Padvindery*" atau SIAP yang pada kongresnya tanggal 2-5 Februari 1928 namanya diubah *Serikat Islam Afdeeling Pandu* (Serikat Islam Bagian Pandu). Tahun 1924 dari PKI juga muncul organisasi kepanduan yang diberinama "*International Padvinder Organisasi*" atau IPO di Semarang. Dari Jong Islamieten Bond muncul "*Nasionale Islamietische Padvindery*" atau NATIPY. Dari Algemeene Studi club muncul *Nasional Padvinders Organisatie* (Organisasi Pandu Nasional) yang kemudian disingkat NPO. Dari Boedi Oetomo muncul *Nasional Padvinderij* (Kepanduan Nasional), sedangkan dari Tamasiswa berdiri organisasi kepanduan Siswo Projo. Organisasi kepanduan lain yang berasaskan agama antara lain Kepanduan al Irsyad, Tri Dharma (dari Kristen), Kepanduan Azas Katolik (dari Katolik), dan Al Kasjaaf van Wal Fadjrie.

Perkembangan tersebut menunjukkan betapa besar antusias para pemuda untuk mendirikan organisasi kepanduan. Sejalan dengan perkembangan kesadaran nasional, dipandang perlu untuk dibentuk sebuah badan untuk mengkoordinasi berbagai organisasi kepanduan tersebut. Oleh karena itulah maka pada tahun 1927 dibentuk badan federasi antara organisasi kepanduan Indonesia yang diberi nama "*Persaudaraan Antar Pandu Indonesia*" atau

PAPI yang dipimpin oleh Mr. Sunario. Beberapa organisasi kependuan yang menjadi anggota PAPI antara lain : IPO, JJP, NATIPIJ, SIAP, Al Kasjaaf van Wal Fidjrie, Nationale Padvinderij, dan Siswo Projo. Sedangkan HW tidak masuk.

Kesadaran nasional untuk mempersatukan semua organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan berlangsung dengan sukses. Perkembangan tersebut memberikan inspirasi bagi organisasi kependuan untuk menyatukan diri dalam organisasi kependuan nasional. Untuk mencapai maksud tersebut maka pada tanggal 15 Desember 1929 di Jakarta dilangsungkan sebuah konferensi yang dihadiri oleh pimpinan pusat berbagai organisasi kependuan yang ada. Dalam konferensi itu Pandu Kebangsaan (PK) yang dipimpin Dr. Muwardi mengusulkan supaya diadakan fungsi oleh semua organisasi kependuan untuk mewujudkan satu organisasi kependuan Indonesia. Oleh karena tidak semua yang hadir dapat menyetujui maka diambil kesimpulan untuk menyatukan berbagai organisasi kependuan yang berazaskan kebangsaan, dan yang berazaskan agama (Islam). Pandu-pandu kebangsaan dari Jong Java, Indonesische Nasional Padvinder Organisatie dan Pandu Indonesia, pandu Pemuda Sumatra dari Jong Sumatra sepakat untuk berfusi. Untuk selanjutnya pada bulan Februari 1930 terbentuklah komisi untuk mempersiapkan fusi.

Sesuai dengan semangat persatuan, maka pada tanggal 13 September 1930, atas prakarsa "Pandu Kebangsaan" di Jakarta lahirlah Kependuan Bangsa Indonesia (KBI). KBI merupakan peleburan dari Pandu Kebangsaan, Pandu Pemuda Sumatra (PPS) dan Indonesische Nationale Organisatie (INPO). Adapun para perintis berdirinya KBI adalah : dari PK terdiri dari Dr. Muwardi, Suratno, dan Sugandi. Dari INPO terdiri dari Suwarjo Tirtosupeno, Dr. Supardan, dan Pentor. Dari PPS terdiri dari Prof. Dr. Bhader Johan, Dr. Nazir, dan Dr. Syagaf.

Sedangkan organisasi yang berasaskan Islam tidak turut bergabung mengadakan fusi, tetapi kemudian membentuk Federasi Kependuan Islam. Organisasi kependuan yang masuk dalam federasi ini antara lain Hizbul Wathan dari Muhamaddiyah, SIAP dari SI, NATIPIJ dari Jong Islamieten Bond dan Al Kasjaf Wal Fadjri. Sedangkan kependuan Siswo Projo dari Tamansiswa tetap berdiri sendiri.

KBI berasas kebangsaan, tidak berhaluan politik dan tidak menjadi bagian dari suatu partai. Namun demikian KBI tidak melarang pandu-pandunya yang telah berusia 18 tahun, ikut dalam pergerakan politik di luar kependuan.

Adapun tujuan dari KBI antara lain : a) Ikut serta mendidik

putra dan putri Indonesia supaya menjadi warga negara yang sehat, bahagia dan berguna bagi nusa dan bangsa. b) Mempersatukan kepanduan yang berasaskan kebangsaan dan bersama-sama dengan organisasi kepanduan lain mengurangi rasa kedaerahan c) Meluaskan rasa kebangsaan dan cinta tanah air sampai seluruh pelosok wilayah Indonesia, serta memberi dasar perjuangan kemerdekaan dari bangsa Indonesia, dan d) Menghasilkan tenaga yang sanggup memikul kewajiban yang berat untuk kepentingan bangsa dan tanah air sebelum dan sesudah Indonesia merdeka.

Sebagai pengurus besar KBI yang pertama adalah :

Ketua	:	Suwarjo Tirtosupono
Wakil Ketua I	:	Suratno Sastroamijoyo
Wakil Ketua II	:	Bahder Johan
Penulis Umum	:	Sugandhi Pringgiamtomo
Penulis II	:	Kuncoro Purbopranoto
Bendahara	:	Sukarman Kartorejo
Pembantu	:	Patah, Hendrosartono dan Kustio

Sedangkan pengurus Kwartir Besar KBI terdiri dari :

Komisi Besar	:	Muwardi
Ajun Komisaris Besar	:	Sunarjo Atmodipuwu
Penulis	:	Suardiman
Komisaris Penuntun	:	Surip Suwowidagdo
Komisaris Pandu	:	Abdul Aziz Saleh
Komisaris Pandu Muda	:	Santo
Komisaris Go. Putri	:	Ny. Suratman, Ny. Suratmi Saleh, Aminah, Sunarti dan Prabandari

Pembantu untuk kursus-kursus:

Santoso

Kemudian pada bulan September 1930 di Yogyakarta berdiri KBI Cabang Yogyakarta, adapun pengurus Kwartir Cabang Mataram terdiri dari :

Ketua	:	Hertog
Bendahara	:	Ruswo
Komisaris Pandu Muda	:	Samsu
Komisaris Golongan Pandu	:	Deblod Sundoro
Komisaris Golongan Penuntun	:	Supeno
Komisaris Golongan Putri	:	Peni Sundoro

Sejak KBI Cabang Mataram berdiri, selalu mengikuti program-program yang disusun dari pusat. Selain dari itu KBI Cabang Mataram juga mengadakan program kegiatan sendiri antara lain setiap hari Sabtu sore dan Minggu pagi mengadakan latihan seperti baris-berbaris, menyanyi, ketrampilan dan sebagainya. Sedang untuk Minggu sore dipergunakan untuk kursus

para kelapa regu. Keculai itu, pada setiap Minggu sore juga diadakan rapat dewan pimpinan cabang. Untuk sebulan sekali KBI Cabang Mataram mengadakan latihan bersama dari ketujuh kelompok (regu) KBI cabang Mataram yang disebut *algemene oefening*. KBI Cabang Mataram mempunyai tujuh kelompok, yaitu : Kelompok I Bumijo, Kelompok II Baciro, Kelompok III Joyodipuran, Kelompok IV Kuncen, Kelompok V Klitren, Kelompok VI Jetis, Kelompok VII Bausasran. Dari kelompok-kelompok tersebut yang paling disegani adalah kelompok Bumijo dan mendapat sebutan *amstrotip*. Hal ini disebabkan anggotanya sebagian besar adalah para siswa AMS.

Pada akhir bulan Desember 1930, KBI mengadakan kongres pertamanya di Ambar Binangun, Yogyakarta. Kongres itu juga dikenal sebagai Jambore Nasional KBI Pertama. Kongres KBI pertama ini dihadiri oleh 38 cabang atau 2/3 dari seluruh cabang yang berjumlah 57 buah. Dari 38 cabang KBI yang hadir dalam kongres hanya 15 cabang yang telah diakui syah sebagai cabang KBI. Cabang lainnya belum karena syarat-syarat untuk diakui belum lengkap. Adapun ke 15 cabang KBI itu adalah Jakarta, Surabaya, Bogor, Mataram, Solo, Semarang, Salatiga, Magelang, Purworejo, Madiun, Kediri, Malang, Tabanan (Bali), Bakumpai (Kalimantan), dan Bukit Tinggi (Sumatra). Waktu itu utusan KBI Mataram (Yogyakarta) adalah Darmosugito, Hertog, Ruswo, dan Peni Sundoro.

Kongres KBI pertama ini dipimpin oleh Suwarjo Tirtosupono dan Muwardi, masing-masing sebagai Ketua Pengurus Besar dan Komisaris Besar. Titik berat pembicaraan dalam kongres tersebut mengenai perumusan peraturan yang sudah ada dan berasal dari ketiga organisasi kepanduan yang telah menjadi satu untuk dipakai sebagai pedoman kerja KBI. Ketika kongres tersebut akan berakhir, tiba-tiba daerah sekitar Muntilan tertimpa bencana alam meletusnya gunung Merapi. Saat itu KBI segera mengerahkan pandunya untuk mengurangi penderitaan para korban. Dalam musibah tersebut KBI Mataram mengerahkan anggotanya untuk membantu masyarakat yang terkena musibah.

9. **Pakaian Pandu Mataram bagian wanita**

Pakaian Pandu Mataram bagian wanita ini adalah milik RR. Soetimah, seorang anggota Pandu Mataram yang dipakainya dalam mengikuti PERKINO I di Yogyakarta. Waktu itu berada dibawah ketua PKP Hitam Merah yang bernama Djokowaluyo.

Pandu Mataram adalah merupakan nama lain yang dipakai oleh anggota KBI Cabang Yogyakarta. KBI Cabang Yogyakarta berdiri pada bulan September 1930. Sebagai ketua KBI Cabang

Mataram (Pandu Mataram) adalah Hertog. Sejak Pandu Mataram berdiri maka kegiatannya selalu mengacu pada program KBI pusat. Dalam perkembangannya Pandu Mataram dibagi menjadi 7 kelompok atau Regu yang terdiri dari Kelompok I Bumijo, Kelompok II Baciro, Kelompok III Joyodipuran, Kelompok IV Kuncen, Kelompok V Klitren, Kelompok VI Jetis, Kelompok VII Bausasran. Di dalam kelompok-kelompok itu terdapat juga bagian putri.

Pada tanggal 11 Pebruari 1941 BPPKI (Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia) mengadakan koferensi di Solo. Dalam konferensi tersebut diputuskan bahwa Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem (PERKINO) Pertama akan diselenggarakan pada tanggal 19-23 Juli 1941. Sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan adalah di Lapangan Kuncen Yogyakarta. Adapun yang ditunjuk sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan ini adalah KBI Mataram beserta Badan Persaudaran Kepanduan Mataram yang diketuai oleh Dr. Martohusodo. Adapun susunan pengurus penyelenggara Perkino I adalah sebagai berikut :

Pengayom	: BPH. Suryodiningrat
Ketua Mulya	: RMAA. Condroadikusumo
Majelis Pengetua	: Ki dan Nyi Hadjar Dewantara
Ketua	: Dr. R. Riyo Martohusodo
Wakil Ketua	: RT. Sastroseutro
Sekretariat	: RL. Kuwakno, Sutomo, Sumantoro, Wijokongko
Bendahara	: Ny. Samsudin, Dr. S.M. Samsudin, Bawuk, Ibnu Buldan.

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 30 Desember 2004 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 745a/SB/UPT/KKP/XII/04, pakaian pandu mataram putri tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

10. Perlengkapan Ir. Soekarno di Rengasdengklok

Barang-barang yang terdiri dari tempat tidur, meja dan kursi, peralatan minum adalah merupakan perlengkapan yang dipergunakan oleh Bung Karno ketika sedang berada di Rengasdengklok.

Pada saat bangsa Indonesia sudah menyelesaikan rumusan dasar Negara Indonesia merdeka, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Hampir seluruh wilayah yang diduduki Jepang di Asia Tenggara jatuh ke tangan Sekutu. Birma jatuh ke

tangan Laksamana Mountbatten. Papua Nugini dan Filipina jatuh ke tangan Jenderal Douglas Mac Arthur. Wilayah Indonesia, yang merupakan wilayah satu-satunya di luar Jepang yang belum jatuh, sudah dibombardir Sekutu. Wilayah Jepang sendiri tidak lepas dari serangan Sekutu. Saipan yang berjarak hanya 2.000 mil dari Tokyo jatuh ke tangan Sekutu setelah pertempuran sengit dengan memakan banyak korban. Entah dengan alasan ingin mempercepat berakhirnya perang atau menguji senjata baru, pada hari Senin, 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, salah satu basis militer Jepang, dibom atom oleh pesawat pembom Amerika Serikat B - 29 *Enola Gay*. Hanya dalam waktu 43 detik, kota Hiroshima rata dengan tanah. Sebanyak 60.000 orang tewas seketika, 100.000 luka berat, dan sisanya luka ringan. Termasuk yang tewas dan luka berat adalah 40.000 tentara infanteri yang berpangkalan di Chugako, Hiroshima.

Setelah pemboman mengerikan itu, Jepang menawarkan perdamaian dengan Sekutu, tetapi Sekutu hanya mau Jepang menyerah tanpa syarat. Kalau tidak, bom atom kedua akan dijatuhkan di Jepang. Bom kedua dijatuhkan di Nagashaki dan membunuh ribuan orang hanya dalam tempo sekejap.

Pada waktu yang hampir bersamaan dengan jatuhnya bom di kota Nagashaki, Sukarno, Mohammad Hatta, dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat berangkat ke Saigon atas undangan Jenderal Terauci. Dalam pertemuan itu Jenderal Terauci menyatakan bahwa Pemerintah Kemaharajaan Jepang telah memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah persiapan selesai. Wilayah Indonesia yang dimaksud meliputi bekas Hindia Belanda.

Hanya selang sehari setelah kepulangan Sukarno, Mohammad Hatta, dan dr. Radjiman dari Saigon, Sekutu mengumumkan bahwa Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir. Sutan Syahrir, yang mendengar berita penyerahan itu, termasuk tokoh pertama yang mendesak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia oleh Sukarno dan Mohammad Hatta tanpa melalui PPKI. Ia berpendapat bahwa hanya Sukarno yang mempunyai cukup pengaruh pada rakyat Indonesia. Proklamasi oleh orang lain tidak akan berarti. Hatta berpendapat proklamasi dengan atau tanpa PPKI, Belanda tetap akan mencapnya kolaborator. Sukarno dan Mohammad Hatta ingin mengecek kebenaran berita tersebut kepada *Gunseikan*. Akan tetapi yang berhasil ditemuinya hanya seorang wakil *Gunseikan*, sedangkan *Gunseikan*-nya sendiri sedang tidak di tempat, sehingga tidak bisa memastikan kebenaran berita itu. Selanjutnya Sukarno

dan Mohammad Hatta didampingi Ahmad Subardjo menemui kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk menanyakan kebenaran berita tersebut. Namun Maeda pun menyatakan bahwa berita tersebut belum bisa dikatakan benar karena belum diperoleh berita dari Tokyo.

Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai proklamasi kemerdekaan telah mendorong golongan pemuda membawa Sukarno dan Mohammad Hatta ke Rengasdengklok. Tindakan ini berdasarkan keputusan rapat terakhir yang diadakan pemuda menjelang pukul 24.00 tanggal 16 Agustus 1945 di Asrama Baperpi, jalan Cikini 71. Rencana berjalan lancar karena mendapat bantuan dari Cudanco Latief Hendraningrat yang saat itu menggantikan Cudanco Kasman Singodimejo. Demikianlah pada tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 04.00 WIB, Sukarno dibawa ke Rengasdengklok di sebelah Utara Karawang Jawa Barat oleh Sukarni, Muwardi, dan Yusuf Kunto dengan pengawalan Shodancho Singgih dengan membawa regu tentara PETA, dengan menggunakan kendaraan lapis baja. Sementara itu Ibu Fatmawati dan Guntur Sukarno juga turut dibawa keluar kota.

Rengasdengklok dipilih untuk mengamankan Sukarno dan Mohammad Hatta karena perhitungan Militer. Antara anggota PETA Daidan Purwakarta dan Daidan Jakarta terdapat hubungan yang erat semenjak mereka mengadakan latihan bersama. Selain itu, Rengasdengklok letaknya terpencil yaitu 15 km ke dalam dari Kedung Gede, Karawang pada jalan raya Jakarta-Cirebon. Dengan demikian dapat dideteksi dengan mudah setiap gerakan tentara Jepang yang datang ke Rengasdengklok. Baik yang datang dari Jakarta maupun dari Bandung ataupun dari Jawa Tengah.

Pertimbangan lain tentang Rengasdengklok bahwa Daidacho Suryoputra di Rengasdengklok adalah seorang daidanchu yang dapat dipercaya dan tentu akan membantu gerakan kemerdekaan. Komandan PETA Chuudan di Rengasdengklok sudah dikenal oleh mahasiswa sebagai chuudanchu yang dapat dipercaya ialah saudara Soebeno dan Umar Bahsan. Juga Asisten Wedana Rengasdengklok yang bernama Soejono Hadipranoto adalah bekas pimpinan BAPERPI yang juga adalah pejuang kemerdekaan sejak Sekolah Tinggi Kehakiman.

Semula di Rengasdengklok Sukarno dan Mohammad Hatta ditempatkan di markas Tentara Peta. Namun karena dipandang tempatnya tidak layak maka mereka dipindahkan ke rumah seorang Tionghoa bernama Djiaw Kie Siong yang terletak di sisi

sungai Citarum. Barang-barang yang terdiri dari meja dan kursi, tempat tidur, seperangkat alat minum yang dipakai oleh Sukarno dan Mohammad Hatta ini adalah milik Djiaw Kie Siong.

11. Klise mata uang ORI dan uang ORI

Klise mata uang ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) merupakan perangkat pencetakan mata uang di Yogyakarta yang waktu itu berpusat di Percetakan Kanisius Jalan Gondomanan Yogyakarta selama tahun 1947-1949.

Meski dalam mata uang ORI tercantum tanggal 17 Oktober 1945, namun secara defacto mata uang resmi pemerintah RI baru terbit empat bulan setelah proklamasi. Dalam catatan sejarah, tertulis bahwa pada tanggal 30 Oktober 1946 adalah awal penerbitan mata uang RI, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Keuangan. Waktu itu wakil presiden RI Drs. Mohamadd Hatta di depan corong RRI Yogyakarta mengantarkan lahirnya uang kertas RI yang menggantikan uang Jepang dan uang *de Javaasche Bank*.

Emisi pertama uang keras RI ini terdiri dari pecahan 1, 5, 10, dan 50 sen. Kemudian 1, 5, 10 dan 100 rupiah. Semuanya ditandatangani oleh menteri keuangan RI Mr. A.A. Maramis. Pada pecahan 1 sampai 10 rupiah bergambar wajah presiden Soekarno. Uang RI ini disebut ORI (Oeang Repoeblik Indonesia).

Pada masa awal proklamasi kemerdekaan yang dinyatakan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah adalah uang kertas Jepang. Meski demikian uang pemerintah Belanda masih tetap beredar. Uang pendudukan Jepang di Indonesia terdiri dari :

1. Uang yang sudah dipersiapkan sebelum Jepang menguasai Indonesia. Uang ini menggunakan bahasa Belanda, *De Japanesche Regeering*, dengan satuan *gulden*, emisi 1942, berkode "S" (untuk di Indonesia). Sedang untuk Semenanjung Malaya berkode "M" dengan satuan dollar, di Philipina berkode "P" dengan satuan pesos, di Birma berkode "B" dengan satuan rupee, di Oceania berkode "O" dengan satuan Shilling.
2. Uang yang menggunakan bahasa Indonesia, *Pamerintah Dai Nipon*, emisi 1943 dalam pecahan bernilai 100 rupiah saja, karena pecahan bernilai 1.000 yang sudah dicetak ternyata tidak sempat beredar.
3. Yang menggunakan bahasa Jepang, *Dai Nippon Teikoku Seibu*, emisi tahun 1943, antara lain bergambar Gatotkaca dalam pecahan 10 rupiah, rumah gadang dalam pecahan 5 rupiah

Ketika Sekutu datang ke Indonesia menggantikan tentara pendudukan Jepang, mereka diboncengi oleh NICA dibawah pimpinan HJ. Van Mook. Komandan Sekutu melarang anggotanya

menerima uang Jepang, dan sebagai gantinya mengedarkan uang NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*), yang dicetak di Australia tahun 1943 bergambar Ratu Wilhelmina. Uang ini kemudian dikenal dengan "Uang Merah". Sisa pemerintah Belanda dalam pengasingan di Australia 1942-1945 memang mempersiapkan diri kembali ke Indonesia setelah Jepang meninggalkan RI.

Waktu itu memang RI belum mampu mencetak uang sendiri, maka melalui Maklumat Presiden RI no. 1/10, tanggal 3 Oktober 1945, menetapkan untuk sementara berlaku tiga jenis mata uang yang berlaku di Indonesia yaitu Uang De Javasche Bank, Uang Pemerintah Hindia Belanda, dan uang pendudukan Jepang.

Tanggal 24 Oktober 1945, Menteri Keuangan RI, Mr. A.A. Maramis, menginstruksikan Tim Serikat Buruh Percetakan G. Kolf Jakarta selaku Tim Pencari Data, untuk menemukan tempat percetakan uang. Hasilnya Percetakan G. Kolf Jakarta yang waktu itu dikuasai oleh serikat buruhnya dan Percetakan *Nederlands Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF)* di Kendalpayak Malang (Jawa Timur), dianggap memenuhi syarat.

Menteri Keuangan RI dengan Surat Keputusannya no. 3/RD, tanggal 7 Nopember 1945, menetapkan pembentukan Panitia Penyelenggara Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia. Panitia diketuai oleh T.R.B. Sabarudin (kantor Besar Bank Rakyat Indonesia), dan beranggotakan H.A. Pandelaki (Kementerian Keuangan), M. Tabrani (Kementerian Penerangan), S. Sugiono (Bank Rakyat Indonesia), E. Kusnadi (Kas Negara), R. Aboebakar Winangoen (Kementerian Keuangan), Oesman dan Aoes Soerjatna (keduanya mewakili Serikat Buruh Percetakan). Pembuatan desain dan bahan-bahan induk berupa negatif kaca dilakukan percetakan Balai Pustaka Jakarta dan ditangani oleh Bunyamin Surjohardjo. Pelukis pertama ORI adalah Abdulsalam dan Soerono. Proses cetak offset dilakukan di Percetakan RI Salemba Jakarta (dibawah kementerian Penerangan). Produksi ORI ditangani oleh R.A.S. Winarno dan Joenet Ramli. Pencetakan dilakukan setiap hari dari pukul 07.00 pagi sampai 10.00 malam, sejak Januari 1946.

Pada bulan Mei 1946, pencetakan uang ORI di Jakarta terpaksa dihentikan. Pekerjaan besar itu dipindahkan dan dilanjutkan ke daerah pedalaman Republik, yang tersebar di kota-kota Yogyakarta, Surakarta, Malang dan kemudian di Ponorogo, dengan memanfaatkan berbagai percetakan swasta yang relatif

modern di masa itu. Akhirnya kerja keras itu menghasilkan buahnya pada tanggal 30 Oktober 1946, yaitu diterbitkannya emisi pertama uang kertas ORI. Adapun pengumuman kepada seluruh rakyat Indonesia disampaikan sendiri oleh Wakil Presiden Moehammad Hatta, pada malam hari sebelumnya. Adapun dasar hukum penerbitan ORI ini adalah :

- a. Undang-undang no. 17/1946 tanggal 1 Oktober 1946 tentang pengeluaran ORI.
- b. Undang-undang no. 19/1946 tanggal 19 Oktober 1946 tentang nilai tukar 1 rupiah ORI sama dengan 50 rupiah uang Jepang di pulau Jawa, atau 100 rupiah uang Jepang di pulau Sumatra.
- c. Keputusan Menteri Keuangan RI no. Ss/1/35 tanggal 29 Oktober 1946 tentang berlakunya secara sah ORI sejak 30 Oktober 1946 pukul 00.00, serta jangka waktu penarikan uang Hindia Belanda dan uang pendudukan Jepang dari peredaran.

Sementara itu, ketika tentara Sekutu masih melaksanakan tugas di Indonesia, Panglima Sekutu Sir Montagne Topford, pada tanggal 6 Maret 1946, mengumumkan bahwa hanya uang NICA saja yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah pendudukan Sekutu. Oleh karena itu ketika terjadi Agresi Militer Belanda Pertama, tanggal 21 Juli 1947, Belanda hanya tinggal melanjutkan kebijakan Sekutu tersebut. Meski demikian ORI tetap saja memasuki daerah pendudukan Belanda, mengingat daerah tersebut juga memerlukan kebutuhan pokok yang harus dibeli dengan ORI. Waktu itu TNI mempertaruhkan ORI untuk melawan uang NICA.

Sejak Oktober 1946 sampai dengan Desember 1949, pemerintah RI melakukan emisi uang kertas ORI sampai dengan lima kali. *Emisi pertama*, telah dijelaskan dimuka. *Emisi kedua*, ditanda tangani oleh Menteri Keuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara, di Yogyakarta tanggal 1 Januari 1947. *Emisi ketiga*, ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis, di Yogyakarta tanggal 26 Juli 1947. *Emisi keempat*, ditanda tangani oleh Menteri Keuangan *ad interim* Dr. Mohammad Hattak di Yogyakarta tanggal 23 Agustus 1948. Beberapa nilai nominal seri ini memiliki keunikan, yaitu 40, 75, 400 dan 600 rupiah, tetapi yang 6000 rupiah belum sempat diedarkan. Ada kesan kuat bahwa hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan susunan peringkat nilai uang yang pernah ada. *Emisi kelima*, ditandatangani oleh Menteri Keuangan Lukman Hakim, di Yogyakarta tanggal 17 Agustus 1949, dengan kata-kata Rupiah Baru. Dari emisi kedua sampai dengan ke lima dicetak di Percetakan Kanisius Jalan Gondomanan Yogyakarta.

Selain ORI, dikenal pula adanya ORIDA (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah), yang dikeluarkan oleh pemerintah-pemerintah daerah tingkat propinsi, karesidenan dan bahkan kabupaten semasa perang kemerdekaan 1947-1949. Terbitnya ORIDA atas izin pemerintah pusat RI guna memecahkan dan mengatasi kekurangan uang tunai di daerah akibat terputusnya komunikasi normal antara Pusat dan Daerah karena pendudukan Belanda dalam agresi militer Belanda pertama (21 Juli 1947) dan kedua (19 Desember 1948).

Ketika agresi militer Belanda Kedua yang berhasil menduduki ibukota RI dan menangkap para pemimpin RI, pemerintahan tetap berjalan dibawah PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) di bawah Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Sumatra Barat. Waktu itu masalah pencetakan uang ORI dipedalaman tetap berjalan dibawah pengawasan Menteri Keuangan PDRI yaitu Dr. Lukman Hakim. Ketika "Yogya telah Kembali" tanggal 29 Juni 1949 setelah tentara pendudukan Belanda ditarik dari Yogyakarta, maka pada tanggal 1 Juli 1949 Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Menteri Negara/Koordinator Keamanan menetapkan ORI masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah disamping uang NICA yang beredar di daerah pendudukan. Berdasarkan pengamatan selama masa revolusi fisik tahun 1945-1949, Prof. Dr. J.K. Gailbraith seorang ahli dari AS mengatakan bahwa uang ORI adalah *an instrument of revolution* atau suatu alat revolusi.

12. Meja Guru Militer Akademi Yogyakarta

Meja ini merupakan meja yang dipergunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar di Militer Akademi Yogyakarta, tepatnya yang dipakai sebagai meja guru (pengajar/ instruktur). Meja ini punya peran yang cukup besar dalam membentuk kader pucuk pimpinan dalam jajaran TNI.

Pada tanggal 5 Oktober 1945 berdirilah TKR (Tentara Kamanan Rakyat) sebagai pelepasan dari BKR. Dalam sidangnya tanggal 15 Oktober 1945 di Jakarta kabinet memutuskan bahwa markas besar umum TKR berkedudukan di Yogyakarta. Sebagai kepala staf umum ditunjuk Oerip Soemohardjo dengan pangkat Letnan Jenderal. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1945 (dua minggu setelah menjabat Kepala Staf Umum TKR), Letjen Oerip Soemohardjo memerintahkan untuk membentuk akademi militer nasional. Dalam hal ini yang ditunjuk oleh Letjen Oerip Soemohardjo adalah Samidjo Mangoenwirono (bekas Letnan KNIL). Segala perangkat yang diperlukan harus dicari sendiri.

Sebagai direktur Militer Akademi Yogyakarta adalah Mayor

Jenderal R. Memet Rachman Ali Soewardi (mantan Kapten KNIL). Dan Kolonel Samidjo Mangoenwirono sebagai wakil. Ketika Kolonel Samidjo Mangoenwirono harus memimpin sekolah kader militer di Gombang, kedudukan wakil direktur militer akademi dijabat oleh Wardiman Wirjosapoetro.

Sebagai tenaga-tenaga instruktur di MA Yogyakarta antara lain Kapten Sukirdjan, Kapten R. Ismail, Kapten Setiaji, Kapten Moch Nor dan Kapten Soekasno. Di samping itu masih ada penambahan tenaga medis yang sudah lama dikenal di kalangan para pejuang antara lain Kapten dr. Ibrahim Ichsan dan Kapten dr. Singgih.

Pengumuman pembukaan MA Yogyakarta diterbitkan tanggal 31 Oktober 1945 (kemudian menjadi hari berdirinya MA Yogyakarta), dan dipancarluaskan melalui RRI Yogyakarta selama 3 hari berturut-turut. Harian Kedaulatan Rakyat juga memuat pengumuman dan panggilan yang ditandatangani langsung oleh Letjen Oerip Soemohardjo tanggal 1 November 1945. Pendaftaran ditutup tanggal 7 November 1945.

Syarat untuk memasuki MA Yogyakarta ini adalah pemuda Indonesia yang bersemangat kemerdekaan, minimal lulus SR (setingkat SD) bagi pendidikan kader dan lulusan Sekolah Menengah untuk MA. Lama pendidikan adalah 2 bulan baik untuk MA dan Kader. Setelah lulus dari MA berpangkat Letnan Dua dan dari Kader berpangkat Sersan Dua. Kemudian lama pendidikan ditambah untuk MA diperpanjang sampai tiga tahun dan untuk Kader diperpanjang sampai enam bulan.

Sebagai tempat dilaksanakannya proses pendidikan MA Yogyakarta adalah di Gedung Christelijk Mulo Yogyakarta (Sekarang SMU BOPKRI I Kotabaru, Yogyakarta). Di gedung itulah dididik para siswa Militer Akademi dan Sekolah Kader.

Pada tanggal 19 Oktober 1948 direktur MA Mayor Jenderal R. Memet Rachman Ali Soewardi digantikan oleh Kolonel Gusti Pangeran Haryo (GPH) Djati Koesoemo.

Pada pembukaan angkatan I, bulan November 1945 dari 3.502 pendaftar diterima 442 orang. Tersaring dalam wisudawan I tahun 1948 berjumlah 198 orang yang diwisuda pada tanggal 28 Nopember 1948 di halaman Istana Presiden Yogyakarta (Gedung Agung) oleh Presiden Soekarno. Lima orang wisudawan yang waktu itu mendapat prestasi tertinggi antara lain Letnan Dua Kun Suryatjojo, Letnan Dua Subroto, Letnan Dua Sayidiman, Letnan Dua Utoyo Notodirdjo dan Letnan Dua Susilo Sudarman.

Angkatan II yang dibuka tahun 1946 dari 400 pendaftar diterima 150 orang. Jumlah itu bertambah dengan

diintegrasikannya Sekolah Kader Malang ke MA Yogyakarta. Dari jumlah yang ada berhasil diwisuda sebanyak 156 orang dalam tiga kali upacara. Satu kali di Yogyakarta yaitu tahun 1949 dan dua kali di Jakarta tahun 1950. Tahun 1957 kemudian menjelma menjadi Akademi Militer Negara (AMN) di Magelang. Tahun 1966 berintegrasi dengan akademi angkatan yang lain menjadi satu dengan nama AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 17 Desember 1991 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 298/BVY/XII/U.91, meja guru tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta bersama dengan meja siswa lainnya.

13. Perlengkapan milik Tjilik pejuang dari Bali

Perlengkapan milik pejuang dari Bali yang bernama Tjilik terdiri dari tongkat, bumbung, perples, cangkir bambu, senter, ikat pinggang rotan, dan dokumen perjuangan. Barang-barang tersebut mempunyai peran yang cukup besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan di daerah Bali dan sekitarnya pada tahun 1946-1949.

Untuk merealisasikan niatnya yang ingin menjajah kembali Indonesia, tentara Belanda (NICA/Netherlands Indies Civil Administration) dalam bentuk kesatuan Gajah Merah berusaha kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Sekutu yang melaksanakan melucuti senjata Jepang. Di Bali kesatuan NICA di Pantai Sanur Pantai Selatan Bali pada tanggal 2 Maret 1946. Oleh karena itu atas dasar semangat juang menghadapi penjajah, maka kesatuan ataupun organisasi mengadakan perfusian dalam bentuk kesatuan yang besar yang meliputi wilayah Sundakecil dengan nama Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia (DPRI) dibawah pimpinan Letkan Kolonel Rai (I Gusti Ngurah Rai) dari TRI, untuk menghadapi kesatuan Gajah Merah Belanda.

Pertempuran pertama terjadi antara pihak DPRI dan Gajah Merah di kota Denpasar pada tanggal 10 April 1946, yang kemudian segera disusul dengan pertempuran-pertempuran lain di berbagai pelosok di wilayah Sunda Kecil. Puncak pertempuran terjadi ketika diadakan Long march ke Gunung Agung pada bulan Juni-Juli 1946, dimana rakyat Bali dengan pemuda-pemuda gerilyanya mendukung perjuangan DPRI, meski dengan nyawa taruhannya. Setelah peristiwa tersebut menyusul pertempuran hebat yang mengakibatkan gugurnya pimpinan DPRI Letkol I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 20 November 1949 di dekat Desa

Marga. Peristiwa tersebut dikenal dengan Puputan Margarana, karena seluruh pasukan dibawah pimpinan Letkol I Gusti Ngurah Rai gugur.

Setelah peristiwa Puputan Margarana 20 November 1946, yang mengakibatkan gugur sebagian pucuk pimpin TRI di Bali termasuk di antaranya Letkol I. Gusti Ngurah RI, maka pimpinan DPRI dipegang oleh empat orang tokoh pemuda pejuang antara lain : Made Widjakusuma (Pucuk pimpinan), K. Widjana, W. Noor Rai, dan Nyoman Mantik.

Perundingan Renville yang berhasil ditandatangani oleh RI dan Belanda pada bulan Januari 1948 memberikan pengaruh besar terhadap perjuangan rakyat Bali. Pada tanggal 14 Mei 1948 dengan segala keterpaksaan anggota DPRI mengadakan penyerahan umum demi mentaati hasil perundingan Renville. Meski demikian bukan berarti perjuangan para pemuda pupus begitu saja. Para pemuda pejuang tetap melanjutkan perjuangannya hingga tercapai pengakuan kedaulatan RIS tanggal 27 Desember 1949. Dibawah pimpinan Tjilik, Poeng Tanaya dan Sentosa mereka berjuang dengan panji LANJUTAN PERJUANGAN yang kemudian dinamakan Pemerintah Daurat Republik Indonesia (PDRI). Mereka yang tergabung di dalam PDRI antara lain : Ida Bagus Tantera (pucuk pimpinan), Tjilik, Tjokorda Anom Sandat, Ida Bagus Tamu. Kesatuan-kesatuan pemuda yang bersimpati terhadap PDRI selalu bergerak mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Dengan menggunakan pakaian serba hitam para pemuda mengadakan operasi di daerah Buleleng. Mereka melaksanakan tugas dibawah pimpinan Tjilik. Mereka membentuk Markas Besar di Daerah Buleleng, yang kemudian dikenal dengan Markas Besar Buleleng. PDRI ini baru dibubarkan pada tanggal 15 Januari 1950.

Setelah keadaan terkendali dan suasana perang sudah tidak muncul di Bali, maka para pemuda pejuang yang kembali ke masyarakat dan menjadi masyarakat sipil ditampung dan dikumpulkan. Mereka kemudian membentuk sebuah yayasan yang dikenal dengan Yayasan Kebaktian Pejuang (YKP) dibawah pimpinan Tjilik.

Untuk meyakinkan suatu keamanan yang terjamin atas rakyat Bali, maka Presiden Soekarno telah memanggil ketigabelas pemuda pejuang yang memegang pimpinan dalam Perjuangan Rakyat di Sundakecil selama revolusi antara lain : Made Widjakusuma, Ketut Widjanan, Njoman Mantik, Wajan Noor Rai, Ida Bagus Mahadewa, Ida bagus Tantera, Gde Puger, Sutedja, Tjilik, Bondjoran, Made Sugita, Ida Bagus Tamu dan I. Gusti Gde Subana pada tanggal 31 Desember 1951 dengan menghadap ke

Jakarta guna membicarakan masalah-masalah keamanan dan pembangunan di Pulau Bali khususnya dan Sunda Kecil umumnya, dimana antara lain sdr Tjilik mengusulkan agar para pejuang yang kini ditahan oleh pemerintah karena revolusi dapat ditinjau kembali.

14. Keranjang rumput

Keranjang rumput yang biasa dipakai untuk mengusung rumput makanan ternak ini, oleh para pemuda pejuang di Bali dipakai sebagai alat perjuangan. Dengan berdalih sebagai tukang mencari rumput mereka bertindak sebagai kurir ataupun spionase. Di dalam keranjang rumput tersebut kadang-kadang berisi senjata yang diselundupkan ke daerah musuh. Disamping itu dengan membawa keranjang rumput tersebut dan bertindak seolah olah pencari rumput, mereka dengan leluasa mengawasi daerah-daerah musuh yang kemudian dilaporkan kepada pimpinan gerilyawan. Ternyata sistem ini sungguh sangat efisien dan intensif.

15. Tas kayu

Tas kayu merupakan tempat dokumen penting para pemuda pejuang gerilyawan di Bali yang dibawa kemanapun pergi mengikuti perpindahan markas gerilya antara tahun 1946-1949, setelah pejuang militer memakai sistem militer pasif yaitu dengan mengadakan perjuangan dengan markas berpindah-pindah di hutan-hutan.

Setelah peristiwa puputan Margarana tanggal 20 November 1946, Bali kehilangan banyak tokoh militer, sehingga pola perjuangan menjadi militer pasif dan politik aktif. Militer pasif dengan mengadakan perjuangan di hutan-hutan, dan politik aktif dengan cara mempengaruhi para pejabat agar mau membantu para pejuang. Kondisi ini juga mempengaruhi pola perjuangan para pemuda gerilyawan. Markas pemuda gerilyawan juga mengalami perpindahan dari tempat yang satu ketempat yang lain. Kegiatan administratif markas perjuanganpun demikian pula. Dari gubug yang satu pindah ke gubug yang lain, dari hutan yang satu ke hutan yang lain, begitulah seterusnya. Berkas-berkas penting dan peralatan lainnya selalu dibawa oleh para gerilyawan. Untuk membawanya perlu tas dokumen.

16. Bambu Runcing

Bambu runcing ini menjadi senjata andalan Hardjowiyono seorang pelaku gerilyawan, Dusun gondang Donokerto Turi Sleman Yogyakarta

Pada masa awal perjuangan, semangat rakyat dalam membela kemerdekaan begitu berapi-api. Meski dengan senjata seadanya mereka dengan gagah berani dan sikap optimis tampil ke

depan sebagai laskar pejuang pembela kemerdekaan.

Pada masa perjuangan revolusi fisik (1945-1949) senjata populer rakyat dan gerilyawan adalah bambu runcing. Waktu itu bambu runcing yang terkenal adalah bambu runcing yang telah diberi mantra oleh Kyai Subchi dari Parakan Temanggung Jawa Tengah. Bambu runcing itu termasuk yang telah diberi mantra oleh Kyi Haji Subchi.

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 8 Maret 1994 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 253/BVY/III/U.1994, bambu runcing tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta.

17. Sepeda TP

Sepeda ini merupakan sepeda yang mempunyai andil besar dalam sejarah perjuangan Tentara Pelajar, sebagai sarana koordinasi antar pucuk pimpinan perjuangan dan sarana transportasi para pejuang TP pada tahun 1948-1949.

Pembentukan TP Yogyakarta diawali dengan dibentuknya IPI Yogyakarta, setelah pengurus IPI Pusat pindah ke Yogyakarta tahun 1946. Terbentuknya IPI Pertahanan di Yogyakarta diprakarsai oleh Martono, Soetomo Honggowongso, Moh. Said dan Abdul Gafar serta Warsito. Kemudian IPI Pertahanan diresmikan pada tanggal 17 Juli 1946 di halaman asrama TKR Pingit, Yogyakarta oleh Jenderal Mayor Mustopo atas nama Menteri Pertahanan RI.

Adanya reorganisasi dan rasionalisasi dalam APRI sebagai realisasi penetapan Presiden Nomor 14 tahun 1948 tanggal 14 Mei 1948, maka dibentuklah brigade tentara pelajar yang langsung berada di bawah pimpinan Panglima Besar Angkatan Perang RI Jenderal Soedirman. Pelaksanaan pembentukan divisi dan brigade tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pertahanan RI nomor A/58/48 tanggal 20 Oktober 1948.

Panglima MBKD (Markas Besar Komando Djawa), Kolonel A.H. Nasution menunjuk Mayor Sudarto sebagai komandan Brigade XVII/TNI (TP mendapat urutan brigade yang ke XVII). Pangkatnya kemudian dinaikkan menjadi Letnan Kolonel. Brigade ini diresmikan pada tanggal 17 November 1948 di Kepatihan Yogyakarta. Kemudian kesatuan itu segera tersebar ke seluruh Jawa, dan diresmikan berdirinya tanggal 17 November 1948.

Ketika terjadi agresi militer Belanda Kedua tanggal 19 Desember 1948, untuk menghadapinya maka dalam bidang

pertahanan dan keamanan perlu disusun kekuatan serta disempurnakan organisasi teritorial ke bawah. Oleh karena itu maka Panglima Teritorium Tentara Djawa (PTTD) Kolonel AH. Nasution kemudian mengeluarkan Maklumat No. 1/MBKD/1948 pada tanggal 25 Desember 1948 yang mengumumkan berlakunya pemerintahan militer untuk seluruh Jawa. Selanjutnya diatur bahwa pada tingkat kabupaten dibentuk KDM (Komando Distrik Militer), tingkat kecamatan sampai dengan kelurahan dibentuk KODM (Komando Onder Distrik Militer).

Sejalan dibentuknya pemerintahan militer (yang pada hakekatnya adalah pemerintahan gerilya) tersebut maka pertahanan di Sektor Utara, khususnya di Kabupaten Sleman, Propinsi DIY dibentuklah KDM yang dipimpin oleh Radiono, yang kemudian digantikan oleh Zidni Nuri dan Sekretarisnya Dahlan.

Khusus untuk Kecamatan Ngaglik yang wilayahnya meliputi Kelurahan Sariharjo, Donohardjo, Sardonohardjo, Sukohardjo dan kelurahan Sinduhardjo dibentuklah Komando Onder Distrik Militer (KODM) yang dipimpin oleh Bachrum. Guna mencukupi keperluan akan senjata, mendapat bantuan dari seorang terkemuka di Dusun Redjodani yaitu Haji Harun.

Selain itu untuk memperkuat pertahanan di Sektor Utara ditempatkan pula Detasemen III Brigade XVII Tentara Pelajar (TP) dibawah komandan Martono. Sepasukan TP seksi 3 dari kompi 2 ini menempati rumah-rumah penduduk di pedukuhan Tanjung dan Balong. Sedangkan wilayah operasinya meliputi daerah Sleman Tengah. Mereka sering melakukan pecegatan dan penyerangan terhadap pasukan Belanda yang sedang mengadakan operasi. Untuk menghindari sergapan musuh markasnya selalu berpindah-pindah. Salah satu markas TP di daerah Turi adalah di rumah rumah Bapak Sosro Pernoto almarhum di Kelor, Bangunkerto, Turi, Sleman.

Ketika bermarkas di rumah tersebut banyak fasilitas milik keluarga Bapak Sosro Pertono yang dipergunakan oleh kesatuan TP. Salah satunya adalah sepeda. Sepeda milik Bapak Alm. Sosro Pernoto dipakai oleh anggota TP sebagai alat transportasi dalam mendukung perjuangan TP. Ketika anggota TP yang bermarkas di rumahnya ingin mengadakan konsolidasi dengan pucuk pimpinan yang lain, serta membuat strategi pertempuran lampu gantung miliknya menjadi sarana penerangan dalam kegiatan tersebut.

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 24 November 2005 berdasarkan berita acara serah terima

barang nomor 1298/ SB/MBVY/KKP/2005, sepeda dan lampu gantung tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta.

18. Perlengkapan Soekimin Seorang Anggota TP

Peralatan milik Soekimin seorang anggota TP (Tentara Pelajar) terdiri dari buku arsip surat-surat penting Brigade XVIII TP, Buku catatan harian, Topi pakaian TP, dan Bendera Merah Putih.

Soekimin mulai aktif dan terlibat dalam kegiatan TRIP Jatim sejak tahun 1946. Pada tahun 1947 masuk TP YK dan menjadi komandan Kompi PHB dengan pangkat letnan II. Buku arsip memuat arsip surat-penting dari TP untuk koordinasi pasukan dalam pertempuran. Buku harian (besar) ditulis sejak masuk TRIP Jatim, (kecil) sejak masuk TP Yogyakarta. Topi pakaian sejak masuk TRIP Jatim dan dipakai hingga bertugas di Yogyakarta sampai 1950. Bendera semula dipasang di senjata laras panjang jika PHB terpaksa harus turut bertempur. Peristiwa-peristiwa penting ditulis dalam lembaran merah.

Alamat terakhir Soekimin adalah di Jl. Brigjen Katamso No. 9 Yogyakarta. Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Juli 1999 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 174/F4.113/J3/1999, Buku arsip surat-surat penting Brigade XVIII TP, Buku catatan harian, Topi pakaian TP, dan Bendera Merah Putih tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta.

19. Perlengkapan SPN (Sekolah Polisi Negara) di Nanggulan

Perlengkapan yang terdiri dari meja, Kentongan, dan lampu senthir (cublik), merupakan benda-benda bersejarah saksi keberadaan SPN (Sekolah Polisi Negara) pada masa revolusi fisik di Nanggulan, Sendangagung, Minggir, Sleman.

Tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengumumkan bahwa polisi termasuk di dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Tanggal 30 Agustus 1945 orang-orang Indonesia yang berkerja sebagai pegawai Pemerintah Jepang secara bulan menyatakan diri sebagai pegawai Pemerintah RI, termasuk polisi di dalamnya. Selanjutnya tanggal 2 September 1945, pemerintah melalui maklumat yang ditandatangani oleh Menteri Dalam negeri, Menteri Kehakiman, dan jaksa Agung mengangkat kepala kepolisian negara yang pertama yaitu: R. Soekanto Tjokroatmojo. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/SD tertanggal 25 Juni 1946 dikeluarkan dari Departemen Dalam negeri dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri sebagai jawatan tersendiri. Penetapan tersebut berlaku mulai

tanggal 1 Juli 1946. Kemudian tanggal 1 Juli ditetapkan sebagai hari Bhayangkara.

Pada saat terjadi Agresi Militer Belanda Kedua pada tanggal 19 Desember 1948, seluruh lapisan masyarakat terpanggil untuk bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan. Mereka bersatu padu mendukung perjuangan dengan cara-cara yang bisa mereka kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Selain mengakibatkan jatuhnya ibukota RI dan di tawannya para pemimpin RI oleh Belanda, juga mengakibatkan adanya gerak arus pengungsian kearah barat kota Yogyakarta. Sejak Agresi Militer Belanda Kedua (Clash II), daerah Sendangagung, Minggir, Sleman menjadi markas berbagai pasukan, antara lain :

1. Pasukan KRIS/Brigade XVI yang dipimpin oleh Maulana Lapar, Sumilat Pelupesi, dan seorang yang bernama Kendangan sebagai wakil gubernur Sulawesi dengan stafnya yang berjumlah kurang lebih satu kompi.
2. Pasukan Barisan Sakit Hati yang dipimpin oleh Kahar Muzakar dan isterinya yang bernama Corie yang berjumlah kurang lebih satu batalyon.
3. Pasukan dari Kepolisian dengan stafnya yang dipimpin oleh Jenderal Moh. Soerjopranoto, Sosrodanukusmo, Subarkah, Sutarto, Sunaryo, Subagyo, Wiyono, Subekti, Sukirman, Herusumardi, Amirin, Pagyo, Susardi, Sumarno dan Hasan.

Tugas dari pasukan tersebut ialah bergerilya dan menjaga batas kota, khususnya Yogyakarta bagian barat, serta membuat kekacauan terhadap berbagai pos tentara Belanda yang ada di wilayah itu dan memata-matai jalan masuk kota, baik siang maupun malam hari.

Bagi Moh. Soerjopranoto di samping bergerilya juga membuka pendidikan siswa calon polisi di Desa Nanggulan, Kelurahan Sendangagung, Minggir, Sleman. Lembaga pendidikan itu berlangsung cukup lama yaitu hingga 27 Desember 1949.

Tahap pertama di SPN ini diterima siswa berjumlah 120 orang dan tahap kedua menerima 350 orang. Mengenai sumber dana untuk penyelenggaraan SPN ini diambilkan dari sumbangan 7 (tujuh) kecamatan di Sleman Barat. Selama dalam pendidikan siswa memperoleh makanan berupa syur dan sayur besengek. Penduduk yang rumahnya ditempati untuk pendidikan itu tidak pernah dibayar dengan uang, tetapi mendapat pembayaran berupa beras dari Kepala Polisi Negara yang bersangkutan. Rumah-rumah penduduk yang ditempati untuk kegiatan pendidikan Kepolisian Negara itu adalah milik Brojoseco, Harjosumarto, Surokaryo, kartorejo, Wongsodimejo, Tomoijohyo, Wongsokromo, Kariyo-

dinomo, Pawirodikromo, Harjodinomo, Kasanraji, dan Martodinomo. Selama pendidikan itu berlangsung rumah Brojoseco (jagabaya) dipergunakan sebagai "Sekolahan", sedangkan yang lainnya dipergunakan sebagai asrama siswa. Dapur umum untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para siswa dipusatkan di rumah Harjosumarto. Tenaga untuk kebutuhan dapur umum itu diambil dari para istri pemilik rumah yang ditempati oleh para siswa Sekolah Polisi Negara.

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 23 Desember 1998 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 485/F4.113/J3/98, meja dan kursi, Kentongan dan lampu senthir (cublik) tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta.

20. Plakat Perjuangan

Buku Pamflet perjuangan ini di buat oleh para pejuang dari Kapanewon (kecamatan) Galur Kulon Progo pada tahun 1948. Pamflet perjuangan tersebut dibuat untuk memberikan pengertian dan menyadarkan rakyat agar tidak mau diajak kerja sama dengan Belanda, melainkan terus tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan apapun yang terjadi. Waktu itu Djawatan Penerangan Kapanewon Galur Kulon Progo dan bagian-bagiannya yang dikepalai oleh Noor Effendy, mempunyai tugas :

- a. Bagian poster mengerjakan poster dan plakat
- b. Bagian Berita mengerjakan mencari dan meng-over berita
- c. Bagian Administrasi mengerjakan dan mengurus urusan administrasi seluruhnya
- d. Bagian keuangan mengerjakan dan berusaha uang
- e. Bagian penyelidikan mengerjakan bagian dokumentasi.

Bagian agitasi propaganda/juru penerang beranggotakan Noor Effendy, Moh. Noor Salim, Busraharjana, Zunnata, Chamin, Kachdum. Tenaga-tenaga tersebut mulai mengerjakan tugasnya sejak tanggal 25 Desember 1948 dan dibubarkan tanggal 1 Juli 1949.

Koleksi Buku Plakat perjuangan ini diserahkan ke Museum Perjuangan tanggal 17 November 1961 oleh Djawatan Penerangan Kulon Progo. Tanggal 5 September 1997 diserahkan ke Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta bersama dengan pelimpahan tugas dan wewenang Museum Perjuangan dari Museum Negeri Propinsi DIY Sonobudoyo kepada Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta.

21. Kentongan Kesekretariatan MBKD

Kentongan ini merupakan benda bersejarah yang dipakai sebagai

kode (tanda) yang baik bahaya, aman, waspada, dll pada masa revolusi. Kentongan ini dipasang di Markas PTTD (MBKD) bagian kesekretarian di daerah Kulon Progo.

Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda tahun 1948, Markas PTTD dipindahkan ke luar kota yaitu ke Desa Kepurun, Manisrenggo, Klaten, Jateng dan dikenal dengan MBKD (Markas Besar Komando Djawa) Pos X-1. Namun karena gerakan Belanda yang membahayakan markas maka bulan Pebruari 1949 MBKD dipindahkan ke Dusun Boro, Banjarharja, Kalibawang, Kulon Progo di rumah Bp. Nitirejo. Sedangkan untuk kesekretariatan menempati rumah Bp. Suparjan di Dusun Padaan, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo. Untuk kesekretariatan dibawah pimpinan Kapten Sukendro, dan wakilnya Letnan Karto Suwarno.

Disamping rumah Bapak Suparjan, sebagai tempat kegiatan sekretariat markas PTTD (MBKD) juga menempati rumah Pawiro Sardiyo pada dusun yang sama yang berdekatan dengan rumah Bapak Suparjan. Di rumah Bapak Pawiro Sardiyo inilah Kentongan itu dipasang dan menjadi sarana yang efektif dan efisien sebagai tanda atau kode tentang situasi pada waktu itu.

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 23 Desember 1998 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 485/F4.113/J3/98, Kentongan tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta.

22. Perlengkapan Kepolisian

Perlengkapan Kepolisian ini adalah milik Kepolisian Gunung Kidul yang dipakai sebelum tahun 1958.

Peralatan yang terdiri dari tanda kepangkatan, senjata lantakan, dan cetakan pangkat ini merupakan perlengkapan kepolisian di Gunung Kidul pada masa revolusi fisik.

Tanda simbol korps kepolisian : *Tiang*, melambangkan polisi sebagai salah satu tiang negara yang kokoh sentosa. *Suluh (obor)* : melambangkan polisi sebagai penyuluh dan penerangan yang hendaknya menerangi segala lapisan masyarakat. *Padi* : melambangkan polisi sebagai alat negara yang mempertahankan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan rakyat. *Perisai* : melambangkan polisi sebagai penangkis, penghalau bahaya terhadap keamanan dalam negeri. *Bintang berjau lima* : melambangkan pokok dasar falsafah negara Indonesia, Pancasila.

Tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengumumkan bahwa polisi termasuk di dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Tanggal 30 Agustus 1945 orang-orang Indonesia yang berkerja

sebagai pegawai Pemerintah Jepang secara bulan menyatakan diri sebagai pegawai Pemerintah RI, termasuk polisi di dalamnya. Selanjutnya tanggal 2 September 1945, pemerintah melalui maklumat yang ditandatangani oleh Menteri Dalam negeri, Menteri Kehakiman, dan jaksa Agung mengangkat kepala kepolisian negara yang pertama yaitu: R. Soekanto Tjokroatmojo. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/SD tertanggal 25 Juni 1946 dikeluarkan dari Departemen Dalam negeri dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri sebagai jawatan tersendiri. Penetapan tersebut berlaku mulai tanggal 1 Juli 1946. Kemudian tanggal 1 Juli ditetapkan sebagai hari Bhayangkara. Setelah peristiwa Agresi Militer Belanda Pertama tanggal 21 Juli 1947, membawa dampak pada perkembangan kepolisian. Mulai tanggal 1 Desember 1947, Jawatan Kepolisian Negara ditetapkan berkedudukan di Yogyakarta.

Karena penyerbuan tentara Belanda ke Kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, terpaksa polisi bersama alat perlengkapan negara bersama TNI meninggalkan kota. Diluar kota, berpusat Pemerintahan Militer di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang dibantu oleh Staf Keamanan, terdiri dari Jaksa Agung Tentara sebagai Kepala Staf, P.d. Kepala Jawatan Kepolisian Negara dan Komandan Corps Polisi Militer Jawa, masing-masing sebagai Wakil Kepala I dan II. Pada Markas Besar Tentara Komando Jawa, Staf keamanan dan terdiri dari wakil Jawatan Kepolisian negara dan komando C.P.M. Tiap-tiap Gubernur Militer mempunyai staf keamanan.

Perlengkapan polisi ini dipakai sebelum tahun 1958 untuk penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian di Gunung Kidul.

23. Meja kursi tamu Kapten Widodo

Meja dan kursi ini menjadi saksi sejarah perjuangan Kapten Widodo sebagai komandan kompi dalam jajaran TNI SWK (Sub Wehrkreise) 102 pimpinan Mayor Sarjono di daerah Bantul.

Hasil konsolidasi pasukan TNI yang tercerai berai setelah Agresi Militer Belanda Kedua, pasukan dibagi dalam beberapa SWK. Untuk daerah Bantul menjadi SWK 102 dibawah pimpinan Mayor Sardjono. Kompi Widodo berada di dalamnya. Sebagai salah satu penerapan siasat gerilya adalah dengan melakukan perjuangan dengan markas yang selalu berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Salah satu markas perjuangan yang dipakai oleh Kapten Widodo waktu itu (tahun 1948-1949) adalah rumah Broto Sudarmo di dusun Jetis Bajang, Gilangharjo, Pandak, Bantul. Untuk menjaga agar identitasnya

tidak diketahui oleh musuh, maka Kapten Widodo selalu berusaha membaur dengan penduduk. Kadang-kadang beliau berada di rumah Martowiyarjo (petani), dan kadang-kadang pula berada di rumah Mulyodidono (petani). Bahkan tak jarang juga berada di rumah Darmorejo (pamong desa). Sikap membaur dan menyamar seperti ini sering dilakukan oleh para pemimpin perjuangan yang lain.

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 12 September 1992 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 156.a/BVY/IX/U.92, Meja dan kursi tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta bersama dengan benda lain yang berperan sama yaitu cangkir, teko, tempat sayur, dan naman.

24. Samurai

Samurai ini merupakan benda bersejarah saksi peristiwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1945.

Sejalan dengan aksi-aksi pelucutan senjata Jepang dan nasionalisasi aset milik tentara pendudukan Jepang di Indonesia, Samurai ini merupakan benda penyerahan dari seorang Kempeitei Jepang kepada R. Suprpto Wasito yang waktu itu menjadi Polisi Militer kurang lebih pada tahun 1945 (awal kemerdekaan). Selanjutnya pada pada masa clash II, samurai tersebut oleh R. Suprpto diserahkan kepada R. Soetrasno seorang polisi. Oleh R. Soetrasno waktu dipakasi sebagai senjata dalam perjuangan pada masa menghadapi Agresi Militer Belanda Kedua (Clash II). Setelah perjuangan selesai, benda tersebut disimpan dan menjadi benda yang sangat berharga bagi R. Soetrasno. Baru pada bulan September 1991 samurai tersebut dihibahkan kepada Dra. Suyatmi (adik R. Soetrasno) yang tinggal di Pandean, Ngotho, Bangunharjo, Sewon, Bantul.

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 13 Pebruari 1992 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 363/BVY/II/U.92, Samurai tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta.

25. Radio Perjuangan

Radio ini mempunyai peran yang cukup penting dalam penyebaran berita perjuangan ke dunia internasional. Sejak adanya kekuatan asing (NICA) yang ingin menjajah lagi Indonesi sebagai negara yang merdeka sejak 17 Agustus 1945, usaha-usaha

menegakkan kemerdekaan selalu digerakkan. Selain dengan mengandalkan kekuatan fisik bersenjata, juga ditempuh dengan cara diplomasi yang dilakukan oleh para pemimpin negara di meja perundingan.

Perjuangan dengan sistem diplomasi mempunyai kelebihan dibanding dengan perjuangan yang mengandalkan kekuatan fisik, yaitu adanya pengakuan dunia internasional tentang keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia. Hal itu terlihat dengan adanya kemauan dunia internasional (PBB) untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia dan Belanda. Dengan demikian keberadaan Indonesia secara defacto dan de jure dunia telah mengakuinya.

Untuk menghadapi hal ini, maka Belanda sering menggunakan taktik "provokasi" yaitu dengan menyebar kabar bohong tentang hancurnya RI dan TNI seperti halnya yang dilakukan oleh Belanda setelah jatuhnya kota Yogyakarta ke tangan Belanda akibat Agresi Militer Belanda Kedua tanggal 19 Desember 1948. Propaganda yang bersifat provokatif tersebut dilakukan dengan menggunakan siaran radio. Hal ini memberikan inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk melakukan hal yang sama, dengan maksud menangkis pernyataan apa yang disampaikan oleh Belanda tersebut. Sehingga radio-radio pada masa perjuangan waktu itu merupakan senjata yang ampuh bagi bangsa Indonesia untuk mendukung perjuangan para diplomat RI dan mempertahankan kemerdekaan di meja perundingan. Peristiwa-peristiwa yang "disembunyikan" oleh Belanda dari "mata dan telinga" dunia internasional, mampu dibeberkan dengan gamblang oleh radio-radio perjuangan waktu itu kepada dunia. Hal ini membuat Belanda menjadi terpojok dalam percaturan politik internasional. Salah satu dari radio-radio itu adalah seperangkat radio penyiaran berita-berita perjuangan milik PTT Bandung ini. Perangkat ini memiliki peran besar dalam penyiaran berita-berita perjuangan pada masa revolusi fisik.

26. Lumpang Batu

Lumpang batu ini merupakan saksi sejarah perjuangan Tentara Genie Pelajar (TGP) di daerah Seyegan Sleman yang waktu bermarkas di rumah Bapak Mulyo Sewoyo di Klangkapan, Margoluwih, Seyegan, Sleman.

Pada masa agresi militer Belanda II, TGP turut berjuang di wilayah Yogya barat. Salah satu markas TGP adalah rumah Bp. Mulyo Sewoyo di Klangkapan, Margoluwih, Seyegan, Sleman, Yogyakarta. TGP waktu itu dipimpin oleh Bambang Triantoro. Peralatan tersebut berperan dalam melayani kebutuhan logistik

para perjuangan TGP di daerah Yogyakarta Barat khususnya yang bermarkas di rumah Bp. Mulyo Sewoyo (lurah waktu itu)

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 15 Oktober 1996 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 133/BPP.MBY/X/U.96, lumpang batu tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta bersama dengan benda lainnya yaitu dandang, kenceng, naman, lepek, cangkir, bokor, dan peralatan makan lainnya.

27. Tas kulit Drs. Mohamad Hatta

Tas kulit ini adalah tas kuli milik Bung Hatta yang dulu pernah dipergunakan sebagai tas kerja tempat menyimpan dokumen-dokumen penting dalam rangka perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan RI di dalam Perundingan KMB yang berlangsung 23 Agustus-2 November 1949 di Den Haag Belanda.

Serangan Umum yang dilancarkan pada tanggal 1 Maret 1949 berhasil membuka mata dunia bahwa apa yang selama ini diberitakan oleh Belanda tentang hancurnya RI dan TNI hanyalah omong kosong belaka. Oleh karena itu atas inisiatif komisi PBB untuk Indonesia (UNCI : United Nations Commission for Indonesia) pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan antara RI dan Belanda yang diadakan di Hotel Des Indes Jakarta. Setelah berjalan cukup alot maka perundingan dapat berhasil menandatangani hasil persetujuan pada tanggal 7 Mei 1949. Perundingan tersebut dikenal dengan Persetujuan Roem Royen. Salah satu hasil dari persetujuan tersebut adalah RI siap menghadapi KMB.

Oleh karena itu sebelum KMB dilaksanakan dirasa perlu diadakan pendekatan antara RI dengan BFO (Bijeenkomst Voor Federal Overleg atau Pertemuan Musyawarah Federal) terutama dalam hubungannya dengan pembentukan RIS (Republik Indonesia Serikat).

Untuk itu pada tanggal 19 sampai dengan 22 Juli 1949 diadakan Konferensi Inter Indonesia (KII) yang pertama. Konferensi tersebut diselenggarakan di Hotel Toegoe Yogyakarta Jl. Pangeran Mangkubumi Yogyakarta. Sedangkan konferensi lanjutan tahap kedua dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 31 Juli sampai dengan 3 Agustus 1949.

Setelah masalah intern antara RI dan BFO telah terjadi kata sepakat maka kini bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan telah siap menghadapi KMB. Tanggal 4 Agustus 1949 telah ditetapkan

delegasi RI untuk KMB antara lain Drs. M. Hatta, Mr. Mohammad Roem, Prof. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastro Amidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Soekiman, Mr. Soejono Hadinoto, Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, dan Mr. Soemadi. Sedangkan perwira-perwira TNI yang duduk dalam delegasi tersebut antara lain Kolonel TB. Simatupang, Komodor Suryadi Suryadarma, Kolonel Soebijakto, Letkol Daan Jahja, dan Mayor Haryono. Untuk Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.

Tanggal 23 Agustus 1949 bertempat di Riderzaal, Den Haag dibuka sidang KMB. Dalam sidang tersebut delegasi RI diketuai oleh Drs. M. Hatta, delegasi Belanda diketuai oleh Mr. Van Maarseveen sedangkan UNCI (United Nations Commission for Indonesia) diketuai oleh Chritchley.

Setelah sidang berjalan dengan alot selama kurang lebih 3 bulan, pada tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan penandatanganan Piagam Persetujuan tentang konstitusi RI di kota Scheveningen, Nederland. Pada tanggal 2 Nopember 1949 dilangsungkan upacara penutupan KMB di Riderzaal, Den Haag dengan hasil ketentuan bahwa Kedaulatan Belanda di Indonesia akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.

28. Peralatan minum Pangsar Jenderal Soedirman

Peralatan minum ini merupakan saksi sejarah perjuangan Pangsar Jenderal Soedirman. Peralatan minum dipergunakan oleh Pangsar Jenderal Soedirman ketika beristirahat di Rumah Bapak Bajuri, dusun Kreja, Genjahan, Ponjong, Gunung Kidul tanggal 8 Juli 1949.

Meski dalam keadaan sakit, Jenderal Soedirman memilih meninggalkan kota Yogyakarta untuk melanjutkan perlawanan secara bergerilya, ketika Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta dan menawan para pemimpin RI pada tanggal 19 Desember 1948. Setelah membakar semua dokumen yang ada di kediamannya Jl. Bintaran Wetan 3 Yogyakarta, kurang lebih pukul 11.30 Pangsar Soedirman segera meninggalkan Bintaran dan menuju Kadipaten melalui Mergangsari, Gading, Alun-alun Kidul. Atas laporan kolonel Abdul Latif maka diputuskan Pangsar Soedirman segera meninggalkan kota Yogyakarta. Saat itulah perjalanan gerilya Pangsar Jenderal Soedirman yang dikenal dengan "Wiralelana" dimulai. Dari hari ke hari perjalanan pasukan Pangsar Jenderal Soedirman semakin jauh meninggalkan kota Yogyakarta dan diikuti oleh para pengikut dan anak buahnya yang setia dalam suka dan dukanya perjuangan. Perjalanan rombongan Pangsar Jenderal Soedirman berakhir di suatu desa yang aman

yaitu dukuh Sobo, desa Pakis, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Disinilah tempat yang paling lama didiami oleh Pangsar Jenderal Soedirman sampai menjelang beliau beserta pasukannya pulang ke Yogyakarta. Baru setelah Tentara Belanda berhasil ditarik mundur dari Kota Yogyakarta yang dikenal dengan "Peristiwa Yogya Kembali" tanggal 29 Juni 1949, Jenderal Soedirman mulai kembali masuk Kota Yogyakarta pada bulan Juli 1949.

Setelah Yogya kembali tanggal 29 Juni 1949, TNI sudah kembali ke Yogyakarta. Keamanan sudah pulih dan terjamin. Pada tanggal 6 Juli 1949 Presiden Soekarno, Wakil Presiden Drs. M. Hatta dan para pemimpin yang lain tiba di Maguwo (Adisucipto sekarang) dari pengasingannya. Waktu itu hanya tinggal Pangsar Soedirman yang belum tiba. Oleh karena itu Letkol Soeharto diperintahkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk kembali ke hutan, ke markas gerilya Pangsar Jenderal Soedirman dan meyakinkan beliau agar mau masuk Kota Yogyakarta.

Dengan membawa surat yang dikirim oleh Sri Sultan HB IX dan Kolonel Gatot Subroto, Letkol Soeharto berangkat menuju markas gerilya Pangsar Soedirman. Setelah berdiskusi selama berjam-jam maka Pangsar Soedirman salah seorang yang kontra terhadap Perundingan Roem Royen akhirnya menerima permintaan untuk kembali ke Yogyakarta.

Akhirnya pada tanggal 7 Juli 1949 dengan dilepas oleh rakyat di Sobo, berangkatlah Pangsar Jenderal Soedirman menuju Yogyakarta. Tanggal 8 Juli 1949 Pangsar Jenderal Jenderal Sudirman singgah di Rumah Ibu Bajuri di dusun Kreja, Genjahan, Ponjong, Gunung Kidul. Untuk menjamu Pangsar Jenderal Soedirman dipinjamkan perlengkapan meja kursi dan perlengkapan mimun milik Ibu Harjo Suwito yaitu orang tua bapak Imam Supardi yang rumahnya dekat Ibu Bajuri.

Pada tanggal 9 Juli 1949 Pangsar Jenderal Soedirman dengan para pengawal beserta dengan Letkol Soeharto yang disertai Mayor Dr. Irsan, wartawan Rosihan Anwar dan wartawan foto F.S. Mendur selaku misi pertama penjemputan melakukan perjalanan menuju Yogyakarta.

Perjalanan Pangsar Soedirman di Piyungan dan para pengawalnya beristirahat selama satu malam. Pagi harinya tanggal 10 Juli 1949 datang misi penjemputan kedua dipimpin Jenderal Mayor Soehardjo Hardjowardojo dan Kolonel T.B. Simatupang. Selanjutnya Pangsar Soedirman naik kendaraan Jeep yang telah disiapkan menuju Yogyakarta, diikuti oleh Letkol Soeharto dan para pengawal lainnya.

Pangsar Jenderal Soedirman langsung menuju Gedung Agung dan bertemu dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Kolonel TB. Simatupang. Setelah selesai menghadap Presiden dan memberikan laporan, kemudian Pangsar Jenderal Soedirman menuju ke Alun-alun Utara untuk menerima devile penyambutan. Pada waktu itu berlangsung parade kebesaran dari pasukan TNI dan barisan pejuang lainnya.

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 19 Januari 1998 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 433/F4.113/J3/1998, peralatan minum tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta bersama dengan benda lainnya yaitu meja dan kursi.

29. Perlengkapan Kolonel Zulkifli Lubis

Peralatan ini merupakan saksi sejarah perjuangan Zulkifli Lubis di daerah Srunggo Selopamioro Imogiri Bantul pada masa revolusi fisik. Gogok ini merupakan tempat candu yang merupakan aset perjuangan. Hasil penjualan candu ini dapat dipakai sebagai modal berjuang. Sedangkan poci ini merupakan peralatan minum yang dipakai oleh Kolonel Zulkifli Lubis yang waktu itu bermarkas di dusun Srunggo, Selopamioro, Imogiri, Bantul.

Akibat serangan Belanda di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1948, pasukan TNI tercerai berai dan segera mengadakan gerakan mundur ke luar kota. Salah satu daerah yang dijadikan tempat bertahan adalah desa Srunggo, Selopamioro, Imogiri, Bantul. Pasukan TNI diterima dengan baik oleh warga masyarakat dibawah pimpinan Lurah Sastrowiharjo. Waktu itu pimpinan militer yang mundur ke wilayah Srunggo dibawah pimpinan Kolonel Zulkifli Lubis yang dibantu oleh para pembesar militer yang lain yaitu Kapten Sutрино (bagian perlengkapan), Yadi dan Karli (tata usaha), Ilham (dokumentasi), Himawan Sukoco dan Santoso (sekretaris). Waktu itu kurang lebih 20 rumah yang dipergunakan sebagai tempat menginap pasukan Zulkifli Lubis, disamping juga para pembesar sipil. Kolonel Zulkifli Lubis bersama beberapa pembantunya menginap di rumah Kertosari. Sedangkan rumah Joikromo digunakan sebagai tempat penyimpanan candu oleh MBKD (Markas Besar Komando Djawa). Rumah Darjono digunakan untuk menyimpan amunisi, sedangkan rumah-rumah yang lain dipakai sebagai tempat penyimpanan candu. Rumah-rumah tersebut antara lain rumah Projokromo, Poncosetiko, Resosentono, Patemorejo, Saigeno, Mertojoyo, Partorejo dan Irosanimo. Mengenai darimana asal candu tersebut tidak diketahui, karena cara mengangkutnya dengan sembunyi-sembunyi dan

dikawal oleh dua atau tiga tentara. Pengelolaan candu di Srunggo ini dipegang oleh Karli yang juga mengurus tata usaha.

Pada mulanya candu ditempatkan dalam kaleng-kaleng, tetapi setelah sampai di desa Srunggo, lalu dimasak atau dicairkan, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Pemasakan candu dilaksanakan di rumah Soigeno. Dipasarkan kemana candu-candu tersebut juga warga tidak tahu, yang pasti pemasaran candu itu mendatangkan dana yang besar untuk biaya perjuangan TNI. Para pengungsi di Srunggo meninggalkan Srunggo setelah keadaan aman bulan Juni 1949.

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 7 Oktober 1996 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 139/PP.MBY/X/U.96, peralatan minum tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta bersama dengan benda lainnya yaitu meja dan kursi.

30. Perlengkapan Letkol Soeharto di Markas Perjuangan Kulon Progo.

Peralatan ini merupakan saksi sejarah perjuangan Letkol Soeharto dalam mempertahankan kemerdekaan. Perlengkapan dipergunakan oleh Letkol Soeharto ketika bermarkas di di rumah Bapak Padmodiharjo di Palihan, Palihan Temon Kulon Progo pada akhir tahun 1948.

Adanya Agresi Militer Belanda Kedua tanggal 19 Desember 1948, selain berhasil menduduki kota Yogyakarta dan menawan para pemimpin RI, juga menyebabkan pasukan TNI tercerai berai dan melakukan gerakan mundur ke luar kota Yogyakarta. Oleh karena itulah maka guna mengadakan koordinasi antar pucuk pimpinan TNI memerlukan waktu yang cukup lama, karena antara pucuk pimpinan yang satu dengan yang lain tidak saling mengetahui dimana keberadaannya. Untuk mencari informasi tentang kekuatan TNI di Yogyakarta selatan, Letkol Soeharto selaku komandan WK III memerintahkan Mayor Sardjono.

Satu hari setelah jatuhnya kota Yogyakarta ketangan Belanda, Letkol Soeharto segera mengadakan konsolidasi untuk menghimpun kekuatan TNI di daerah WK III. Dari hasil konsolidasi dapat dirinci kekuatan pasukan bersenjata di Yogyakarta. Dengan melihat cukup besarnya kekuatan pasukan bersenjata yang ada serta simpati rakyat yang begitu besar terhadap perjuangan maka direncanakan serangan balasan terhadap Belanda di kota maupun pos-posnya yang berada di luar kota. Serangan balasan pertama kali yang dilakukan oleh gerilyawan TNI setelah agresi Belanda II yang telah direncanakan sejak

tanggal 26 Desember 1948, dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1948. Serangan tersebut dipimpin oleh Letkol Soeharto.

Serangan tersebut dilaksanakan setelah dari hasil konsolidasi pasukan TNI WK III dibagi menjadi Sub WK – Sub WK. Setelah diadakan perubahan susunan anggota berdasarkan pertimbangan kekuatan, maka barulah serangan dilaksanakan. Pembagian WK III dalam beberapa SWK (Sub Wehrkreise) inilah yang nantinya akan menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan Serangan Umum 1 Maret 1949.

Dalam mengadakan konsolidasi inilah, Letkol Soeharto pernah bermalam di rumah Bapak Padmodiharjo di Palihan, Palihan Temon Kulon Progo pada akhir tahun 1948. Sedangkan perlengkapan kapstok dan nampan itu pernah dipergunakannya.

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 16 Oktober 1996 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 135/BPP.MBY/X/U.96, kaca hias, nampan dan longsong mortir tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta bersama dengan benda lainnya yaitu meja dan kursi.

31. Replika Patung Nyi Ageng Serang

Nyi Ageng Serang waktu lahir pada tahun 1752 bernama Raden Ajeng Kustiah Retno Edi. Ayahnya bernama Pangeran Notoprojo yang kemudian terkenal dengan nama Panembahan Serang (Bupati Serang, daerah terpencil sebelah utara Sala). Waktu terjadi pertempuran antara VOC dengan pasukan ayahnya (Notoprojo) yang menolak perjanjian Giyanti, beliau tertangkap dan dibawa ke Yogyakarta. Tetapi kemudian dikembalikan ke Serang. Hingga saat meletus perang Diponegoro (1825-1830) kembali beliau melibatkan diri bersama cucunya R.M. Papak, meski telah berusia 73 tahun. Pasukannya selalu berhasil memporak-porandakan pasukan Belanda di daerah Purwodadi, Semarang, Demak, Kudus, Yuwono, dan Rembang. Nyi Ageng Serang pernah memimpin pasukan secara langsung di Desa Beku, Kabupaten Kulon Progo. Beliau wafat pada usia 76 tahun dan dimakamkan di Desa Beku, Kabupaten Kulon Progo sesuai permintaan Beliau.

32. Lukisan Pernyataan Negeri Ngayogyakarta

Berita Proklamasi yang disiarkan oleh Kantor Berita Domei Pusat Jakarta dapat diterima oleh Kantor Berita Domei Cabang Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 siang hari. Semula ingin segera disebar luaskan ke seluruh rakyat Yogyakarta tetapi dilarang oleh pihak Jepang. Akhirnya berita tersebut hanya disebarluaskan dari mulut ke mulut. Kebetulan hari itu adalah hari Jum'at.

Sehingga masjid-masjid di Yogyakarta memegang peranan penting dalam penyebarluasan berita proklamasi. Melalui khotbah-khotbah shallat Jum'at berita proklamasi dapat segera tersebar ke penjuru kota Yogyakarta. Masjid-masjid tersebut antara lain Mesjid Agung Kauman Yogyakarta (sebelah barat Alun-Alun Utara Yogyakarta) dan Masjid Paku Alaman.

Akan tetapi waktu itu sebagian besar rakyat masih bingung. Disaat proklamasi telah berkumandang namun tentara Jepang masih nyata berkuasa. Demikian pula Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai panutan, masih tetap diam. Keragu-raguan itu akhirnya lenyap setelah Hari Sinar Matahari yang terbit pada tanggal 19 Agustus 1945 memuat tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bersamaan dengan berita Proklamasi Kemerdekaan tersebut dimuat pula teks UUD 1945.

Siang itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX segera bertindak mantap. Sultan segera mengirim telegram untuk mengucapkan selamat kepada Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta atas terpilihnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sikap Sultan ini segera ditanggapi oleh Ir. Soekarno dengan membuat Piagam Penetapan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Meski dikeluarkan tanggal 19 Agustus 1945, tetapi baru disampaikan pada tanggal 6 September 1945, satu hari setelah Sultan mengeluarkan amanat 5 September 1945. Piagam tersebut dibawa oleh Mr. Sartono dan Mr. AA. Maramis.

Disamping itu pada siang itu pula tanggal 19 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB Sultan mengundang kelompok-kelompok pemuda untuk mengadakan pertemuan dengan mereka. Pertemuan dilaksanakan di Gedung Wilis, Bangsal Kepatihan, Yogyakarta. Hadir dalam pertemuan itu wakil kelompok pemuda dari golongan agama, nasionalis, kepanduan dan keturunan Cina yang jumlahnya kurang lebih 100 orang. Pertemuan berlangsung kurang lebih setengah jam. Pidato Sultan dalam pertemuan tersebut antara lain :

“Kita telah beratus tahun dijajah bangsa lain. Maka selama itu perasan kita tertekan dan sekarang kita merdeka. Tentu perasaan yang lepas dari tekanan akan melonjak. Melonjaknya ini yang harus kita jaga. Biarlah melonjak setinggi-tingginya, sepuas-puasnya. Akan tetapi jangan sampai menyerempet-nyerempet yang tidak perlu yang bisa menimbulkan kerugian. Menurut sejarah, di mana terjadi perubahan besar dan mendadak seperti yang terjadi di tanah air kita sekarang, pemuda senantiasa memegang peranan penting. Oleh karena itu saudara-saudara saya minta menjaga keamanan masyarakat, baik di kampung-kampung,

di perusahaan-perusahaan, di toko-toko dan lain-lain jangan sampai terjadi kerusuhan. Kalau terjadi sesuatu laporkan kepada saya. Dan bertindak sebagai wakil saya dalam hubungannya dengan saudara-saudara adalah Pangeran Bintoro.”

Selanjutnya Sri Sultan Hamengku Buwo IX juga menyampaikan kata sambutan yang dimuat dalam Harian Sinar Matahari tanggal 20 Agustus 1945, yang berisi antara lain menghimbau agar seluruh lapisan masyarakat bersatu padu bahu-membahu untuk rela berkorban demi kepentingan bersama menjaga, memelihara, membela kemerdekaan nusa dan bangsa.

Pada tanggal 20 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Kebaktian Rakyat Yogyakarta (Yogyakarta Koci Hokokai), kembali mengirim telegram yang ditujukan kepada Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta. Telegram itu menegaskan bahwa Yogyakarta sanggup berdiri di belakang kepemimpinan Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta. Dan Sultan akan bertanggung jawab kepada Presiden. Demikian pula Sri Paku Alam VIII.

Setelah memperhatikan keinginan rakyat dan atas persetujuan KNID maka Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII segera mengeluarkan amanat tanggal 5 September 1945 yang menyebutkan bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan Negeri Paku Alaman, yang keduanya bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Dan perhubungan antara kedua daerah tersebut dengan pemerintah pusat bersifat langsung dan kedua penguasanya bertanggungjawab secara langsung dengan Presiden.

33. Replika Patung Dewi Sartika

Raden Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Jawa Barat. Ayahnya adalah Raden Somanagara seorang patih di Bandung yang kemudian dibuang ke Ternate karena menentang Pemerintahan Belanda. Pada umur 15 tahun atas dorongan dan bantuan kakeknya R.A.A. Martanegara dan Den Hamer (inspektur Kantor Pengajaran) maka tanggal 16 Januari 1904 dibukalah sebuah sekolah seperti yang dicita-citakan Dewi Sartika yang kemudian diberi nama Sekolah Istri. Muridnya sekitar 20 orang dan bertempat di Kantor Kepatihan Bandung. Tahun 1910 sekolah tersebut berganti nama menjadi Sekolah Kautaman Istri. Atas keberhasilannya itu maka berdiri pula sekolah serupa di Garut, Tasikmalaya, Purwakarta dll. Keberhasilan Dewi Sartika tidak luput dari dukungan suaminya yang bernama Raden Kanduruan Agah Suriawinata. Pada masa perang kemerdekaan

Dewi Sartika menghentikan kegiatannya dan mengungsi ke Cinean sampai wafatnya tanggal 11 September 1947. Setelah keadaan aman makamnya kemudian dipindahkan ke Bandung. Tampak Dewi Sartika bersama beberapa orang murid-muridnya.

34. Lukisan Pengibaran Merah Putih di Gedung Agung

Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Yogyakarta, di hati sebagian besar rakyat Yogyakarta masih tersimpan rasa keragu-raguan. Baru setelah Sri Sultan Hamengku Buwono IX memberikan arahan kepada kelompok-kelompok pemuda di Gedung Wilis Kepatihan Yogyakarta, rakyat merasa mantap. Ditambah lagi dengan keluarnya maklumat 5 September 1945 oleh kedua raja Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII.

Sementara itu pada tanggal 20 September 1945, di Jakarta dilangsungkan konferensi yang dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat, pegawai, polisi, BKR dan Barisan Pelopor dari seluruh Jawa yang bertujuan untuk membulatkan tekad sebagai pendukung proklamasi dan pembela Republik. Konferensi tersebut menegaskan antara lain pemasangan bendera Merah Putih agar makin diperhebat.

Menanggapi hal tersebut maka di Yogyakarta, para pemuda dengan semangat yang berapi-api segera bergerak. Mereka berusaha mengibarkan bendera Merah Putih di rumah-rumah, di pabrik-pabrik, di toko-toko, di gedung-gedung instansi maupun di kendaraan-kendaraan bermotor. Tak sekalipun terlintas rasa takut akan tentara Jepang meski dengan senjata terhunus.

Pada tanggal 21 September 1945, sebelum terjadi penurunan bendera Hinomaru di gedung Cokan Kantai, rakyat bergerak menuju Balai Mataram (Senisono sekarang) untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Setelah bendera Merah Putih telah berkibar di Balai Mataram, mereka dihalau oleh tentara Jepang. Tetapi kemudian sekitar jam 12.00 WIB mereka kembali lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Ribuan rakyat Yogyakarta yang sebagian besar pemuda pelajar telah berkumpul di depan Gedung Cokan Kantai (Gedung Agung) dengan dikawal oleh satu kompi pasukan Polisi Istimewa. Waktu itu sebagai juru bicara adalah Jamaludin Nasution yang bertindak selaku Sekretaris Promotor Pemuda Nasional (PPN). Mereka bermaksud menurunkan bendera Hinomaru di atas atap Gedung Cokan Kantai dan ingin menggantinya dengan bendera Merah Putih. Tanpa perasaan takut sedikitpun sebanyak 4 orang pemuda antara lain Slamet, Sutan Ilyas, Supardi dan Rusli. Ditambah 1 orang pemuda yang bernama Siti Ngaisah (ada yang memanggil Widowati)

segera naik ke atas Gedung Cokan Kantai menurunkan bendera Hinomaru dan menggantikannya dengan bendera Merah Putih. Saat itu pula bergema lagu Indonesia Raya yang melantun dengan khidmat. Peristiwa besar ini kemudian dikenal dengan Insiden Bendera di Cokan Kantai.

Sebelum peristiwa itu terjadi, sebetulnya telah ada delegasi Indonesia yang menghadap Jepang di Gedung Cokan Kantai untuk meminta menurunkan bendera Hinomaru dan menggantikannya dengan Merah Putih, dan dikabulkan. Tetapi selang beberapa waktu Jepang menggantinya dengan menaikkan kembali Bendera Hinomaru. Inilah yang membuat marah rakyat Indonesia.

Sesudah bendera Merah Putih berkibar di atas Gedung Cokan Kantai, kemudian ribuan rakyat Yogyakarta bergerak melakukan demonstrasi di sepanjang Jl. Malioboro. Arak-arakan dipimpin oleh satuan Polisi Istimewa dengan senjata lengkap. Arak-arakan tersebut kemudian berpapasan dengan satuan Kenpeitei yang bermarkas di Pingit. Namun ketika itu tidak terjadi kontak senjata.

Pada tanggal yang sama Kesatuan Polisi Istimewa Yogyakarta di Asrama Polisi Pathuk, dipimpin RP. Sudarsono, mengadakan ikrar dan ketetapan hati untuk hanya melaksanakan perintah dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pucuk pimpinan di Yogyakarta.

35. Replika Patung Soetomo

Soetomo adalah seorang tokoh, ketua pertama Organisasi Boedi Oetomo. Beliau lahir di Ngepeh, Jawa Timur 30 Juli 1888 dengan nama Subroto dan wafat di Surabaya 30 Mei 1938. Sebagai mahasiswa STOVIA masuk pada 10 Januari 1903 dan tamat 11 April 1911. Bersama rekan-rekannya Goenawan, Soeradji, Goembrek dll, Beliau mendirikan Organisasi Boedi Oetmo pada 20 Mei 1908. Pemuda Sutomo merupakan pelajar pertama yang merespon ajakan Dokter Wahidin Soediro Hoesodo untuk mendirikan Budi Utomo bersama-sama dengan para pelajar Stovia lainnya. Tahun 1919 Soetomo berkesempatan belajar ke Negeri Belanda, Jerman dan Austria. Di Negeri Belanda Soetomo menjadi anggota Indische Vereeniging (yang kemudian berubah menjadi Indonesische Vereeniging dan kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia). Setelah ke Indonesia menganjurkan agar Boedi Oetomo bergerak dalam dunia politik dan organisasinya terbuka untuk umum.

36. Lukisan Korban Pertempuran Kotabaru

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah pimpinan Sri Sultan Hamengku

Buwono IX, Sri Paku Alam VIII, BPU (Barisan Penjagaan Umum), KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah), Polisi, BKR (Badan Keamanan Rakyat) dan rakyat berhasil menjalin kerjasama yang harmonis dengan kaum mudanya untuk melakukan gerakan perebutan kekuasaan dan perebutan senjata Jepang. Organisasi-organisasi tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam pengoperan kantor-kantor sipil, gedung-gedung resmi, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik dan gerakan pelucutan senjata baik dengan kekerasan maupun dengan cara damai.

Pada tanggal 6 Oktober 1945 usaha pelucutan senjata Jepang di Kotabaru secara damai sudah dilakukan. Perundingan di Kotabaru (gudang senjata dan markas tentara Jepang) dimulai antara R. Mohammad Saleh (Ketua KNID), RP. Sudarsono, Sunjoto, Bardosono (dari BKR) dengan Mayor Otzuka, Kenpeitai Cho Sasaki, Kapten Ito dan Kiabuco dari pihak Jepang. Perundingan tersebut dilaksanakan di rumah Butaico Kotabaru (sebelah barat SMU 3 Yogyakarta, sekarang) mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB.

Dalam perundingan itu RP. Sudarsono meminta agar Butaico Mayor Otzuka menyerahkan senjata Jepang kepada pihak Indonesia. Sementara perundingan sedang berlangsung, ribuan rakyat dan pemuda yang digerakkan oleh KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah), BPU (Barisan Penjagaan Umum), BKR (Badan Keamanan Rakyat), dan PI (Polisi Istimewa) bergerak menuju Kotabaru. Mereka menggunakan senjata apa adanya. Seperti golok, bambu runcing, tombak, keris, pentung dan sejenisnya.

Setelah kurang lebih kurang 8 jam perundingan berlangsung, akhirnya menemui jalan buntu. Mayor Otzuka mencoba mengulur waktu dengan menyatakan bahwa mau menyerahkan senjata Jepang pada jam 10.00 WIB setelah mendapat ijin dari Jenderal Nakamura yang berkedudukan di Magelang. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh wakil Indonesia. Setelah perundingan gagal maka Moh. Saleh (Ketua KNID), RP. Sudarsono, Bardosono, dan Sunjoto (BKR) segera meninggalkan tempat perundingan dengan diantar oleh pembesar-pembesar Jepang.

Rakyat dan pemuda yang didukung oleh BKR dan PI telah berkumpul di sekitar Kotabaru sejak pukul 23.00 WIB sudah tidak sabar lagi untuk mengadakan penyerbuan ke markas Jepang di Kotabaru. Setelah perundingan dianggap gagal maka tepat pada pukul 04.00 WIB penyerangan dimulai dengan tanda letusan granat tangan. Senjata mitraliur Jepang mulai beraksi menyerbu para pemuda dan pejuang.

Ketika pertempuran terjadi, Butaico yang bermarkas di Pingit datang ke Kotabaru. Butaico di Pingit mau menyerahkan senjatanya kepada TKR asalkan anak buahnya tidak diganggu. Kemudian pimpinan TKR meminta kepada Butaico di Pingit agar mau menasehati Bataico Kotabaru Mayor Otzuka supaya bersedia menyerahkan senjatanya kepada TKR. Tetapi Mayor Otzuka tetap pada pendiriannya sehingga pertempuran terus berjalan.

Ketika pertempuran makin gencar terjadi, Moh. Saleh dan RP. Sudarsono berhasil masuk ke dalam tangsi Jepang dan menemui Mayor Otzuka. Kedua pimpinan itu menanyakan apakah Mayor Otzuka mau menyerahkan senjata Jepang atau tidak. Dan kemudian dijawab bahwa Mayor Otzuka mau menyerahkan senjata Jepang hanya kepada Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Pukul 10.30 tanggal 7 Oktober 1945 pertempuran berhenti. Pasukan Jepang mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Sekitar 360 orang serdadu Jepang di Kido Butai Kotabaru berhasil ditawan. Polisi Istimewa kemudian membawanya ke penjara Wirogunan dengan berjalan kaki melalui jalan Jenderal Sudirman, Tugu, Jalan Mangkubumi, Jalan Malioboro dan berhenti sebentar di depan Benteng Vredeburg, kemudian melalui Jalan P. Senapati menuju rumah Penjara Wirogunan.

Sore harinya, Komandan Garnizun Jepang diterima oleh GBPH (Gusti Bendera Pangeran Harya) Prabuningrat di pintu gerbang Keben untuk diantarkan menghadap Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Para perwira Jepang itu diterima Sultan di kantor beliau, Emper Purworetno guna menyatakan penyerahan pasukan dan senjatanya. Senjata Jepang kemudian disimpan di Bangsal Pracimosono dan selanjutnya diserahkan kepada TKR.

Dalam pertempuran gugur sebanyak 21 orang pemuda pejuang yang kemudian nama-nama mereka diabadikan sebagai nama-nama jalan di Kotabaru dan sekitarnya antara lain :1.

1. IDewa Nyoman Oka
2. Amat Djazuli
3. Faridan M. Noto
4. Bagong Ngadikan
5. Suroto
6. Syuhada
7. Sudjijono
8. Sunaryo
9. Supadi
10. Djuwadi
11. Hadidarsono

12. Sukartono
13. A. Djohar Nurhadi
14. Sabirin
15. Mohammad Sareh
16. Mohammad Wardani
17. Trimo
18. Ahmad Zakir
19. Umar Kalipan
20. Abu Bakar AliAtmo Sukarto

37. Replika Patung Tirto Koesoemo

Tirtokoesoemo adalah seorang anak dari seorang wedana Madiun yang sederhana. Untuk meniti kariernya, dengan bekal ijazah sekolah rendah dari Lagere Indlandsch School (sekolah rendah pribumi) dan mengetahui pengetahuan membaca, menulis (bahasa Jawa dan Melayu) dan berhitung harus melewati masa magang sebelum mendapatkan pekerjaan dilingkungan pemerintahan mulai dari sebagai mantri polisi, patih, sampai dengan bupati.

Pertama kali ia bekerja magang di keluarga Mr. PH. (Sic.) seorang jaksa (omgaand rechteer) berkebangsaan Belanda. Tidak lama kemudian sebelum mendapatkan promosi sebagai pegawai kejaksaan institusi omgaand rechteer itu dihapus. Karena pengalaman magangnya itu ia diperkenankan menjadi siswa sekolah perkebunan (Lanbouw School) di Bogor lulus tahun 1884. Oleh karena kecakapannya dapat berbahasa Belanda dengan baik sehingga diangkat direktur di sekolah perkebunan itu yaitu Prof. Dr. Treub sebagai asisten guru (assistant-leeaar) pada tahun 1887. Tidak lama kemudian ia dapat bekerja di lingkungan kerja Inlandsch bestuur (pangreh praja) sebagai mantri polisi di Temanggung, Karesidenan Kedu. Tirtokoesoemo, semenjak itu kariernya mulai menanjak sehingga pada tahun 1900 diangkat menjadi patih (wakil bupati di Magelang), kemudian tahun 1903 diangkat menjadi bupati di Kabupaten Karanganyar (di daerah Karesidenan Kedu).

Sementara itu pada tanggal 3-5 Oktober 1908, di Yogyakarta berlangsung kongres Boedi Oetomo yang pertama di Ruang Makan Kweekschool Jetis Yogyakarta. Salah satu dari hasil kongres tersebut adalah menetapkan RTA. Tirtokoesoemo sebagai ketua pengurus besar Boedi Oetomo, dan Dokter Wahidin Soedirohoesodo sebagai wakil. Sedangkan anggotanya terdiri dari MB. Dwidjosewojo (Guru Kweekschool Yogyakarta), R. Koewatin Sosrosoegondo (Guru Kweekschool Yogyakarta), M. Tjipto Mangoenkoesoemo (Dokter dari Demak), M.B. Wahidin

Soedirohoesodo (Dokter Pensiun Yogyakarta), RM. Aryo Surjodipoetro (Kepala Kejaksaan Bondowoso), RA. Danokoesoemo (Bupati Magelang), RM. Pandji Gondoatmodjo (Paku Alaman), RM. Pandji Gondosoenarjo (Kejaksaan Surakarta)

38. Lukisan Perlawanan TP di Daerah Prambanan

Lukisan Perlawanan TP di Daerah Prambanan merupakan sebuah lukisan karya seorang pelaku pertempuran di Prambanan. Pelukis tersebut adalah Bapak Sugeng Darsono. Beliau adalah bekas anggota TP Brigade XVII Detasemen III yang mulai aktif dalam kesetuan tersebut pada tahun 1946.

Lukisan tersebut menggambarkan suasana ketika terjadi pertempuran antara Tentara Belanda dengan anggota TP di daerah Prambanan pada pertengahan tahun 1949. Lukisan tersebut dibuat oleh Bapak Sugeng Darsono pada tahun 1992.

Pada waktu ada pengakuan kedaulatan RIS para anggota TP diberi alternatif pilihan untuk melanjutkan kariernya dalam bidang militer atau dalam bidang pendidikan. Pada kesempatan itu Bapak Sugeng Darsono memilih dalam bidang pendidikan dan melanjutkan pendidikannya di ASRI sejak tahun 1951 dan lulus tahun 1956.

39. Replika Patung KHA. Dahlan

KHA. Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Sewaktu kecil bernama Muhammad Darwisy. Pada umur 15 tahun telah pergi haji dan tinggal di Mekah selama lima tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rasyid Ridha dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan.

Pada tahun 1903, beliau bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama dua tahun. Pada masa ini, beliau sempat berguru kepada Syeh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, K.H. Hasyim Asyari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di kampung Kauman, Yogyakarta.

Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan al-Qur'an dan al-Hadits. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 Nopember 1912. Dan sejak awal Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan

bergerak di bidang pendidikan.

Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914, dengan Surat Ketetapan Pemerintah No. 81 tanggal 22 Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Dari Pemerintah Hindia Belanda timbul kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini. Itulah sebabnya kegiatannya dibatasi. Walaupun Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Srandakan, Wonosari dan Imogiri dan lain-lain tempat telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasinya, maka KH. Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Ujung Pandang dengan nama Al-Munir, di Garut dengan nama Ahmadiyah. Sedangkan di Solo berdiri perkumpulan Sidiq Amanah Tabligh Fathonah (SATF) yang mendapat pimpinan dari cabang Muhammadiyah. Bahkan dalam kota Yogyakarta sendiri ia menganjurkan adanya jama'ah dan perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam. Perkumpulan-perkumpulan dan Jama'ah-jama'ah ini mendapat bimbingan dari Muhammadiyah, yang diantaranya ialah Ikhwatul Muslimin, Taqwimuddin, Cahaya Muda, Hambudi-Suci, Khayatul Qulub, Priya Utama, Dewan Islam, Thaharatul Qulub, Thaharatul-Aba, Ta'awanu alal birri, Ta'ruf bima kanu wal- Fajri, Wal-Ashri, Jamiyatul Muslimin, Syahratul Muhtadi.

Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota, disamping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921 Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921.

Sebagai seorang yang demokratis dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, Dahlan juga memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi

kerja dan pemilihan pemimpin dalam Muhammadiyah. Selama hidupnya dalam aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, telah diselenggarakan dua belas kali pertemuan anggota (sekali dalam setahun), yang saat itu dipakai istilah *Algemeene Vergadering* (persidangan umum).

KHA. Dahlan wafat pada tanggal 23 Pebruari 1923 dan dimakamkan di Karangajen, Yogyakarta. Atas jasa-jasa KH. Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa ini melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka Pemerintah Republik Indonesia menetakannya sebagai Pahlawan Nasional dengan surat Keputusan Presiden no. 657 tahun 1961.

40. Lukisan Serangan Umum 1 Maret 1949

Serangan umum merupakan sebuah serangan besar-besaran yang dilakukan oleh anggota TNI dan gerilyawan terhadap markah Belanda di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949. Terjadinya Serangan Umum ini merupakan gagasan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang melalui siaran radio di Kraton mendengar siaran radio Belanda tentang hancurnya RI dan lumpuhnya TNI.

Setelah mengadakan koordinasi dengan Panglima Besar Soedirman di daerah gerilya, maka Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengadakan pembicaraan dengan Letkol Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai Komandan WK III. Hasil pembicaraan maka serangan akan dimulai tanggal 1 Maret 1949 jam 6 pagi saat sirene tanda habisnya jam malam berbunyi.

Karena adanya persatuan antara TNI dan rakyat maka serangan tersebut berhasil menguasai Yogyakarta dalam 6 jam. Keberhasilan ini kemudian disiarkan oleh radio AURI di Playen Gunung Kidul (PC 2), yang menyiarkan berita ini sedara berantai ke Bukit Tinggi (stasiun radio PDRI), Aceh (stasiun radio AURI), Birma (stasiun radio AURI pada Indonesia Airways di Rangoon) dan India (All India Radio). Selanjutnya melalui wakil-wakil RI dalam perundingan di DK PBB yang sedang singgah ke India, akhirnya berita besar tentang kebohongan Belanda sampai ke meja perundingan DK PBB.

Dengan demikian maka terbukalah mata dunia internasional bahwa apa yang selama ini disiarkan oleh Belanda hanyalah omong kosong belaka. Oleh karena itulah setelah posisinya semakin terjepit dalam percaturan politik Internasional maka Belanda bersedia membuka kembali perundingan dengan Indonesia. Hal ini membuka jalan bagi adanya pengakuan kedaulatan RIS setelah tahapan perundingan Roem-Royen dan KMB dilalui.

41. Replika Patung RM. Soerjopranoto

RM. Soerjopranoto adalah seorang bangsawan Pakualaman, putra pertama dari KPH. Suryaningrat (putra Paku Alam III) yang lahir pada tanggal 11 Agustus 1875 dengan nama kecil RM. Iskandar. Pada masa kecil dia mempunyai kebiasaan senang berkelahi. Sampai menginjak usia dewasa kebiasaannya tersebut masih terus dilakukan, sehingga kemudian ia terkenal dengan sebutan "Den Mas Iskandar Pendekar Jalanan". Kemudian dengan tubuhnya yang tegap tinggi dan besar, beliau mendapat julukan lagi "Den Mas Landung".

Dengan status keistimewaannya sebagai cucu seorang raja, RM. Soerjopranoto berkesempatan menempuh pendidikan formal di sekolah rendah Eropa atau *Europeesche Lagere School* (ELS). Lulus dari ELS kemudian meneruskan ke *Klien Ambtenaren Cursus* (Kursus Pegawai Rendah), dan setelah lulus ia diterima sebagai pegawai pada *Controleurs-kantoor* di Tuban Jawa Timur. Karena pernah menempeleng seorang Controleur Belanda, maka RM. Soerjopranoto dikeluarkan dan segera kembali ke Yogyakarta. Di Yogyakarta oleh pamannya KPH Suryokusumo diangkat sebagai Wedana Sentana Praja Paku Alaman dengan pangkat Panji dengan tugas mengurus administrasi kerabat Paku Alaman. Selama di Yogyakarta, RM. Soerjopranoto mendirikan Mardi Kaskaya pada tahun 1900. Satu tahun kemudian juga mendirikan *Societeit Soetrohardjo* sebuah klub yang identik dengan sebuah kelompok belajar (*biblioteek*).

Oleh karena kiprah RM. Soerjopranoto ini, dia dipandang membahayakan oleh Belanda, sehingga dengan dalih melanjutkan pendidikan ke *Middlebare Landbouw School* (MLS) dia harus meninggalkan Yogyakarta dan pergi ke Bogor. Tahun 1907 pendidikan di MLS Bogor selesai dan RM. Soerjopranoto berhak atas *Landbouw Kundige* (Ahli Pertanian), dan *Landbouw Leerar* (Guru Pertanian). Dengan ijazah yang dimilikinya itu ia ditugaskan di Kejajar, Wonosobo sebagai *Landbouw Consulent* (Kepala Dinas Pertanian).

Sewaktu di Wonosobo ini, RM. Soerjopranoto berhasil mendirikan SI (Sarekat Islam) dan dia sendiri menjadi anggota Komisariss Central Sarekat Islam (CSI). Pada tahun 1916, karena ada konflik dengan pejabat Belanda, RM. Soerjopranoto keluar dari pekerjaannya di Wonosobo, ia coba mendirikan Mardi kiswa, suatu koperasi petani, namun gagal. Ia lalu aktif dalam BO, dan menjadi pemimpin Adhi Dharma.

Adhi Dharma adalah organisasi para pangeran Pakualaman yang bertujuan meningkatkan kehidupan spiritual, moral, dan intelektual yang serasi. RM. Soerjopranoto berhasil mengubah

organisasi itu dari sekedar klup para pangeran menjadi jaringan perlindungan yang diberikan oleh pangeran dan priyayi kepada bermacam-macam orang dan golongan masyarakat (*patronage*). Program dari Adhi Dharma ini adalah menolong kaum cacat, memberi pinjaman kepada yang memerlukan, memajukan perdagangan, dan mendirikan sekolah.

Pada bulan November 1918, RM. Soerjopranoto memelopori berdirinya PFB (*Personeel Fabrieks Bond*). Selanjutnya pada bulan Februari 1919 terbentuk pengurus pusat PFB yang disebut Komite Sentral (*Centrale Comite*). Pengurus pusat ini terdiri dari RM. Soerjopranoto sebagai ketua, Soemodihardjo sebagai sekretaris, dan Soemoharjono sebagai anggota. Dalam waktu sebulan jumlah anggota telah mencapai 750 orang. PFB ini mampu mempengaruhi gerakan buruh pabrik diseluruh Jawa pada musim tebang dan giling tebu (April – Agustus). Pengaruh itu akibat kecenderungan melapor ke kantor pusat PFB setiap kali buruh di suatu pabrik hendak bergerak. Tuntutan mereka berkisar pada kenaikan upah, persamaan upah antara karyawan Eropa dan Bumiputera, peningkatan mutu lingkungan kerja, masa kerja delapan jam sehari, sehari libur yang dibayar dalam seminggu, dan upah lembur. Pada akhir tahun 1919, PFB menjadi organisasi buruh terbesar di Hindia-Belanda dengan 90 cabang, 10 ribu anggota di seluruh Jawa, satu surat kabar *Boereh Bergerak*, dan Soerjopranoto sebagai Si Raja Pemogokan. Perkembangan pesat dari PFB ini tidak dapat dilepaskan dari ketenaran seorang RM. Soerjopranoto yang waktu itu merupakan seorang komisarisi CSI (*Central Serikat Islam*) dan juga Ketua SI (Sarekat Islam) Yogyakarta. Ia juga merupakan pemimpin Adhi Dharma, suatu paguyuban para pangeran. Dengan posisinya dan segala otoritasnya RM. Soerjopranoto mampu menggerakkan elemen-elemen yang dibawahnya untuk mendukung gerakan PFB. Ketika timbul kerusuhan buruh di pabrik gula Padokan Yogyakarta, RM. Soerjopranoto berhasil mendirikan "Tentara Buruh" (*Arbeidsleger*) yang juga disebut Prawiro Pandojo Ing Joedo sebagai cabang dari Adhi Dharma. Oleh karena keberaniannya melakukan pemogokan, kemudian RM. Soeryopranata mendapat sebutan "*de staking konig*" yang berarti raja pemogokan.

Pada tanggal 15 Oktober 1954, R.M. Soerjopranoto meninggal dunia dalam usia 88 tahun di rumah menantunya di Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Dua hari kemudian yaitu tanggal 17 Oktober 1954, dengan diiringi ribuan pelayat, jenazah R.M. Soerjopranoto dimakamkan di makam keluarga "Rachmat Jati",

Kotagede, Yogyakarta. Upacara pemakaman jenazah R.M. Soerjopranoto dilakukan secara militer sebagai seorang perwira tinggi.

Untuk menghargai jasa-jasanya dan perjuangannya dalam merintis kemerdekaan maka dengan Keputusan Presiden RI tanggal 30 November 1959, Nomor : 310, tahun 1959, R.M. Soerjopranoto diangkat sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1960, Presiden Sukarno menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Tingkat II kepada Almarhum R.M. Soerjopranoto.

42. Lukisan Dapur Umum di Daerah Gerilya

Kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda melalui Agresi Militernya yang ke dua tanggal 19 Desember 1948. Perintah pertempuran secara bergerilya segera dikeluarkan oleh Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Soedirman. Desa-desa dan gunung-gunung dijadikan basis perjuangan gerilyawan.

Untuk mengisi kekosongan sipil yang diakibatkan oleh tertawannya para pemimpin negara RI oleh Belanda, maka PTTD (Panglima Tentara Teritorium Djawa) Kolonel A.H. Nasution pada tanggal 25 Desember 1948 mengeluarkan maklumat No. 1/MBKD yang mengumumkan berlakunya pemerintahan militer untuk seluruh Djawa. Pemerintahan ini menggunakan sistem pemerintahan yang totaliter. Yaitu melibatkan seluruh lapisan masyarakat dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Dalam hal ini rakyat berperan total mendukung perjuangan. Mereka itu antara lain ada yang ikut di garis depan dengan menyebarkan diri ke dalam kesatuan laskar perjuangan ataupun TNI. Atau yang berjuang di garis belakang seperti PMI, kurir, maupun aktif dalam kegiatan Dapur Umum.

Ketika Belanda mulai memasuki kota Yogyakarta dan dengan dalih mencari para gerilyawan bertindak semena-mena terhadap siapa saja yang dijumpainya, maka rakyat di sebelah timur Sungai Progo mulai berbondong-bondong ke arah sebelah barat Sungai Progo untuk mengungsi. Sehingga ketika itu daerah-daerah di sebelah barat Sungai Progo menjadi daerah yang padat oleh pengungsi. Baik itu militer maupun sipil. Sehingga tidak mengherankan kalau di daerah tersebut sangat disibukkan oleh kepentingan perjuangan. Disamping rakyat biasa, ada juga tokoh pemerintahan sipil maupun militer yang turut pula mengungsi di daerah tersebut.

Untuk mencukupi kebutuhan logistik dari para pengungsi tersebut diselenggarakanlah sebuah Dapur Umum. Seperti yang diselenggarakan di Rumah Bapak Kariyo Utomo di Dusun

Banaran, Banjarasri, Samigalung, Kulon Progo. Disamping dipergunakan sebagai Dapur Umum, rumah Bapak Kariyo Utomo juga dipergunakan sebagai Markas Perjuangan Kolonel TB. Simatupang (Wakil KSAP) yang waktu itu tugasnya sangatlah berat. Beliau harus dapat mengatur pertahanan Jawa dan Sumatra. Hubungan antara MBKD (Markas Besar Komando Djawa), MBKS (Markas Besar Komando Sumatra) dan Panglima Besar Jenderal Soedirman juga menjadi tanggungjawabnya.

Sebagai dapur umum, di rumah Bapak Kariyo Utomo harus menyediakan kebutuhan makan para tentara gerilyawan yang jumlahnya kurang lebih 150 orang. Sebagai pimpinan Dapur Umum Ny. Kariyo Utomo dibantu oleh ibu-ibu di daerah tersebut antara lain Sutilah, Rujiah, Rubinah, Sadirah, Inem, Rubinem dll.

Di rumah Bapak Kariyo Utomo tersebut, telah banyak langkah yang diambil oleh Kolonel TB. Simatupang, antara lain :

- a. Mengadakan rapat strategi militer
- b. Melatih kemiliteran para pemuda setempat
- c. Mengadakan kursus bahasa Inggris dengan gurunya. Mr. Ali Budiarto dan Mr. Sosro Pawiro
- d. Melatih peningkatan pengetahuan bagi para wanita setempat
- e. Mengadakan penerangan situasi gerilya bagi warga desa setempat.
- f. Mengadakan pertemuan dengan Kolonel Bambang Sugeng pada tanggal 18 Januari 1949 yang membicarakan seputar rencana dilaksanakannya Serangan Umum ke Yogyakarta 1 Maret 1949.

43. Patung Letjend Oerip Soemohardjo

Kepala Staf Umum TKR pemrakarsa berdiri MA di Yogyakarta 31 Oktober 1945. Pada masa kecilnya bernama Muhammad Sidik yang lahir pada tanggal 23 Pebruari 1893 di Purworejo. Setelah lulus dari sekolah OSVIA (Sekolah Calon Pegawai Pemerintah) kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah militer Jatinegara, Jakarta dan lulus pada tahun 1913. Ia kemudian memasuki dinas militer KNIL dengan pangkat Letnan Dua. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Beliau menyarankan agar segera dibentuk tentara. Atas usulnya tersebut maka berdirilah BKR. Badan ini terus-menerus Beliau sempurnakan hingga akhirnya terbentuklah TNI. Pada tahun 1948 beliau mengundurkan diri dari jabatan Kepala Staf Angkatan Perang karena beliau tidak setuju dengan Perjanjian Renville. Tetapi kemudian diangkat sebagai penasihat militer Presiden. Pada tanggal 17 November 1948 Beliau wafat dan dimakamkan di TMP Semaki Yogyakarta. Karena jasanya terhadap kelahiran ABRI maka Beliau mendapat sebutan Bapak Angkatan

Perang Republik Indonesia. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 314/Tahun 1964, tanggal 10 Desember 1964 Beliau ditetapkan sebagai Pahlawan Pembela Kemerdekaan.

44. Replika Patung Adi Sucipto

Adisutjipto dilahirkan pada tanggal 3 Juli 1916 di Salatiga, mengenyam pendidikan GHS (*Geneeskundige Hoge School*) (Sekolah Tinggi Kedokteran) dan lulusan Sekolah Penerbang *Militaire Luchvaart* di Kalijati.

Pada tanggal 15 November 1945, Adisutjipto mendirikan Sekolah Penerbang di Yogyakarta, tepatnya di Lapangan Udara Maguwo, yang kemudian diganti namanya menjadi Bandara Adisutjipto, untuk mengenang jasa beliau sebagai pahlawan nasional.

Pada saat Agresi Militer Belanda Pertama, Adisutjipto dan Abdulrahman Saleh diperintahkan terbang ke India. Penerobosan blokade udara Belanda menuju India dan Pakistan berhasil dilakukan. Namun dalam perjalanan pulang membawa bantuan obat-obatan dari Malaya, pesawat Dakota VT-CLA ditumpanginya jatuh ditembak oleh dua pesawat P-40 Kittyhawk Belanda di Dusun Ngoto pada tanggal 29 Juli 1947.

Beliau dimakamkan di pekaman umum Kuncen I dan II, dan kemudian pada tanggal 14 Juli 2000⁽¹⁾ dipindahkan ke Monumen Perjuangan di Desa Ngoto, Bantul, Yogyakarta.

45. Replika Patung Ir. Soekarno

Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar Jawa Timur dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo, seorang guru di Surabaya, Jawa. Ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai berasal dari Buleleng, Bali. Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya di Tulungagung, Jawa Timur. Pada usia 14 tahun, seorang kawan ayahnya yang bernama Oemar Said Tjokroaminoto mengajak Soekarno tinggal di Surabaya dan disekolahkan ke *Hoogere Burger School (H.B.S.)*.

Tamat H.B.S. tahun 1920, Soekarno melanjutkan ke *Technische Hoge School* (sekarang ITB) di Bandung, dan tamat pada tahun 1925. Saat di Bandung, Soekarno berinteraksi dengan Tjipto Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi National Indische Partij.

Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan *Algemene Studie Club* di Bandung. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belanda pada bulan Desember 1929, dan memunculkan pledoinya yaitu "Indonesia

Menggugat”, hingga dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember 1931.

Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933, dan diasingkan ke Flores. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942 Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942.

Pada awal masa penjajahan Jepang (1942-1945), pemerintah Jepang sempat tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Namun menjadi berbalik ketika Jepang memerlukan dukungan rakyat Indonesia. Disebutkan dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat (Putera), BPUPKI dan PPKI, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H Mas Mansyur dan lain lainnya disebutkan dan terlihat begitu aktif. Namun oleh Soekarno, karena kepopuleran namanya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang (resmi), Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang/Panitia Sembilan (yang menghasilkan Piagam Jakarta) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, Soekarno-Hatta mendirikan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, dimana Soekarno dan Mohammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan Pembela Tanah Air Peta Rengasdengklok. Para pemuda mendesak agar Sukarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah ada kesepakatan antara tokoh muda dan tua maka pada tanggal 17 Agustus 1945 berkumandanglah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945 pengangkatan menjadi presiden dan wakil presiden dikukuhkan oleh KNIP.

Pada tanggal 4 Januari 1946, Presiden Soekarno dan para pemimpin negara lainnya hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta dengan alasan keamanan akibat tindakan tentara Belanda yang datang

dengan membonceng tentara Sekutu.

Akibat terjadinya Agresi Militer Belanda II Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara ditahan Belanda. Setelah Pengakuan Kedaulatan (Pemerintah Belanda menyebutkan sebagai Penyerahan Kedaulatan), Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Mohammad Hatta diangkat sebagai perdana menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr Assaat, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa-Yogya. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr Assaat sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Ir. Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah presiden konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya.

Masa-masa kejatuhan Soekarno dimulai sejak mundurnya Wakil Presiden Moh. Hatta, pada tahun 1956. Ditambah dengan sejumlah pemberontakan separatis yang terjadi di seluruh pelosok Indonesia, dan puncaknya, pemberontakan G 30 S, membuat Soekarno di dalam masa jabatannya tidak dapat "memenuhi" cita-cita bangsa Indonesia yang makmur dan sejahtera.

Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Wisma Yaso, Jakarta. Jenazahnya dikebumikan di Kota Blitar, Jawa Timur.

46. Patung Drs. Moh. Hatta

Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi. Ayahnya bernama Haji Mohammad Djamil. Ia memiliki enam saudara perempuan. Ia adalah anak laki-laki satu-satunya.

Sejak duduk di MULO di kota Padang, Mohammad Hatta telah tertarik pada pergerakan. Karena itulah ia kemudian menggabungkan diri dalam organisasi Jong Sumatranen Bond dan menjabat sebagai bendahara.

Pada tahun 1921 Hatta tiba di Negeri Belanda untuk belajar pada Handels Hoge School di Rotterdam. Ia mendaftarkan sebagai anggota Indische Vereniging. Tahun 1922, perkumpulan ini berganti nama menjadi Indonesische Vereniging. Perkumpulan yang menolok bekerja sama dengan Belanda itu kemudian berganti nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia (PI).

Hatta lulus dalam ujian handels economie (ekonomi perdagangan) pada tahun 1923. Semula dia bermaksud menempuh ujian doctoral di bidang ilmu ekonomi pada akhir tahun 1925. Karena itu pada tahun 1924 dia non-aktif dalam PI. Tetapi waktu itu

dibuka jurusan baru, yaitu hukum negara dan hukum administratif. Hatta pun memasuki jurusan itu terdorong oleh minatnya yang besar di bidang politik.

Perpanjangan rencana studinya itu memungkinkan Hatta terpilih menjadi Ketua PI pada tanggal 17 Januari 1926. Sejak tahun 1926 sampai 1930, berturut-turut Hatta dipilih menjadi Ketua PI. PI melakukan propaganda aktif di luar negeri Belanda. Hampir setiap kongres internasional di Eropa dimasukinya, dan menerima perkumpulan ini. Selama itu, hampir selalu Hatta sendiri yang memimpin delegasi.

Pada tahun 1926, dengan tujuan memperkenalkan nama "Indonesia", Hatta memimpin delegasi ke Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Bierville, Prancis. Tanpa banyak oposisi, "Indonesia" secara resmi diakui oleh kongres. Nama "Indonesia" untuk menyebutkan wilayah Hindia Belanda ketika itu telah benar-benar dikenal kalangan organisasi-organisasi internasional.

Hatta dan pergerakan nasional Indonesia mendapat pengalaman penting di Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial, suatu kongres internasional yang diadakan di Brussels tanggal 10-15 Pebruari 1927. Di kongres ini Hatta berkenalan dengan pemimpin-pemimpin pergerakan buruh seperti G. Ledebour dan Edo Fimmen, serta tokoh-tokoh yang kemudian menjadi negarawan-negarawan di Asia dan Afrika seperti Jawaharlal Nehru (India), Hafiz Ramadhan Bey (Mesir), dan Senghor (Afrika). Persahabatan pribadinya dengan Nehru mulai dirintis sejak saat itu.

Pada tahun 1927 itu pula, Hatta dan Nehru diundang untuk memberikan ceramah bagi "Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kebebasan" di Gland, Swiss. Judul ceramah Hatta adalah *L'Indonesie et son Probleme de l'Independence* (Indonesia dan Persoalan Kemerdekaan).

Bersama dengan Nazir St. Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Madjid Djojoadingrat, Hatta dipenjarakan selama lima setengah bulan. Pada tanggal 22 Maret 1928, mahkamah pengadilan di Den Haag membebaskan keempatnya dari segala tuduhan. Dalam sidang yang bersejarah itu, Hatta mengemukakan pidato pembelaan yang mengagumkan, yang kemudian diterbitkan sebagai brosur dengan nama "Indonesia Vrij", dan kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai buku dengan judul *Indonesia Merdeka*.

Antara tahun 1930-1931, Hatta memusatkan diri kepada studinya serta penulisan karangan untuk majalah *Daulat Ra'jat* dan *kadang-kadang De Socialist*. Pada bulan Juli 1932, Hatta berhasil

menyelesaikan studinya di Negeri Belanda dan sebulan kemudian ia tiba di Jakarta. Antara akhir tahun 1932 dan 1933, kesibukan utama Hatta adalah menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk Daulat Ra'jat dan melakukan berbagai kegiatan politik, terutama pendidikan kader-kader politik pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Prinsip non-kooperasi selalu ditekankan kepada kader-kadernya.

Reaksi Hatta yang keras terhadap sikap Soekarno sehubungan dengan penahannya oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang berakhir dengan pembuangan Soekarno ke Ende, Flores, terlihat pada tulisan-tulisannya di Daulat Ra'jat, yang berjudul "Soekarno Ditahan" (10 Agustus 1933), "Tragedi Soekarno" (30 Nopember 1933), dan "Sikap Pemimpin" (10 Desember 1933).

Pada bulan Pebruari 1934, setelah Soekarno dibuang ke Ende, Pemerintah Kolonial Belanda mengalihkan perhatiannya kepada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Para pimpinan Partai Pendidikan Nasional Indonesia ditahan dan kemudian dibuang ke Boven Digoel. Seluruhnya berjumlah tujuh orang. Dari kantor Jakarta adalah Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Bondan. Dari kantor Bandung : Maskun Sumadiredja, Burhanuddin, Soeka, dan Murwoto. Sebelum ke Digoel, mereka dipenjara selama hampir setahun di penjara Glodok dan Cipinang, Jakarta. Di penjara Glodok, Hatta menulis buku berjudul "Krisis Ekonomi dan Kapitalisme".

Pada bulan Januari 1935, Hatta dan kawan-kawannya tiba di Tanah Merah, Boven Digoel (Papua). Dalam pembuangan, Hatta secara teratur menulis artikel-artikel untuk surat kabar Pemandangan. Rumahnya di Digoel dipenuhi oleh buku-bukunya yang khusus dibawa dari Jakarta sebanyak 16 peti. Dengan demikian, Hatta mempunyai cukup banyak bahan untuk memberikan pelajaran kepada kawan-kawannya di pembuangan mengenai ilmu ekonomi, sejarah, dan filsafat. Kumpulan bahan-bahan pelajaran itu di kemudian hari dibukukan dengan judul-judul antara lain, "Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan" dan "Alam Pikiran Yunani." (empat jilid).

Pada bulan Desember 1935, Kapten Wiarda, pengganti van Langen, memberitahukan bahwa tempat pembuangan Hatta dan Sjahrir dipindah ke Bandaneira. Pada Januari 1936 keduanya berangkat ke Bandaneira. Mereka bertemu Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Di Bandaneira, Hatta dan Sjahrir dapat bergaul bebas dengan penduduk setempat dan memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, tatabuku, politik, dan lain-lain.

Pada tanggal 3 Pebruari 1942, Hatta dan Sjahrir dibawa ke Sukabumi. Pada tanggal 9 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, dan pada tanggal 22 Maret 1942 Hatta dan Sjahrir dibawa ke Jakarta.

Selama masa pendudukan Jepang, Hatta tidak banyak bicara. Namun pidato yang diucapkan di Lapangan Ikada (sekarang Lapangan Merdeka) pada tanggal 8 Desember 1942 menggemparkan banyak kalangan. Ia mengatakan, "Indonesia terlepas dari penjajahan imperialisme Belanda. Dan oleh karena itu ia tak ingin menjadi jajahan kembali. Tua dan muda merasakan ini setajam-tajamnya. Bagi pemuda Indonesia, ia lebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dalam lautan daripada mempunyainya sebagai jajahan orang kembali."

Pada awal Agustus 1945, Panitia Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan Soekamo sebagai Ketua dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Anggotanya terdiri dari wakil-wakil daerah di seluruh Indonesia, sembilan dari Pulau Jawa dan dua belas orang dari luar Pulau Jawa.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempersiapkan proklamasi dalam rapat di rumah Admiral Maeda (JI Imam Bonjol, sekarang), yang berakhir pada pukul 03.00 pagi keesokan harinya. Panitia kecil yang terdiri dari 5 orang, yaitu Soekamo, Hatta, Soebardjo, Soekarni, dan Sayuti Melik memisahkan diri ke suatu ruangan untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno meminta Hatta menyusun teks proklamasi yang ringkas. Hatta menyarankan agar Soekarno yang menuliskan kata-kata yang didiktekannya. Setelah pekerjaan itu selesai, mereka membawanya ke ruang tengah, tempat para anggota lainnya menanti.

Soekarni mengusulkan agar naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh dua orang saja, Soekarno dan Mohammad Hatta. Semua yang hadir menyambut dengan bertepuk tangan riuh.

Tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepat pada jam 10.00 pagi di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta.

Tanggal 18 Agustus 1945, Ir Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Babak baru perjuangan bangsa Indonesia telah dimulai. Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya dari usaha Pemerintah Belanda yang ingin menjajah kembali. Pemerintah Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Dua kali perundingan dengan

Belanda menghasilkan Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan akibat kecurangan pihak Belanda.

Untuk mencari dukungan luar negeri, pada Juli 1947, Bung Hatta pergi ke India menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. dengan menyamar sebagai kopilot bernama Abdullah (Pilot pesawat adalah Biju Patnaik yang kemudian menjadi Menteri Baja India di masa Pemerintah Perdana Menteri Morarji Desai). Nehru berjanji, India dapat membantu Indonesia dengan protes dan resolusi kepada PBB agar Belanda dihukum.

Kesukaran dan ancaman yang dihadapi silih berganti. September 1948 PKI melakukan pemberontakan. Tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi kedua. Presiden dan Wapres ditawan dan diasingkan ke Bangka. Namun perjuangan Rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan terus berkobar di mana-mana. Panglima Besar Soediman melanjutkan memimpin perjuangan bersenjata.

Pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, Bung Hatta yang mengetuai Delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar untuk menerima pengakuan kedaulatan Indonesia dari Ratu Juliana.

Bung Hatta juga menjadi Perdana Menteri waktu Negara Republik Indonesia Serikat berdiri. Selanjutnya setelah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bung Hatta kembali menjadi Wakil Presiden.

Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya. Tanggal 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato radio untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia. Karena besarnya aktivitas Bung Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada tanggal 17 Juli 1953 dia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (1971).

Pada tahun 1955, Bung Hatta mengumumkan bahwa apabila parlemen dan konsituante pilihan rakyat sudah terbentuk, ia akan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Niatnya untuk mengundurkan diri itu diberitahukannya melalui sepucuk surat kepada ketua Perlemen, Mr. Sartono. Tembusan surat dikirimkan kepada Presiden Soekarno. Setelah Konstituante dibuka secara

resmi oleh Presiden, Wakil Presiden Hatta mengemukakan kepada Ketua Parlemen bahwa pada tanggal 1 Desember 1956 ia akan meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Soekarno berusaha mencegahnya, tetapi Bung Hatta tetap pada pendiriannya.

Pada tanggal 27 Nopember 1956, ia memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Pada kesempatan itu, Bung Hatta mengucapkan pidato pengukuhan yang berjudul "Lampau dan Datang".

Sesudah Bung Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, beberapa gelar akademis juga diperolehnya dari berbagai perguruan tinggi. Universitas Padjadjaran di Bandung mengukuhkan Bung Hatta sebagai guru besar dalam ilmu politik perekonomian. Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang memberikan gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ekonomi. Universitas Indonesia memberikan gelar Doctor Honoris Causa di bidang ilmu hukum. Pidato pengukuhan Bung Hatta berjudul "Menuju Negara Hukum".

Pada tahun 1960 Bung Hatta menulis "Demokrasi Kita" dalam majalah *Pandji Masyarakat*. Sebuah tulisan yang terkenal karena menonjolkan pandangan dan pikiran Bung Hatta mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia waktu itu.

Dalam masa pemerintahan Orde Baru, Bung Hatta lebih merupakan negarawan sesepuh bagi bangsanya daripada seorang politikus.

Hatta menikah dengan Rahmi Rachim pada tanggal 18 Nopember 1945 di desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mereka mempunyai tiga orang putri, yaitu Meutia Farida, Gemala Rabi'ah, dan Halida Nuriah. Dua orang putrinya yang tertua telah menikah. Yang pertama dengan Dr. Sri Edi Swasono dan yang kedua dengan Drs. Mohammad Chalil Baridjambek. Hatta sempat menyaksikan kelahiran dua cucunya, yaitu Sri Juwita Hanum Swasono dan Mohamad Athar Baridjambek.

Pada tanggal 15 Agustus 1972, Presiden Soeharto menyampaikan kepada Bung Hatta anugerah negara berupa Tanda Kehormatan tertinggi "Bintang Republik Indonesia Kelas I" pada suatu upacara kenegaraan di Istana Negara. Bung Hatta, Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Dr Tjipto Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77 tahun dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir pada tanggal 15 Maret 1980.

BAB IV PENUTUP

Setelah menyimak dan memahami serta menghayati tentang latar belakang pendirian Museum Perjuangan, dapat kita simpulkan bahwa semuanya berlandaskan pada sikap yang berorientasi pada nasionalisme. Tonggak-tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia baik dalam merintis, mencapai, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan merupakan momen historis yang harus dimunculkan dan dikomunikasikan kepada generasi muda sebagai cermin kebesaran bangsa dimasa silam.

Meski demikian, masa lampau hanyalah akan berupa potret usang tanpa makna, apabila dari padanya tidak dilakukan pemaknaan kembali sesuai dengan jamanya. Dari proses tersebut di dapat pesan yang secara berkesinambungan satu dengan yang lain akan tampak sebuah pola kecenderungan umum. Dari sanalah akhirnya proyeksi masa depan akan dapat dilihat sehingga sebuah generasi akan dapat melangkah secara bijak dalam menyongsong masa depan.

Bertolak dari pemikiran seperti tersebut di atas maka dengan adanya Museum Perjuangan, kita semua dapat berharap bahwa :

1. Masyarakat khususnya generasi muda dan pelajar mengenal Museum Perjuangan sebagai museum yang menyajikan benda-benda bersejarah dimana nilai-nilai luhur banyak terkandung didalamnya.
2. Kelampauan yang berkaitan dengan proses jalannya sejarah bangsa Indonesia dalam rangka merintis, mencapai, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan merupakan bagian dari pengalaman kolektif bangsa Indonesia. Oleh karena itu harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang.
3. Museum Perjuangan sebagai salah satu sumber informasi, dapat melayani masyarakat untuk melakukan "perlawatan ke masa silam" melalui koleksi-koleksinya.
4. Dibukanya kembali Museum Perjuangan perlu disambut positif dengan peran serta masyarakat yang bersikap pro aktif dalam memanfaatkan museum sebagai wahana komunikasi masa sekarang dan masa lampau. Dengan begitu rasa cinta akan sejarah dapat dipupuk sejak dini.
5. Keberadaan Museum Perjuangan dapat menjadi media apresiasi bagi masyarakat. Dengan berkunjung ke museum masyarakat dapat mengetahui, mencermati, serta memahami makna yang

terkandung dalam sajian materi koleksi sehingga dapat menumbuhkan aspirasi guna mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang positif.

6. Kepada pengunjung museum diharapkan peran sertanya dalam ikut membantu memelihara dan mempublikasikan keberadaan Museum Perjuangan kepada masyarakat luas sehingga fungsi edukatif, rekreatif dan inspiratifnya dapat terlaksana dengan baik.
7. Masyarakat dapat berperan aktif membantu tugas museum untuk menyelamatkan benda-benda bukti material peristiwa sejarah yang masih banyak berada di masyarakat.

Demikianlah, bahwa keberadaan Museum Perjuangan bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk satu dua orang saja, bukan untuk sekelompok orang saja. Akan tetapi Museum Perjuangan dibuka untuk kita semua tak terkecuali. Oleh karena itu manfaatkanlah museum secara proporsional menurut fungsinya sebagai media studi, penelitian, dan rekreasi.

Pengakuan keberadaan sebuah generasi, bukan ditentukan oleh sejarah. Tetapi pengakuan keberadaan sebuah generasi ditentukan oleh bagaimana generasi tersebut membuat sejarah. Oleh karena itu, bukan tidak beralasan ketika Bung Karno dalam sebuah pidatonya menyampaikan bahwa : "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah" (Jasmerah) serta "Belajarlah dari sejarah untuk membuat sejarah". Kiranya untuk melakukan hal tersebut, museum menjadi satu media alternatif yang representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dandun Widoyoko, Selarang Pandang Museum Perjuangan Yogyakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993
- Daud Sinjal, Laporan Kepada Bangsa : Milliter Akademi Yogyakarta, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Depdikbud, Selarah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peroyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Yogyakarta, 1977.
- Depdikbud, Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka. Jilid I, PT. Citra Lamtorong Persada, Jakarta, 1985.
- Djamil Marsudi, dkk, Yogyakarta Benteng Proklamasi, Penerbit Barahmus DIY Perwakilan Jakarta, Jakarta, 1985.
- Hadisutjipto, S.Z, Drs., Gedung STOVIA Sebagai Cagar Selarah, Depdikbud, Jakarta, 1966 (Cetakan ke IV)
- Moedjanto, G, Drs, Indonesia Abad Ke 20 Jilid II : Dari Perang Kemerdekaan sampai PELITA III, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992. (Cetakan Ke III).
- Moedjanto, G, Drs., Indonesia Abad Ke 20 Jilid I : Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggalati, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992. (Cetakan Ke III).
- Nagazumi Akira, Bangkitnya Nasionalisme Indonesia. Budi Utomo 1908 - 1918, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1989.
- Nani Mulyani, dkk, 50 Tahun Indonesia Merdeka 1965 - 1995, PT. Citra Media Persada, Jakarta, 1995.
- Panitia Peyusun Biro Pemuda Departemen P.D. dan K, Selarah Perjuangan Pemuda Indonesia, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1965
- Pringgodigdo, A.K, SH, Selarah Pergerakan Rakyat Indonesia, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986 (Cetakan ke 11)
- Radik Utoyo Sudirjo, Album Perang Kemerdekaan. 1945 - 1950, Penerbit Almanak RI / BP ALDA, Jakarta, 1983 (Cetakan VI)

Saleh, RHA, Akademi Militer Tangerang dan Peristiwa Lengkong, Yayasan Pustaka bekerjasama dengan Sebelas Maret University Press, Yogyakarta, 1994.

Sedjarah Musium Perjuangan Jogjakarta, Panitia Setengah Abad Kebangkitan Nasional Jogjakarta, 1961

Simbolon, Parakirti, T. Menjadi Indonesia Buku I : Akar-akar Kebangsaan Indonesia, Kompas-Grasindo, Jakarta, 1995.

Soebagijo, I.N., Perjuangan Pelajar IPI - IPPI, Balai Pustaka, Jakarta, 1987. (Cetakan I)

Soedarsono, R.G., Peranan Pelajar Dalam Perang Kemerdekaan, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1985. (Cetakan I)

Soejono Martosewojo, dr, MD/MPH, Mahasiswa '45 Prapatan -10 : Pengabdiannya, Penerbit Patma, Bandung, 1984

Sudirjo, Radik Utoyo, Album Perang Kemerdekaan 1945 - 1950, Almanak RI/BP. ALDA, 1983. (Cetakan VI)

Suhartono, Dr, Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908 - 1945, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1984

Suhatno, Kepanduan Bangsa Indonesia. Suatu Kajian Sejarah Tahun 1930 - 1961, Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Yogyakarta, Yogyakarta, 2001

Sulistyo Admodjo, S., Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Nasional 1945 - 1949 ke I. Riwayat dan Perjuangan. Mengenang Almarhum Panglima Besar Jenderal Soedirman - Pahlawan Besar, Yayasan 10 Juli 1949 Pusat, Yogyakarta, 1988. (Cetakan II)

Suryo Haryono, P, Drs, Dkk., Monumen Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Depdikbud, Jakarta, 1987.

Sutrisno Kutoyo, Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Riwayat Hidup dan Perjuangan, PT. Mutiara Sumber Widya Ofset, Jakarta, 1997.

Tashadi, dkk, Buku Kenangan 50 Tahun Republik Indonesia di Yogyakarta. Sebuah Lintasan Sejarah, Panitia Gabungan

Peringatan HUT Ke 50 Kemerdekaan RI Bhakti Pertiwi
Propinsi DIY, 1995.

Tim Penyusun Bahtera Jaya, **Album 97 Pahlawan Nasional**, Bahtera
Jaya, Jakarta, 1994 (Cetakan VIII)

Yayasan 19 Desember 1948, **Perang Rakyat Semesta 1948 – 1949**,
Balai Pustaka Jakarta, 1994 (Cetakan I)

Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Perum Peruri,
Banknotes and Coins From Indonesia 1945 – 1990, PT.
Mahendra Sampana, Jakarta, 1991

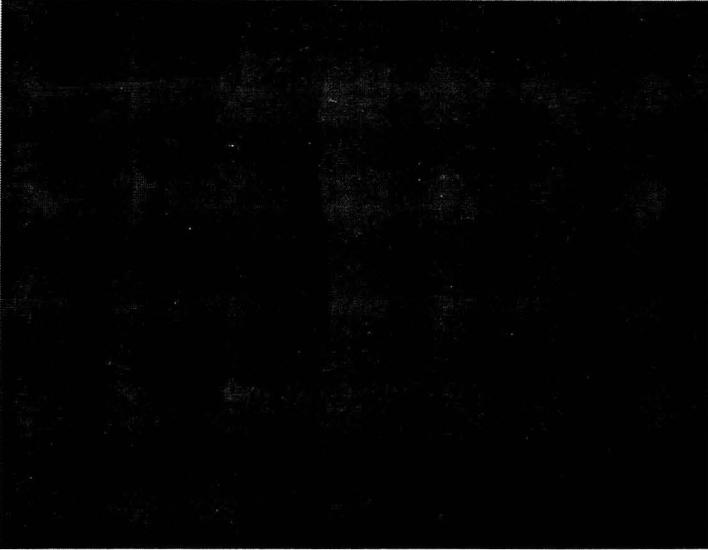
LAMPIRAN



Gbr 1. Museum Perjuangan Yogyakarta dilihat dari Jalan Kolonel Soegiyono Yogyakarta, tampak indah dan asri



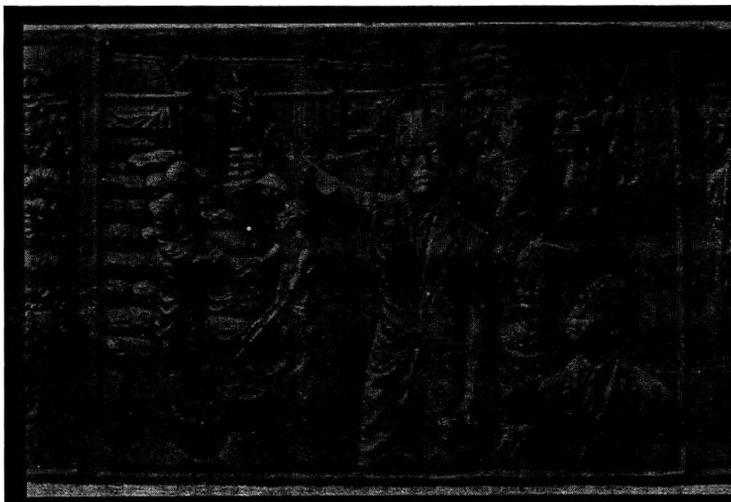
Gbr 2. Makara yang terletak di kanan dan kiri pintu masuk Museum Perjuangan, sebagai lambang penjaga keamanan simbol ketentrangan



Gbr 3. Sri Sultan Hamengku Buwono IX sedang memasang batu terahir Museum Perjuangan, tanggal 29 Juni 1961



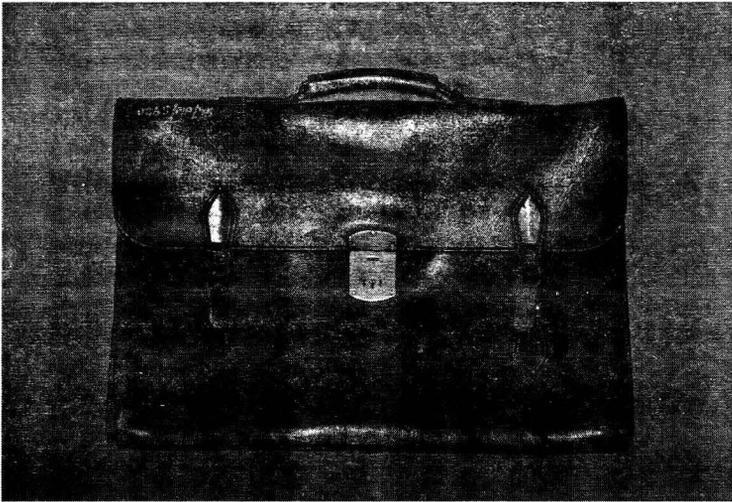
Gbr 4. Candrasengkala "Anggatra Pirantining Kusuma Negara" yang berarti angka tahun 1959, dimulainya pembangunan Museum Perjuangan



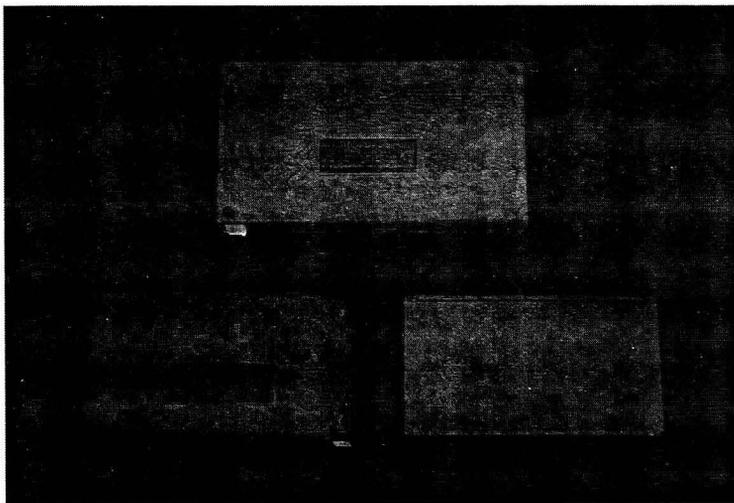
Gbr 5. Salah satu relief dinding "Lahirnya Boedi Oetomo" sebagai cikal bakal tumbuh dan berkembangnya nasionalisme Indonesia



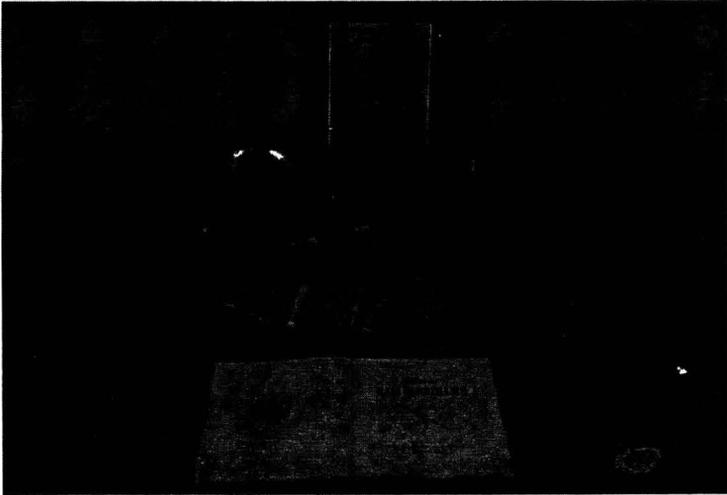
Gbr 6. Koleksi Perlengkapan meja kursi dan minum Ir. Soekarno ketika diamankan oleh para pemuda di Rengasdengklok, Jawa Barat tanggal 16 Agustus 1945



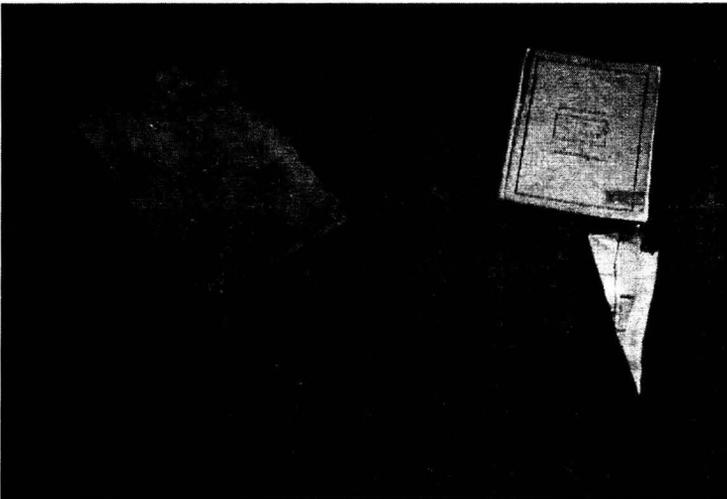
Gbr 7. Koleksi Tas Milik Bung Hatta yang dipakai oleh beliau membawa dokumen penting dalam mengikuti KMB di Den Haag Belanda tahun 1949



Gbr 8. Klise Mata Uang yang dipergunakan untuk mencetak ORI pada emisi kedua tahun 1947 di Yogyakarta



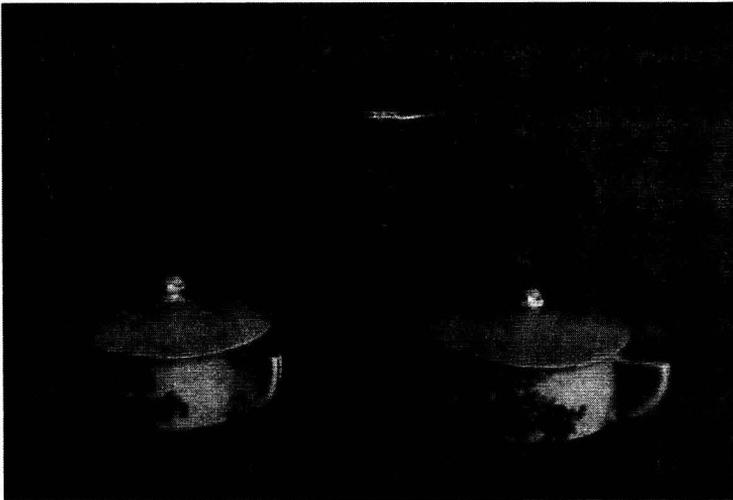
Gbr 9. Koleksi perlengkapan perjuangan milik Pejuang dari Bali yang bernama Tjilik, dalam menghadapi tentara NICA Belanda tahun 1946 - 1949



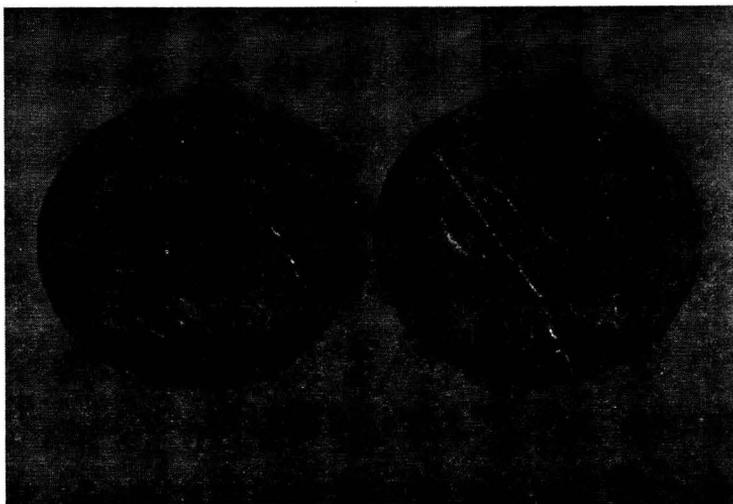
Gbr 10. Perlengkapan milik anggota TP bagian PHB yang bernama Soekimin yang aktif dalam perjuangan tahun 1947 - 1949



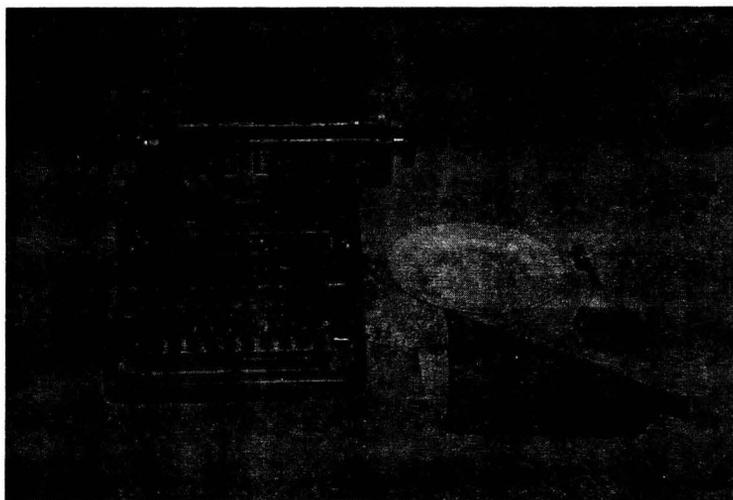
Gbr 11. Tugu peringatan meleburnya organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia kedalam satu wadah KBI tahun 1930



Gbr 12. Koleksi perlengkapan minum Jenderal Soedirman ketika beristirahat di desa Krejo, Genjahan, Gunung Kidul bulan Juli 1949



Gbr 13. Mata uang VOC sebagai bukti material telah berjalannya sebuah monopoli dagang oleh bangsa asing (Belanda) di Nusantara



Gbr 14. Perlengkapan milik RM. Soerjopranoto sebagai pejuang dalam PFB, SI, dan Adhidama yang gigih memperjuangkan kaum bumi putera tahun 1920 an

Perpus
Jende